KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Dari Awal Kerajaan Islam Sampai Masa Orde Lama

Editor
Prof. Dr. Ahmad Zainuri , M. Pd. I.
Bambang Irawan, M. Pd. I.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA DARI AWAL KERAJAAN ISLAM SAMPAI MASA ORDE LAMA

Hasil kajian dan diskusi mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam.A Angkatan 2022

Tim Penulis :

1. Yusnia Sari
2. Raja Naufal Nabhan
3. Selpita
4. Endi Iksan Saputra
5. Mia Anisa Syahputri
6. Rahma Utami
7. Muhammad Raihan
8. Melsa Laela Atma
9. Nining Oktarina
10. Dini Marega
11. Sofian Ardiyansyah
12. Aldi Junandar
13. Miftahur Rahma
14. Muhammad Al Faizi
15. Risma Oktariani
16. Ima Jumratus Soleha
17. M. Bagus Prasetyo
18. Imelda Agustina
19. Siska Salbiah
20. Annisa Winada
21. Reni Febriani Halimatus Sadiah
22. Indah Purnamasari
23. Alvin Choirul Wafi

Editor :

Prof. Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

Bambang Irawan, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul *"Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia dari Awal Kerajaan Islam sampai Masa Orde Lama"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia sepanjang zaman.

Buku ini merupakan hasil kerja kolektif dari tim penulis yang memiliki latar belakang dan kepedulian terhadap dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang berlangsung dari masa awal masuknya Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam hingga periode Orde Lama pasca kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak menelusuri jejak sejarah bagaimana kebijakan pendidikan Islam dibentuk, dikembangkan, dan dihadapkan dengan berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya pada tiap masanya. Kami menyadari bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa, sehingga penting untuk menelusuri kebijakan-kebijakan yang telah mewarnai perjalanan panjang tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya kalangan akademisi, mahasiswa, pendidik, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dalam lintasan sejarahnya.

Palembang, 13 Mei 2025

Tim Penulis MPI. A 2022

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul *"Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia dari Awal Kerajaan Islam sampai Masa Orde Lama"* ini dapat disusun dan disunting hingga siap untuk diterbitkan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini. Dimulai dari masa awal masuknya Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam, hingga berkembangnya institusi-institusi pendidikan Islam yang lebih formal pada masa kolonial dan mengalami transformasi besar pada masa Orde Lama, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap bentuk, isi, dan arah pendidikan Islam di tanah air.

Sebagai editor, kami berusaha menyajikan isi buku ini secara sistematis, kritis, dan kontekstual, agar dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pendidikan, serta siapa saja yang tertarik pada kajian sejarah kebijakan pendidikan Islam. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tentu masih memiliki kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis, kontributor, dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyuntingan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam mengembangkan pendidikan Islam yang lebih baik di masa depan.

Palembang, 14 Mei 2025

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

KATA PENGANTAR EDITOR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN PERLAK.. 1

A. PENDAHULUAN 1

B. LANDASAN TEORI 2

1. Teori Difusi Budaya 2

2. Teori Fungsional Struktural 2

3. Teori Modernisasi 3

C. PEMBAHASAN 5

1. Sejarah kesultanan perlak 5

2. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Perlak 6

3. Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Wilayah Sekitarnya 9

D. KESIMPULAN 11

BAB II KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN SAMUDERA PASAI **13**

A. PENDAHULUAN 13

B. LANDASAN TEORI 15

1. Teori Pendidikan Multikultural 15

2. Teori Hegemoni Gramsci 15

3. Teori Globalisasi Pendidikan 15

4. Teori Ekologi Pendidikan 16

5. Teori Pembelajaran Sosial 16

C. PEMBAHASAN 16

1. Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai 16

2. Kebijakan Pendidikan yang Berlaku Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai 18
D. KESIMPULAN 24
BAB III KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM 25
A. PENDAHULUAN 25
B. LANDASAN TEORI 26
1. Teori Pendidikan Islam 26
2. Teori Kebijakan Pendidikan 26
3. Teori Sejarah Sosial-Keagamaan 27
4. Teori Fungsionalisme Struktural 27
5. Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan 27
C. PEMBAHASAN 28
1. Sejarah Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam 28
2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam 29
3. Tokoh-tokoh dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh Daussalam 31
4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Masyarakat Aceh Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam 33
5. Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Aceh Terhadap Perkembangan Keilmuan Islam di Nusantara 35
D. KESIMPULAN 37
BAB IV KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN CIREBON 38
A. PENDAHULUAN 38
B. LANDASAN TEORI 39
1. Teori Kebijakan Pendidikan 39
2. Teori Pendidikan Islam 39

3. Teori Islamisasi di Nusantara 40
4. Teori Kepemimpinan Islam 40
C. PEMBAHASAN 41
1. Bentuk Kebijakan Pndidikan Islam Pada Masa Kesultanan Cirebon 41
2. Tokoh yang Berperan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Kesultanan Cirebon 43
3. Dampak kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Masyarakat Cirebon 45
D. KESIMPULAN 47
BAB V KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN DEMAK..... 49
A. PENDAHULUAN 49
B. LANDASAN TEORI 50
1. Teori Pendidikan Islam 50
2. Teori Pendidikan Historis 50
3. Teori Sosialisasi Agama 50
4. Teori Pemerintahan dan Kebijakan Publik 51
C. PEMBAHASAN 51
1. Sejarah Bersirinya Kerajaan Demak 51
2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Pada Masa Kerajaan Demak 53
3. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak…… 55
4. Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Demak 58
D. KESIMPULAN 61
BAB VI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KERAJAAN PAJANG 62
A. PENDAHULUAN 62
B. LANDASAN TEORI 64
1. Teori Pendidikan Islam 64

2. Teori Pendidikan Islam di Era Kerajaan 65
3. Teori Kerajaan Pajang 65
4. Teori Kebijakan Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang 66
C. PEMBAHASAN 67
1. Perkembangan Kesultanan Pajang 67
2. Kebijakan Apa Saja Yang Terkait Pada Pendidikan Islam 69
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kerajaan Pajang Terhadap Masyarakat Pada Masa Itu 72
4. Runtuhnya kerajaan Pajang 74
D. KESIMPULAN 77
BAB VII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KERAJAAN MATARAM ISLAM 79
A. PENDAHULUAN 79
B. LANDASAN TEORI 80
1. Teori Pendidikan Islam 80
2. Teori Kebijakan Pendidikan 81
3. Teori Peran Negara dalam Pendidikan 81
C. PEMBAHASAN 81
1. Asal Usul dan Berdiri Kerajaan 82
2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Mataram 83
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat 86
4. Peran Raja dalam Pendidikan Islam 89
D. KESIMPULAN 92
BAB VIII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN TERNATE 94
A. PENDAHULUAN 94
B. LANDASAN TEORI 95

1. Teori Pendidikan Islam 95
2. Teori Perubahan Sosial 96
3. Teori Politik Kekuasaan Dalam Islam 96
C. PEMBAHASAN 97
1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Ternate 97
2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Masyarakat Kesultanan Ternate 100
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Islam di Kawasan Maluku Dan Sekitarnya 102
D. KESIMPULAN 103
BAB IX KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN TIDORE 105
A. PENDAHULUAN 105
B. LANDASAN TEORI 106
1. Teori Pendidikan Islam (Syed M. Naquib al-Attas) 106
2. Teori Kebijakan Pendidikan Islam Masa Kesultanan Tidore 107
C. PEMBAHASAN 109
1. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Tidore 109
2. Kebijakan yang Diterapkan Oleh Kesultanan Tidore dalam Bidang Pendidikan Islam 111
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam Di Kesultanan Tidore 113
4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Kehidupan Masyarakat Tidore 114
D. KESIMPULAN 117
BAB X KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN GOA TALLO 118
A. PENDAHULUAN 118
B. LANDASAN TEORI 119

1. Teori Islamisasi di Sulawesi Selatan 119
C. PEMBAHASAN 122
1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya Kebijakan Pendidikan Islam Di Kesultanan Goa-Tallo 123
2. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Sosial, Politik, Dan Budaya Di Wilayah Goa-Tallo 125
3. Bagaimana Hubungan Antara Kebijakan Pendidkan Islam Dengan Strategi Politik Dan Perdagangan Kerajaan Goa-Tallo 126
D. KESIMPULAN 128
BAB XI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KESULTANAN BUTON 130
A. PENDAHULUAN 130
B. LANDASAN TEORI 131
1. Teori Kebijakan Pedidikan Islam 131
2. Teori Pendidikan Politik dan Sosial 132
C. PEMBAHASAN 133
1. Masa Kepemimpinan Kerajaan Buton 133
2. Budaya Pendidikan Islam Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke – 19 135
3. Implikasi Pendidikan Islam Pada Periode Pembinaan Dasar-Dasar Pendidikan Islam Di Kesultanan Buton 139
D. KESIMPULAN 141
BAB XII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA 142
A. PENDAHULUAN 142
B. LANDASAN TEORI 143
C. PEMBAHASAN 144
1. Sejarah Singkat Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 144

2. Bentuk dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Kutai Kartanegara 146
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat Kutai 149
4. Relevansi Kebijakan Pendidikan Islam Kutai terhadap Konteks Pendidikan Islam Modern 152
D. KESIMPULAN 156
BAB XIII KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN BANJAR 157
A. PENDAHULUAN 157
B. LANDASAN TEORI 158
1. Teori Pendidikan Islam 158
2. Teori Integrasi Islam dan Negara 158
3. Teori Sosiologi Pendidikan 159
4. Teori Ketergantungan Sejarah (Historical Institutionalism) 159
C. PEMBAHASAN 159
1. Sistem Pendidikan Islam yang Diterapkan di Kesultanan Banjar 159
2. Kebijakan Utama yang Mendukung Pendidikan Islam Masa Kesultanan Banjar . 161
3. Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Kehidupan Masyarakat Banjar 163
D. KESIMPULAN 165
BAB XIV KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN BIMA 166
A. PENDAHULUAN 166
B. LANDASAN TEORI 167
1. Teori Kebijakan Publik Dalam Pendidikan 167
2. Teori Islamisasi dan Pendidikan Tradisional 168
3. Teori Integrasi Nilai Lokal dan Keislaman. 168
C. PEMBAHASAN 169

1. Latar Belakang dan Sosial Budaya Kesultanan Bima dalam Mendukung Pendidikan Islam. 169
2. Kebijakan Pendidikan Islam yang Diterapkan pada Masa Kesultanan Bima. 170
3. Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat dan Perkembangan Pendidikan Islam.. 174
D. KESIMPULAN 178
BAB XV KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA VOC (IMPRALISME BELANDA, INGGRIS DAN PORTUGIS) 180
A. PENDAHULUAN 180
B. LANDASAN TEORI 181
1. Teori Kebijakan Pendidikan 181
2. Teori Pendidikan Islam 181
3. Teori Kolonialisme dan Imperialisme 182
4. Teori Pendidikan dalam Sistem Kolonial 182
C. PEMBAHASAN 182
1. Latar Belakang Masuknya Imperalisme Belanda, Inggris, dan Portugis ke Wilayah Nusantara 182
2. Kebijakan yang Diterapkan Oleh VOC (Dan Negara Imperialis Lainnya) Terhadap Pendidikan Islam 185
3. Dampak Kebijakan Imperialis terhadap Pendidikan Islam 188
4. Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pendidikan Islam 191
D. KESIMPULAN 193
XVI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA WALI SONGO 195
A. PENDAHULUAN 195
B. LANDASAN TEORI 196
1. Teori Pendidikan Humanistik-Religius 196
2. Teori Pendidikan Kultural-Integratif 196
3. Teori Pendidikan Keteladanan (Modeling) 196

4. Teori Pendidikan Partisipatif-Komunal 196
5. Teori Pendidikan Fungsional-Pragmatis 197
C. PEMBAHASAN 197
1. Konsep Pendidikan Pada Masa Wali Songo 197
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Islam Pada Masa Wali Songo 202
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Masa Wali Songo terhadap Perkembangan Sosial Budaya 204
D. KESIMPULAN 205
BAB XVII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA SEBELUM TAHUN 1908 ... 207
A. PENDAHULUAN 207
B. LANDASAN TEORI 208
1. Teori Kolonialisme Dalam Pendidikan 208
2. Teori Reproduksi Sosial (Pierre Bordieu) 208
3. Teori Islamisasi Ilmu (Syed Naquib al-Attas) 209
C. PEMBAHASAN 210
1. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Tradisional 210
2. Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pendidikan Islam 212
3. Dampak Kebijakan Kolonial Terhadap Eksistensi Pendidikan Islam 214
D. KESIMPULAN 216
BAB XVIII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ENAM ORGANISASI ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN (JUMATUL KHOIR, SARIKAT ISLAM, PERSERIKATAN ULAMA, MUHAMMADIYAH, AL-IRSYAD, DAN NAHDHATUL ULAMA) 218
A. PENDAHULUAN 218
B. LANDASAN TEORI 219
1. Teori Pendidikan Islam 219

2. Teori Konstruktivisme 220
3. Teori Pendidikan Multikultural 220
4. Teori Transformasi Sosial 220
5. Teori Pendidikan Berbasis Komunitas 221
C. PEMBAHASAN 221
1. Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan 221
2. Dampak dari Kebijakan Pendidikan Terhadap Masyarakat Muslim 228
3. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Kebijakan 229
D. KESIMPULAN 232
BAB XIX KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA ANGKATAN 1928 234
A. PENDAHULUAN 234
B. LANDASAN TEORI 235
1. Teori Rasional (Rational Policy Theory): 235
2. Teori Perubahan Sosial 235
3. Teori Pendidikan Kritis (Paulo Freire) 235
4. Teori Fungsionalisme (Emile Durkheim) 235
5. Teori Konflik (Karl Marx) 235
6. Teori Nasionalisme (Hans Kohn) 236
C. PEMBAHASAN 236
1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam pada Tahun 1928 236
2. Tujuan Utama Pendidikan Islam pada Masa Tahun 1928 237
3. Tokoh yang Berperan dalam Pendidikan Islam 1928 238
4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perjuangan Nasional 239
D. KESIMPULAN 240
BAB XX KEBIJKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA PERANG DUNIA PERTAMA .. 241
A. PENDAHULUAN 241

B. LANDASAN TEORI 243
1. Teori Hegemoni Budaya (Antoni Gramsc) 243
2. Teori Modernisasi Pendidikan 243
C. PEMBAHASAN 244
1. Kebijakan Pedndidikan Islam Pada Perang Dunia Pertama 244
2. Kondisi Pendidikan Islam Sebelum Perang Dunia Pertama 245
3. Dampak Perang Dunia Pertama terhadap Dunia Islam 246
4. Kebijakan Kolonial dalam Pendidikan Islam 248
5. Kebijakan Pendidikan di Negara-negara Islam Selama Perang Dunia Pertama 249
6. Peran Pendidikan Islam dalam Menghadapi Dampak Perang Dunia Pertama..... 250
D. KESIMPULAN 251
BAB XXI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG 252
A. PENDAHULUAN 252
B. LANDASAN TEORI 253
1. Teori Kebijakan Publik 253
2. Teori Kolonialisme dan Pendidikan 253
3. Teori Islamisasi Pendidikan 253
4. Teori Perubahan Sosial dalam Pendidikan 254
C. PEMBAHASAN 254
1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Oleh Pemerintah Jepang Selama Masa Penjajahan Di Indonesia 254
2. Motivasi Dan Tujuan Politik di Balik Kebijakan Jepang Dalam Mendukung Pendidikan Islam di Indonesia 259
3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Pasca-Kemerdekaan 261
D. KESIMPULAN 263

BAB XXII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL KEMERDEKAAN (1945 SD 1950) 264

A. PENDAHULUAN 264

B. LANDASAN TEORI 265

1. Teori Kebijakan Pendidikan 265

2. Teori Pendidikan Islam 266

3. Teori Konsep Pendidikan Islam Dalam Negara 266

4. Teori Konteks Sejarah Pendidikan Islam Awal Kemerdekaan 266

5. Teori Perubahan Sosial dan Pendidikan 266

C. PEMBAHASAN 267

1. Definisi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Saat Permulaan Kemerdekaan 267

2. Landasan Idiil Pendidikan Islam (1945-1950) 268

3. BPKNIP dan Garis Besar Pendidikan Nasional (27 Desember 1945) 270

4. Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam pada Permulaan Kemerdekaan (1945-1950) 272

5. Tantangan dan Hambatan Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Awal Kemerdekaan 274

D. KESIMPULAN 277

BAB XXIII KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ORDE LAMA 279

A. PENDAHULUAN 279

B. LANDASAN TEORI 280

1. Teori Kebijakan Publik Dalam Pendidikan 280

2. Teori Historis Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam 280

3. Teori Pendekatan Studi Islam Secara Multidisipliner 281

C. PEMBAHASAN 281

1. Kondisi Sosial-Politik Indonesia pada Masa Orde Lama 281

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama 283

3. Tantangan dan Dampak Kebijakan Lembaga Pendidikan islam di Indonesia pada Masa Orde Lama 286
D. KESIMPULAN 288
DAFTAR PUSTAKA 290

BAB I
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN PERLAK

A. PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sangat panjang dan kaya, yang dimulai sejak kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Namun, jauh sebelum itu, pada abad ke-9, tepatnya di masa Kesultanan Perlak, pendidikan Islam mulai berkembang dan memainkan peran kunci dalam membentuk masyarakat di wilayah tersebut. Kesultanan Perlak, yang terletak di Aceh Timur, Sumatera, dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara dan menjadi pusat awal penyebaran Islam di kawasan ini.[1]

Meskipun Kesultanan Perlak hanya bertahan selama beberapa abad, keberadaannya memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pendidikan Islam. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh kerajaan ini adalah pembentukan lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan *meunasah* atau *dayah*, yang menjadi pusat utama pengajaran agama Islam di wilayah tersebut. Di lembaga-lembaga ini, masyarakat diberi pendidikan tentang Al-Qur'an, hadis, fiqh, dan berbagai ilmu Islam lainnya. Ulama-ulama dari luar negeri, seperti dari Gujarat dan Arab, juga berperan besar dalam memperkaya tradisi pendidikan di Perlak.[2]

Pendidikan yang diberikan pada masa tersebut tidak hanya terfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan karakter spiritual masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan di Perlak tidak hanya terbatas pada lembaga formal seperti *meunasah*, tetapi juga berlangsung melalui interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kesultanan Perlak terkait erat dengan struktur sosial, ekonomi,dan politik, menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat identitas agama sekaligus mendorong kemajuan sosial masyarakat.[3]

Meski demikian, meskipun peran pendidikan Islam di Kesultanan Perlak telah banyak diakui, masih banyak yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan pendidikan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam tentang kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan

[1] Hikayat Perlak, jilid I, hlm. 45.

[2] Prasasti Tombak Perlak, tahun 840 M, ditemukan di Kuala Perlak; diterjemahkan dalam A. R. Al-Ghazali, "Prasasti Islam Awal di Sumatra," *Jurnal Arkeologi*, vol. 5, no. 2 (2015): 23–30.

[3] M. Quraish Shihab, *Membedah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 2008, hlm. 78–84.

Perlak dan bagaimana pengaruhnya terhadap tradisi pendidikan Islam di Indonesia secara keseluruhan.[4]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Difusi Budaya

Teori difusi budaya menjelaskan bagaimana suatu unsur budaya, termasuk sistem pendidikan, berpindah dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya melalui proses interaksi sosial, migrasi, perdagangan, maupun penyebaran agama. Dalam konteks Kesultanan Perlak, teori ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana nilai-nilai dan sistem pendidikan Islam yang berasal dari Timur Tengah dan wilayah Asia Selatan seperti Gujarat, masuk dan menyebar di wilayah Nusantara, khususnya di Aceh.[5]

Difusi budaya ini tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga model pendidikan, metode pengajaran, dan struktur kelembagaan seperti madrasah atau meunasah. Para ulama yang datang ke wilayah Perlak memainkan peran penting sebagai agen difusi budaya dengan memperkenalkan sistem pendidikan Islam dan nilai-nilai keilmuan ke dalam struktur sosial masyarakat lokal.[6]

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Kesultanan Perlak tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses akulturasi budaya Islam yang telah melalui tahapan difusi yang panjang dan kompleks. Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi media penting dalam mentransmisikan nilai dan membentuk identitas budaya masyarakat.[7]

2. Teori Fungsional Struktural

Teori fungsional struktural, yang dipopulerkan oleh sosiolog Emile Durkheim, memandang bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling berkaitan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Pendidikan dalam

---

[4] Thomas R. Anderson, *Public Policymaking*, Boston: Houghton Mifflin, 2010, hlm. 12–15.

[5] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 78

[6] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVI dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 34–36.

[7] Nandang Sambas, *Sosiologi Pendidikan: Perspektif Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 83.

teori ini dianggap sebagai institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan budaya dari generasi ke generasi.[8]

Dalam konteks Kesultanan Perlak, pendidikan Islam berfungsi sebagai wahana untuk menjaga kestabilan sosial dan membentuk identitas kolektif masyarakat yang religius. Melalui pendidikan di lembaga seperti meunasah, masyarakat dibimbing untuk memahami ajaran Islam, membentuk akhlak, dan memperkuat solidaritas sosial. Pendidikan menjadi alat integrasi sosial yang mampu menyatukan masyarakat dalam kerangka nilai-nilai keislaman yang dianut oleh negara.[9]

Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, di mana masyarakat dibentuk agar taat terhadap hukum syariat dan struktur sosial yang berlaku. Peran pendidikan seperti ini selaras dengan pandangan Durkheim bahwa pendidikan merupakan mekanisme penting dalam membangun konsensus sosial dan menghindari konflik di tengah masyarakat.[10]

3. Teori Modernisasi

Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu masyarakat beralih dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Proses ini biasanya melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk struktur sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Modernisasi menekankan pentingnya perubahan dalam pola pikir, institusi, dan teknologi yang membantu masyarakat berkembang dan beradaptasi dengan zaman.[11]

Dalam konteks Kesultanan Perlak, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berperan dalam transformasi sosial dan budaya di wilayah tersebut. Meskipun Perlak merupakan kerajaan yang pada dasarnya masih mempertahankan tradisi lokal, masuknya Islam melalui jalur perdagangan dan dakwah membawa konsep-konsep baru yang berhubungan dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya. Pendidikan Islam yang diperkenalkan pada masa Kesultanan Perlak bukan

[8] Suwito, "Pendidikan Islam dalam Struktur Sosial Masyarakat Tradisional," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 11, no. 2 (2023): 120.

[9] Jonathan H. Turner, *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2022), hlm. 142–145.

[10] Saiful Hadi, *Sosiologi Pendidikan Islam: Kajian Teoretis dan Praktis* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

[11] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 2020), hlm. 42–45.

hanya terbatas pada pembelajaran agama, tetapi juga membawa perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.[12]

Pendidikan Islam yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga seperti dayah dan meunasah berfungsi sebagai instrumen modernisasi. Melalui lembaga-lembaga ini, masyarakat Perlak diajarkan nilai-nilai baru yang lebih egaliter, seperti konsep keadilan sosial, persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mengarah pada transformasi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara lebih terstruktur dan dinamis.[13]

Selain itu, pendidikan Islam di Perlak juga membawa kemajuan dalam aspek hukum dan pemerintahan. Konsep-konsep seperti syariat Islam yang diperkenalkan oleh para ulama mengubah pola-pola lama dalam pengaturan sosial dan hukum di kerajaan tersebut. Melalui sistem pendidikan yang berbasis agama ini, masyarakat Perlak mulai mengadopsi nilai-nilai baru yang berlandaskan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan keterbukaan dalam pemerintahan.[14]

Dengan demikian, pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Kesultanan Perlak dapat dipandang sebagai katalisator bagi proses modernisasi di wilayah tersebut. Proses ini tidak hanya mengubah sistem pendidikan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya secara keseluruhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan sosial dan politik yang lebih modern di kawasan Nusantara.[15]

---

[12] Walt W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 6–9.

[13] Muhammad Fikri, "Modernisasi Pendidikan Islam: Pendekatan Historis," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 15, no. 1 (2023): 50–51.

[14] Ronald Inglehart dan Christian Welzel, *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*, updated ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 88–91.

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 112.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah kesultanan perlak

Kesultanan Perlak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di kawasan Nusantara yang berdiri sekitar tahun 840 M. Lokasinya berada di Aceh Timur, sebuah wilayah yang dulunya menjadi jalur strategis perdagangan internasional di Selat Malaka. Karena posisi geografisnya yang penting, Perlak sering disinggahi pedagang dari Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Dari interaksi inilah ajaran Islam mulai masuk dan diterima oleh masyarakat lokal.[16]

Masuknya Islam ke wilayah Kesultanan Perlak tidak lepas dari peran aktif para ulama yang berasal dari luar negeri, khususnya dari wilayah Timur Tengah dan India. Mereka datang sebagai pedagang, ulama, dan duta agama, membawa ajaran Islam sekaligus sistem pendidikan Islam yang menjadi bagian integral dari dakwah mereka. Melalui jalur perdagangan yang strategis di Selat Malaka, Islam menyebar ke masyarakat lokal dengan cara yang lebih bersifat akulturatif. Ulama yang datang tidak hanya memperkenalkan ajaran agama, tetapi juga mendirikan lembaga pendidikan untuk mengajarkan dasar-dasar Islam seperti membaca Al-Qur'an, fiqh, dan akhlak.[17]

Jalur perdagangan yang menjadi penghubung antara wilayah Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan dengan Nusantara mempercepat penyebaran ajaran Islam. Perlak, sebagai salah satu titik persinggahan utama para pedagang, menjadi salah satu pusat pembelajaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, peran ulama sebagai agen difusi budaya sangat signifikan dalam membawa perubahan sosial dan pendidikan di Perlak. Kesultanan Perlak (Peureulak) merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang terletak di pesisir timur Aceh. Kerajaan ini berdiri pada tahun 840 M dan dikenal sebagai kerajaan pertama yang secara resmi menganut Islam sebagai dasar pemerintahannya.[18]

Pendirinya adalah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, keturunan Arab dari Bani Hashim, yang datang bersama rombongan pedagang dan dai. Setelah

---

[16] M. Nasir Tamara, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 25.

[17] Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Logos, 2021), hlm. 78.

[18] Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

diterima oleh masyarakat setempat dan menikah dengan bangsawan lokal, ia mendapat dukungan untuk membentuk sebuah pemerintahan berbasis Islam.[19]

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak menjalani sistem sosial dan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Ulama memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan religius dan pendidikan masyarakat. Tak heran jika Kesultanan Perlak kemudian dikenal bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga sebagai tempat awal berkembangnya tradisi keilmuan Islam di Nusantara. Masa keemasan Kesultanan Perlak ditandai dengan banyaknya ulama yang lahir dan belajar di wilayah ini, serta kebijakan para sultan yang mendorong pembentukan lembaga pendidikan berbasis masjid, tempat halaqah, serta majelis ilmu untuk membina umat.[20]

2. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Perlak

Kesultanan Perlak memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam penyebaran ajaran Islam. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan tersebut adalah pembangunan lembaga pendidikan seperti meunasah, dayah, dan tempat pengajian yang mudah diakses oleh masyarakat. Di tempat-tempat ini, warga belajar membaca dan memahami.[21]

Al-Qur'an, hadis, hukum Islam, serta pelajaran dasar keislaman lainnya. Metode pembelajaran yang digunakan umumnya bersifat langsung antara guru dan murid (talaqqi), yang merupakan metode tradisional dalam pendidikan Islam. Ulama-ulama yang mengajar di Perlak bukan hanya dari daerah sekitar, tetapi juga berasal dari luar negeri seperti Gujarat dan Arab, sehingga memperkaya isi pembelajaran dan memperluas wawasan keagamaan masyarakat. [22]

Sistem pengajaran di Kesultanan Perlak banyak mengadopsi metode talaqqi, yang merupakan cara belajar mengajar langsung antara guru dan murid secara lisan dan interaktif. Metode ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dalam dunia pendidikan Islam, di mana pengetahuan diajarkan secara langsung oleh para ulama atau guru kepada santri.[23] Dalam konteks Perlak, para ulama yang datang dari berbagai

---

[19] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15.

[20] Hasan Ibrahim, "Islamisasi dan Peranan Kesultanan Perlak," *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, vol. 10, no. 2 (2021): 33–34.

[21] Siti Maryam, "Peranan Kesultanan Perlak dalam Menyebarkan Islam di Nusantara," *Jurnal Tarikh dan Peradaban Islam*, Vol. 8, No. 1 (2021): hlm. 73.

[22] Badruddin, "Kesultanan Islam Awal di Nusantara: Perlak dan Samudera Pasai," *Jurnal Tamaddun*, Vol. 10, No. 2 (2023)

[23] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2019), hlm. 51.

wilayah, termasuk dari Timur Tengah dan India, memainkan peran penting dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam melalui sistem talaqqi ini.[24]

Selain itu, lembaga pendidikan seperti dayah dan meunasah menjadi pusat utama untuk menuntut ilmu. Dayah adalah lembaga pendidikan yang sering kali berfungsi sebagai pesantren, tempat para santri mendalami agama Islam dalam suasana yang mendalam dan penuh kedisiplinan. Sementara itu, meunasah adalah lembaga yang lebih informal namun tetap berfungsi sebagai tempat pengajian bagi masyarakat untuk mempelajari dasar-dasar agama Islam. Keduanya menjadi fondasi pendidikan di Perlak, tidak hanya sebagai sarana belajar agama, tetapi juga sebagai tempat memperkuat solidaritas sosial dan budaya Islam di masyarakat.[25]

Kurikulum pendidikan yang diterapkan juga cukup beragam, mencakup ilmu agama, bahasa Arab, logika, dan akhlak. Sistem pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung keberlangsungan sistem kerajaan Islam yang berlaku. Pemerintah kerajaan juga turut memberikan dukungan terhadap proses pendidikan, mulai dari menyediakan tempat belajar hingga kebutuhan hidup bagi para santri dan pengajarnya. Dukungan inilah yang menjadikan pendidikan di Perlak sebagai fondasi kuat bagi berkembangnya keilmuan Islam di wilayah tersebut.[26]

Hal ini turut mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan Islam untuk memperkuat ajaran agama di kalangan masyarakat.[27]

a. Penerapan Sistem Pendidikan Tradisional (Talaqqi)

Salah satu kebijakan utama dalam pendidikan Islam pada masa Kesultanan Perlak adalah penerapan sistem pengajaran talaqqi, yang merupakan metode pengajaran langsung antara guru (ulama) dan murid. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung dan mendalam, sehingga santri dapat menerima ajaran agama secara utuh dan menyeluruh. Pengajaran dilakukan dalam bentuk ceramah, pengajian, dan diskusi tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta ilmu fiqih dan tasawuf.[28]

---

[24] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 98.

[26] Baharuddin, *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Pendidikan Unggul dan Berkarakter* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 67.

[27] Ahmad Fauzi, "Peran Politik Kesultanan Islam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Nusantara," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 1 (2022): hlm. 55.

[28] Muhammad Natsir, "Metode Talaqqi dalam Pendidikan Islam Tradisional: Studi Kasus Dayah di Aceh," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021): hlm. 134.

Kebijakan ini menciptakan tradisi pendidikan yang bersifat personal, di mana guru memegang peran sentral dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan moral masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.[29]

b. Pendiriannya Lembaga Pendidikan Islam (Dayah dan Meunasah)

Sebagai bagian dari kebijakan pendidikan Islam, Kesultanan Perlak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti dayah dan meunasah. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang mirip dengan pesantren, di mana para santri mendalami ilmu agama dalam suasana yang serius dan penuh kedisiplinan. Dayah menjadi tempat bagi generasi muda untuk belajar ilmu agama dan mengajarkan mereka prinsip-prinsip dasar kehidupan beragama.[30]

Sementara itu, meunasah adalah lembaga yang lebih informal dan berfungsi sebagai tempat pengajian untuk masyarakat umum. Di meunasah, warga setempat bisa berkumpul untuk mempelajari Al-Qur'an, hadis, serta ilmu agama lainnya. Selain sebagai pusat pendidikan, meunasah juga berfungsi sebagai tempat untuk mempererat hubungan sosial antar warga.[31] adanya lembaga-lembaga ini, Kesultanan Perlak memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama Islam yang lebih mendalam, baik dalam bentuk formal (dayah) maupun informal (meunasah).[32]

c. Peran Ulama dalam Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan di Kesultanan Perlak tidak terlepas dari peran besar yang dimainkan oleh para ulama. Para ulama, baik yang berasal dari Perlak maupun luar Perlak, seperti dari Timur Tengah dan India, berperan penting dalam mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Mereka menjadi pemimpin spiritual dan intelektual yang tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga menjadi pembentuk sistem pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai agama.[33]

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh ulama di Perlak ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter masyarakat yang taat beragama.

---

[29] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2017), hlm. 88.

[30] Ismail Suardi Wekke, "Peran Dayah dan Meunasah dalam Pendidikan Islam Tradisional di Aceh," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 23, No. 3 (2023): hlm. 212.

[31] Rusydi Ali Muhammad, *Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Aceh: Kajian Historis dan Perkembangannya* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020), hlm. 67.

[32] Mukhlis, "Dinamika Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Sosial Masyarakat Aceh," *Jurnal Al-Bidayah*, Vol. 13, No. 1 (2022): hlm. 58.

[33] Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Kompas, 2021), hlm. 142.

Ulama juga berperan dalam mendirikan lembaga pendidikan, menyusun kurikulum pengajaran, dan menetapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[34]

d. Penyebaran Islam Melalui Pendidikan

Melalui kebijakan pendidikan Islam ini, Kesultanan Perlak berhasil mengembangkan jaringan ulama yang tersebar di berbagai wilayah. Pendidikan yang berbasis Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat akidah umat, tetapi juga untuk memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara dan bahkan ke kawasan Asia Tenggara.[35]

Para ulama yang terlatih di Perlak kemudian mendirikan lembaga pendidikan serupa di wilayah lain, seperti Samudera Pasai dan Aceh, yang ikut memperluas jaringan pendidikan Islam di seluruh kawasan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kesultanan Perlak memiliki dampak yang jauh lebih luas, baik bagi kerajaan itu sendiri maupun bagi perkembangan Islam di kawasan sekitar.[36]

e. Pengaruh Terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya

Kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Perlak juga memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Pendidikan agama yang diterapkan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang Islam, tetapi juga membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, pendidikan Islam berperan sebagai agen perubahan sosial yang memperkenalkan nilai-nilai baru dalam kehidupan sosial masyarakat.[37]

3. Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Wilayah Sekitarnya

Kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan di Perlak tidak hanya berdampak lokal, tapi juga menjalar ke berbagai daerah sekitarnya. Kesultanan Perlak menjadi pusat belajar dan penyebaran Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap kerajaan

---

[34] Asnawi, "Peran Ulama dalam Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Klasik," *Jurnal Tarbiyatuna*, Vol. 14, No. 2 (2022): hlm. 78.

[35] Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Bandung: Salamadani, 2020), hlm. 60.

[36] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Pendidikan Islam Sebagai Instrumen Dakwah dan Transformasi Sosial di Nusantara," *Jurnal Studi Islam Asia Tenggara*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 89.

[37] Fitriani, "Dampak Pendidikan Islam terhadap Struktur Sosial Masyarakat Tradisional," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 6, No. 2 (2022): hlm. 92.

Islam lain seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh, bahkan hingga ke wilayah semenanjung Melayu.[38]

Banyak ulama dan pendakwah yang berasal dari Perlak menyebarkan ajaran Islam sambil membawa sistem pendidikan dan nilai-nilai Islam yang telah mereka pelajari. Hal ini menyebabkan lembaga seperti dayah dan meunasah kemudian digunakan juga di daerah lain sebagai bentuk sistem pendidikan tradisional Islam yang efektif.[39]

Selain membentuk struktur pendidikan, kebijakan tersebut juga membantu membangun jaringan ulama yang kuat di wilayah barat Indonesia. Tak hanya itu, melalui pendidikan, nilai-nilai Islam menjadi bagian dari budaya masyarakat dan membentuk identitas sosial keislaman yang terus berkembang dari masa ke masa.[40]

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kesultanan Perlak memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan pendidikan Islam di wilayah-wilayah sekitarnya. Sebagai pusat peradaban Islam awal di Nusantara, Perlak menjadi titik rujukan bagi kerajaan-kerajaan lain dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis agama. Salah satu dampak utama adalah terbentuknya jaringan ulama dan pusat-pusat pembelajaran Islam di daerah-daerah seperti Samudera Pasai, Aceh, hingga wilayah Semenanjung Malaya.

Pendidikan yang diajarkan di Perlak, baik melalui sistem dayah maupun meunasah, tidak hanya terbatas pada wilayah tersebut, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Para ulama yang lahir dari Perlak berperan aktif dalam mendirikan lembaga pendidikan serupa di daerah-daerah lain, sehingga memperluas jaringan pendidikan Islam di kawasan Sumatera dan sekitarnya.[41]

Selain itu, kebijakan pendidikan di Perlak juga mempercepat penyebaran nilai-nilai Islam ke masyarakat sekitar, termasuk dalam aspek budaya, hukum, dan sosial. Lembaga pendidikan yang ada turut berperan dalam menciptakan iklim sosial yang lebih Islami dan mendorong masyarakat untuk lebih memahami ajaran agama melalui pendidikan formal. Hal ini menyebabkan wilayah sekitar Perlak semakin terintegrasi dalam jaringan Islam Nusantara yang berkembang pesat pada abad-abad berikutnya.[42]

---

[38] Irwan Abdullah, "Transformasi Pendidikan Islam dan Pengaruhnya terhadap Peradaban Kawasan Melayu," *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 13, No. 1 (2021): hlm. 67.

[39] Fathurahman, Oman, *Filologi dan Islam Nusantara* (Depok: Komunitas Bambu, 2019), hlm. 105

[40] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 98.

[41] Rina Haryanti, "Dampak Kebijakan Pendidikan Kesultanan Terhadap Masyarakat Maritim di Sumatra Timur," *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, Vol. 10, No. 2 (2023): hlm. 98.

[42] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2019), hlm. 67.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Perlak dan dampaknya terhadap wilayah sekitarnya sebagai berikut Kesultanan Perlak memainkan peran penting sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang memberikan kontribusi besar terhadap penyebaran ajaran Islam, khususnya melalui pendidikan. Pendirian lembaga pendidikan seperti dayah dan meunasah menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintahan Perlak dalam menumbuhkan generasi yang berakhlak dan berilmu. Metode pengajaran talaqqi yang diterapkan, dengan mengutamakan hubungan langsung antara guru dan murid, berhasil membentuk karakter umat yang terdidik dan religius.

Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Masyarakat Lokal Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Kesultanan Perlak tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga berperan dalam penguatan sosial dan budaya masyarakat. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Islam, yang berdampak positif pada struktur sosial dan nilai-nilai budaya setempat. Pendidikan menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan solidaritas umat Islam, serta membentuk tatanan sosial yang harmonis.

Dampak Penyebaran Pendidikan Islam ke Wilayah Sekitar Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Perlak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya. Model pendidikan yang berkembang di Perlak menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain seperti Samudera Pasai dan Aceh. Penyebaran pendidikan berbasis Islam ini memperkuat jaringan keilmuan dan dakwah di Nusantara, yang melibatkan para ulama dan cendekiawan yang berasal dari berbagai wilayah. Dengan demikian, pendidikan Islam di Perlak menjadi cikal bakal bagi perkembangan pendidikan Islam di kawasan Sumatera dan bahkan di wilayah Asia Tenggara.

Ulama-ulama yang muncul dari Kesultanan Perlak tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan tetapi juga berperan dalam memperluas pengaruh Islam melalui dakwah. Mereka menyebarkan ilmu agama dan mendirikan lembaga pendidikan serupa di wilayah lain, sehingga memperkuat fondasi pendidikan Islam di Nusantara.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa Kesultanan Perlak memiliki dampak yang sangat besar, baik terhadap masyarakat lokal maupun terhadap perkembangan pendidikan Islam di wilayah sekitarnya. Perlak tidak hanya

sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang berpengaruh dalam membentuk peradaban Islam di Nusantara.

BAB II
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN SAMUDERA PASAI

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bertujuan membimbing manusia kepada kesalehan dan penemuan makna substansial. Karena itu, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan pribadi manusia dari aspek jasmani dan rohani secara Integratif dan bertahap. Kemampuan jasmani dan kematangan rohani serta mental intelektual yang dibina melalui pendidikan Islam sangat signifikan utamanya dalam upaya mengantisipasi gerak dan dinamika kehidupan dan sejarah kemanusiaan. Salah satu Aspek Islam adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk menambah kecakapan, pengertian, keterampilan, pengalaman dan sikap belajar yang dibutuhkan untuk memungkinkan manusia mempertahankan dan mencapai tujuan hidup.[43]

Kerajaan Samudera Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia, didirikan sekitar abad ke-13 oleh Malik Al-Saleh. Terletak di pesisir utara Sumatra, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penting di jalur perdagangan internasional. Melalui aktivitas perdagangan, Islam menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat lokal, menjadikan Samudera Pasai sebagai pusat studi dan pengajaran agama dengan berdirinya madrasah dan pesantren.[44]

Kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai kerajaan lain, termasuk Kesultanan Malaka dan negara-negara di Timur Tengah, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat peradaban Islam. Namun, pada abad ke-16, Samudera Pasai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan lain, seperti Portugis dan Aceh. Akhirnya, kerajaan ini kehilangan kekuasaannya dan digantikan oleh Kesultanan Aceh, tetapi warisannya tetap signifikan dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara.

Terkait dengan dinamika kehidupan dan sejarah kemanusiaan, sejarah menyimpan kumpulan kekuatan yang dapat melahirkan dan menimbulkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan umat manusia. Demikian pula halnya dengan sejarah pendidikan Islam, selain mengandung perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan pada

[43] Abd Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Samudra Biru, 2018).

[44] Yuri El Hanif Azwanda, Syahril Yusuf, and Ellya Roza, 'Proses Masuk Dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai Di Aceh', *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 5.2 (2024), pp. 1–6.

zamannya, juga menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dirinci, paling tidak ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam studi sejarah pendidikan Islam, yaitu yang bersifat umum yakni sebagai faktor keteladanan, dan yang bersifat khusus atau akademis dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan Islam.[45]

Berbicara tentang pendidikan Islam masa pra Islam di Indonesia, sangatlah erat hubungannya dengan kedatangan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa pra Islam tidak terlepas dari proses perkembangan Islam. Pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya proses islamisasi di beberapa daerah yang merupakan wilayah Nusantara, khususnya daerah tertentu yang didatangi oleh para muballig yang juga berdagang.

Dalam konteks ini Mahmud Yunus mengatakan bahwa Sejarah Sosial Pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia. Realitas ini disebabkan karena pemeluk baru agama Islam pada saat itu tentu ingin mempelajari dan memahami lebih mendalam ajaran-ajaran Islam. Jika mereka ingin belajar shalat dan membaca al-Qur'an, terjadi proses belajar mengajar agama Islam, walaupun proses tersebut masih sangat sederhana dan tradisional. Masa tersebut merupakan awal timbulnya pendidikan Islam, di mana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar/surau, masjid dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin besarnya volume kebutuhan akan pendidikan yang sistematis, timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang dapat dilihat saat ini. Pendidikan Islam dimulai seiring dengan beralihnya masa pra Islam yang ditandai dengan datangnya Islam di kepulauan Nusantara, namun pendidikan Islam secara lembaga pada saat itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana sesuai dengan budaya pendidikan masing-masing daerah, seperti seorang murid atau santri mendatangi gurunya atau seorang guru melakukan kunjungan keliling untuk berdakwah dan sebagainya. Oleh karena itu, uraian permasalahan yang muncul dalam tulisan adalah bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana sistem pendidikan Islam pada masa awal.[46]

[45] Andini Fitriani, Isrina Siregar, and Supian Ramli, 'Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326m', *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2.1 (2022), pp. 11–22.

[46] Mudhiah Mudhiah and Rusdiah Rusdiah, 'Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Analisis Historis Terhadap Dinamika Kurikulum, Lembaga, Dan Strategi Pembelajaran', *Mandarasa*, 1.2 (2024).

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Multikultural

Teori ini, yang dikembangkan oleh ahli seperti James A. Banks, menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam pendidikan. Dalam konteks Kerajaan Samudera Pasai, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pendidikan Islam berinteraksi dengan tradisi lokal dan berbagai etnis yang ada. Teori ini sangat relevan karena Kerajaan Samudera Pasai adalah wilayah yang kaya akan keragaman budaya dan etnis. Pendidikan Islam di kerajaan ini tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga harus beradaptasi dengan tradisi lokal yang ada.[47]

2. Teori Hegemoni Gramsci

Dikenalkan oleh Antonio Gramsci, teori ini membahas bagaimana kelompok dominan mengontrol pandangan dunia melalui pendidikan. Dalam konteks ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan Islam digunakan untuk membentuk norma dan nilai masyarakat serta mempertahankan kekuasaan politik. Dalam konteks Kerajaan Samudera Pasai, teori hegemoni dapat digunakan untuk memahami bagaimana penguasa menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan bisa jadi bertujuan untuk membentuk pandangan dunia masyarakat yang sejalan dengan kepentingan politik penguasa.[48]

3. Teori Globalisasi Pendidikan

Kerajaan Samudera Pasai, sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam, terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran dan praktik pendidikan dari luar, terutama dari Arab. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana pengaruh globalisasi, terutama dalam bentuk pertukaran budaya dan pemikiran, mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Misalnya, kurikulum pendidikan mungkin mencakup teks-teks dari ulama besar di dunia Islam, yang menunjukkan interaksi dengan tradisi pendidikan luar.

---

[47] Siti Aisyah Abbas and Nur Rahma Asnawi, 'Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sumatera (Suatu Kajian Terhadap Tokoh Dan Lembaganya)', *ASH-SHAHABAH: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2020), pp. 1–15.

[48] Aulia Dinan Muhammad Dzakiyy and Muhammad Farhan Febrian, 'Sejarah Kerajaan Samudera Pasai Di Indonesia', *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3.7 (2024), pp. 161–67.

Ini membantu memahami dinamika lokal dan global yang membentuk kebijakan pendidikan.[49]

4. Teori Ekologi Pendidikan

Dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner, teori ini melihat pendidikan sebagai sistem yang dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan sosial. Ini membantu memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai. Dalam Kerajaan Samudera Pasai, kebijakan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan politik yang ada. Misalnya, dukungan dari penguasa terhadap lembaga pendidikan dapat dipahami sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, sekaligus sebagai strategi untuk memperkuat posisi politik mereka. Dengan analisis ini, kita dapat melihat bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi kebijakan pendidikan.[50]

5. Teori Pembelajaran Sosial

Diajukan oleh Albert Bandura, teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, teori ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial di lembaga pendidikan berkontribusi pada pembentukan identitas Islam di masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai, interaksi antara guru dan siswa, serta antar siswa itu sendiri, berperan besar dalam pembentukan identitas Islam.[51]

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai

Dalam sebuah sejarah ada yang menyatakan bahwa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Samudera Pasai yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Pada tahun 1345, Ibnu Batutah dari Maroko

[49] Opan Arifudin and others, *Psikologi Pendidikan: Tinjauan Teori Dan Praktis* (Penerbit Widina, 2020).

[50] Unik Hanifah Salsabila, 'Teori Ekologi Bronfenbrenner Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 7.1 (2018), pp. 139–58.

[51] M Ilham Masykuri Hamdie and others, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan', *Titik Karya: Jurnal Sosial Dan Humaniora Kontemporer*, 1.01 (2023), pp. 9–17.

sempat singgah di kerajaan Samudera Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir pada abad ke-14 M untuk mengikuti pengajian yang diadakan oleh raja dalam sebuah halaqoh setelah shalat Jum'at sampai waktu Ashar.[52]

Menurut Ibnu Batutah, Pasai pada abad ke-14 M sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan menjadi tempat berkumpul ulama-ulama dari negara-negara lslam. Seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Batutah, bahwa Sultan Malik Az-Zahir adalah orang yang terkenal alim dalam ilmu agama juga cinta kepada para Ulama dan ilmu pengetahuan, sehingga bila hari jum'at tiba.[53]

Sultan shalat di masjid dengan menggunakan pakaian Ulama, setelah itu mengadakan diskusi dengan para Alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan untuk membahas masalah-masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus. Dengan demikian, Samudera Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua yang dilakukan oleh sebuah kerajaan. Sementara itu, untuk luar kerajaan, diskusi ajaran Islam diduga sudah dilakukan di koloni-koloni tempat pedagang Islam berdatangan di Pelabuhan-pelabuhan.[54]

Pada abad ke-14 M merupakan zaman kejayaan kerajaan Samudera Pasai, sehingga pada waktu itu pendidikan juga tentu, mendapat tempat/ perhatian tersendiri.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Samudera Pasai, diantaranya:

a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syari'at adalah fiqh Syafi'i.
b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis ta'lim dan halaqah (diskusi).
c. Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama.
d. Biaya pendidikan bersumber dari negara.

Pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai terdiri dari dua sistem: pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal biasanya dilaksanakan di madrasah atau pesantren, di mana kurikulum mencakup pelajaran agama, bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sementara pendidikan informal terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat, di mana nilai-nilai Islam diajarkan melalui praktik sehari-hari.[55]

---

[52] Ach Syaikhu, 'SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM'.

[53] Ilham Maulana and others, 'PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607–1636', *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1.2 (2024), pp. 139–56.

[54] Abdul Halim and Muhammad Alfani Alpi, 'Peninggalan Kesultanan Islam Di Tanah Melayu Sebuah Pembaruan Pendidikan Islam Dan Tamadun Melayu', *Arriyadhah*, 20.2 (2023), pp. 49–55.

[55] Abdul Mukti and others, 'PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN SAMUDERA PASAI', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11.2 (2022), pp. 327–34.

Kurikulum pendidikan Islam pada masa ini meliputi studi Al-Qur'an, Hadis, fiqh, dan tasawuf. Selain itu, ada juga pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa pengantar utama di lembaga pendidikan. Beberapa institusi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti matematika dan astronomi, yang menunjukkan keterbukaan terhadap pengetahuan.[56]

Ulama memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat dan penentu arah kebijakan pendidikan. Guru-guru di madrasah dan pesantren diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam dan kemampuan untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Lembaga pendidikan pada masa itu biasanya didirikan di dekat masjid atau tempat-tempat ibadah. Fasilitas yang ada mungkin sederhana, tetapi memadai untuk kegiatan belajar-mengajar. Madrasah dan pesantren menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual, di mana siswa tidak hanya belajar, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat.[57]

Sistem pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik Kerajaan Samudera Pasai. Dukungan dari penguasa terhadap pendidikan, seperti penyediaan dana dan sumber daya, memungkinkan pengembangan lembaga pendidikan. Selain itu, keberadaan Kerajaan Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan juga membawa pengaruh dari luar yang memperkaya sistem pendidikan.[58]

Secara keseluruhan, sistem pendidikan Islam pada masa Kerajaan Samudera Pasai merupakan perpaduan antara ajaran agama dengan konteks sosial dan budaya yang kaya, yang berkontribusi pada pembentukan identitas masyarakat Islam di wilayah tersebut.

2. Kebijakan Pendidikan yang Berlaku Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai

a. Masjid Ta’lim atau Halaqah

Sistem pendidikan yang berlaku pada zaman Kerajaan Samudera Pasai adalah sistem pendidikan informal, yaitu majelis ta'lim dan halaqah. Majelis Ta'lim adalah

[56] Miftakhul Muthoharoh, ‘Historis Pendidikan Islam Serta Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional’, *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiyah*, 28.1 (2021), pp. 1–14.

[57] Moona Maghfirah Maghfirah, ‘Relasi Kuasa Dan Islamisasi: Dinamika Hukum Islam Di Kesultanan Samudera Pasai’, *PERADA*, 7.1 (2024).

[58] Susmihara Mihara, ‘Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara’, *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6.1 (2018), pp. 13–32.

sebutan untuk lembaga pendidikan informal Islam yang mempunyai kurikulum tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur. Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata, yaitu majelis dan ta'lim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan, sedangkan ta'lim berarti pengajaran.

Majelis Ta'lim mengajarkan tentang ilmu keagamaan, baik dari aspek teologi, filsafat, atau tasawuf. Sementara itu, halaqah berasal dari bahasa Arab, halaqo, yahluqo, halqotan, berarti lingkaran. Artinya, halaqah adalah perkumpulan antara dua orang atau lebih yang membahas mengenai agama. Secara istilah, halaqah berarti pengajian di mana orang-orang yang ikut di dalam pengajian tersebut akan duduk secara melingkar. Ternyata, istilah halaqah ini juga memiliki pengertian yang pada dasarnya sama dengan majelis ta'lim atau forum yang sifatnya keilmuan. Umumnya, materi yang diulas dalam halaqah adalah aqidah, fiqih, hadis, sirah, dan sebagainya.

Salah satu fungsi dari halaqah adalah sebagai sarana untuk bertemu dan saling mengenal yang disebut muakhhoh atau mempersaudarakan. Orang yang mengajar di halaqah adalah murobbi atau guru yang memiliki keahlian dalam hal mendidik, memimpin, dan bergaul.

b. Penyampaian Materi Fiqh Mazhab Syafi'i

Materi pendidikan dan pengajaran agama yang disampaikan pada masa Kerajaan Samudera Pasai adalah fiqh mazhab syafi'i. Mazhab ini disusun oleh seorang tokoh agama bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau Imam Syafi'i. Dia mulai mengembangkan mazhabnya pada awal abad ke-9, yang disusun berdasarkan Hadis dan Qiyas.

Adapun metodologi yang digunakan Imam Syafi'i merupakan hasil kolaborasi dari ilmu hadis yang dia pelajari dari para ahli di Hijaz dan para ahli kias di Irak. Kedua ilmu yang dia dapatkan kemudian dijabarkan sebagai dasar mazhabnya, yaitu Mazhab Syafi'i yang terkenal di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dasar-dasar pokok mazhab syafi'i yang diterapkan oleh Imam Syafi'i adalah: Al-Quran, sunah dari Rasulullah SAW., ijmak (kesepakatan para sahabat nabi), dan qiyas.[59]

c. Pengaruh Kerajaan Islam Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

[59] Dahrun Sajadi, 'Sistem Pendidikan Islam', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.1 (2021), pp. 47–66.

Pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia sangat mendalam dan kompleks, mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Kerajaan Islam pertama, seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh, memainkan peran penting dalam mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Madrasah dan pesantren yang didirikan selama periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual masyarakat.[60]

Kurikulum yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan ini mencakup studi Al-Qur'an, Hadis, fiqh, serta ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Arab dan matematika. Dengan pengajaran yang terstruktur, pendidikan Islam menjadi lebih sistematis, memungkinkan generasi muda untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik. Lembaga pendidikan ini menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang dianggap penting dalam membentuk karakter masyarakat.[61]

Kerajaan Islam juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Pendidikan Islam disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Misalnya, dalam pengajaran, metode yang digunakan seringkali mencerminkan tradisi lokal, sehingga menciptakan harmoni antara ajaran agama dan budaya yang ada.

Melalui lembaga pendidikan ini, ajaran Islam dapat disebarkan secara luas ke berbagai lapisan masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk identitas Islam dan memperkuat komunitas Muslim di seluruh nusantara. Dengan adanya pendidikan Islam, generasi muda diharapkan dapat memahami akidah, ibadah, dan etika Islam, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.[62]

Secara keseluruhan, pengaruh kerajaan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia membentuk struktur dan sistem pendidikan yang kuat, yang terus

[60] Zulqarnain Tajuddin, Bahaking Rama, and Abdul Kadir, 'AWAL MASUKNYA ISLAM DI SUMATRA (Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Sumatera Barat, Lembaga & Tokohnya)', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 3.4 (2023), pp. 242–55.

[61] Safei Safei, 'Peranan Kerajaan Islam Dalam Perkembangan Pendidikan Di Indonesia', *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2.2 (2015), pp. 301–08.

[62] Masruraini Masruraini, Bahaking Rama, and Muhammad Rusydi Rasyid, 'Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam Di Aceh: Lembaga Dan Tokohnya', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 2.4 (2022), pp. 210–23.

berkembang hingga saat ini. Warisan ini menciptakan fondasi bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.[63]

d. Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Samudera Pasai

Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Samudera Pasai menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal dalam kerajaan, tetapi juga dari kondisi eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai:[64]

1) Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun infrastruktur. Madrasah dan pesantren yang didirikan memerlukan dana untuk operasional, pengadaan buku, dan pemeliharaan fasilitas. Dalam konteks Kerajaan Samudera Pasai, yang merupakan kerajaan perdagangan, alokasi dana untuk pendidikan sering kali bersaing dengan kebutuhan lain, seperti pertahanan dan perdagangan. Keterbatasan ini dapat menghambat pengembangan kurikulum yang lebih kaya dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar.

2) Kualitas Pengajaran

Kualitas pengajaran menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Meskipun banyak ulama yang berpengetahuan, tidak semua guru memiliki keterampilan pedagogis yang memadai. Kurangnya pelatihan dalam metode pengajaran modern dapat mengakibatkan kurang efektifnya penyampaian materi kepada siswa. Hal ini berpotensi mengurangi pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan ilmu pengetahuan lainnya.[65]

3) Resistensi Budaya Lokal

Meskipun pendidikan Islam berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal, ada kalanya muncul resistensi dari masyarakat terhadap ajaran yang

[63] Titin Hardianti, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, 'PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA (STUDI SEJARAH DAN IMPLEMENTASI)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2025), pp. 26–36.

[64] Mukti and others, 'PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN SAMUDERA PASAI'.

[65] Ahmad Shihabuddin and Ellya Roza, 'Sejarah Uang Dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi Terhadap Peradaban Islam Di Indonesia', *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9.2 (2023), pp. 171–86.

dianggap asing. Sebagian masyarakat mungkin merasa bahwa pendidikan Islam mengancam tradisi dan budaya lokal mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menimbulkan konflik antara nilai-nilai Islam yang diajarkan di lembaga pendidikan dan praktik budaya yang sudah ada. Mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif.[66]nasi

4) Ketidakstabilan Politik

Kerajaan Samudera Pasai mengalami periode ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan. Persaingan dengan kerajaan lain, konflik internal, dan perubahan kepemimpinan sering kali mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pendidikan. Ketidakpastian ini dapat mengganggu kontinuitas program pendidikan dan menyebabkan kebijakan yang tidak konsisten.[67]

5) Aksesibilitas Pendidikan

Meskipun madrasah dan pesantren didirikan, aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat masih menjadi tantangan. Sebagian besar lembaga pendidikan mungkin terpusat di daerah perkotaan, sementara masyarakat di daerah pedesaan sulit untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Jarak yang jauh, biaya transportasi, dan kurangnya fasilitas juga menjadi halangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

e. Dampak kebijakan Pendidikan Islam terhadap Penyebaran Islam di Wilayah Nusantara Selama Masa Kerajaan Samudera Pasai

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Samudera Pasai memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kebijakan yang mendukung pendidikan, kerajaan ini berhasil mencetak ulama dan cendekiawan yang terampil dalam ilmu agama. Para tokoh ini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat.[68]

[66] Muh Nasir, Bahaking Rama, and Muhammad Yahdi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Awal Di Indonesia', *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6.2 (2023), pp. 1282–96.

[67] Sinta Novita Sari and Qolbi Khoiri, 'Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.1 (2023), pp. 4806–14.

[68] Novi Novrandianti, Endis Firdaus, and Saepul Anwar, 'Pendidikan Islam Di Indonesia: Dari Awal Penyebaran Islam Hingga Era Reformasi Pendidikan', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14.2 (2024), pp. 279–94.

Selanjutnya, pendirian lembaga pendidikan seperti pesantren dan madrasah merupakan langkah strategis dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat belajar bagi masyarakat, menarik minat banyak orang untuk mempelajari ajaran Islam. Dengan adanya tempat belajar yang terstruktur, masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan agama, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah umat Muslim di wilayah tersebut.

Kebijakan pendidikan Islam juga berkontribusi dalam penguatan identitas Islam di kalangan komunitas Muslim. Melalui pendidikan, nilai-nilai dan ajaran Islam ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan solidaritas sosial dan budaya yang kuat di antara umat Islam. Identitas ini menjadi fondasi bagi komunitas untuk bersatu dan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama mereka.[69]

Kebijakan pendidikan Islam yang inklusif juga memungkinkan adanya adaptasi terhadap budaya lokal. Dengan pendekatan yang menghormati tradisi dan kearifan lokal, ajaran Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Proses ini menciptakan sinergi antara Islam dan budaya lokal, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka tidak perlu meninggalkan identitas budaya mereka untuk memeluk agama Islam.[70]

Literasi juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Kebijakan pendidikan yang menekankan pengajaran kitab-kitab Islam dan literatur keagamaan membantu memperluas pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Dengan meningkatnya kemampuan membaca dan memahami teks-teks keagamaan, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka terhadap pesan-pesan Islam.

Terakhir, dukungan dari penguasa juga sangat krusial. Kebijakan yang didukung oleh raja dan elit kekuasaan memberikan legitimasi bagi penyebaran ajaran Islam. Ketika pemimpin kerajaan mendukung pendidikan Islam, masyarakat umumnya lebih terdorong untuk mengikuti jejak mereka. Hal ini menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pertumbuhan dan penyebaran Islam di Nusantara.[71]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya berkontribusi pada penyebaran ajaran Islam, tetapi juga membentuk

---

[69] Imailda Nur Laila, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Peradaban Islam Di Indonesia', *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 7.02 (2023), pp. 70–79.

[70] Faisal Affandi and Melda Diana Nasution, 'ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM', *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, 1.1 (2023).

[71] Izzi Fekrat, Duski Samad, and Elda Rifai, 'Islamisasi Dan Pertumbuhan Institusi-Institusi Pendidikan Islam Di Nusantara', *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2024), pp. 197–209.

struktur sosial dan budaya yang mendukung keberlangsungan dan perkembangan Islam di wilayah Nusantara.

D. KESIMPULAN

Kerajaan Samudera Pasai, yang didirikan sekitar abad ke-13 oleh Malik Al-Saleh. Kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam dan perdagangan di Asia Tenggara, dengan madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan utama. Pendidikan Islam di Samudera Pasai mencakup materi pengajaran fiqh Syafi'i, sistem pendidikan informal melalui majelis ta'lim, dan dukungan dari penguasa untuk biaya Pendidikan.

Pendidikan ini juga berfungsi untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam, membentuk identitas masyarakat Muslim. Namun, implementasi kebijakan pendidikan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kualitas pengajaran, resistensi budaya lokal, dan ketidakstabilan politik.

Pentingnya pendidikan Islam dalam konteks sejarah, serta relevansinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Samudera Pasai menunjukkan upaya yang terstruktur dan komprehensif untuk mendidik generasi muda, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Warisan pendidikan ini tetap signifikan dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara.

BAB III
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-17. Terletak di ujung utara Pulau Sumatra, Aceh tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan politik, tetapi juga pusat intelektual Islam yang sangat maju pada masanya. Salah satu aspek penting yang menandai kejayaan Aceh adalah perhatian besar terhadap pendidikan Islam, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang visioner dan progresif untuk ukuran zamannya.[72]

Kesultanan Aceh Darussalam memandang pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk masyarakat yang religius, beradab, dan berilmu. Kesadaran ini mendorong para sultan Aceh, khususnya Sultan Iskandar Muda (1607–1636) dan Sultanah Shafiatuddin (1641–1675), untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Di bawah kepemimpinan mereka, Aceh menjadi magnet bagi para ulama, cendekiawan, dan pelajar dari berbagai penjuru dunia Islam, termasuk dari Timur Tengah, India, dan Nusantara sendiri.[73]

Kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Aceh mencakup pendirian lembaga-lembaga pendidikan seperti dayah (pesantren tradisional Aceh), pengiriman pelajar ke luar negeri, serta pengundangan dan pemberdayaan ulama-ulama besar. Salah satu ulama terkenal pada masa itu adalah Syekh Nuruddin ar-Raniri, yang tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang teologi dan hukum Islam, tetapi juga dalam membentuk kerangka kurikulum pendidikan yang menyeimbangkan aspek spiritual dan intelektual. Karya-karya ulama Aceh yang ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu juga menjadi warisan berharga dalam khazanah keilmuan Islam Nusantara.[74]

Kebijakan ini tidak lepas dari kondisi geopolitik dan sosial-budaya saat itu. Aceh yang berperan sebagai pusat perdagangan internasional juga menjadi tempat pertemuan berbagai

[72] M Khusni Mubarok and Al Darmono, 'Konstruksi Filosofi Pendidikan Islam Multikultural Nasional', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14.1 (2020), pp. 56–64.

[73] H M Syadli ZA, 'Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh', *Alqalam*, 20.96 (2003), pp. 125–42.

[74] Iswandi Iswandi, 'Pilar-Pilar Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh', *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 3.2 (2019), pp. 109–21.

aliran dan mazhab Islam. Oleh karena itu, Kesultanan Aceh memerlukan sistem pendidikan yang tidak hanya memperkuat pemahaman keislaman masyarakat, tetapi juga mampu menjaga kohesi sosial dan identitas keislaman di tengah pluralitas pengaruh asing. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam membentuk identitas kultural dan keagamaan rakyat Aceh serta memperkuat legitimasi kekuasaan sultan.[75]

Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan Islam Aceh memiliki dampak yang melampaui wilayah kekuasaan kerajaan itu sendiri. Banyak tokoh dan ulama yang dididik di Aceh kemudian menyebarkan pengaruhnya ke daerah-daerah lain di Nusantara, menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat transmisi keilmuan Islam di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa Kesultanan Aceh tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki kontribusi yang luas dalam sejarah peradaban Islam regional.[76]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna secara spiritual, intelektual, dan moral. Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan bahwa pendidikan Islam bukan sekadar transfer ilmu, melainkan proses internalisasi nilai ilahi dan adab dalam diri peserta didik. Dalam konteks Kesultanan Aceh, teori ini menjelaskan bagaimana pendidikan tidak hanya menjadi instrumen penyebaran ilmu agama, tetapi juga pembentukan masyarakat yang berbudi luhur dan beridentitas Islam yang kuat.[77]

2. Teori Kebijakan Pendidikan

Teori ini membantu memahami pendidikan sebagai produk kebijakan negara atau penguasa. Menurut Stephen J. Ball, kebijakan pendidikan selalu beririsan dengan kekuasaan dan ideologi. Di Kesultanan Aceh, sultan dan elite kerajaan tidak hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pelindung agama dan penentu

[75] Abdul Mukti and others, 'MEMAHAMI PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN ACEH', *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11.2 (2022), pp. 345–50.

[76] Sri Astuti A Samad, 'Peran Perempuan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita Dalam Tinjauan Sejarah)', 2016.

[77] Syadidul Kahar, 'Modernisasi Pendidikan Islam Di Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

arah pendidikan. Pendidikan menjadi alat strategis untuk membentuk struktur sosial yang stabil dan mendukung legitimasi kekuasaan Islam.[78]

3. Teori Sejarah Sosial-Keagamaan

Teori ini melihat pendidikan Islam sebagai bagian dari realitas sosial dan budaya masyarakat Muslim. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari interaksi antara ulama, masyarakat, dan kekuasaan dalam suatu sistem sosial yang dinamis. Dalam konteks Aceh, teori ini dapat menjelaskan bagaimana pendidikan Islam berkembang secara organik melalui jaringan dayah (pesantren tradisional), peran ulama, serta pengaruh budaya lokal dan global.[79]

4. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini, yang dipelopori oleh tokoh seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons, melihat pendidikan sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan kesinambungan masyarakat. Pendidikan membantu mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan peran sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kasus Aceh, pendidikan Islam berperan dalam membentuk struktur sosial keagamaan dan menjaga harmoni antara agama, budaya, dan negara. Dayah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk struktur sosial yang mendukung stabilitas kerajaan.[80]

5. Teori Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Teori ini berkaitan erat dengan gagasan bahwa Islam tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, melainkan menyatukannya dalam kerangka tauhid. Tokoh-tokoh seperti Ismail Raji al-Faruqi dan al-Attas menekankan bahwa ilmu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam agar tidak sekadar bersifat sekuler atau teknokratis. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana ulama dan intelektual Aceh menyusun kurikulum dan kegiatan ilmiah yang menyatukan dimensi teologis dan rasionalitas

[78] Hasan Basri M Nur, 'Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan Di Kerajaan Aceh Darussalam', *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2024), pp. 26–41.

[79] Kusnadi Kusnadi, Bahaking Rama, and Muhammad Rusydi Rasyid, 'Proses Perkembangan Islam Di Nusantara, Teori Masuknya Dan Pusat Pendidikan Islam Masa Awal Di Asia Tenggara', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 2.2 (2022), pp. 75–91.

[80] Desy Ramadhani and Septian Teguh Wijiyanto, 'Sulthanah Taj'al Alam Safiatuddin Syah: Nilai Inspirasi Dan Kontribusi Dalam Memimpin Kesultanan Aceh 1641-1675', *Rinontje: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 3.2 (2022).

ilmiah, serta bagaimana mereka menulis karya-karya yang bersifat ensiklopedik dan multidisipliner.[81]

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga ke-17. Sejarah berdirinya kesultanan ini berkaitan erat dengan perkembangan Islam di wilayah Nusantara dan dinamika politik yang terjadi di Sumatra bagian utara pada masa itu. Awal mula terbentuknya Kesultanan Aceh Darussalam tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kerajaan-kerajaan kecil yang telah ada sebelumnya di wilayah Aceh, seperti Kerajaan Lamuri, Peureulak, dan Pasai. Kerajaan-kerajaan ini merupakan pusat awal penyebaran Islam di kawasan tersebut sejak abad ke-13. Dari kerajaan-kerajaan itulah pengaruh Islam mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat pesisir.[82]

Kesultanan Aceh sendiri secara resmi berdiri pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1511, tak lama setelah jatuhnya Kesultanan Malaka ke tangan Portugis. Jatuhnya Malaka menjadi pukulan besar bagi umat Islam di wilayah Melayu karena kota tersebut merupakan pusat perdagangan dan dakwah Islam yang sangat penting. Para ulama, pedagang, dan bangsawan Muslim dari Malaka pun mulai bermigrasi ke daerah-daerah lain, termasuk ke Aceh. Hal ini menjadi faktor penting dalam mempercepat proses konsolidasi kekuasaan Islam di Aceh dan memperkuat posisi politik dan ekonomi wilayah tersebut.[83]

Pendiri Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mughayat Syah, yang sebelumnya dikenal dengan nama Raja Ibrahim. Ia mempersatukan beberapa wilayah di Aceh dan mendirikan pusat pemerintahan di Kutaraja, yang kini dikenal sebagai Banda Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh mulai memperluas wilayahnya dengan

[81] Muhammad Sabarudin, 'Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan', *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015), pp. 139–74.

[82] Miftahul Jannah, 'PEMERINTAHAN ISLAM DI KERAJAAN ACEH PADA MASA SULTAN ISKANDAR MUDATAHUN 1951—2009'.

[83] Akhmad Fajar Ma'rufin, 'Kebijakan Ordonansi Guru Dan Pendidikan Islam Di Jawa Timur 1905-1942' (Universitas Negeri Malang, 2011).

menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya serta melakukan perlawanan terhadap Portugis yang saat itu mendominasi jalur perdagangan Selat Malaka.[84]

Kesultanan Aceh kemudian berkembang pesat menjadi kekuatan maritim dan ekonomi yang besar. Pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), Aceh mencapai puncak keemasannya. Wilayah kekuasaannya meluas hingga ke sebagian besar Sumatra dan bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Kesultanan Utsmaniyah di Turki, Inggris, dan Belanda. Selain kuat secara militer dan politik, Aceh juga menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan Islam. Banyak ulama besar lahir dan berkarya di sana, menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat intelektual Islam di Asia Tenggara.[85]

Dengan demikian, berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya merupakan hasil dari konsolidasi kekuasaan lokal, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap perubahan geopolitik regional akibat kedatangan bangsa Eropa. Aceh muncul sebagai simbol kekuatan Islam yang berdaulat dan menjadi benteng pertahanan budaya serta agama Islam di wilayah barat Nusantara.

2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Aceh Darussalam (khususnya abad ke-16 hingga ke-17) menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan Islam. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh para sultan dalam membina dan memperluas ilmu keislaman di kalangan masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga alat pembentukan identitas keagamaan, sosial, dan politik rakyat Aceh.[86]

a. *Pendirian dan Pengembangan Lembaga Pendidikan (Dayah)*

Bentuk paling nyata dari kebijakan pendidikan Islam adalah pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang dikenal dengan sebutan dayah. Dayah berfungsi seperti pesantren, di mana ulama sebagai guru (teungku) mengajarkan berbagai cabang ilmu agama, seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan bahasa Arab. Kesultanan Aceh mendukung pendirian dayah-dayah di seluruh

[84] Jihan Fahira, 'Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh', *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.1 (2024), pp. 1–11.

[85] Nurainiah Nurainiah, Nia Wardhani, and Nurul Jeumpa, 'Eksistensi Ulama Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Aceh', *Al-Hashif: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), pp. 1–15.

[86] Sabarudin, 'Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan'.

wilayah kerajaan, bahkan menyediakan insentif bagi ulama dan mendanai pembangunan sarana pendidikan.[87]

b. *Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Ulama*

Kesultanan Aceh memberikan posisi tinggi kepada para ulama dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Ulama tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga penasehat sultan, qadhi (hakim agama), dan tokoh masyarakat. Contoh nyata adalah kedatangan dan pengangkatan Syekh Nuruddin ar-Raniri, seorang ulama dari Gujarat, sebagai penasehat istana dan pemimpin keilmuan pada masa Sultan Iskandar Tsani. Dukungan politik terhadap ulama ini memperkuat sistem pendidikan dan memperluas pengaruhnya ke seluruh rakyat.[88]

c. *Kurikulum Berbasis Ilmu Keislaman Klasik*

Pendidikan yang dijalankan tidak hanya mencakup pengajaran Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga ilmu kalam, filsafat, mantik (logika), tasawuf, dan bahkan ilmu astronomi serta kedokteran dalam kerangka Islam. Kurikulum ini disusun oleh para ulama berdasarkan tradisi keilmuan Islam klasik, sebagaimana yang diterapkan di pusat-pusat pendidikan Islam dunia seperti Mekah dan Mesir.[89]

d. *Penulisan dan Penerjemahan Karya Ilmiah*

Kebijakan pendidikan juga diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap penulisan karya ilmiah. Banyak ulama Aceh menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab dan Melayu, yang digunakan sebagai bahan ajar di dayah maupun sebagai rujukan umat Islam di wilayah lain. Beberapa karya penting antara lain *Bustan al-Salatin* oleh Nuruddin ar-Raniri, serta karya-karya tasawuf dari Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Ini menunjukkan bahwa Aceh menjadi pusat produksi pengetahuan Islam yang penting pada masa itu.[90]

e. *Pengiriman dan Penerimaan Pelajar Internasional*

Kesultanan Aceh membuka diri terhadap pertukaran intelektual global. Banyak pelajar Aceh dikirim ke Timur Tengah, terutama ke Mekah dan Kairo, untuk menimba ilmu, kemudian kembali mengajar di Aceh. Sebaliknya, Aceh juga menjadi tempat tujuan pelajar dari wilayah lain di Nusantara dan luar negeri,

[87] Intan Devi Orlita Sari, 'Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam', *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8.2 (2022), pp. 146–54.

[88] Sari, 'Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam'.

[89] Nur, 'Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan Di Kerajaan Aceh Darussalam'.

[90] Susmihara Mihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6.1 (2018), pp. 13–32.

menjadikannya pusat keilmuan Islam regional. Ini merupakan bentuk kebijakan luar negeri dalam bidang pendidikan yang menunjukkan visi globalisasi keilmuan Islam.[91]

f. *Pendidikan sebagai Alat Diplomasi dan Islamisasi*

Sultan Iskandar Muda dan penerusnya menggunakan pendidikan Islam sebagai instrumen untuk memperkuat kekuasaan dan memperluas pengaruh agama Islam ke wilayah-wilayah taklukan atau mitra. Dayah dan ulama dikirim ke wilayah baru untuk melakukan dakwah dan pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai bagian dari strategi Islamisasi di Sumatra dan Semenanjung Melayu.[92]

3. Tokoh-tokoh dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh Daussalam

Perkembangan pendidikan Islam di Kesultanan Aceh tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para tokoh penting yang berperan aktif dalam membentuk tradisi keilmuan Islam. Para tokoh ini berasal dari kalangan penguasa (sultan/sultanah) dan intelektual-ulama**,** yang bekerja sama membangun sistem pendidikan yang kuat dan berakar pada nilai-nilai Islam. Mereka tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga menulis karya-karya ilmiah, mengembangkan kurikulum, serta membimbing masyarakat dalam kehidupan spiritual dan intelektual.[93]

a. *Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*

Sultan Iskandar Muda adalah pemimpin besar yang membawa Aceh pada puncak kejayaannya. Di samping kekuatan militernya, ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Ia membangun dan memperluas jaringan dayah (lembaga pendidikan Islam tradisional), mendatangkan ulama dari berbagai belahan dunia Islam, dan memberikan dukungan finansial serta politik kepada kegiatan keilmuan.

[91] Ilham Maulana and others, 'PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607–1636', *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1.2 (2024), pp. 139–56.

[92] Fahira, 'Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh'.

[93] Djaelani Haluty, 'Warisan Pendidikan Islam Nusantara: Suatu Perubahan Dan Keberlangsungan', *Al-Ulum*, 16.1 (2016), pp. 208–28.

Di bawah kepemimpinannya, pendidikan tidak hanya diselenggarakan di dayah-dayah besar, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pemerintahan.[94]

b. *Syekh Nuruddin ar-Raniri (wafat 1658)*

Nuruddin ar-Raniri adalah ulama besar yang berasal dari Gujarat, India, dan menjadi tokoh sentral dalam pendidikan Islam Aceh setelah diundang oleh Sultan Iskandar Tsani. Ia diangkat menjadi mufti kerajaan dan penasehat keagamaan resmi. Perannya sangat besar dalam pembentukan kurikulum pendidikan, penyusunan kitab ajar, serta pembenahan ajaran tasawuf yang dianggap menyimpang. Ia menulis sejumlah karya penting, salah satunya Bustan al-Salatin, yang tidak hanya membahas sejarah, tetapi juga etika, teologi, dan tata kelola pemerintahan Islami. Gagasannya menekankan pentingnya syariat dan keteguhan akidah dalam pendidikan.[95]

c. *Hamzah Fansuri (abad ke-16)*

Hamzah Fansuri adalah seorang penyair sufi dan ulama besar yang dipandang sebagai pelopor penulisan karya-karya Islam dalam bahasa Melayu. Ia dikenal karena karya-karyanya yang penuh makna filosofis dan tasawuf tinggi. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh konsep wahdatul wujud (kesatuan wujud) ala Ibn Arabi. Karya-karya Hamzah Fansuri banyak dibaca di dayah dan menjadi sumber pengetahuan spiritual bagi para pelajar. Meskipun pada masa Nuruddin ar-Raniri ajaran-ajaran tasawufnya dikritik, ia tetap dikenang sebagai pembaharu dalam metode penyampaian pendidikan melalui puisi dan sastra keagamaan.[96]

d. *Syamsuddin as-Sumatrani (wafat 1630)*

Syamsuddin merupakan ulama Aceh yang terkenal dengan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan filsafat Islam. Ia menjabat sebagai qadhi malikul adil (hakim agung) pada masa Sultan Iskandar Muda. Ia adalah tokoh penting dalam memperkenalkan dan mempertahankan ajaran wahdatul wujud, serta mendorong pendekatan spiritual yang mendalam dalam pendidikan. Syamsuddin dikenal karena kedalaman intelektual dan kontribusinya terhadap penyusunan bahan ajar untuk

---

[94] Maulana and others, 'PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607–1636'.

[95] Ihsan Harun, 'Sejarah Pendidikan Islam Di Aceh Tengah Era Tahun 1910-1986' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

[96] Dewi Setyawati, Heryati Heryati, and Yuliarni Yuliarni, 'PENGARUH INVESTASI ASING TERHADAP EKONOMI PEERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN PALEMBANG TAHUN 1724-1825', *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 8.3 (2023), pp. 911–26.

dayah-dayah besar di Aceh. Pemikirannya sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di wilayah Melayu, terutama dalam aspek metafisika dan akhlak.[97]

e. *Sultanah Shafiatuddin Syah (1641–1675)*

Sultanah Shafiatuddin Syah adalah penguasa perempuan pertama di Aceh dan merupakan istri dari Sultan Iskandar Tsani. Di tengah situasi politik yang tidak mudah, ia berhasil mempertahankan kestabilan kerajaan dan melanjutkan kebijakan pendidikan Islam dari masa sebelumnya. Ia memberikan ruang besar kepada ulama untuk terus mengembangkan keilmuan, serta mendukung pendidikan bagi perempuan. Di bawah pemerintahannya, Aceh tetap menjadi pusat kajian keislaman, dan ia dikenal sebagai sosok yang bijak dan religius. Dukungannya terhadap pendidikan juga terlihat dari kelanjutan hubungan diplomatik dan keilmuan dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah.[98]

Tokoh-tokoh di atas menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam di Aceh adalah hasil kolaborasi erat antara otoritas politik (sultan dan sultanah) dan intelektual-ulama**.** Peran mereka meliputi pembangunan lembaga pendidikan, penulisan karya ilmiah, pembentukan kurikulum, serta penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah. Tradisi keilmuan yang dibangun pada masa ini tidak hanya memperkuat identitas Islam Aceh, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran Islam di Nusantara secara keseluruhan.

4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Masyarakat Aceh Pada Masa Kesultanan Aceh Darussalam

Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, pendidikan Islam mendapat perhatian besar dari para sultan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Lembaga-lembaga seperti dayah dan meunasah berkembang pesat sebagai pusat pembelajaran agama. Para ulama diberi peran penting dalam menyebarkan ilmu, dan masyarakat didorong untuk memperdalam ajaran Islam. Kebijakan ini membawa dampak luas terhadap kehidupan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Aceh. Berikut adalah beberapa dampaknya:[99]

---

[97] Sibhgatullah Ar Rasyid and Nurul Jeumpa, 'Peran Tgk. Muhammad Daud Beureueh Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Aceh', *JKA*, 1.2 (2024).

[98] Muslih Hidayat, 'Islamisasi Dan Prototipe Institusi-Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia', *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 1.1 (2019), pp. 23–39.

[99] M R MA, 'Institusi Pendidikan Islam Di Nusantara Pada Masa Awal (Kajian Terhadap Meunasah, Dayah Dan Rangkang)', *Lentera: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 12.3 (2012), p. 148437.

a. Meningkatnya tingkat literasi dan pemahaman agama di kalangan masyarakat

   Kesultanan Aceh sangat menekankan pentingnya pendidikan agama Islam, terutama dalam memahami Al-Qur'an, hadis, fiqih, dan tasawuf. Sultan-sultan Aceh mendirikan lembaga pendidikan seperti dayah dan meunasah yang menjadi pusat belajar masyarakat dari berbagai lapisan. Akibatnya, masyarakat Aceh pada masa itu memiliki tingkat literasi keagamaan yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Nusantara. Masyarakat tidak hanya mampu membaca huruf Arab, tetapi juga memahami kandungan ajaran Islam secara mendalam. Literasi keagamaan ini membentuk karakter religius yang kuat dan menjadikan Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekkah."

b. Lahirnya ulama-ulama besar yang berpengaruh di tingkat regional dan internasional

   Kebijakan pendidikan Islam yang kuat melahirkan tokoh-tokoh ulama besar seperti Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili. Para ulama ini bukan hanya dikenal di Aceh, tetapi juga di dunia Islam, karena karya-karya mereka menjadi rujukan penting dalam berbagai bidang keilmuan. Mereka menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab dan Melayu Jawi, yang tersebar hingga ke Semenanjung Malaya dan kepulauan lainnya. Dengan demikian, Aceh menjadi pusat studi Islam yang memiliki daya tarik bagi pelajar dari berbagai daerah di Asia Tenggara.[100]

c. Terbentuknya sistem pendidikan Islam yang sistematis dan terstruktur

   Pemerintah kesultanan mendukung pembentukan kurikulum dan struktur pendidikan yang sistematis di pesantren dan dayah. Pendidikan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari dasar seperti membaca Al-Qur'an, lalu dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, hingga filsafat Islam. Hal ini menjadikan pendidikan di Aceh tidak bersifat informal semata, tetapi memiliki struktur yang mendukung kemajuan intelektual. Sistem ini bahkan menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam tradisional di berbagai wilayah Indonesia hingga saat ini.[101]

d. Meningkatnya peran perempuan dalam pendidikan dan keagamaan

   Salah satu dampak penting dari kebijakan pendidikan Islam pada masa

[100] Suhaimi Fajrin and Taufikurrahman Taufikurrahman, 'Reorientasi Pendidikan Islam Tradisional Di Indonesia', *AL-ALLAM*, 2.2 (2021), pp. 41–52.

[101] Fadhli Munir, 'Pendidikan Rangkang Sebagai Media Pendidikan Syari'at Islam Di Aceh: Tinjauan Sosiologi Masyarakat Aceh', *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 2.1 (2016), pp. 1–25.

Kesultanan Aceh adalah terbukanya peluang bagi perempuan untuk mengakses pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan penting seperti Sultanah Safiatuddin dan Sultanah Nahrasiyah, yang tidak hanya memimpin kerajaan tetapi juga mendukung pendidikan agama. Dalam lingkungan dayah, banyak perempuan yang ikut belajar ilmu agama. Fenomena ini cukup maju dibandingkan dengan beberapa wilayah lain pada masa itu, menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Aceh bersifat inklusif dan progresif.[102]

e. Memperkuat identitas keislaman dan kohesi sosial masyarakat Aceh

Dengan pendidikan Islam sebagai fondasi utama, identitas keislaman masyarakat Aceh semakin kuat. Nilai-nilai Islam meresap dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hukum adat (yang dipengaruhi syariat), norma sosial, hingga pemerintahan. Pendidikan menjadi alat penting dalam menyatukan masyarakat dengan nilai yang sama, menciptakan solidaritas sosial yang tinggi. Dalam menghadapi ancaman luar seperti Portugis dan Belanda, masyarakat Aceh mampu menunjukkan semangat perjuangan yang kuat, karena mereka tidak hanya membela wilayah, tetapi juga agama dan nilai-nilai yang diajarkan melalui pendidikan Islam.[103]

5. Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Aceh Terhadap Perkembangan Keilmuan Islam di Nusantara

Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran penting sebagai pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh para sultan, terutama pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Shafiatuddin Syah, memberikan dampak yang sangat besar dalam memperluas cakrawala keilmuan Islam di wilayah ini. Pendidikan Islam tidak hanya dijadikan sebagai alat dakwah, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang beradab, religius, dan berpikir kritis. Kebijakan yang menyatukan antara kekuasaan politik dan otoritas keilmuan ini menjadikan Aceh sebagai poros penyebaran ilmu pengetahuan Islam ke berbagai wilayah di kepulauan Melayu.[104]

---

[102] Mhd Alfat Gunawan and Asnil Aidah Ritonga, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tari Mesekat Suku Alas Di Aceh Tenggara', *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.3 (2023), pp. 645–58.

[103] Muhammad Rusdi, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 10.2 (2007), pp. 228–37.

[104] Mihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara'.

Salah satu pengaruh paling nyata adalah tumbuhnya jaringan keilmuan yang luas antara Aceh dengan wilayah-wilayah lain di Nusantara, seperti Minangkabau, Riau, Palembang, Banjar, Banten, hingga ke Semenanjung Malaka. Para ulama yang belajar di Aceh kemudian kembali ke daerah asal mereka sebagai guru dan pendakwah, membawa ilmu yang telah diperoleh untuk dikembangkan di daerah masing-masing. Dengan demikian, Aceh menjadi pusat kaderisasi ulama, yang berfungsi seperti universitas terbuka bagi para pencari ilmu dari berbagai penjuru.[105]

Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Aceh memperkuat penyebaran ilmu ke berbagai wilayah Melayu karena dapat dipahami secara luas. Melalui penerjemahan dan penulisan karya-karya dalam bahasa Melayu—oleh tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, dan Nuruddin ar-Raniri—konsep-konsep keislaman dapat diakses oleh kalangan yang lebih luas, tidak terbatas pada yang menguasai bahasa Arab. Karya-karya ini menjadi rujukan penting dalam pendidikan Islam dan digunakan di banyak pesantren dan surau di luar Aceh.[106]

Dari sisi lembaga pendidikan, model dayah Aceh menjadi inspirasi bagi pesantren di Jawa dan surau di Sumatera Barat, baik dari segi struktur, metode pengajaran, maupun sistem asramanya. Metode halaqah, talaqqi, serta hubungan erat antara guru dan murid menjadi model pembelajaran yang bertahan lama dan terus direplikasi di berbagai wilayah hingga kini [107].

Kebijakan pendidikan Islam di Aceh juga memperkuat pentingnya otoritas ulama dalam kehidupan sosial-politik. Tradisi ini kemudian berkembang di wilayah lain, di mana ulama tidak hanya menjadi tokoh agama, tetapi juga tokoh masyarakat, pengadil, penasehat politik, dan pelindung nilai-nilai Islam. Hal ini membentuk pola kepemimpinan keagamaan di Nusantara yang bercorak Islam inklusif dan berakar kuat dalam masyarakat lokal.[108]

Secara keseluruhan, pengaruh kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Aceh tidak hanya terbatas pada transformasi pengetahuan, tetapi juga menciptakan sebuah tradisi keilmuan dan kebudayaan Islam yang khas di Nusantara. Pengaruh ini

---

[105] Mudhiah Mudhiah and Rusdiah Rusdiah, 'Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Analisis Historis Terhadap Dinamika Kurikulum, Lembaga, Dan Strategi Pembelajaran', *Mandarasa*, 1.2 (2024).

[106] N U R ALFIYYAH SALAM, 'LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN'.

[107] Hamdie and others, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan'.

[108] Fithria Rifatul Azizah, 'Mengembangkan Paradigma Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi (Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Islam', *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4.2 (2019).

menjadikan Aceh sebagai batu penjuru dalam sejarah intelektual Islam Asia Tenggara, dan warisannya masih dapat ditemukan dalam berbagai sistem pendidikan Islam tradisional yang terus berkembang hingga hari ini.[109]

D. KESIMPULAN

Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Melalui kebijakan-kebijakan yang visioner dan progresif, para pemimpin Kesultanan Aceh berhasil membangun sistem pendidikan Islam yang terstruktur, inklusif, dan bernuansa keilmuan tinggi. Pendidikan tidak hanya difungsikan sebagai alat dakwah, tetapi juga sebagai pilar utama pembentukan peradaban. Lembaga-lembaga seperti dayah, meunasah, rangkang, serta majelis keilmuan istana, menjadi sarana penyebaran dan penguatan ilmu pengetahuan yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Pengaruh pendidikan Islam Aceh tidak hanya terbatas pada wilayah kerajaan itu sendiri, tetapi juga menjalar ke berbagai pelosok Nusantara melalui para ulama dan murid yang belajar di Aceh. Karya-karya ilmiah berbahasa Melayu, metode pembelajaran talaqqi dan halaqah, serta jaringan ulama lintas daerah menunjukkan bahwa Aceh adalah pusat keilmuan Islam yang strategis dan berpengaruh.

Dari kebijakan pendidikan Aceh, kita dapat mengambil banyak nilai penting untuk pengembangan pendidikan Islam masa kini, seperti integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, pentingnya kepemimpinan yang mendukung pendidikan, kemandirian lembaga pendidikan berbasis masyarakat, dan penekanan pada akhlak serta spiritualitas. Nilai-nilai ini relevan untuk menjawab tantangan zaman modern, sekaligus menjaga esensi pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Dengan demikian, studi tentang pendidikan Islam pada masa Kesultanan Aceh tidak hanya penting sebagai kajian sejarah, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan refleksi untuk membangun pendidikan Islam yang lebih baik dan kontekstual di masa kini.

[109] K M Akhiruddin, 'Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara', *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015), pp. 195–219.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN CIREBON

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Cirebon, yang berdiri pada abad ke-15 di pesisir utara Pulau Jawa, merupakan salah satu pusat penyebaran Islam yang penting di Nusantara. Sebagai kerajaan Islam yang berkembang dari perpaduan budaya lokal, Hindu-Buddha, dan pengaruh Islam dari Timur Tengah dan Gujarat, Kesultanan Cirebon menempatkan pendidikan agama sebagai salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahannya. Pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai alat pembentukan identitas budaya dan politik masyarakat Cirebon yang bercorak Islam. Dalam konteks ini, para sultan dan ulama bekerja sama erat dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan halaqah, serta mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, akhlak, dan tasawuf.[110]

Kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Cirebon tidak lepas dari peran strategis para tokoh seperti Sunan Gunung Jati, yang selain sebagai penguasa juga dikenal sebagai ulama dan penyebar agama Islam. Beliau menggunakan pendekatan yang inklusif, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem sosial dan budaya lokal. Pendidikan disebarkan melalui jaringan pesantren dan madrasah yang tersebar di wilayah kekuasaan Cirebon, dan pembelajaran dilakukan dalam berbagai tingkatan, dari yang paling dasar seperti membaca huruf Arab, hingga yang lebih tinggi seperti tafsir dan ilmu kalam. Kebijakan ini tidak hanya menghasilkan individu-individu yang alim dalam bidang agama, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidup, yang pada gilirannya memperkokoh legitimasi kesultanan secara spiritual maupun politik.[111]

Dalam dinamika sosial-politik Kesultanan Cirebon, pendidikan Islam juga menjadi alat diplomasi dan penyatuan wilayah. Banyak santri dan ulama dari luar wilayah datang ke Cirebon untuk menimba ilmu, lalu kembali ke daerah asalnya sebagai agen penyebar Islam

[110]Pandjaitan, Manahan Budiarto, Amin Lestari, and Udin Solehudin. "STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG DITERAPKAN OLEH SUNAN GUNUNG JATI DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM CIREBON." *JURNAL ILMIAH KAJIAN KEANGKATANLAUTAN* 7.1 (2025): 91-102.

[111]Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9.1 (2021): 165-184.

yang membawa nilai-nilai Cirebon. Hal ini menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai pusat intelektual Islam yang berpengaruh di Jawa Barat dan sekitarnya. Selain itu, dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai kebijakan resmi negara, kesultanan berhasil menciptakan masyarakat yang tidak hanya religius, tetapi juga terorganisasi dalam tatanan sosial yang harmonis. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Kesultanan Cirebon bukan sekadar aktivitas keagamaan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan peradaban yang berkelanjutan.[112]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merujuk pada seperangkat prinsip, aturan, dan strategi yang digunakan untuk mengatur sistem pendidikan. Menurut Wahab, kebijakan pendidikan adalah suatu kebijakan publik yang diterapkan dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam konteks sejarah, kebijakan pendidikan tidak hanya mencerminkan kebutuhan zaman, tetapi juga nilai-nilai ideologis yang dianut oleh pemerintah saat itu. Pada masa kerajaan Islam, kebijakan pendidikan umumnya berorientasi pada pembentukan karakter religius serta penguasaan ilmu-ilmu keislaman.[113]

2. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam diri individu dengan tujuan membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Menurut Al-Attas, tujuan utama pendidikan Islam adalah proses ta'dib, yaitu pembentukan manusia yang beradab berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara termasuk Kesultanan Cirebon lebih menekankan pada transmisi ilmu-ilmu keislaman melalui lembaga tradisional seperti pesantren, surau, dan masjid.[114]

---

[112]Atika, Siti Nur, et al. "PERAN KESULTANAN BANTEN DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI ISLAM DI NUSANTARA." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 4.3 (2025): 671-689.

[113]Meliani, Fitri, Andewi Suhartini, and Hasan Basri. "Dinamika dan tipologi pondok pesantren di Cirebon." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7.2 (2022): 297-312.

[114]Syafrizal, Achmad. "Sejarah islam nusantara." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2.2 (2015): 235-253.

3. Teori Islamisasi di Nusantara

Islamisasi adalah proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah tertentu. Menurut Azra, proses Islamisasi di Nusantara tidak hanya melalui perdagangan dan dakwah, tetapi juga melalui lembaga pendidikan yang dikelola oleh kerajaan-kerajaan Islam. Kesultanan Cirebon, sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di pantai utara Jawa, menggunakan pendidikan sebagai instrumen utama dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun peradaban.[115]

4. Teori Kepemimpinan Islam

Dalam Islam, pemimpin (khalifah, sultan) bertanggung jawab tidak hanya dalam urusan politik, tetapi juga dalam mengurus pendidikan rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin Islam wajib menjamin terlaksananya pendidikan Islam yang sesuai syariat. Hal ini tercermin dalam kebijakan para sultan Cirebon yang mendorong pendidikan berbasis Islam di wilayah kekuasaannya.[116]

[115]Azzahra, Fatimah, Muhammad Mutawali, and Syukri Syukri. "Aktualisasi Nilai Historis & Teoritis dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4.1 (2025): 463-480.

[116]Pane, Ismail. "Peradaban Islam di Indonesia." *Journal of Education and Culture* 3.1 (2023): 15-20.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pndidikan Islam Pada Masa Kesultanan Cirebon

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Cirebon merupakan hasil dari perpaduan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai lokal yang berkembang di wilayah pesisir utara Jawa pada abad ke-15 hingga 17. Kesultanan Cirebon sendiri didirikan oleh Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), yang merupakan salah satu dari Wali Songo, tokoh-tokoh penyebar Islam di Jawa. Sebagai seorang ulama sekaligus penguasa, Sunan Gunung Jati menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian penting dalam membentuk masyarakat yang beradab dan religius. Pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya terfokus pada pembelajaran kitab suci Al-Qur'an, tetapi juga mencakup pengajaran fiqih, akhlak, tasawuf, bahasa Arab, dan juga keterampilan hidup yang relevan dengan kondisi masyarakat kala itu. Sistem pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial, sehingga menghasilkan generasi yang tidak hanya saleh secara individu, tetapi juga berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.[117]

Lembaga pendidikan Islam pada masa Kesultanan Cirebon tidak bersifat formal seperti sekolah modern, melainkan mengambil bentuk pesantren, surau, atau madrasah tradisional yang dibangun di sekitar masjid, keraton, atau rumah para ulama. Pesantren menjadi pusat pembelajaran utama, dengan kiai atau ajengan sebagai figur sentral yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Salah satu ciri khas dari pendidikan masa ini adalah sistem halaqah, yakni metode pengajaran berbentuk lingkaran antara guru dan murid, yang mencerminkan tradisi keilmuan klasik Islam. Selain itu, sistem sorogan dan bandongan juga digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing santri. Pemerintah Kesultanan turut memberikan dukungan terhadap pesantren, baik dalam bentuk pengakuan resmi, perlindungan, maupun pemberian lahan dan sumber daya, sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ulama.[118]

Kebijakan pendidikan Islam juga mencerminkan semangat dakwah kultural yang menyesuaikan diri dengan konteks masyarakat lokal. Sunan Gunung Jati, sebagai pemimpin spiritual dan politik, sangat bijak dalam mengislamkan masyarakat tanpa menghapus tradisi lokal. Hal ini tercermin dalam materi pembelajaran yang disampaikan dengan pendekatan budaya lokal, seperti penggunaan tembang, wayang, dan simbol-

[117]Dewi, Befika Fitriya. "Basic Concepts of Modern Thought Islamic Religious Education." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8.1 (2025): 371-384.

[118]Ayatullah, Ayatullah, et al. "Tradisi Magis di Kesultanan Cirebon." *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 5.1 (2024): 43-66.

simbol Jawa dalam penyampaian nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, pendidikan Islam tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat, melainkan diterima dengan terbuka dan penuh penghargaan. Bahkan, bahasa Jawa dan Cirebon digunakan sebagai bahasa pengantar, diselingi dengan istilah Arab dalam konteks keagamaan, sehingga Islam dapat meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cirebon secara alami.[119]

Selain untuk mendidik individu, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Cirebon juga diarahkan untuk membentuk struktur sosial yang Islami. Para lulusan pesantren dan murid-murid yang dibina oleh ulama kemudian didorong untuk menjadi bagian dari struktur pemerintahan atau penggerak dakwah di masyarakat. Mereka berperan sebagai penghulu, mufti, imam masjid, hingga guru di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Dengan cara ini, Kesultanan Cirebon berhasil membangun jaringan keilmuan dan keagamaan yang luas dan kuat, yang turut memperkokoh stabilitas politik dan memperluas pengaruh Islam di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai alat penting untuk memperluas kekuasaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.[120]

Akhirnya, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Cirebon menunjukkan integrasi yang erat antara agama dan kekuasaan, yang menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama ritual semata, tetapi sebagai sistem kehidupan yang melandasi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesultanan tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat keilmuan dan spiritualitas. Pendidikan Islam menjadi wahana penting untuk melahirkan generasi yang memiliki ilmu, iman, dan akhlak, serta mampu mengemban amanah sebagai pemimpin dan pelayan umat. Warisan kebijakan ini masih bisa dirasakan hingga kini melalui eksistensi pesantren-pesantren tua di Cirebon dan sekitarnya, serta nilai-nilai budaya Islam yang masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon telah meletakkan fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam di Nusantara.[121]

Adapun bentuk kebijakan pendidikan islam pada masa kesultanan cirebon.

a. Pendirian Pesantren

[119]Salsabilah, Karima. "Awal Mulanya Islam Berkembang Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2.1 (2024): 57-66.

[120]Mihara, Susmihara. "Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam di Nusantara." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan* 6.1 (2018): 13-32.

[121]Erwantoro, Heru. "Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon." *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 4.1 (2012): 166-179.

Pesantren menjadi pusat utama pendidikan Islam. Para ulama dan wali, seperti Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah), mendirikan pesantren sebagai tempat pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu keislaman lainnya.

b. Penggunaan Bahasa Lokal dan Arab

Dalam pengajaran, digunakan bahasa Arab untuk teks-teks keagamaan, namun bahasa Jawa-Cirebon digunakan sebagai media penjelasan, sehingga masyarakat lokal dapat lebih mudah memahami ajaran Islam.

c. Penyebaran Islam melalui Dakwah dan Kesenian

Pendidikan agama tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui dakwah yang dikemas dalam bentuk kesenian seperti wayang, gamelan, dan pantun bernafaskan Islam. Ini menjadi bagian dari strategi kultural Kesultanan Cirebon.

d. Peran Sultan sebagai Pemimpin Agama dan Pendidikan

Sultan Cirebon tidak hanya memimpin secara politik, tetapi juga sebagai tokoh agama yang mendukung pendidikan Islam. Ia kerap mengundang ulama dari luar daerah untuk mengajar dan memperluas wawasan keislaman masyarakat.

e. Penerapan Hukum Islam dan Nilai Moral dalam Pendidikan

Pendidikan juga diarahkan pada pembentukan akhlak dan moral masyarakat, selaras dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembelajaran sosial.

f. Kurikulum Berbasis Keislaman dan Budaya Lokal

Materi pendidikan mengintegrasikan ilmu keislaman dengan pengetahuan lokal, termasuk sejarah, budaya, dan nilai-nilai adat Cirebon.[122]

2. Tokoh yang Berperan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Kesultanan Cirebon

Pada masa Kesultanan Cirebon, sejumlah tokoh berperan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Salah satu tokoh utama yang tak bisa dipisahkan dari sejarah pendidikan Islam di Cirebon adalah Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Beliau bukan hanya pendiri Kesultanan Cirebon, tetapi juga seorang ulama besar yang memiliki pengaruh luas dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan sekitarnya. Sebagai pemimpin spiritual dan politik, Sunan Gunung Jati mendirikan

[122]Supendi, Usman, Syofiah Pribadi, and Fitria Eka Dewi Murni. "Dampak Islamisasi Kerajaan Padjajaran: Sistim Pendidikan dan Nilai-Nilai Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Sunda." *Attractive: Innovative Education Journal* 6.1 (2024): 15-26.

pesantren dan sekolah-sekolah agama yang menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai figur yang berhasil menggabungkan antara ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, sehingga pendidikan Islam di Cirebon dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sunan Gunung Jati memandang pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang religius dan beradab, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[123]

Selain Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga juga memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di wilayah Cirebon. Meskipun lebih terkenal dengan dakwahnya di wilayah Demak dan sekitarnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam pendekatan dakwah yang mengutamakan seni dan budaya. Ajaran-ajarannya tentang dakwah yang mengedepankan kebudayaan dan tradisi lokal sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam di Cirebon. Melalui seni dan budaya, seperti wayang kulit dan tembang, Sunan Kalijaga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Metode dakwahnya yang penuh kebijaksanaan ini diterapkan dalam pendidikan Islam di Cirebon, yang mengedepankan cara yang tidak mengisolasi masyarakat dari kebudayaan mereka, tetapi justru menggabungkannya dengan ajaran Islam.[124]

Tokoh lain yang juga sangat berperan dalam kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Cirebon adalah Sunan Bonang, seorang Wali Songo yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ajaran Islam di Jawa. Meskipun berpusat di Tuban, ajaran dan metode dakwahnya juga memengaruhi Cirebon. Sunan Bonang dikenal dengan pendekatan dakwah yang menggunakan media seni dan budaya, seperti gamelan dan seni pertunjukan. Hal ini membantu mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat Cirebon yang sangat kental dengan budaya seni. Sebagai seorang ulama, Sunan Bonang turut memberikan pengaruh terhadap metode pendidikan yang mengedepankan keindahan dan daya tarik seni dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya melibatkan pengajaran kitab-kitab agama, tetapi juga keterampilan seni yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Selain tokoh-tokoh Wali Songo, ada juga tokoh-tokoh lokal yang berperan

[123]Ridhotullah, Nurrona Abdi, and Mahfud Ifendi. "PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA." *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum* 2.4 (2024): 16-30.

[124]Dandi, Idan, and Tendi Tendi. "Merekonstruksi Sosok Pangeran Kuningan dalam Sejarah Cirebon." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 10.1 (2022):13-15.

dalam pendidikan Islam di Cirebon. Salah satu tokoh tersebut adalah Ajengan Drajat, yang terkenal sebagai salah satu kiai terkemuka di Cirebon. Ajengan Drajat adalah salah satu pemimpin pesantren yang memiliki pengaruh dalam mendidik generasi muda di Cirebon dengan ajaran Islam yang moderat. Ia menjadi figur sentral dalam pengajaran dan penyebaran ilmu agama Islam di Cirebon, mengajarkan fiqih, akhlak, dan ilmu tasawuf kepada para santrinya. Ajengan Drajat memiliki banyak murid yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat dan sekitarnya. Kontribusinya dalam pendidikan Islam di Cirebon memberikan dampak yang besar, terutama dalam menciptakan ulama-ulama yang berkompeten dalam bidang keagamaan dan dakwah.[125]

Selanjutnya, Sultan Cirebon sebagai penguasa politik sekaligus pelindung pendidikan Islam juga memiliki peran yang sangat besar. Para sultan Cirebon, terutama pada masa Sultan Muhammad Syamsuddin, mendukung penuh pendirian pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Sultan Cirebon menyadari pentingnya peran pendidikan dalam memperkokoh kekuasaan politik dan menjaga stabilitas sosial di bawah naungan kerajaan Islam. Sultan tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menciptakan kebijakan yang melindungi ulama dan santri. Selain itu, para sultan juga berperan dalam menjaga hubungan baik dengan pusat-pusat kebudayaan Islam di Timur Tengah dan India, yang membuka akses terhadap ilmu pengetahuan Islam yang lebih luas bagi masyarakat Cirebon. Dengan kebijakan ini, Sultan Cirebon berusaha memastikan bahwa pendidikan Islam berjalan dengan lancar dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Kesultanan Cirebon.[126]

3. Dampak kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Masyarakat Cirebon

Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Cirebon dapat dilihat dari berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Cirebon sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki akar sejarah Islam yang kuat, sering kali dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di wilayah ini. Sejak zaman Kesultanan Cirebon, pendidikan Islam telah memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dan spiritual masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam di Cirebon tidak hanya

[125]Prasetyo, Geta Ilham Adi, et al. "Pengelolaan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Bingkai Kebijakan Agraria Nasional terhadap UUPA." *Jurnal Pertanahan* 14.1 (2024).

[126]Rozi, Bahru, and Ahmad Misbah. "Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752." *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 1.1 (2022): 21-39.

terbatas pada aspek agama, tetapi juga berpengaruh besar terhadap dinamika sosial dan transformasi budaya masyarakat. Salah satu dampak yang paling signifikan dari kebijakan pendidikan Islam di Cirebon adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pengetahuan agama. Di Cirebon, banyak pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama Islam, yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan praktis. Kebijakan yang mendukung pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai ajaran Islam. Hal ini berpengaruh besar pada kesadaran agama masyarakat, yang tercermin dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam yang lebih baik.[127]

Selain itu, kebijakan pendidikan Islam juga memberikan dampak dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Cirebon. Sebagai daerah yang memiliki tradisi Islam yang kental, pendidikan Islam menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi keagamaan, seperti seni Islam, bahasa Arab, dan ritual keagamaan, yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Cirebon. Dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan seni dan budaya Islam, masyarakat Cirebon dapat mempertahankan warisan budaya yang telah ada sejak lama.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendidikan keterampilan. Banyak pesantren di Cirebon yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan praktis, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Kebijakan yang mendukung pendidikan keterampilan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian lokal, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri secara finansial. Namun, kebijakan pendidikan Islam di Cirebon juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung pendidikan Islam tradisional di pesantren dan pihak yang menginginkan pendidikan Islam yang lebih modern dan terintegrasi dengan kurikulum nasional. Ketidaksesuaian kurikulum antara pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan formal sering kali menyebabkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di sektor

[127]Supendi, Usman, M. Zikril Oksa Putra, and Yan Nurcahya. "Islam Pada Zaman Kerajaan Sumedanglarang (Abad 14-15)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.1 (2025): 09-19.

formal. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal kualitas dan standar pendidikan yang masih perlu ditingkatkan agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman yang semakin berkembang.[128]

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pendidikan Islam di Cirebon sangat kompleks dan memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman agama, memperkuat identitas budaya, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Cirebon perlu terus didorong dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat.[129]

D. KESIMPULAN

Pada masa Kesultanan Cirebon, kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan agama. Pendidikan Islam dijalankan melalui pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama, dengan kurikulum yang menekankan pada ilmu agama seperti tafsir, hadis, fiqih, dan bahasa Arab. Kesultanan Cirebon juga mendirikan lembaga pendidikan yang lebih formal, seperti madrasah, untuk mencetak ulama dan pemimpin yang memiliki wawasan keagamaan yang mendalam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dominasi Islam dan memperkuat posisi kerajaan sebagai pusat kekuasaan Islam di wilayah tersebut.

Tokoh yang berperan penting dalam kebijakan pendidikan Islam di Cirebon antara lain Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon, yang juga dikenal sebagai ulama besar dan penyebar agama Islam. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Walisongo yang turut berperan dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir Jawa juga memberi pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Cirebon. Mereka mendirikan pesantren dan memfokuskan pendidikan pada pengajaran ajaran agama serta nilai-nilai Islam.

Dampak dari kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Cirebon sangat signifikan. Masyarakat Cirebon mengalami transformasi sosial dengan meningkatnya

[128]Kurniati, Kurniati. "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4.2 (2022): 84-96.

[129]Khotimah, Uus Husnul, Anda Juanda, and Didin Nurul Rosidin. "Implementasi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Cirebon." *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)* 2.2 (2023): 285-295.

pemahaman agama dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam juga memperkuat identitas Cirebon sebagai pusat kebudayaan Islam di Jawa Barat. Namun, kebijakan ini juga membatasi ruang gerak bagi pendidikan sekuler, yang menyebabkan fokus utama masyarakat pada pengajaran agama lebih dominan.

BAB V
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KERAJAAN DEMAK

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang sejalan dengan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah ini. Salah satu periode penting dalam sejarah tersebut terjadi pada masa Kerajaan Demak, yang berdiri pada awal abad ke-16 dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Perubahan besar dalam sistem kepercayaan dan pemerintahan dari Hindu-Buddha ke Islam menuntut adanya kebijakan pendidikan yang mampu membentuk masyarakat baru dengan landasan nilai-nilai keislaman. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, Demak menyadari pentingnya pendidikan dalam menyebarluaskan ajaran agama, membangun struktur sosial, dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Pendidikan Islam dijadikan sebagai instrumen utama untuk menanamkan pemahaman keagamaan kepada masyarakat sekaligus membentuk sumber daya manusia yang siap mendukung pemerintahan berbasis nilai-nilai syariah.[130]

Selain memenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat, pendidikan Islam pada masa Demak juga diarahkan untuk mempersiapkan aparatur pemerintahan yang memahami hukum Islam. Hal ini penting agar seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat. Dukungan penuh dari pemerintah Demak terhadap kegiatan pendidikan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kekuatan politik dan budaya Islam di Jawa. Proses penyebaran Islam pada masa ini dilakukan secara damai melalui pendekatan budaya lokal. Ajaran-ajaran Islam dikemas dalam bentuk kesenian tradisional seperti wayang, gamelan, dan seni sastra, sehingga dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di lingkungan formal seperti pesantren, tetapi juga melalui interaksi sosial dan budaya, menciptakan masyarakat Islam yang tetap berakar pada budaya Nusantara.[131]

Melihat pentingnya peranan pendidikan dalam proses Islamisasi pada masa Kerajaan Demak, kajian tentang kebijakan pendidikan Islam pada periode ini menjadi sangat relevan. Pemahaman tentang bagaimana pendidikan dikembangkan dan dilaksanakan pada masa itu

[130] Rohmah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakad Media Publishing, (2025) hal 68

[131] Mufarokhah, *Refleksi filosofi sunan kalijaga pada tata kelola pemerintahan di kabupaten demak*. Diss. Universitas islam sultan agung, (2023) hal 46

memberikan gambaran tentang strategi penyebaran Islam yang adaptif dan efektif di tengah perubahan sosial budaya yang besar.[132]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter dan akhlak yang baik melalui penyampaian ilmu yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan Islam di masa Kerajaan Demak dapat dipahami melalui konsep dasar pendidikan dalam Islam,teor mengutamakan penyampaian ilmu pengetahuan, baik agama maupun sains, serta pembentukan karakter berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu sumber utama pendidikan Islam adalah *Al-Qur'an* yang memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sementara *Hadis* berperan sebagai penjelasan praktis dari ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Sistem pendidikan Islam di masa itu menekankan pada pembelajaran agama sebagai dasar kehidupan, yang nantinya mencakup bidang sosial, politik, dan ekonomi.[133]

2. Teori Pendidikan Historis

Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak juga dapat dianalisis menggunakan teori pendidikan historis, yang memandang pendidikan sebagai bagian dari dinamika sosial dan sejarah. Berdasarkan teori ini, kebijakan pendidikan pada masa Demak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang terjadi saat itu, yaitu transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam. Pendidikan Islam pada masa ini dipengaruhi oleh peran para ulama, terutama Walisongo, yang memiliki visi untuk menyebarkan ajaran Islam sekaligus meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan agama yang dapat diterima oleh masyarakat Jawa.[134]

3. Teori Sosialisasi Agama

Pada masa Kerajaan Demak, sosialisasi agama melalui pendidikan dilakukan oleh para ulama dan Walisongo dengan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat

---

[132] Atika. "Peran Kesultanan Banten Dalam Mempertahankan Dan Mengembangkan Nilai-Nilai Islam Di Nusantara." *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* 4.3 (2025) hal 671-689.

[133] Nur Sahed, Pendekatan Rasional-Religius dalam Pendidikan Islam (Kajian Terhadap Falsafah Dasar Iqra'), Tarbawiyah*: Jurnal Ilmiah Pendidikan* : Volume 02; (2018), hal. 60

[134] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, (2016), hal.286

melalui berbagai lembaga pendidikan, seperti pesantren. Teori ini menganggap bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dari proses sosialisasi dalam masyarakat. Para ulama dan penyebar agama Islam menggunakan pesantren sebagai media utama untuk mengajarkan ilmu agama dan mendidik masyarakat mengenai ajaran Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di masa Demak bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga berfungsi sebagai pusat penyebaran budaya Islam di Jawa.[135]

4. Teori Pemerintahan dan Kebijakan Publik

Kerajaan Demak, sebagai pemerintahan Islam pertama di Jawa, juga memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pendidikan. Teori pemerintahan dan kebijakan publik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana penguasa Demak, seperti Sultan Raden Patah, mendukung pendidikan Islam melalui kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk pembangunan pesantren dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Kebijakan pendidikan pada masa ini juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhadap pengajaran agama untuk memperkuat paham Islam di kalangan rakyatnya.[136]

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Bersirinya Kerajaan Demak

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berkembang pesat pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah, seorang bangsawan yang diyakini masih memiliki garis keturunan dari raja Majapahit terakhir, Brawijaya V. Menurut beberapa sumber, Raden Patah awalnya mendirikan sebuah pesantren di wilayah Bintoro, Demak, sebelum akhirnya mengembangkan daerah tersebut menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat. Kerajaan Demak tidak terlepas dari melemahnya kekuasaan Majapahit. Pada masa itu, Majapahit yang sebelumnya menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara mulai mengalami kemunduran yang tajam akibat perang saudara, krisis politik, serta

[135] Badrun, Ahmad. *Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pengembangan Program Pendidikan Pesantren Modern (Studi Kasus Pada Pesantren Modern Darussalam Ciamis Jawa Barat)*. MS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah jakarta, (2023) hlm 169

[136] Irawan, Aguk. "Relasi Pesantren dan Keraton: Perspektif Antropologi-Sejarah era Kerajaan Demak Bintoro dan Mataram Islam." *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 3.2 (2022) hal 57-76.

melemahnya ekonomi. Banyak daerah kekuasaan Majapahit, terutama di pesisir utara Jawa, yang mulai melepaskan diri dan membentuk kekuatan baru, salah satunya adalah Demak. Keruntuhan Majapahit memberikan peluang besar bagi munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang berbasis di daerah pesisir.[137]

Wilayah Demak memiliki posisi geografis yang sangat strategis, yakni berada di jalur perdagangan internasional antara Asia Barat, India, Tiongkok, dan kepulauan Nusantara. Ini menyebabkan Demak cepat berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai. Para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok yang beragama Islam tidak hanya membawa barang-barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Hal ini membuat Islam tumbuh subur di daerah pesisir, termasuk Demak.[138]

Selain faktor politik dan ekonomi, penyebaran Islam di Jawa juga diperkuat oleh peran para ulama, terutama Walisongo. Mereka bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga aktif membimbing masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, budaya, dan politik. Walisongo turut mendukung berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam yang diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan spiritual dan politik di Jawa setelah keruntuhan Majapahit. Dengan bekal dukungan rakyat, kekuatan ekonomi, serta pengaruh spiritual yang kuat, Raden Patah memproklamasikan berdirinya Kerajaan Demak. Ia kemudian dinobatkan sebagai sultan pertama, dan menjadikan Demak bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat dakwah Islam di Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Demak juga mulai memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya, bahkan terlibat aktif dalam upaya menghalau pengaruh Portugis yang mulai masuk ke wilayah Nusantara melalui Malaka.[139]

Secara keseluruhan, berdirinya Kerajaan Demak adalah hasil dari perpaduan antara melemahnya kekuasaan lama (Majapahit), berkembangnya jaringan perdagangan internasional, meningkatnya penyebaran agama Islam melalui perdagangan dan dakwah, serta dukungan sosial dan politik dari para ulama dan masyarakat pesisir. Kerajaan Demak menjadi tonggak penting dalam sejarah Islamisasi di Indonesia, dan membuka jalan bagi berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara.[140]

---

[137] Abbudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, (2016), hal. 240

[138] Yogyanto, "*Peran Raden Fatah Dalam Mengembangkan Agama Islam Di Demak*." Yogyakarta:PGRI,(2017), hal. 5

[139] Syarifuddin. *Jejak Awal Islam di Nusantara: Sejarah Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam*. Bening Media Publishing, (2024) hal 58

[140] Nasution. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, (2023). Hal 160

2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Pada Masa Kerajaan Demak

Pada masa Kerajaan Demak, kebijakan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan membentuk masyarakat yang berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, memiliki kebijakan pendidikan yang berfokus pada pengajaran agama, dengan peran besar yang dimainkan oleh para ulama dan Walisongo. [141]

Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan pendidikan Islam pada masa tersebut:

a. Pendirian Pesantren

Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh Kerajaan Demak dalam bidang pendidikan Islam adalah pendirian *pesantren*. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang paling penting pada masa itu. Di pesantren, para santri (murid) belajar berbagai ilmu agama, termasuk Al-Qur'an, Hadis, fiqh, serta ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan ajaran Islam. Pesantren juga menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Walisongo, yang merupakan tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Jawa, memiliki pesantren-pesantren yang menjadi tempat pengajaran agama sekaligus tempat untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal.[142]

b. Kurikulum Berbasis Agama

Pendidikan yang diberikan di pesantren pada masa Demak berfokus pada pengajaran agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam meliputi pembelajaran Al-Qur'an, Hadis, fiqh, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Selain itu, pendidikan moral dan akhlak juga menjadi bagian penting dari pembelajaran di pesantren. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat Jawa agar sesuai dengan ajaran Islam. Penekanan pada pendidikan agama di pesantren ini menunjukkan upaya Kerajaan Demak untuk memperkenalkan dan menguatkan ajaran Islam di kalangan rakyat.[143]

c. Peran Ulama dalam Pendidikan

Ulama, khususnya Walisongo, memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak. Mereka tidak hanya

---

[141] Naily Fadhilah, "Jejak Peradaban Dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak," *Al- Mawarid* 2, no. 1 (2020) hal 33–46.

[142] Enhas. "Sejarah, Transformasi, dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 13.3 (2023) hal 289-310.

[143] Saputra. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, (2022). hal 128

sebagai pendidik, tetapi juga sebagai penyebar ajaran Islam yang memimpin pesantren-pesantren di berbagai daerah. Walisongo memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pendidikan Islam di Demak, dengan mengajarkan ajaran Islam yang sesuai dengan kondisi budaya lokal masyarakat Jawa. Selain itu, mereka juga mengajarkan cara beragama yang damai dan mengakomodasi budaya setempat agar Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat.[144]

d. Dukungan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam

Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam, memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pendidikan Islam. Raden Patah sebagai sultan pertama, serta penguasa-penguasa berikutnya, mendorong pembangunan pesantren dan memberikan perlindungan bagi para ulama yang mengajar di pesantren. Bahkan, pemerintah Demak memberikan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung pengajaran agama, termasuk pemberian tanah untuk mendirikan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Demak sangat erat kaitannya dengan dukungan politik dari penguasa.[145]

e. Penyebaran Islam Melalui Pendidikan

Kerajaan Demak juga memanfaatkan pendidikan sebagai salah satu alat untuk memperluas pengaruh Islam di Jawa. Selain pesantren, para ulama dan Walisongo juga mengajarkan Islam secara langsung kepada masyarakat melalui dakwah di masjid dan tempat umum. Pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada kalangan terdidik atau elite, tetapi juga diperuntukkan bagi masyarakat umum agar mereka dapat memahami ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.[146]

f. Pendidikan untuk Kalangan Rakyat Bawah

Salah satu ciri khas kebijakan pendidikan Islam pada masa Demak adalah keberpihakannya kepada kalangan masyarakat bawah atau rakyat biasa. Kerajaan Demak menyadari pentingnya pendidikan agama untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk petani dan pekerja, agar mereka dapat menjalankan ajaran Islam dengan

[144] Supendi, Usman, M. Zikril Oksa Putra, and Yan Nurcahya. "Islam Pada Zaman Kerajaan Sumedanglarang (Abad 14-15)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.1 (2025) hal 19.

[145] Ubaidillah, Ahmad. *Ekonomi Islam Nusantara*. Nawa Litera Publishing, (2023) hal 78

[146] Tsabit Azinar Ahmad, "Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019) hal 1689–1699

benar. Oleh karena itu, banyak pesantren yang dibuka di daerah-daerah pelosok untuk menjangkau masyarakat luas.[147]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak berfokus pada penyebaran dan penguatan ajaran Islam melalui pesantren dan pendidikan agama. Kerajaan Demak mendukung penuh peran para ulama dan Walisongo dalam mendirikan pesantren dan mengajarkan ilmu agama, yang akhirnya membentuk basis pendidikan Islam yang kuat di Pulau Jawa.[148]

3. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak antara lain adalah faktor sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa, menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda dalam menyebarkan dan mengembangkan pendidikan Islam.[149]

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa tersebut:

a. Proses Islamisasi dan Transisi Agama

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Demak adalah proses Islamisasi yang terjadi setelah runtuhnya Majapahit. Islam mulai menyebar di Nusantara melalui jalur perdagangan, dakwah para ulama, dan pengaruh kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, yang diyakini sebagai keturunan Majapahit, memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan pendidikan Islam sebagai bagian dari upaya untuk mengubah masyarakat Jawa dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam. Kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menanamkan ajaran Islam kepada masyarakat yang sebelumnya belum mengenal agama ini.[150]

b. Peran Ulama

---

[147] Songgirin, Amin. *Sistem Pendidikan Kader dan pengembangan lembaga pendidikan islam*. Penerbit NEM, (2022). Hal 145

[148] Jamil. "Perspektif sejarah sosial dan nilai edukatif pesantren dalam pendidikan Islam." *Risalatuna Journal of Pesantren Studies* 3.2 (2023) hal197

[149] Abuddin Nata, *Pendidikan Islam Di era milineal*, Jakarta, Kencana, (2020).hal 67-68

[150] Setiawan, Ahmad Hapsak, and Roby Sagara. "Sejarah Masuknya Islam di Indonesia." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4.3 (2024) hal 398

Walisongo yang merupakan tokoh ulama utama pada masa Kerajaan Demak, memainkan peran yang sangat besar dalam kebijakan pendidikan Islam. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Walisongo mendirikan pesantren sebagai lembaga pendidikan utama di mana masyarakat Jawa dapat mempelajari Islam secara mendalam. Peran mereka dalam mendirikan dan mengelola pesantren serta mengajarkan ajaran Islam sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa itu, baik dari segi kurikulum, metodologi pengajaran, maupun penyebaran Islam di kalangan rakyat.[151]

c. Dukungan Pemerintah Demak

Kerajaan Demak memberikan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pendidikan Islam. Sultan Raden Patah dan penguasa Demak lainnya menyadari bahwa pendidikan agama adalah fondasi utama untuk memperkuat posisi kerajaan dan mengokohkan ajaran Islam di kalangan rakyat. Pemerintah mendukung pendirian pesantren, memberikan fasilitas dan tanah untuk mendirikan lembaga pendidikan, serta melibatkan ulama dalam kebijakan pemerintahan. Dengan adanya dukungan pemerintah, pendidikan Islam dapat berkembang dengan pesat dan dapat diakses oleh masyarakat luas.[152]

d. Kebutuhan Sosial dan Kultural

Masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Demak memiliki tradisi budaya yang kuat, termasuk ajaran-ajaran Hindu-Buddha yang telah lama berkembang. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan ini dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menghapus sepenuhnya tradisi dan budaya lokal mereka. Oleh karena itu, para ulama, terutama Walisongo, mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dengan mengajarkan Islam melalui proses akulturasi, sehingga pendidikan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam pada masa itu berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara ajaran agama Islam dan kebudayaan Jawa yang sudah ada.[153]

---

[151] Syarifuddin, *Jejak Awal Islam di Nusantara: Sejarah Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam*. Bening Media Publishing, (2024) hal 56

[152] Farid Setiawan, *Kebijakan pendidikan muhammadiyah 1911-1942*, Yogyakarta, UAD Press, (2021).hal 251.

[153] Adam. "Islam Melayu dan Islam Jawa: Studi Komparatif Akulturasi Islam dan Kebudayaan dalam Perspektif Sejarah." *Muslim Heritage* 8.1 (2023) hal 133

e. Perkembangan Ekonomi dan Perdagangan

Kerajaan Demak terletak di jalur perdagangan yang strategis di pesisir utara Jawa. Perdagangan internasional yang melibatkan pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Jawa. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran agama Islam yang kemudian dipelajari oleh masyarakat setempat. Keberadaan perdagangan internasional ini turut mendorong pengembangan pendidikan Islam, karena semakin banyak orang yang tertarik untuk belajar Islam dan mengikuti ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para pedagang.[154]

f. Pengaruh Politik dan Militer

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup kuat. Kekuatan politik ini mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam dengan memberikan stabilitas yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren. Selain itu, penguasa Demak juga menggunakan pendidikan Islam untuk memperkuat posisi mereka secara politik dan untuk menjaga keharmonisan sosial. Pendidikan Islam menjadi alat untuk mempersatukan masyarakat Jawa di bawah satu ajaran agama yang sama dan mengurangi perbedaan yang ada akibat pengaruh Hindu-Buddha.[155]

g. Penyebaran Islam melalui Dakwah

Selain melalui pesantren, dakwah juga memainkan peran penting dalam pendidikan Islam. Walisongo dan ulama lainnya aktif dalam berdakwah ke masyarakat, mengajarkan ajaran Islam secara langsung di masjid, tempat umum, dan komunitas-komunitas. Proses dakwah ini juga mempengaruhi kebijakan pendidikan, karena dakwah menjadi salah satu cara untuk menyebarkan ajaran agama dan mengedukasi masyarakat mengenai Islam. Dengan cara ini, pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada santri di pesantren, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas.[156]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait.

---

[154] Baihaqi, Ahmad. "Analisis Kemajuan Kerajaan Demak " *TARIKHUNA: JURNAL SEJARAH PERADABAN ISLAM* 3.02 (2023) hal 160

[155] Amin. *Hukum Islam Dalam Politik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Jilid 1*. Vol. 1. Penerbit Adab, (2024) hal 56

[156] Irmansyah. *Manajemen Dakwah dalam Kondisi Bencana*. Publica Indonesia Utama, (2024) hal 79

Faktor-faktor ini mendorong pemerintah Demak untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam yang dapat diterima oleh masyarakat, sekaligus memperkuat penyebaran ajaran Islam di Jawa.[157]

4. Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Demak

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Kerajaan Demak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Jawa, baik dalam aspek sosial, budaya, agama, maupun politik. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kebijakan pendidikan Islam tersebut:

a. Perubahan dalam Sistem Pendidikan dan Pengetahuan

Salah satu dampak besar kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak adalah pengenalan sistem pendidikan berbasis Islam melalui pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan utama yang mengajarkan ilmu agama, moral, dan akhlak kepada masyarakat Jawa. Dengan adanya pesantren, masyarakat Jawa mulai mengenal konsep pendidikan formal yang sebelumnya belum ada dalam sistem pendidikan Hindu-Buddha. Pendidikan di pesantren mencakup pengajaran Al-Qur'an, Hadis, fiqh, serta ilmu pengetahuan Islam lainnya. Hal ini memperluas wawasan masyarakat Jawa tentang agama dan pengetahuan yang sebelumnya terbatas pada ajaran-ajaran Hindu-Buddha.[158]

b. Islamisasi dan Perubahan Agama Masyarakat

Kebijakan pendidikan Islam berperan besar dalam proses Islamisasi masyarakat Jawa. Melalui pendidikan di pesantren, dakwah ulama, dan pengajaran langsung kepada masyarakat, banyak orang Jawa yang beralih dari agama Hindu-Buddha ke Islam. Islam dipandang sebagai agama yang membawa perdamaian, kesederhanaan, dan moralitas yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Jawa. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam membantu mempercepat proses perubahan agama masyarakat Jawa, sekaligus memperkenalkan ajaran Islam yang menekankan pada kesetaraan, keadilan sosial, dan ibadah yang lebih sistematis.[159]

---

[157] Amando, Fytrio. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Mohammad Natsir*. BS thesis. (2023) hal 58

[158] Rambe. "Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Dari Pengajian hingga Era Kontemporer." *Rayah Al-Islam* 8.4 (2024) hal 2370

[159] Afidah, Nur. "Perkembangan Islam pada Masa Kerajaan Demak." *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 1.1 (2021) hal 64-76.

c. Penguatan Identitas Sosial dan Budaya Islam

Kebijakan pendidikan Islam juga memperkuat identitas sosial dan budaya Islam di kalangan masyarakat Jawa. Proses akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam pendidikan Islam yang diberikan di pesantren, terdapat penekanan pada pentingnya akhlak dan budi pekerti, yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam budaya Jawa. Hal ini menciptakan jembatan antara budaya lokal dan ajaran Islam, sehingga Islam tidak hanya diterima sebagai agama baru, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa.[160]

d. Pengembangan Jaringan Sosial dan Ekonomi

Pendidikan Islam yang berkembang di masa Kerajaan Demak turut mempengaruhi jaringan sosial dan ekonomi*masyarakat. Banyak ulama yang mendirikan pesantren di daerah pesisir dan pedalaman, yang tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat pertemuan sosial dan ekonomi. Pesantren menjadi tempat berkumpulnya para pedagang, petani, dan masyarakat umum untuk berdiskusi, belajar, serta memperkuat ikatan sosial mereka. Selain itu, dengan meningkatnya pengetahuan agama, masyarakat juga mulai memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mendorong mereka untuk menjalankan perdagangan dengan lebih etis dan berdasarkan prinsip keadilan sosial.[161]

e. Penguatan Peran Ulama dan Pemimpin Agama

Kebijakan pendidikan Islam memberikan peran yang lebih besar bagi ulama dan pemimpin agama dalam masyarakat. Sebagai pendidik dan penasihat, ulama memainkan peran sentral dalam membimbing masyarakat menuju pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Mereka tidak hanya mengajarkan agama di pesantren, tetapi juga berperan dalam mengarahkan kebijakan politik dan sosial. Dengan demikian, ulama menjadi figur yang dihormati dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu.[162]

f. Perubahan Struktur Sosial dan Politik

[160] Muntoha, Tohir, et al. "Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal." *Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam* 4.1 (2023) hal 141

[161] Aziz, Suci Karlina, et al. "Pengaruh Kebijakan Politik Etis Pemerintah Terhadap Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.5 (2024): 244-252.

[162] Hafiz, Muhammad. "Pandangan Ulama Terhadap Prospek Alumni Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Di Kabupaten Labuhan Batu Utara." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* (2024).

Kebijakan pendidikan Islam juga berkontribusi pada perubahan struktur sosial di Kerajaan Demak. Pesantren tidak hanya menjadi tempat untuk mendidik agama, tetapi juga menjadi pusat kekuatan politik dan sosial. Para ulama dan santri yang terdidik di pesantren seringkali menjadi tokoh yang berperan dalam pemerintahan dan dakwah. Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama, memperkuat kedudukan politiknya dengan mengandalkan pendidikan Islam untuk menciptakan kohesi sosial dan politik di masyarakat. Para penguasa Demak, seperti Sultan Raden Patah, juga mendekatkan diri dengan ulama sebagai bagian dari kebijakan untuk mendapatkan dukungan rakyat.[163]

g. Penyebaran Islam ke Wilayah Lain

Melalui kebijakan pendidikan yang diterapkan di Kerajaan Demak, banyak pesantren yang didirikan di wilayah luar Demak, seperti Cirebon, Banten, dan bahkan ke Sumatra. Hal ini mendorong penyebaran Islam ke wilayah lain di Nusantara dengan Jawa sebagai pusat utama penyebaran agama Islam. Pendidikan Islam yang kuat di Kerajaan Demak turut memfasilitasi penyebaran Islam ke berbagai wilayah, baik melalui dakwah langsung maupun melalui para santri yang kemudian menyebarkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain.[164]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak memiliki dampak besar terhadap perubahan sosial, budaya, agama, dan politik di Jawa. Pendidikan Islam yang berfokus pada pengajaran agama dan moralitas telah mengubah masyarakat Jawa secara mendalam, memperkenalkan nilai-nilai Islam, dan mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut.[165]

[163] Dini, Permanasari. "*Peran Ulama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Depok*." (2023) hal 90

[164] Daulay. *Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya*. Prenada Media, (2019) hal 87

[165] Roseta, Charolin Indah. "Dakwah Antarbudaya: Perubahan Sosial Budaya Pada Proses Islamisasi Jawa Abad XV." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 1.2 (2020) hal 163

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat Jawa, baik dalam aspek sosial, budaya, agama, maupun politik. Melalui pendirian pesantren dan peran aktif para ulama, terutama Walisongo, pendidikan Islam tidak hanya memperkenalkan ajaran agama Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Proses Islamisasi yang dipengaruhi oleh pendidikan agama ini mengubah secara signifikan struktur sosial masyarakat, memperkenalkan sistem pendidikan berbasis agama yang lebih terstruktur, serta memperkuat identitas Islam di kalangan masyarakat Jawa.

Pendidikan Islam juga mempercepat peralihan agama masyarakat Jawa dari Hindu-Buddha ke Islam, dengan pendekatan yang inklusif dan mengakomodasi budaya lokal. Selain itu, kebijakan ini berperan penting dalam membentuk karakter moral dan etika masyarakat melalui pengajaran agama yang menekankan pada akhlak yang baik. Kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Demak turut memperkuat peran ulama sebagai pemimpin agama dan sosial, serta memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam ke wilayah lain di Nusantara. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Demak berperan penting dalam membentuk fondasi keagamaan, sosial, dan budaya yang lebih kuat di Jawa, sekaligus mempercepat proses penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara.

BAB VI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KERAJAAN PAJANG

A. PENDAHULUAN

Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam awal di tanah Jawa yang memiliki peranan penting dalam proses penyebaran dan pengembangan ajaran Islam, khususnya di wilayah pedalaman Jawa Tengah. Berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Pajang mewarisi semangat dakwah Islam dan memainkan peran sebagai penerus legitimasi kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, kerajaan ini menjadi pusat baru pemerintahan Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek politik dan militer, tetapi juga pada aspek pendidikan agama. Peralihan dari pusat kekuasaan Islam pesisir (Demak) ke pedalaman (Pajang) menandai pergeseran strategi dakwah Islam. Jika Demak dikenal dengan kekuatan maritim dan pengaruh ulama pesisir, maka Pajang harus menghadapi tantangan menyebarkan Islam dalam konteks budaya agraris dan kejawen yang kental di pedalaman Jawa. Oleh karena itu, pendidikan Islam menjadi instrumen penting untuk menjembatani nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Proses ini dilakukan melalui lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan pengajian yang tersebar di berbagai wilayah kekuasaan Pajang.[166]

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan Kerajaan Pajang lebih bersifat mendukung dan memfasilitasi. Pemerintah tidak membentuk lembaga pendidikan secara langsung seperti sistem formal masa kini, melainkan memberikan ruang dan perlindungan kepada para ulama untuk mengembangkan pendidikan agama di tengah masyarakat. Ulama memiliki posisi terhormat di istana dan sering menjadi penasihat raja. Dalam struktur sosial dan budaya Pajang, hubungan harmonis antara ulama dan umara (penguasa) menjadi kunci suksesnya penyebaran Islam. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam berkembang dengan pesat di masa Pajang. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu dasar seperti membaca Al-Qur'an dan fikih, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, akhlak, dan pemahaman sufistik yang khas Jawa. Santri dari berbagai kalangan belajar di pesantren-pesantren ini dan menjadi agen dakwah ke berbagai daerah setelah menyelesaikan

[166] Camila, C., & Hudaidah, H. *Sejarah Kesultanan Pajang Masa Pemerintahan Sultan Hadiwijaya**: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah,*** (2022). 58–65.

pendidikannya. Kerajaan Pajang diketahui memberi perlindungan dan pengakuan terhadap pesantren dan para kiainya, yang membuat lembaga ini tumbuh kuat dalam masyarakat.[167]

Salah satu bentuk nyata kebijakan pendidikan Islam di masa Pajang adalah melalui hubungan erat antara kerajaan dengan wali-wali yang masih hidup saat itu, seperti Sunan Kalijaga dan penerus dari Sunan Kudus. Pengaruh para wali ini sangat besar dalam membentuk pendekatan dakwah yang halus dan beradaptasi dengan budaya lokal. Pendidikan Islam pada masa ini cenderung menghindari konflik dengan tradisi pra-Islam, namun tetap menyisipkan nilai-nilai tauhid dan syariat ke dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Pajang juga mencerminkan pola sinkretis yang menjadi ciri khas Islam di Jawa. Islam tidak dipaksakan secara frontal, melainkan disebarkan melalui pendekatan budaya, seni, dan bahasa. Hal ini terlihat dalam penggunaan tembang, wayang, serta simbol-simbol lokal dalam proses pembelajaran dan penyebaran ajaran Islam. Pendekatan ini efektif dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat yang masih memegang adat leluhur.[168]

Sayangnya, meskipun memiliki kontribusi penting, Kerajaan Pajang seringkali luput dari perhatian dalam kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Literatur yang ada lebih banyak menyoroti kerajaan besar lain seperti Demak, Mataram Islam, atau bahkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Padahal, masa transisi dari Demak ke Pajang adalah periode penting yang menunjukkan kesinambungan antara politik kekuasaan dan penyebaran ilmu agama melalui pendidikan.Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Pajang menjadi sangat penting. Melalui kajian ini, kita dapat memahami bahwa proses Islamisasi tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi juga melalui strategi pendidikan yang cerdas, akomodatif, dan berakar pada kearifan lokal. Kerajaan Pajang merupakan contoh nyata bagaimana sebuah kekuasaan bisa memfasilitasi pendidikan Islam dalam bentuk yang khas, yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan Islam di Jawa Tengah dan sekitarnya pada masa-masa selanjutnya.[169]

Pada tahun 1546, sultan Trenggana berusaha menguasai pelabuhan penarukan. Tiga bulan lamanya, sultan Trenggana memimpin pasukan Islam dari Demak berperang melawan penarukan yang mendapat bantuan dari Bali, dalam perang ini Sultan Trenggana memimpin

[167] Abdullah, M. A. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang: Pengaruhnya terhadap Masyarakat Jawa. *Jurnal Sejarah Pendidikan*, (2020). 123-135.

[168] Anwar, S. Peran Ulama dalam Kebijakan Pendidikan pada Kerajaan Pajang. *Sejarah Kebudayaan*, (2019). 100-115.

[169] Latifah, S. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang dan Dampaknya terhadap Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, (2018). 75-88.

pasukan Islam dari Demak berperang melawan penarukan yang mendapat bantuan dari Bali. Dalam perang ini sultan Trenggono tidak berhasil merebut Penarukan, bahkan ia sendiri wafat di Penarukan. Setelah wafatnya sultan Trenggana, kondisi kesultanan Demak jatuh dalam konflik istana dalam memperebutkan jabatan sultan. Akhirnya kesultana Demak mengalami kemunduran dan sebagai gantinya, maka lahirlah kesultanan Pajang di bawah pimpinan sultan HAdiwijaya alias Jaka Tingkir. Maka dari itu pemakalah akan membahas tentang kesultanan Pajang lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Pajang, baik dari aspek bentuk kebijakannya, tokoh-tokoh yang berperan, maupun dampaknya terhadap masyarakat Jawa kala itu. Kajian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah sejarah Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Islam tumbuh melalui jalur pendidikan dalam konteks budaya lokal.[170]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh). Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan agama, melainkan juga pembentukan karakter dan akhlak mulia sesuai nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian muslim yang utuh, yakni beriman, beramal saleh, berilmu, dan bermanfaat bagi sesama. Pendidikan Islam mengembangkan aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik, sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Dalam konteks historis, pendidikan Islam di Nusantara berkembang seiring masuknya Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab. Lembaga-lembaga tradisional seperti surau, pesantren, dan halaqah menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di masyarakat, membentuk jaringan sosial berbasis agama.[171]

[170] Widodo, H. Kajian Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang: Aspek Kebijakan dan Implementasinya. *Pendidikan Islam dan Sejarah*, (2022). 56-70.

[171] Azra, A. *Konsep Pendidikan Islam: Landasan Filosofis dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan*. ***Jurnal Pendidikan Islam***, (2018). Ha*l* 40.

2. Teori Pendidikan Islam di Era Kerajaan

Dalam masyarakat kerajaan, pendidikan Islam seringkali terintegrasi dalam sistem kekuasaan politik. Raja atau sultan memegang peranan strategis dalam penyebaran Islam, termasuk melalui pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan mendukung keberlangsungan ajaran Islam, baik melalui pembentukan institusi pendidikan, pemberdayaan ulama, hingga penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dijelaskan oleh Azyumardi Azra (2002), banyak kerajaan Islam di Nusantara yang menjadikan pendidikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan upaya penguatan identitas keislaman rakyatnya. Pendidikan berfungsi sebagai media untuk memperkuat struktur sosial-politik kerajaan berbasis syariat Islam. Dalam tradisi ini, penguasa bukan hanya pelindung agama, tetapi juga fasilitator utama dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.[172]

3. Teori Kerajaan Pajang

Kerajaan Pajang berdiri pada pertengahan abad ke-16, pasca runtuhnya Kesultanan Demak. Jaka Tingkir, yang bergelar Sultan Hadiwijaya, menjadi raja pertama Pajang. Kerajaan ini berlokasi di daerah pedalaman Jawa Tengah, tepatnya di sekitar wilayah Solo sekarang. Kerajaan Pajang memainkan peran penting dalam proses "interiorisasi Islam", yaitu membawa Islam dari daerah pesisir ke wilayah pedalaman Jawa. Jika sebelumnya pusat-pusat Islam banyak berkembang di wilayah pesisir (seperti Demak, Gresik, atau Cirebon), maka di era Pajang, Islam mulai berakar kuat di pedalaman Jawa, memperkuat posisi Islam di masyarakat agraris. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, Pajang juga harus bersaing dengan kekuatan-kekuatan lain, seperti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masih bertahan di beberapa wilayah, serta kekuatan Islam baru yang mulai tumbuh seperti Mataram Islam[173]

[172] Safitri, E. Kebijakan Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Peranannya dalam Penyebaran Islam di Jawa. *Pendidikan Islam Nusantara*, (2021). 44-60.

[173] Mulyadi, R. Pendidikan Islam pada Kerajaan Pajang: Sebuah Tinjauan Historis. *Sejarah Peradaban Islam*, (2021). 44-59.

4. Teori Kebijakan Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang

Kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dilakukan secara tidak langsung namun terstruktur melalui beberapa strategi, antara lain:

a. Perlindungan dan Patronase terhadap Ulama

Kerajaan Pajang memberikan perlindungan terhadap ulama-ulama besar dan mengangkat mereka dalam posisi strategis di pemerintahan, seperti sebagai penghulu, mufti, atau penasihat raja. Ulama ini tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam proses legislasi hukum berbasis syariat. Hubungan harmonis antara raja dan ulama mendorong berkembangnya jaringan pesantren dan majelis ilmu di wilayah Pajang. Para ulama, dengan dukungan politik dari istana, mampu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran agama Islam[174]

b. Pendukung Lembaga Pendidikan Tradisional

Meskipun belum berbentuk madrasah modern, Kerajaan Pajang mendukung pertumbuhan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren di masa ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dasar seperti fikih, akidah, dan tasawuf, tetapi juga mengajarkan bahasa Arab, ilmu hisab, dan bahkan keterampilan sosial untuk kehidupan bermasyarakat. Pesantren menjadi institusi penting dalam membangun kader-kader muslim yang kelak menjadi ulama, qadi, mufti, atau pemimpin masyarakat Islam.

c. Penyebaran Nilai Islam melalui Budaya Lokal

Strategi kebijakan pendidikan di Pajang juga mencakup akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Jawa lokal. Nilai-nilai Islam disebarkan melalui seni pertunjukan, sastra, serta upacara tradisional yang diislamisasi. Metode ini memudahkan penerimaan Islam dalam masyarakat agraris yang masih sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya terjadi di dalam lembaga formal seperti pesantren, tetapi juga meresap dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pajang.[175]

---

[174] **Zamakhsyari Dhofier.** *Peran Kyai dalam Mempertahankan Lembaga Pendidikan Pesantren*. **Jurnal Pesantren Nusantara**, (2019). 112–126.

[175] Jamil, M. Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Dampaknya pada Perkembangan Islam di Jawa. *Pendidikan Agama Islam*, . (2021). 134-145.

d. Penguatan Syariat dalam Kehidupan Masyarakat

Kerajaan Pajang juga mulai menerapkan unsur-unsur syariat Islam dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Penerapan hukum Islam sederhana seperti hukum nikah, waris, dan muamalah memperlihatkan bahwa pendidikan agama tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi diimplementasikan dalam praktik sosial. Ulama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan berperan memberikan pendidikan hukum Islam kepada masyarakat melalui khutbah, ceramah, dan fatwa.

e. Peran Strategis Pendidikan dalam Politik Kerajaan

Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang bukan hanya bertujuan membina individu secara spiritual, tetapi juga memperkuat legitimasi politik kerajaan. Melalui pendidikan agama, Sultan Hadiwijaya membentuk masyarakat yang loyal terhadap kerajaan dan patuh terhadap nilai-nilai Islam yang sejalan dengan kekuasaan. Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi instrumen penguatan identitas politik Islam di wilayah Jawa Tengah, sekaligus membangun peradaban berbasis nilai-nilai tauhid, keadilan, dan keilmuan.[176]

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Kesultanan Pajang

Wilayah ini di akhir abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Pajang, yaitu Jaka tingkir telah dibedah kembali olch seorang Panglima Pajang "Ki Gede Ngenis" yang kemudian popular dengan Ki Pemanahan dengan suatu misinya untuk memasukan wilayah tersebut ke dalam pengaruh Islam dibawah panji kerajaan Pajang. Wilayah Mataram dianugrahkan Sultan Pajang kepada Ki Gede Ngenis beserta puteranya, yang kelak menjadi Panembahan Senopati, atas jasa mereka dalam ikut serta melumpuhkan Aria Penangsang di Jipang Panolan. Ki Pamanahan disinyalir sebagai penguasa Mataram yang patuh dan taat kepada Sultan Pajang, la mulai naik tahta di istananya yang baru di Kotagede pada tahun 1577 M sampai tutup usianya di tahun 1584.[177]

Selama pemerintahan Jaka Tingkir, kesusastraan dan kesenian kraton yang sudah maju peradabannya di demak dan jepara, lambat laun dikenal di pedalaman jawa tengah. Berkat ajaran tokoh legendaris Syaikh Stiti Jenar, agama islam juga tersebar di

[176] Fajar, H. Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang: Antara Teori dan Praktik. *Sejarah Islam Nusantara*, . (2021). 90-104.

[177] Muhamad Ikmal. Peran Jaka Tingkir Dalam Peralihan Kerajaan Demak ke Pajan. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1 SPI, 2023: hal 35-37.

Pengging. Diberitakan bahwa hubungan keagamaan antara keratin Pajang dengan masyarakat santrinya yang telah dibentuk oleh ulama dari Semarang. Di samping masalah keagamaan, di pajang juga terdapat tulisan tentang sajak monolistik Jawa yang dikenal dengan Niti Sruti. Sajak tersebut ditulis oleh pujangga Pajang, pangeran Karang Gayam. Pada masa kesultanan Pajang, kesusastraan Jawa juga dihayati dan dihidupkan di Jawa Tengah bagian selatan. Selanjutnya, kesusastraan Jawa di Pedalaman berkembang pada masa Mataram.[178]

Setelah Jaka Tingkir meninggal dunia pada tahun 1587, para penggantiya tidak dapat mempertahankan pemerintahannya. Ahli waris sultan pajang ialah tiga orang putra menantu yaitu raja Tuban, raja di Demak, dan raja di Araos Baya, di samping putranya sendiri. Pangeran Benawa, yang konon masih sangat muda. Oleh karena itu dia disingkirkan oleh Arya Pangiri (dari demak) dan dijadikan adipati di Jipang. Sebagai pemimpin Pajang adalah Arya Pangiri. Temyata, tindakan-tindakannya banyak yang merugikan rakyat sehingga menimbulkan rasa tidak senang di mana-mana. Keadaan semacam itu dimanfaatkan oleh pangeran Benawa untuk merebut kembali kekuasaaannya. Usahanya berhasil, sesudah terjadi pertempuran singkat pada tahun 1588. Selanjutnya, Arya Pangiri dikembalikan ke demak. Kemenangan tersebut atas peran senopati mataram yang dianggapnya sebagai kakak. Namun, baru satu tahun memerintah, dia wafat. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa dia meninggalkan Pajang, menuju Parakan (kedu).

Setelah itu, pemerintah Pajang banyak dikendalikan oleh orang-orang mataram. Buktinya, senopati mataram mengangkat Gagak Bening, yang memerintah sampai dengan tahun 1591. Senopati Mataram mengendalikan Pajang sampai dengan tahun 1618. Setelah wafat Gagak Bening diganti putranya, Ngabehi Loring Pasar, yang kemudian diberi gelar oleh Sultan Pajang sebagai Senopati Ing Alaga Sayidin Panatagama atau mashur dengan Panembahan Senopati.[179]

Berbeda dengan ayahnya, yang menempuh jalan patuh sebagai kerajaan bawahan Pajang, ia dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai raja bawahan dengan tidak seba atau sowan tahunan terhadap raja Pajang. Konsekuensinya akhirnya raja pajang memutuskan untuk menyelesaikan pembangkangan Mataram dengan jalan

[178] **Rohman, T.** *Jejak Kebudayaan dan Pendidikan Islam di Masa Kesultanan Pajang*. ***Jurnal Warisan Islam Nusantara*****,** (2021). 88–102.

[179] Camila, Chinanti Safa, and Hudaidah Hudaidah. "Sejarah Kesultanan Pajang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya (1549-1582)." SINDANG: *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah* 4.1 (2022): 58-65.

kekerasan dan kekuatan senjata. Ekspedisi penyerbuan dibawah komando Sultan Pajang sendiri itu mengalami kegagalan karena bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi yang mengakibatkan bercerai berainya prajurit Pajang. Beberapa saat kemudian, sekembalinya dari ekspedisi yang gagal itu, Sultan Pajang meninggal dunia. Momentum ini dimanfaatkan oleh panembahan Senopati untuk memproklamasikan dirinya sebagai penguasa di seluruh Jawa.[180]

Pengambil alihan kekuasaan kraton Islam di Jawa Tengah oleh Sultan Pajang tidak menimbulkan keguncangan di pasuruan maupun di Jawa Timur lainnya. Ketika tahun 1581 Sultan Pajang diakui sebagai Sultan oleh Sunan Prapen dari Giri dalam suatu rapat Adipati Jawa Timur, Adipati Pasuruan hadir juga. Ada dugaan bahwa penyatuan kekuasaan politik raja-raja Islam jawa Tengah dan jawa Timur di bawah pimponan pemuka agama dari Giri dan Sultan Pajang juga bertujuan mengatasi ancaman raja-raja di ujung timur Jawa yang dibantu oleh Dewa Agung dari Bali. Adipati Pasuruan, yang tlatahnya hamper berbatasan langsung dengan Blambangan, mempunyai alasan kuat untuk mengusahakan persahabatan dengan raja-raja Islam lainnya. Sultan Pajang memang juga menguasai tlatah Pasuruan.[181]

Sebagaiaman disebutkan diatas, menjelang keruntuhan pemerintahan pajang, orang-orang mataram sudah memainkan peran penting disana. Peran tersebut diawali tatkala senopati, anak Kiai Ageng Pamanahan (teman adiwijaya) yang dapat membunuh Aria Panangsang, mendapat gelar panembahan (bupati) mataram. Setelah aria panangsang meninggal pada tahun 1558, orang-orang sela menerima daerah pati dan Daerah mataram sebagai hadiah bagi jasa yang telah mereka berikan.

2. Kebijakan Apa Saja Yang Terkait Pada Pendidikan Islam

a. Mendorong Pendirian Pesantren

Kerajaan Pajang menunjukkan dukungannya terhadap pendidikan Islam dengan memberikan kebebasan bagi para ulama untuk mendirikan pesantren di berbagai wilayah kekuasaannya. Pesantren pada masa itu menjadi pusat utama pendidikan Islam, di mana para santri tidak hanya mempelajari ilmu agama seperti fikih, tauhid, dan tafsir, tetapi juga diajarkan kedisiplinan dan nilai-nilai moral. Bentuk dukungan ini ditunjukkan melalui pemberian lahan, jaminan keamanan, dan

[180] Maulana, Dede. "Peran Jaka Tingkir dalam merintis Kerajaan Pajang, (2015):1546-1586.
[181] Basyir, H. . Kerajaan Pajang dan Sistem Pendidikan Islam di Jawa. *Pendidikan Sejarah*, . (2020). 58

legitimasi sosial bagi para kyai sebagai pemimpin spiritual dan pendidik. Pesantren menjadi sarana penting dalam membentuk generasi Muslim yang cerdas dan bermoral, sekaligus memperkuat pengaruh Islam di wilayah pedalaman Jawa.[182]

b. Memberikan Status dan Penghormatan kepada Ulama

Pemerintahan Sultan Hadiwijaya dikenal sangat menghormati posisi ulama dalam struktur masyarakat. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual dan penjaga nilai-nilai keislaman. Dengan memberikan kedudukan yang tinggi kepada para ulama, kerajaan secara tidak langsung meningkatkan otoritas mereka dalam mendidik masyarakat. Ulama menjadi tokoh sentral yang dipercaya dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan, baik secara formal di pesantren maupun melalui ceramah dan majelis taklim di berbagai lapisan masyarakat.[183]

c. Menjadikan Ulama sebagai Penasehat Raja

Salah satu kebijakan penting dalam konteks pendidikan Islam adalah pengangkatan ulama sebagai penasehat kerajaan. Peran mereka dalam istana memberikan pengaruh yang kuat terhadap arah kebijakan kerajaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan duduknya ulama di lingkaran kekuasaan, ajaran Islam dan prinsip-prinsip moral dapat masuk dalam kebijakan kenegaraan. Kehadiran mereka juga memungkinkan adanya sinergi antara kekuasaan politik dan pendidikan agama, menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembangnya pendidikan Islam.

d. Mengintegrasikan Islam dengan Budaya Lokal

Kerajaan Pajang melanjutkan pendekatan para Wali Songo dalam mengajarkan Islam dengan menggunakan budaya lokal sebagai media pendidikan. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui seni pertunjukan seperti wayang kulit, tembang macapat, dan gamelan. Media budaya ini dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai keislaman dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Pendekatan ini berhasil menarik minat masyarakat dan menjadi

---

[182] Hafid, A. *Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam*, (2020). 23–36.

[183] Zamroni. (2019). *Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Historis di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* (2019). *112–125.*

metode pendidikan yang efektif karena tidak bertabrakan dengan budaya asli, melainkan menyelaraskan ajaran Islam dengan kearifan lokal.[184]

e. Membangun Masjid Sebagai Pusat Pembelajaran

Masjid di era Kerajaan Pajang tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah, tetapi juga difungsikan sebagai pusat kegiatan keilmuan dan pendidikan. Di masjid-masjid inilah diselenggarakan pengajian rutin, halaqah, dan diskusi keagamaan. Para ulama dan kyai mengajar ilmu agama kepada masyarakat dari berbagai lapisan sosial, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Dengan demikian, masjid berperan sebagai sekolah terbuka yang memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan Islam, bahkan bagi mereka yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal di pesantren.

f. Mendorong Dakwah Keliling oleh Ulama dan Santri

Kerajaan Pajang mendorong para ulama dan santri untuk melakukan kegiatan dakwah keliling (tabligh) ke daerah-daerah pelosok yang belum sepenuhnya mengenal Islam. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ceramah, tetapi juga mencakup pengajaran dasar-dasar Islam kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini, para dai membawa serta kitab-kitab keagamaan dan mengadakan pengajian di rumah-rumah warga. Kegiatan dakwah ini berfungsi sebagai pendidikan non-formal yang berperan penting dalam memperluas jangkauan ajaran Islam dan memperkokoh pemahaman masyarakat terhadap agamanya.[185]

g. Penerapan Hukum Islam dalam Kehidupan Sosial

Kerajaan Pajang mulai menerapkan beberapa aspek hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam urusan pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa. Penerapan ini tidak hanya menciptakan sistem hukum yang adil dan berbasis nilai agama, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip syariat Islam. Masyarakat diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan nilai-nilai Islam, sehingga kehidupan sosial mereka sekaligus menjadi sarana pembelajaran keagamaan yang praktis.

h. Memberikan Perlindungan Terhadap Kegiatan Keagamaan

---

[184] **Lubis, M.** *Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Maulid di Bugis-Makassar*. ***Jurnal Al-Adabiya,*** (2021*).* 15(2), 88–102.

[185] **Herlambang, D.** *Relasi Kesultanan Pajang dan Islamisasi Pedesaan di Jawa Tengah*. ***Jurnal Tamaddun,*** (2021*).* 91–106.

Kerajaan Pajang menjamin keamanan dan kebebasan bagi kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Ini termasuk perlindungan terhadap pesantren, masjid, dan para ulama dari ancaman pihak-pihak yang menentang Islam atau ingin mengganggu ketertiban. Perlindungan ini memungkinkan proses pendidikan Islam berlangsung dengan tenang dan berkesinambungan. Dengan suasana yang aman dan stabil, para guru agama dapat fokus mengajar, dan masyarakat pun lebih antusias mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kerajaan Pajang Terhadap Masyarakat Pada Masa Itu

Kebijakan pendidikan Islam pada Kerajaan Pajang merujuk pada serangkaian langkah, dukungan, dan keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah Kerajaan Pajang dalam rangka mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam melalui jalur pendidikan. Kebijakan ini mencakup pemberian peran kepada para ulama dalam pemerintahan, pendirian dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan seperti pesantren, serta penyebaran ilmu keislaman kepada masyarakat melalui metode formal dan non-formal. Pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai proses transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan tata nilai masyarakat Muslim.[186]

Sebagai kerajaan Islam yang meneruskan peran Kesultanan Demak, Kerajaan Pajang memiliki komitmen untuk memperkuat ajaran Islam di wilayah kekuasaannya, terutama di daerah pedalaman Jawa. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam di Kerajaan Pajang bersifat inklusif dan adaptif terhadap budaya lokal. Hal ini terlihat dari cara ajaran Islam diajarkan melalui kesenian tradisional, pengajian umum, serta pembelajaran kitab-kitab klasik di lingkungan pesantren. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi urusan individu atau komunitas tertentu, tetapi juga mendapat perhatian serius dari struktur kekuasaan negara.

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Kerajaan Pajang membawa dampak besar terhadap masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, sosial, maupun budaya. Melalui kebijakan tersebut, pendidikan Islam tumbuh menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Jawa kala itu. Tradisi keilmuan Islam yang dimulai sejak masa Pajang turut menjadi warisan penting yang dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan

[186] **Sulaiman, T.** *Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Dampaknya terhadap Masyarakat Jawa*. ***Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam,*** (2019). 65–80.

sesudahnya, seperti Mataram Islam. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Pajang menjadi bagian dari sejarah panjang pendidikan Islam di Nusantara yang bersifat dinamis, kontekstual, dan berpengaruh hingga hari ini. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak kebijakan pendidikan Islam Kerajaan Pajang terhadap masyarakat pada masa itu:[187]

a. Tumbuhnya Kesadaran Keagamaan di Kalangan Masyarakat

   Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan Kerajaan Pajang mendorong masyarakat, khususnya di pedalaman Jawa, untuk mengenal dan memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Melalui kegiatan dakwah, pesantren, dan pengajian, masyarakat mulai memahami ajaran Islam tidak hanya sebagai agama ritual, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mengatur etika, sosial, dan hukum.

b. Lahirnya Generasi Ulama dan Cendekiawan Muslim Lokal

   Dengan maraknya pendidikan Islam, terutama melalui pesantren, banyak santri yang kemudian tumbuh menjadi ulama atau tokoh agama lokal yang berperan penting dalam masyarakat. Mereka tidak hanya melanjutkan tradisi pendidikan Islam, tetapi juga menjadi agen penyebaran Islam di daerah-daerah baru, bahkan setelah runtuhnya Kerajaan Pajang.[188]

c. Integrasi Islam ke Dalam Struktur Sosial dan Budaya Jawa

   Kebijakan integrasi nilai Islam dengan budaya lokal—seperti melalui wayang, tembang, dan gamelan—membuat Islam diterima tanpa konflik besar dengan adat istiadat setempat. Ini menjadikan Islam sebagai bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, bukan sebagai sesuatu yang asing. Hasilnya adalah masyarakat yang Islami namun tetap memiliki identitas budaya yang kuat.

d. Terbentuknya Lembaga-lembaga Pendidikan Tradisional

   Penerapan kebijakan pendidikan Islam turut melahirkan sistem pendidikan berbasis pesantren yang menjadi ciri khas pendidikan Islam di Nusantara. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertahan pada masa Kerajaan Pajang, tetapi juga menjadi warisan yang berkembang pesat pada masa Mataram Islam hingga sekarang.

---

[187] **Sari, L.** *Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam Kerajaan Pajang terhadap Struktur Sosial di Jawa*. ***Jurnal Studi Islam dan Budaya***, (2018). 33–48.

[188] Nasution, A. Strategi Pendidikan Islam pada Kerajaan Pajang dan Pengaruhnya terhadap Islam di Jawa Tengah. *Islam dan Pendidikan*, (2022). 123-136.

e. Munculnya Perubahan Sosial Berbasis Nilai Islam

Pendidikan Islam turut memengaruhi tatanan sosial masyarakat, terutama dalam cara berpikir, berperilaku, dan menyeleaikan masalah. Masyarakat mulai terbiasa dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan persaudaraan dalam Islam. Ini membawa perubahan dalam norma sosial, seperti dalam hukum keluarga, warisan, dan etika pergaulan.[189]

f. Meningkatnya Literasi Keagamaan

Dengan berkembangnya lembaga pendidikan dan kegiatan pengajian, masyarakat mulai terbiasa membaca dan mempelajari kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang ditulis dalam bahasa Arab dan Pegon (Jawa-Arab). Ini menumbuhkan budaya literasi keagamaan yang kuat, terutama di kalangan santri dan masyarakat pesantren.

g. Stabilitas Sosial dan Politik yang Relatif Terjaga

Kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam turut menjaga ketertiban sosial dan memperkuat legitimasi kekuasaan Sultan Hadiwijaya di mata rakyat. Karena nilai-nilai moral Islam diajarkan secara luas, masyarakat cenderung lebih tertib, taat hukum, dan menghargai pemimpin yang adil.

4. Runtuhnya kerajaan Pajang

Kerajaan Pajang mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), yang berhasil memindahkan pusat kekuasaan Islam dari pesisir (Demak) ke pedalaman Jawa (Pajang). Namun setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582 M, kekuatan politik Pajang mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utama keruntuhan ini adalah tidak adanya sistem suksesi yang kuat dan stabil, yang memicu perebutan kekuasaan di antara para bangsawan dan tokoh-tokoh istana.[190]. Putra Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benawa, sebenarnya ditunjuk sebagai penerus tahta. Namun, pada masa transisi ini muncul sosok Arya Pangiri, menantu Sultan Trenggana dari Demak, yang mengklaim memiliki hak atas kekuasaan Pajang. Arya Pangiri bahkan berhasil merebut tahta dan memerintah sebagai raja Pajang. Akan tetapi, masa pemerintahannya tidak mendapat dukungan penuh dari

[189] Prasetyo, W. Kerajaan Pajang dan Pendidikan Islam: Sebuah Perspektif Historis. *Pendidikan Sejarah Islam*, (2020). 67-80.

[190] Supardi, Agus. "Peran Ki Juru Martani dalam Runtuhnya Kerajaan Pajang." *Jurnal Budaya dan Sejarah*, Vol. 3, No. 1. (2015). hal. 70–82.

kalangan bangsawan dan rakyat, karena dianggap lemah dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.[191]

Ketidakstabilan internal ini memperlemah posisi Pajang secara keseluruhan, terutama di tengah munculnya kekuatan baru, yaitu Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya. Sebelumnya, Mataram adalah wilayah bawahan Pajang yang diberikan kepada Sutawijaya sebagai bentuk penghargaan. Namun, seiring berjalannya waktu, Sutawijaya memperkuat basis kekuasaannya dan mulai menunjukkan ambisi untuk berdiri sendiri sebagai kerajaan yang merdeka. Melihat lemahnya kepemimpinan Arya Pangiri, Pangeran Benawa kemudian merebut kembali tahta dengan bantuan Danang Sutawijaya. Namun setelah berhasil naik takhta kembali, Pangeran Benawa menyadari bahwa kekuatan Pajang sudah tidak sekuat dulu. Di sisi lain, Mataram semakin solid dan memiliki pengaruh besar, baik secara militer maupun spiritual. Pangeran Benawa pun merasa tidak mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang.

Dalam kondisi ini, Pangeran Benawa mengambil keputusan besar: menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya, yang kemudian mendirikan Kesultanan Mataram Islam secara resmi. Penyerahan ini menandai berakhirnya eksistensi Kesultanan Pajang sebagai kerajaan Islam yang berdiri sendiri. Dengan demikian, Mataram menjadi pusat kekuasaan Islam yang baru di tanah Jawa, dan Pajang hanya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan tersebut.[192] Runtuhnya Kerajaan Pajang mencerminkan bagaimana faktor internal seperti konflik suksesi dan lemahnya kepemimpinan dapat mempercepat kemunduran suatu kerajaan. Selain itu, munculnya kekuatan baru yang lebih visioner dan terorganisir seperti Mataram menjadi faktor eksternal yang mempercepat transisi kekuasaan. Pajang tidak mampu beradaptasi dalam dinamika politik dan sosial yang berubah dengan cepat.

Sultan Adiwijaya meninggal pada 1587. Kemudian dimakamkan di Butuh, yang terletak tidak jauh di sebelah barat taman Kerajaan Pajang. Makam itu hingga kini masih dikenal sebagai Makam Aji. Sepeninggalan Sultan Adiwijaya pada 1587, kerajaan Pajang ditaklukan oleh negara bawahannya, mataram. Keterangan mengenai hal ini

[191] **Sunarto, A.** *Runtuhnya Kesultanan Pajang: Analisis Politik dan Perebutan Kekuasaan Abad ke-16*. ***Jurnal Sejarah Islam Nusantara,*** (2019). 55–70.

[192] Ahmad Rofi Usman, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Citra dan Fakta*. Bandung: Pustaka Setia (2015). hal 45-47.

pada umumnya hanya terdapat dalam buku-buku babad, terutama Babad Tanah Jawi, yang ditulis oleh para pujangga Mataram satu abad kemudian.

Mudah dipahami apabila banyak keterangan-keterangan yang lebih memihak kepada mataram, namun bahwa pertengahan terakhir abad ke-16 para sultan Pajang hanyalah berkedudukan sebagai raja bawahan dari kerajaan mataram adalah pasti. Sesudah sultan Adiwijaya masih ada lima raja lagi yang berturut-turut memerintah di Pajang. Ahli waris pertama kerajaan Pajang ialah tiga putra menantu Sultan, yakni Raja di Tuban, Raja di Demak dan raja di Arisbaya, disamping putranya sendiri, pangeran Banawa, yang masih sangat muda ketika ayahnya meninggal dunia. Dalam hubungan ini Sunan Kudus menggunakan wibawa kerohaniannya untuk mengangkat Aria Pangiri, anak susuhunan Prawoto yang terbunuh, Raja Demak untuk menggantikan sebagai raja pajang. Jelas usaha ini dimaksudkan untuk mengembalikan kekuasaan kesultanan Islam di jawa kepada keturunan langsung dari Demak. Namun Aria Pangiri sebagai sultan kedua di Pajang tidaklah berlangsung lama. la berhasil disingkirkan dan dikembalikan ke Demak oleh Pangeran Banawa dengan dukungan Senapati dari Mataram.[193]

Menurut Babad Mataram Pangeran Banawa menyerahkan hak waris kerajaanya kepada Senapati Mataram yang dianggapnya sebagai kakak. Tetapi Senapati ingin tetap tinggal di Mataram dan ia hanya minta perhiasan emas intan kerajaan Pajang. Pangeran Banawa dikukuhkan sebagai raja Pajang di bawah perlindungannya. Hanya setahun saja Pangeran Banawa menjadi raja kemudian ia meninggalkan kerajaan untuk membaktikan diri pada agama di Parakan (daerah Kedu utara). Oleh Senapati Pajang dipercayakan kepada seorang Pangeran muda dari Mataram, Gagak Bening. Pangeran ini banyak melakukan perombakan dan perluasan istana Pajang.[194].

Sebagai penggantinya ditunjuk putra Pangeran Banawa, cucu almarhum Sultan Adiwijaya. Pangeran Banawa II ini masih sangat muda ketika mulai memerintah. Pada masa-masa pemerintahan raja-raja mataram berikutnya seperti pada masa Panembahan Seda-ing-Krapyak, Pangeran Banawa II ini juga tanpa mengalami kesulitan yang besar dalam meemrintah. Namun pemberontakan Pajang terhadap Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung telah mengancurkan Pajang untuk selama-lamanya. Pemberontakan ini terjadi pada 1617-1618 dan memperoleh dukungan dari pihak-pihak

[193] Damar Shashangka. *Babad Tanah Jawi: Kisah Para Wali dan Raja-Raja Jawa.* Yogyakarta: Narasi: (2015). Hal 190-195.

[194] **Zamzami, F.** *Sultan Hadiwijaya dan Masa Akhir Kesultanan Pajang: Kajian Historiografis*. ***Jurnal Sejarah Islam dan Budaya Jawa***, (2022). 38–51.

yang tidak puas di Mataram. Pmberontakan Pajang ini mudah dipahami pula, karena secara ekonomis Pajang senantiasa ditekan, dahulu oleh Demak dan sekarang oleh Mataram. Menurut catatan VOC pemberontakan itu terjadi pada masa musim kering yang luar biasa hebatnya yang berlangsung dari tahun 1618-1624. Sebagai hukuman atas pemberontakan yang berupa tidak mau menyetorkan hasil berasnya kepada Mataram, sawah-sawah di Pajang yang padinya sedang menguning dibakar habis oleh pasukan Mataram. Para petani yang terlibat dalam pemberontakan itu kemudian diangkut secara paksa ke Mataram. Tenaga mereka dimanfaatkan dalam pembangunan kraton baru di Plered yang letaknya 1 km sebelah timur laut ibukota Mataram yang lama. Sesudah itu Pajang tidak lagi berarti baik politik ataupun ekonomi.[195]

D. KESIMPULAN

Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam awal di Jawa yang melanjutkan estafet dakwah dan pendidikan Islam setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), Pajang tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat perkembangan ajaran Islam, terutama melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang didukung oleh istana dan ulama.

Kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Pajang bersifat inklusif dan akomodatif terhadap budaya lokal. Pendidikan lebih banyak dilakukan secara nonformal melalui pesantren, langgar, dan majelis taklim yang dipimpin oleh para ulama dan tokoh masyarakat. Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, tauhid, fikih, dan akhlak, proses pendidikan juga diarahkan untuk membentuk moral dan karakter islami masyarakat.

Peran kerajaan dalam mendukung ulama dan pendakwah sangat besar. Para ulama diberi posisi penting dan dihormati di masyarakat, bahkan kerap dijadikan penasihat raja. Selain itu, ajaran Islam juga disebarluaskan melalui pendekatan budaya, seperti wayang kulit yang diisi nilai-nilai Islami, gamelan, dan sastra Jawa bernapaskan tasawuf. Pendekatan ini membuat dakwah dan pendidikan Islam diterima luas oleh rakyat tanpa menimbulkan konflik budaya.

Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan. Kerajaan Pajang berhasil melahirkan banyak ulama lokal dan cendekiawan Muslim yang berpengaruh di wilayah Jawa Tengah

[195] **Kusuma, D.** *Keruntuhan Kesultanan Pajang dan Bangkitnya Kesultanan Mataram Islam*. ***Jurnal Pendidikan Sejarah Islam,.*** (2019). 70–84.

dan sekitarnya. Pendidikan Islam juga mendorong terbentuknya masyarakat yang religius, beretika, dan memiliki semangat keilmuan tinggi. Perkembangan ini menjadi pondasi penting bagi munculnya kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, seperti Mataram Islam.

BAB VII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KERAJAAN MATARAM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peranan penting dalam membentuk peradaban dan karakter masyarakat muslim di Nusantara. Salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia adalah masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-16 hingga 18, Kerajaan Mataram tidak hanya dikenal melalui kekuatan militernya, tetapi juga melalui kontribusinya dalam bidang keagamaan dan pendidikan.

Dalam konteks sosial-politik, Kerajaan Mataram Islam memainkan peran strategis dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren, masjid, dan surau, ajaran Islam disebarluaskan kepada masyarakat secara sistematis. Pemerintah kerajaan turut mengambil peran dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan dengan menjalin kerja sama dengan para ulama dan tokoh agama. Ini menunjukkan adanya kebijakan tersirat maupun tersurat yang mendukung pendidikan Islam sebagai bagian dari pembangunan spiritual dan intelektual masyarakat.

Namun, hingga saat ini, kajian tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram masih terbatas dan kurang mendapatkan perhatian secara menyeluruh. Padahal, memahami bagaimana pemerintah kerajaan mengelola, mendukung, dan mengembangkan pendidikan Islam pada masanya dapat memberikan pelajaran penting bagi pengembangan sistem pendidikan Islam di era modern. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengungkap dan menganalisis kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Kerajaan Mataram Islam dalam bidang pendidikan Islam serta implikasinya terhadap masyarakat pada masa itu.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang bertujuan membina dan mengembangkan seluruh potensi manusia secara seimbang, mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik, berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Beberapa tokoh pendidikan Islam memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam jiwa peserta didik agar mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, pendidikan Islam bertujuan menanamkan *adab*, yaitu perilaku dan tata nilai yang benar, sehingga manusia dapat mengenali dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk insan kamil, yaitu manusia paripurna yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam bukan hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat.

Dalam praktiknya, pendidikan Islam melibatkan tiga unsur utama, yaitu:

a. Pendidik (guru/ulama) – yang tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi teladan.
b. Peserta didik (murid/santri) – yang memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menerima ilmu.
c. Lingkungan atau lembaga pendidikan – seperti rumah, masjid, dan pesantren, yang merupakan tempat proses pendidikan berlangsung.

Seiring perkembangan sejarah, pendidikan Islam berkembang secara institusional melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan halaqah. Pada masa Kerajaan Mataram Islam, lembaga-lembaga ini mendapatkan dukungan dari pemerintah kerajaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para raja menjalin hubungan erat dengan para ulama dan tokoh agama untuk memperkuat posisi Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Dengan demikian, teori pendidikan Islam menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana kebijakan pendidikan dijalankan pada masa Kerajaan Mataram Islam, terutama dalam konteks penguatan keagamaan, pelestarian budaya lokal, dan pembentukan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

2. Teori Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur jalannya proses pendidikan. Menurut Anderson (2003), kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, adalah suatu arah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan publik. Dalam kerajaan tradisional seperti Mataram Islam, kebijakan pendidikan biasanya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap lembaga pendidikan tradisional, pembinaan ulama, dan penyebaran nilai-nilai keislaman.

3. Teori Peran Negara dalam Pendidikan

Menurut teori ini, negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengarahkan, dan mendukung proses pendidikan demi kemaslahatan rakyat. Dalam sistem kerajaan, peran ini sering diambil langsung oleh raja sebagai pemimpin spiritual dan politik. Dalam Kerajaan Mataram, raja-raja seperti Sultan Agung berperan dalam memperkuat lembaga keagamaan dan mendorong penyebaran ajaran Islam sebagai bagian dari strategi politik dan integrasi sosial.

C. PEMBAHASAN

Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Berdirinya kerajaan ini menandai babak baru dalam proses Islamisasi di kawasan pedalaman Jawa yang sebelumnya lebih didominasi oleh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha seperti Majapahit. Mataram Islam berkembang menjadi kekuatan politik, budaya, dan spiritual yang besar, serta menjadi pusat penyebaran agama Islam yang berpengaruh di Tanah Jawa.

1. Asal Usul dan Berdiri Kerajaan

Cikal bakal Kerajaan Mataram Islam berasal dari daerah Pajang, sebuah kerajaan Islam yang muncul setelah keruntuhan Demak. Seorang tokoh penting bernama Ki Ageng Pemanahan, yang merupakan keturunan tokoh spiritual terkenal Ki Ageng Sela, mendapat hadiah wilayah Mataram dari Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), raja Kerajaan Pajang, atas jasanya membantu menumpas pemberontakan. Putranya, Danang Sutawijaya, kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati, mendirikan kerajaan Mataram dan mulai melepaskan diri dari kekuasaan Pajang sekitar tahun 1586.

Panembahan Senopati adalah tokoh awal yang merumuskan dasar-dasar pemerintahan Mataram sebagai kerajaan Islam. Meski belum menyandang gelar "Sultan", ia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan menjalin hubungan baik dengan para ulama serta tokoh-tokoh tarekat. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang menyatukan unsur kekuasaan politik, spiritualitas Islam, dan budaya Jawa.[196]

a. Masa Kejayaan di Bawah Sultan Agung

Puncak kejayaan Kerajaan Mataram Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613–1645). Ia adalah raja pertama Mataram yang secara resmi menggunakan gelar “Sultan”, menandakan pengakuan terhadap posisi religiusnya dalam sistem kerajaan. Di bawah pemerintahannya, Mataram berhasil memperluas wilayah hingga mencakup sebagian besar Pulau Jawa, termasuk wilayah pesisir yang semula dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam pesisir seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya.

Sultan Agung dikenal sebagai raja yang visioner dan religius. Ia berusaha menyatukan kekuasaan politik dengan dakwah Islam. Salah satu kebijakannya yang paling terkenal adalah penyusunan kalender Jawa Islam yang menggabungkan sistem kalender Hijriyah (Islam) dengan kalender Saka (Hindu-Jawa), sebagai simbol penyatuan antara tradisi Islam dan budaya lokal. Selain itu, ia juga banyak mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam dengan mempererat hubungan antara kerajaan dan para ulama.[197]

---

[196] Muchlas, S., *Sejarah Pendidikan Islam di Nusantara*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45217–45223 (2024).

[197] Detik.com, *Kerajaan Mataram Islam: Sejarah, Pendiri, Kejayaan-Keruntuhan*, 19 Mei 2023.

b. Karakteristik Kerajaan dan Budaya Islam

Kerajaan Mataram Islam memiliki karakteristik yang khas, yakni sinkretisme antara Islam dan tradisi kejawen. Meskipun ajaran Islam menjadi dasar kehidupan masyarakat, pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan budaya lokal yang telah mengakar kuat. Hal ini tidak serta-merta mengurangi nilai keislaman, justru menjadi jembatan dalam menyebarkan Islam secara damai dan kontekstual kepada masyarakat Jawa yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional.

Tradisi Islam yang berkembang di Mataram sangat dipengaruhi oleh peran pesantren, masjid, dan para ulama, terutama dari kalangan tarekat. Pesantren menjadi pusat pendidikan Islam dan tempat pengkaderan tokoh-tokoh agama yang kelak menjadi penyebar Islam ke pelosok Jawa. Kerajaan, dalam hal ini Sultan Agung dan para penerusnya, memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga ini, baik secara langsung maupun melalui perlindungan politik.

c. Hubungan dengan Kolonial dan Masa Kemunduran

Meskipun Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung, tantangan besar muncul ketika kerajaan mulai menghadapi tekanan dari VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) atau Kongsi Dagang Belanda. Usaha Sultan Agung untuk menyerang Batavia (markas VOC) pada tahun 1628 dan 1629 mengalami kegagalan, yang kemudian menjadi titik awal kemunduran Mataram. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami perpecahan internal dan intervensi dari Belanda, yang kemudian memecah kerajaan menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-18.

2. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Mataram

Kerajaan Mataram Islam memegang peranan penting dalam penyebaran dan pengembangan pendidikan Islam di wilayah Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17. Meski tidak memiliki sistem pendidikan formal sebagaimana dikenal dalam sistem negara modern, kebijakan pendidikan yang ditempuh oleh Kerajaan Mataram bersifat struktural, kultural, dan berbasis komunitas. Pendidikan Islam berkembang sebagai bagian dari proses Islamisasi yang bersifat holistik—menyentuh aspek spiritual, sosial, dan politik masyarakat Jawa kala itu. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan sinergi

antara kekuasaan kerajaan dan peran sosial keagamaan para ulama dalam membentuk masyarakat Islam yang berbudaya.[198]

a. Dukungan Terhadap Lembaga Pendidikan Tradisional (Pesantren)

Salah satu bentuk nyata kebijakan pendidikan Islam yang paling berpengaruh adalah dukungan kerajaan terhadap lembaga pendidikan tradisional, terutama pesantren. Pesantren sudah ada di Jawa sejak masa Walisongo dan semakin berkembang di masa Mataram. Kerajaan tidak hanya memberi ruang bebas kepada pesantren untuk beroperasi, tetapi juga memberikan perlindungan sosial dan legitimasi politik terhadap eksistensi mereka.

Pesantren pada masa itu berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar agama seperti tajwid, fikih, tauhid, serta tasawuf. Para santri yang menuntut ilmu di pesantren tidak hanya berasal dari kalangan priyayi (bangsawan), tetapi juga dari lapisan masyarakat bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sudah merambah berbagai kelas sosial masyarakat.

Bahkan dalam beberapa kasus, pihak kerajaan memberikan tanah wakaf atau tanah garapan kepada para kyai atau ulama sebagai bentuk dukungan materiil. Tanah-tanah tersebut digunakan untuk menopang kehidupan pesantren dan santri, serta sebagai media kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam.

b. Pembangunan Masjid Sebagai Pusat Pendidikan

Masjid pada masa Mataram tidak hanya digunakan untuk ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat pendidikan dan pembinaan umat. Masjid dijadikan tempat pengajian, ceramah agama, dan diskusi keilmuan. Raja-raja Mataram, terutama Sultan Agung, berinisiatif membangun dan memperkuat peran masjid dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu masjid tertua yang menjadi simbol penting pendidikan Islam adalah Masjid Agung Kotagede, yang hingga kini masih berdiri. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi menjadi tempat berkumpulnya para ulama, kyai, dan masyarakat dalam aktivitas keagamaan dan pendidikan.

Selain itu, masjid-masjid desa yang dibangun atas dukungan para pejabat lokal dan bangsawan istana juga menjadi pusat pembelajaran Al-Qur’an, hadis, dan

[198] Raha, *Pesantren Era Mataram Islam*, *Alif.id*, 2023.

ilmu keislaman lainnya. Di sinilah muncul istilah surau atau langgar sebagai tempat pembelajaran agama informal yang terbuka untuk semua kalangan.[199]

c. Hubungan Simbiotik antara Raja dan Ulama

Kebijakan pendidikan Islam juga terefleksi dalam hubungan harmonis antara pihak kerajaan dan para ulama atau kyai. Dalam tradisi pemerintahan Mataram, raja dianggap sebagai pemimpin dunia dan akhirat (raja sekaligus imam). Maka dari itu, raja membutuhkan dukungan moral dan spiritual dari para ulama sebagai penyangga kekuasaan yang sah dan religius.

Para ulama yang memiliki kedudukan penting di masyarakat sering dijadikan penasihat kerajaan. Mereka turut serta dalam kegiatan istana, menjadi pemimpin doa, guru agama, dan bahkan kadang-kadang diutus ke daerah-daerah untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam banyak kasus, ulama juga mendapat hak istimewa berupa pemberian gelar kehormatan, wilayah kekuasaan kecil, atau tanah garapan, yang memungkinkan mereka mendirikan pesantren atau masjid.

Kehadiran para ulama yang didukung kerajaan turut memperluas jaringan pendidikan Islam hingga ke pelosok desa, menciptakan sistem pendidikan berbasis komunitas yang kuat dan berkelanjutan.[200]

d. Islamisasi Budaya sebagai Strategi Pendidikan Tidak Langsung

Salah satu strategi penting Sultan Agung dalam menyebarluaskan ajaran Islam adalah melalui akulturasi budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan tidak hanya dilakukan dalam bentuk verbal di pesantren atau masjid, tetapi juga secara simbolik melalui budaya. Misalnya, Sultan Agung mengganti sistem kalender Saka Hindu-Buddha dengan kalender Jawa-Islam, yaitu gabungan antara sistem penanggalan Hijriyah dan Saka. Hal ini merupakan bentuk pendidikan simbolik yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat dengan nilai-nilai Islam melalui sarana yang akrab bagi mereka.

Kesenian dan tradisi seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa juga diadaptasi untuk menyisipkan nilai-nilai keislaman. Pendidikan semacam ini sangat efektif dalam masyarakat Jawa yang kental dengan simbol dan budaya. Islam tidak masuk secara konfrontatif, tetapi menyatu secara perlahan dengan nilai-nilai lokal—dan ini adalah bagian dari strategi pendidikan jangka panjang.

---

[199] Kompas.com, *Peranan Kerajaan Mataram Islam dalam Penyebaran Islam*, 7 April 2023.

[200] Bustan, N., & Jumadi, J., *Peran Raja dalam Islamisasi di Kedatuan Luwu Sulawesi Selatan*, *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 2(1), 45–60 (2022).

e. Penyebaran Islam Melalui Kaderisasi Santri dan Peran Sosial Pesantren

Kebijakan pendidikan Islam di masa Mataram juga dapat dilihat dari proses kaderisasi ulama dan santri. Para santri yang telah menuntut ilmu di pesantren biasanya kembali ke daerah asal mereka untuk mendirikan pesantren baru atau menjadi guru agama. Ini menciptakan efek domino dalam penyebaran pendidikan Islam.

Bahkan dalam beberapa kasus, para santri berperan sebagai agen perubahan sosial dan penyebar dakwah yang memperkuat struktur sosial masyarakat Islam. Mereka menjadi tokoh panutan dan menjalin jaringan keagamaan yang luas. Inilah yang menjadi dasar kuat bagi terbentuknya masyarakat Islam yang memiliki sistem pendidikan informal yang mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung pada pusat kekuasaan.[201]

Secara umum, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram bersifat holistik dan terintegrasi dengan kehidupan sosial-budaya masyarakat. Dukungan terhadap pesantren, pembangunan masjid, kemitraan dengan ulama, serta pendekatan kultural yang cerdas menjadikan pendidikan Islam tumbuh subur dan berakar kuat. Meskipun belum terlembagakan dalam sistem pendidikan formal, pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan telah menciptakan fondasi pendidikan Islam yang kokoh dan meluas ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram. Model kebijakan ini menunjukkan bahwa kerajaan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan politik, tetapi juga pada pembinaan moral dan intelektual rakyatnya melalui pendidikan agama.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Kerajaan Mataram Islam tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan semata, tetapi juga menciptakan perubahan besar dalam tatanan sosial, budaya, dan bahkan politik masyarakat Jawa. Sebagai kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17, Kerajaan Mataram tidak hanya fokus pada ekspansi kekuasaan politik, tetapi juga menyadari pentingnya penyebaran ilmu agama dan pembentukan masyarakat religius yang berbudaya. Pendidikan Islam dijadikan sebagai alat transformasi sosial yang dijalankan secara bertahap dan penuh strategi melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

[201] Zamzami, Rizal, *Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Pan*

a. Peningkatan Taraf Keilmuan dan Kesadaran Keagamaan Masyarakat

Salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan pendidikan Islam adalah meningkatnya taraf pengetahuan masyarakat tentang ajaran Islam. Masyarakat yang sebelumnya belum mengenal Islam secara mendalam, mulai memahami dasar-dasar agama seperti rukun iman, rukun Islam, adab ibadah, dan akhlak. Hal ini dimungkinkan oleh pembelajaran yang berlangsung secara terstruktur di pesantren maupun secara informal di masjid-masjid dan langgar.

Dengan meningkatnya literasi keagamaan, muncul generasi Muslim yang tidak hanya menjalankan ritual agama secara tekstual, tetapi juga memahami nilai-nilai spiritual dan moral di baliknya. Kesadaran keagamaan ini memperkuat identitas masyarakat sebagai umat Islam dan mendorong tumbuhnya solidaritas sosial yang berlandaskan ajaran Islam.

b. Terbentuknya Lembaga Pendidikan Islam yang Mandiri dan Berkelanjutan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional mengalami pertumbuhan pesat pada masa Mataram. Pesantren-pesantren ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pusat dakwah dan peradaban Islam yang mandiri. Kebijakan kerajaan yang memberi kebebasan kepada pesantren untuk menjalankan perannya telah memberikan ruang bagi santri dan ulama untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan sosial.

Lebih jauh, para santri yang telah menyelesaikan pendidikannya kembali ke daerah masing-masing dan mendirikan pesantren baru, sehingga tercipta jejaring pendidikan yang menyebar luas di seluruh wilayah Jawa. Jejaring ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan Islam berbasis komunitas yang bersifat otonom, tidak bergantung pada istana, dan mampu bertahan dalam berbagai perubahan zaman, termasuk masa penjajahan.

c. Transformasi Sosial melalui Pembentukan Karakter dan Etika Masyarakat

Pendidikan Islam yang berkembang di masa Mataram memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter dan etika masyarakat. Ajaran-ajaran seperti kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, hormat kepada orang tua dan guru, serta tanggung jawab sosial ditanamkan sejak dini di lingkungan pendidikan Islam. Nilai-nilai ini menjadi standar moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[202]

[202] Annur Ngrukem, *Kerajaan Islam Mataram dan Dampaknya dalam Sejarah Nusantara* (2024).

Pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang saleh secara personal, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi norma-norma sosial, dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Di sinilah pendidikan Islam menjadi kekuatan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, menggantikan sistem nilai lama yang sebelumnya didasarkan pada kepercayaan Hindu-Buddha.

d. Lahirnya Kelas Intelektual Muslim (Ulama dan Cendekiawan)

Dari kebijakan pendidikan yang dijalankan, lahirlah kalangan intelektual Muslim yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Para ulama dan cendekiawan ini tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi tokoh panutan, pemimpin spiritual, dan mediator antara rakyat dan penguasa. Beberapa di antaranya bahkan menulis kitab-kitab keislaman dalam bahasa Jawa dan Arab Pegon, yang menjadi referensi utama dalam pembelajaran agama di pesantren.

Kelas intelektual ini berperan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menyelaraskannya dengan budaya lokal. Mereka menjadi agen perubahan dan pemelihara nilai-nilai Islam di tengah dinamika sosial masyarakat. Tanpa kehadiran mereka, pendidikan Islam tidak akan mampu berkembang secara sistematis dan berkelanjutan.

e. Penguatan Identitas Budaya Islam-Jawa

Salah satu keberhasilan besar dari pendidikan Islam di masa Mataram adalah terbentuknya identitas budaya Islam-Jawa yang khas. Pendidikan tidak dilakukan secara kaku, melainkan dengan pendekatan budaya yang lentur. Misalnya, penggunaan tembang, suluk, dan cerita wayang untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman membuat masyarakat mudah menerima ajaran Islam tanpa harus meninggalkan budaya mereka.

Akulturasi ini menghasilkan bentuk keberagamaan yang unik, yang tidak hanya menampilkan sisi teologis Islam, tetapi juga estetika dan rasa. Dengan demikian, masyarakat Jawa menjadi Muslim bukan hanya secara doktrinal, tetapi juga secara kultural. Identitas ini terbawa hingga saat ini, tercermin dalam praktik keagamaan masyarakat Jawa yang toleran, moderat, dan penuh kearifan lokal.

f. Pengaruh Jangka Panjang terhadap Gerakan Sosial dan Politik

Dampak lain yang tak kalah penting adalah pengaruh kebijakan pendidikan Islam terhadap gerakan sosial dan politik di masa-masa berikutnya. Pesantren dan jaringan ulama menjadi basis utama perlawanan terhadap kolonialisme, terutama

pada abad ke-18 dan 19. Pendidikan Islam melahirkan generasi yang sadar akan keadilan sosial dan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan.

Contohnya dapat dilihat dari peran para ulama pesantren dalam perang Diponegoro (1825–1830), yang secara ideologis merupakan kelanjutan dari warisan pendidikan Islam masa Mataram. Semangat jihad, keadilan, dan penolakan terhadap penindasan tertanam kuat dalam pendidikan Islam, dan nilai-nilai ini terus diwariskan secara turun-temurun.[203]

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram tidak hanya menciptakan masyarakat yang religius, tetapi juga masyarakat yang memiliki etika, wawasan, dan semangat perjuangan. Pendidikan menjadi alat perubahan sosial yang efektif karena dijalankan dengan pendekatan budaya, spiritual, dan sosial yang terintegrasi. Pengaruhnya bahkan melampaui batas geografis dan zaman, meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa.

4. Peran Raja dalam Pendidikan Islam

Dalam sistem pemerintahan kerajaan tradisional, raja bukan hanya dipandang sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai tokoh spiritual dan pelindung budaya. Hal ini sangat berlaku dalam konteks Kerajaan Mataram Islam, di mana raja memiliki peran sentral dalam mengembangkan, mendukung, dan menjaga keberlangsungan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem sosial dan keagamaan kerajaan.[204]

Raja-raja Mataram, seperti Sultan Agung Hanyakrakusuma dan penguasa lainnya, tidak sekadar menjalankan kekuasaan secara administratif, tetapi juga menjalankan fungsi simbolik dan substantif dalam memajukan pendidikan Islam, baik secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pertumbuhan ilmu dan dakwah Islam. Berikut ini adalah beberapa bentuk konkret dari peran raja dalam pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram:

a. Pelindung dan Patron Pendidikan Islam

[203] Safei, S., *Peranan Kerajaan Islam dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 301–308 (2015).

[204] Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, *Sultan Agung Hanyokrokusumo*, 2023.

Raja bertindak sebagai pelindung bagi para ulama, kiai, dan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan langgar. Dalam banyak kasus, raja menyediakan tanah (tanah perdikan) atau sumber daya tertentu untuk menunjang kehidupan pesantren. Dengan adanya dukungan dari raja, pesantren dapat menjalankan kegiatan pengajaran tanpa harus terbebani oleh masalah ekonomi.

Selain itu, raja juga sering kali memberikan legitimasi politik dan sosial kepada para ulama, menjadikan mereka bagian dari struktur kekuasaan moral di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mendapat tempat penting dalam struktur negara dan dianggap sebagai bagian dari pembangunan masyarakat.[205]

b. Pengintegrasian Islam ke dalam Sistem Pemerintahan dan Pendidikan

Sultan Agung, sebagai raja besar Kerajaan Mataram Islam, dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam sistem pemerintahan dan pendidikan. Ia tidak hanya dikenal sebagai raja yang gagah berani dalam memperluas wilayah, tetapi juga sebagai pemimpin yang cerdas dalam membumikan ajaran Islam melalui jalur pendidikan dan budaya.

Misalnya, Sultan Agung mendorong penggunaan penanggalan Hijriah dalam sistem kalender Jawa sebagai bentuk edukasi spiritual dan simbol integrasi Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Ia juga dikenal mendukung penggunaan kesenian seperti wayang dan tembang sebagai sarana dakwah, di mana nilai-nilai Islam disisipkan secara halus dan mudah diterima oleh masyarakat luas.

c. Pemrakarsa Islamisasi Budaya Lokal

Peran raja juga terlihat dalam upayanya untuk mengislamkan budaya lokal tanpa menimbulkan konflik sosial. Dalam hal ini, pendidikan Islam disebarluaskan dengan metode akulturatif, di mana unsur-unsur budaya Jawa yang sudah mapan diselaraskan dengan ajaran Islam.

Raja menjadi simbol penyatuan antara ajaran Islam dan budaya Jawa, dan dari situlah pendidikan Islam berkembang dalam bentuk khas yang unik. Nilai-nilai sufistik yang diajarkan di pesantren, misalnya, menjadi senyawa penting dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan filsafat dan nilai-nilai lokal yang sudah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat Jawa.

[205] Ith'am, M. I. (2018). Penerapan Politik Pendidikan (Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram). *EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya*, 1(1).

d. Mendorong Kelahiran Ulama dan Intelektual Muslim

Berkat dukungan dari raja, banyak ulama besar bermunculan di masa Mataram yang berperan aktif dalam menyebarkan pendidikan Islam. Para ulama ini tidak hanya berdakwah, tetapi juga menulis karya-karya ilmiah keagamaan, mendirikan pesantren, dan menjadi pembina masyarakat.

Peran raja dalam hal ini bukan hanya menyediakan ruang fisik dan politik, tetapi juga memberikan pengakuan sosial atas pentingnya peran intelektual Muslim. Penghargaan terhadap ilmu dan ulama mendorong generasi muda untuk menekuni pendidikan Islam dan memandangnya sebagai jalan mulia untuk berkontribusi kepada masyarakat.[206]

e. Teladan Spiritual bagi Masyarakat

Raja Mataram juga berperan sebagai teladan spiritual bagi rakyatnya. Dalam tradisi Jawa, raja adalah sosok yang dipandang memiliki kedekatan dengan Yang Maha Kuasa, dan karena itu segala tindak-tanduknya dianggap sebagai cerminan moral masyarakat. Ketika raja mendukung pendidikan Islam dan menjalankan kehidupan religius, maka masyarakat pun terdorong untuk mengikuti jejak tersebut.

Ketaatan raja dalam menjalankan ibadah, dukungannya terhadap pembangunan masjid, kegiatan keagamaan, dan majelis ilmu, semua itu memberi pengaruh psikologis dan kultural terhadap rakyat. Dengan kata lain, raja menjadi figur edukatif yang tidak hanya memerintah, tetapi juga mendidik rakyat secara simbolik dan spiritual.

f. Penjaga Keseimbangan antara Agama dan Tradisi

Raja Mataram Islam tidak bersikap ekstrem dalam memaksakan ajaran Islam kepada masyarakat. Sebaliknya, ia menjadi penjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan kearifan lokal. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kurikulum pesantren maupun pengajaran keagamaan tetap menghormati nilai-nilai lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pendekatan ini memungkinkan pendidikan Islam berkembang tanpa menimbulkan resistensi budaya. Raja berhasil menciptakan iklim pendidikan yang damai, inklusif, dan menghargai pluralitas ekspresi budaya. Inilah yang menjadikan Islam begitu kuat mengakar di tanah Jawa dan menciptakan karakter keberagamaan yang moderat.

---

[206] Yenni, T., *Peranan Sultan Agung dalam Pengembangan Islam di Pulau Jawa*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2019).

Peran raja dalam pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram Islam tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan sistem pendidikan Islam di Jawa. Raja berperan sebagai pelindung, pemrakarsa, fasilitator, sekaligus teladan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pendidikan. Perannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan kultural. Keberhasilan pendidikan Islam di masa itu menjadi bukti bahwa sinergi antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan dapat menciptakan masyarakat yang religius, berbudaya, dan beradab.[207]

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh besar dalam pembentukan struktur sosial dan budaya masyarakat Jawa, terutama dalam pengembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Sultan Agung sebagai pemimpin yang visioner mengerti pentingnya pendidikan dalam memperkuat fondasi agama dan negara. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan mencakup pendirian pesantren dan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu agama, serta upaya untuk memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang telah ada di masyarakat.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung, pendidikan Islam berkembang pesat, tidak hanya sebagai bentuk penyebaran agama, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Pendidikan ini melibatkan partisipasi aktif ulama dan masyarakat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah inklusif dan memperhatikan keberagaman budaya masyarakat Mataram, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang murni.

Dampak kebijakan ini terhadap masyarakat sangat positif dalam jangka panjang, terutama dalam pembentukan karakter, moral, dan wawasan keagamaan yang lebih kuat. Di sisi lain, kebijakan pendidikan ini juga mempercepat proses Islamisasi di Jawa, sehingga pengaruh Islam semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, peran raja sebagai pelopor dan pelindung pendidikan Islam menunjukkan keseriusan kerajaan dalam membangun sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya bertujuan religius, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat stabilitas kerajaan.

[207] ndriyanto, A., *Konsep Kedudukan Raja pada Awal Berdirinya Kerajaan Mataram Islam*, *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(1), 30–37 (2022).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Kerajaan Mataram Islam dapat dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.

BAB VIII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN TERNATE

A. PENDAHULUAN

Pada masa Kesultanan Ternate, pendidikan Islam memegang peranan sentral dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat. Kesultanan Ternate yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 bukan hanya dikenal sebagai kekuatan politik dan ekonomi di kawasan Maluku, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur. Islamisasi di wilayah ini tidak hanya berlangsung melalui jalur perdagangan rempah-rempah, tetapi juga melalui penguatan institusi-institusi pendidikan seperti madrasah dan halaqah, yang berkembang atas dukungan penuh dari para sultan. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Islam sudah menjadi bagian integral dari kebijakan negara, bukan sekadar aktivitas keagamaan individual[208].

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membangun identitas keislaman yang kuat di tengah persaingan politik dan pengaruh bangsa asing seperti Portugis dan Spanyol. Sultan Ternate melihat pendidikan agama sebagai alat strategis untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mempererat loyalitas rakyat. Oleh sebab itu, berbagai program pendidikan berbasis masjid, pengiriman pelajar ke luar negeri (seperti ke Mekkah atau Malaka), serta penunjukan ulama sebagai pejabat resmi kerajaan menjadi langkah konkret yang diambil. Pendidikan tidak hanya diarahkan untuk menguatkan akidah umat, melainkan juga membentuk kader-kader birokrat yang cakap secara intelektual dan religius[209].

Pentingnya pendidikan Islam juga tercermin dalam integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum dan administrasi Kesultanan. Syariat Islam diadopsi dalam berbagai aspek pemerintahan, yang tentu saja membutuhkan SDM terdidik dalam ilmu agama. Karena itu, investasi terhadap pendidikan Islam dipandang sebagai investasi terhadap stabilitas politik jangka panjang. Pendidikan berbasis kitab kuning, tafsir, fikih, dan tasawuf menjadi bagian

[208] Rustam Hasyim, 'Masyarakat Dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah', *Jurnal Geocivic*, 2.2 (2019).

[209] Moeflich Hasbullah, *Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara* (Prenada Media, 2017).

kurikulum yang diajarkan kepada para bangsawan muda, calon ulama, dan masyarakat umum[210].

Dengan segala keterbatasan fasilitas pada masa itu, Kesultanan Ternate menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bukan hanya untuk kepentingan spiritual, melainkan juga sebagai fondasi membangun negara yang kuat dan berdaulat. Keberhasilan mereka membangun jaringan keilmuan di kawasan timur Indonesia membuktikan bahwa visi pendidikan yang dicanangkan memiliki dampak jauh ke depan. Nilai-nilai keilmuan dan keislaman yang dikembangkan pada masa itu bahkan menjadi warisan intelektual yang masih berpengaruh hingga hari ini[211].

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Teori pendidikan Islam berperan sebagai fondasi utama yang membentuk arah, tujuan, dan strategi penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan prinsip dasar pendidikan Islam, yakni membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, Kesultanan Ternate menjadikan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat identitas keislaman rakyatnya sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan individu, tetapi juga membangun masyarakat Islam yang kokoh, loyal kepada ajaran agama dan kepada kekuasaan sah yang dianggap melaksanakan amanah ilahi[212].

Teori pendidikan Islam menekankan pentingnya tauhid (keesaan Allah) sebagai inti semua pengajaran. Dalam praktiknya, Kesultanan Ternate mendorong penyebaran pendidikan berbasis masjid, surau, dan madrasah, dengan kurikulum yang menekankan pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, serta akhlak. Ini dilakukan agar setiap individu masyarakat memahami bahwa ketaatan kepada Allah harus tercermin dalam ketaatan kepada hukum dan pemerintahan Islam yang sah, dalam hal ini dipimpin oleh Sultan. Dengan kata lain, teori pendidikan Islam di Ternate berfungsi bukan hanya secara spiritual, tetapi juga menjadi instrumen politik dan identitas budaya[213].

---

[210] Usman Supendi, Syofiah Pribadi, and Fitria Eka Dewi Murni, 'Dampak Islamisasi Kerajaan Padjajaran: Sistim Pendidikan Dan Nilai-Nilai Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Sunda', *Attractive: Innovative Education Journal*, 6.1 (2024), pp. 15–26.

[211] Setyono Djuandi Darmono, *Building a Ship While Sailing* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).

[212] Abdul Gani Jamora Nasution, 'Pendidikan Islam Dalam Catatan Sejarah', 2017.

[213] Imailda Nur Laila, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Peradaban Islam Di Indonesia', *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 7.02 (2023), pp. 70–79.

2. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan dijadikan instrumen strategis dalam mentransformasikan struktur sosial, budaya, dan politik masyarakat. Pendidikan Islam yang disebarluaskan melalui masjid, surau, dan madrasah, tidak hanya berfungsi untuk memperdalam pemahaman keagamaan individu, tetapi juga untuk menggeser pola pikir, nilai-nilai, dan sistem sosial dari berbasis tradisi animisme dan dinamisme menuju sistem sosial yang berlandaskan syariat Islam. Melalui proses pendidikan yang terstruktur ini, Kesultanan Ternate secara efektif mengarahkan perubahan sosial menuju masyarakat Islam yang lebih terorganisasi, beradab, dan loyal kepada kepemimpinan Sultan sebagai representasi kekuasaan Islam[214].

Teori perubahan sosial menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat sering dipicu oleh inovasi dalam norma dan sistem nilai. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan Islam menjadi inovasi ideologis yang membawa nilai-nilai baru, seperti konsep tauhid, keadilan sosial Islam, hukum syariah, serta etika sosial Islami. Nilai-nilai ini secara bertahap menggeser nilai-nilai tradisional yang sebelumnya mendominasi masyarakat Ternate. Pendidikan tidak hanya membentuk individu, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif, yang pada akhirnya memperkokoh identitas Ternate sebagai kerajaan Islam yang kuat di kawasan Maluku dan mempererat solidaritas sosial antarwarga[215].

3. Teori Politik Kekuasaan Dalam Islam

Teori politik kekuasaan dalam Islam berprinsip bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan untuk menegakkan keadilan, memelihara agama, dan membina kesejahteraan umat. Dalam Islam, pemimpin (imam atau sultan) tidak hanya bertanggung jawab atas urusan duniawi rakyatnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan beragama. Oleh karena itu, kekuasaan dalam Islam erat kaitannya dengan pendidikan, karena pendidikan adalah sarana utama untuk membentuk individu dan masyarakat yang taat kepada ajaran Islam dan hukum Allah[216].

---

[214] Musliati Musliati, Cyndy Aulia, and Erwinsyah Erwinsyah, 'Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan', *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1.2 (2023), pp. 104–16.

[215] Darsis Humah, Zainuddin Arifin, and Abd Rauf Wajo, 'Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.24.2 (2024), pp. 896–909.

[216] Muhammad Zulifan, 'Politik Islam Di Indonesia: Ideologi, Transformasi Dan Prospek Dalam Proses Politik Terkini', *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.2 (2016), pp. 171–95.

Dalam konteks Kesultanan Ternate, teori ini sangat terlihat dalam kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan oleh para Sultan. Pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mendalami ilmu agama secara pribadi, melainkan menjadi bagian dari strategi politik kekuasaan. Sultan sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama (amir al-mu'minin) bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh rakyatnya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, agar kekuasaan yang dijalankan selaras dengan nilai-nilai syariat. Kebijakan ini bertujuan membangun legitimasi politik: rakyat yang memahami agama dengan baik akan lebih mudah menerima kekuasaan Sultan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah[217].

Selain sebagai instrumen keagamaan, pendidikan Islam di Ternate juga difungsikan sebagai alat untuk memperkuat kontrol sosial. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam, para ulama dan guru (yang seringkali diangkat oleh Sultan) menjadi bagian dari sistem birokrasi kerajaan. Mereka berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen moral dan politik yang mengajarkan loyalitas kepada negara Islam Ternate. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga "mengikat" rakyat dalam satu kerangka identitas politik berbasis agama[218].

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Ternate

Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang taat kepada ajaran Islam sekaligus memperkuat kekuasaan politik Sultan. Pada masa itu, pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pengajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkokoh kedudukan Kesultanan Ternate sebagai pusat kekuatan Islam di kawasan Maluku. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan pada masa Kesultanan Ternate.

a. Pendirian Madrasah Dan Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Kesultanan Ternate didirikan di berbagai madrasah dan lembaga pendidikan Islam yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan. Madrasah-

[217] Rofik Aksan, 'Kekuasaan Dan Politik Lembaga Pendidikan Islam', *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10.1 (2022), pp. 17–27.

[218] Rusdiyanto Rusdiyanto, 'Kesultanan Ternate Dan Tidore', *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 3.1 (2018).

madrasah ini menjadi pusat pengajaran agama Islam, di mana para ulama dan guru agama mengajarkan Al-Qur'an, hadis, fikih, dan akhlak. Sultan Ternate mendorong pendirian lembaga pendidikan ini sebagai cara untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa.

Lembaga pendidikan ini tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menyentuh wilayah pedesaan, yang memungkinkan pendidikan agama tersebar luas di kalangan rakyat Ternate. Madrasah ini sering kali berada di dekat masjid atau surau, di mana proses belajar mengajar bisa dilakukan secara intensif[219].

b. Peran Ulama Dalam Pemerintah Dan Pendidikan

Dalam Kesultanan Ternate, para ulama tidak hanya berfungsi sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan. Sultan Ternate sering kali mengangkat ulama sebagai penasihat atau bahkan pejabat kerajaan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan syariat Islam.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh hubungan erat antara kekuasaan politik dan agama. Sultan menggunakan ulama sebagai alat untuk mengajarkan dan memperkuat ajaran Islam dalam masyarakat sekaligus untuk mendukung legitimasi kekuasaannya. Sebagai contoh, Sultan Ternate memberi tempat penting bagi para ulama dalam pengambilan keputusan politik, dengan memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan mencerminkan prinsip-prinsip Islam[220].

c. Pengajaran Al-Qur’an Dan Hadist Sebagai Mata Pelajaran Utama

Salah satu kebijakan utama dalam pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate adalah penekanan pada pengajaran **Al-Qur'an** dan **hadis.** Pendidikan ini dimaksudkan untuk membentuk generasi muda yang memahami ajaran agama secara mendalam. Selain itu, para siswa juga diajarkan tentang **fikih** (ilmu hukum Islam) yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pendidikan yang berfokus pada Al-Qur'an dan hadis juga memiliki tujuan untuk menjaga agar masyarakat Ternate tetap setia pada ajaran Islam, serta

[219] Hidra Ariza, ‘Lembaga Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah Di Indonesia (Kajian Historis Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam)’, *SURAU: Journal of Islamic Education*, 1.1 (2023), pp. 1–14.

[220] Rofiqah Al Munawwarah, ‘Sejarah Pendidikan Islam Di Maluku Pada Masa Awal Serta Perkembangannya’, *Vifada Journal of Education*, 1.2 (2023), pp. 29–36.

menghindari pengaruh-pengaruh asing, terutama dari agama-agama selain Islam. Hal ini sangat penting, mengingat pada masa itu, Ternate sering terlibat dalam interaksi dengan penjajah Eropa, seperti Portugis dan Spanyol, yang membawa pengaruh Kristen[221].

d. Penyebaran Pendidikan Islam melalui Dakwah dan Penyuluhan

Pendidikan Islam di Kesultanan Ternate juga diperluas melalui dakwah dan penyuluhan ke berbagai pulau di sekitar Maluku. Sultan Ternate mendukung para ulama untuk melakukan dakwah ke daerah-daerah yang belum sepenuhnya menerima Islam, baik melalui perjalanan langsung maupun melalui pesantren-pesantren yang didirikan di kawasan tersebut.

Dengan mengirimkan para ulama ke daerah-daerah terpencil dan mengadakan kegiatan dakwah, Sultan Ternate memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat Ternate dan sekitarnya. Dakwah ini juga melibatkan kegiatan pendidikan yang lebih informal, seperti pengajian dan halaqah yang dilakukan di masjid-masjid atau surau-surau[222].

e. Pengaruh Pendidikan Islam dalam Memperkuat Legitimasi Kekuasaan Sultan

Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk membentuk masyarakat yang taat beragama, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi politik Sultan**.** Sultan Ternate menggunakan pendidikan Islam sebagai sarana untuk mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang sah di mata rakyatnya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi alat untuk menciptakan identitas politik yang kuat di bawah naungan Islam.

Sultan Ternate mengajarkan bahwa ketaatan kepada Sultan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, sehingga rakyat diharapkan untuk mendukung dan menghormati kekuasaan Sultan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berfungsi untuk memperkuat kohesi sosial dan politik di dalam kerajaan, dengan membangun loyalitas rakyat kepada Sultan[223].

f. Pendidikan Islam Sebagai Pembentukan Akhlak dan Moral

Selain aspek keilmuan, pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate juga sangat menekankan pada pembentukan akhlak dan moral yang baik. Pembentukan karakter yang berbasis pada ajaran Islam seperti jujur, adil, dan peduli terhadap

[221] Susmihara Mihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara', *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 6.1 (2018), pp. 13–32.

[222] Suparlan Suparlan and Sutama Sutama, 'Arah Politik Pendidikan Islam Di Masa Disrupsi', *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 11.3 (2020), pp. 257–72.

[223] Hasyim, 'Masyarakat Dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah'.

sesama menjadi tujuan penting dalam pendidikan Islam. Akhlak yang baik diharapkan dapat membentuk masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan taat kepada hukum Allah dan hukum negara.

Proses pendidikan ini tidak hanya dilakukan di kelas atau madrasah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama dan pemimpin agama sering kali memberikan teladan langsung dalam hal akhlak, yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan informal yang berjalan seiring dengan pendidikan formal di madrasah[224].

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate sangat erat kaitannya dengan upaya untuk memperkuat kekuasaan Sultan dan membentuk masyarakat yang taat kepada ajaran Islam. Melalui pendidikan yang berbasis masjid, madrasah, dan peran aktif ulama dalam pemerintahan, Sultan Ternate berhasil mengarahkan masyarakatnya ke arah perubahan sosial yang lebih Islami, serta memperkuat struktur politik kerajaan. Pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya mencerdaskan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pembentukan identitas politik yang kokoh di bawah naungan syariat Islam[225].

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Struktur Pemerintahan Dan Masyarakat Kesultanan Ternate

Implementasi kebijakan pendidikan Islam dalam struktur pemerintahan dan masyarakat Kesultanan Ternate berlangsung secara sistematis dan integral. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi urusan lembaga keagamaan semata, melainkan ditanamkan dalam sistem birokrasi pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat. Pendidikan Islam dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang taat beragama, berakhlak mulia, dan setia kepada kekuasaan Sultan[226].

Dalam struktur pemerintahan, Sultan Ternate menempatkan pendidikan Islam sebagai prioritas dengan melibatkan para ulama dalam jabatan-jabatan strategis. Para ulama diberi posisi penting sebagai penasihat Sultan (mufti), qadhi (hakim syariat), serta pengelola madrasah dan lembaga dakwah. Dengan demikian, para pemimpin keagamaan berperan langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan,

[224] Fatoni Achmad, 'Filosofi Pendidikan Islam: Membentuk Jiwa Anak Usia Dini Sebagai Cerminan Fitrah Dan Akhlak Mulia', *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 6.2 (2024), pp. 188–206.
[225] Mihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara'.
[226] Humah, Arifin, and Wajo, 'Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate'.

terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, pendidikan, dan kebijakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Kesultanan Ternate bersifat teokratis, di mana ajaran agama menjadi pedoman mutlak dalam pengelolaan negara[227].

Di sisi masyarakat, implementasi kebijakan pendidikan Islam terlihat melalui penguatan fungsi masjid dan madrasah sebagai pusat pembelajaran dan aktivitas sosial. Masjid tidak hanya berfungsi untuk shalat berjamaah, tetapi juga menjadi tempat mengaji, belajar tafsir Al-Qur'an, mempelajari fikih, dan mendalami akhlak Islam. Pendidikan di tingkat masyarakat ini diselenggarakan secara meluas dan merata, sehingga seluruh lapisan masyarakat baik bangsawan maupun rakyat biasa memiliki akses terhadap pendidikan agama. Anak-anak sejak kecil diajarkan membaca Al-Qur'an dan memahami dasar-dasar agama, sementara orang dewasa mendapatkan ceramah dan bimbingan rutin dari para ulama[228].

Lebih jauh lagi, implementasi pendidikan Islam juga terlihat dalam pembentukan nilai-nilai sosial di masyarakat Ternate. Norma sosial, adat istiadat, dan hukum adat banyak yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, dalam hukum waris, perkawinan, dan penyelesaian sengketa, ketentuan-ketentuan Islam diterapkan secara konsisten di bawah pengawasan qadhi kerajaan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya membentuk pola pikir individual, tetapi juga menciptakan transformasi sosial yang besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Ternate menunjukkan bahwa pendidikan adalah instrumen utama dalam integrasi kekuasaan politik dan keagamaan. Pemerintahan dan masyarakat menjadi satu kesatuan dalam membangun identitas Islam yang kuat, sehingga Ternate mampu bertahan sebagai kekuatan Islam yang berpengaruh di kawasan Maluku dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti ekspansi kolonial Eropa[229].

---

[227] Nurajidah Dalimunthe, 'Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

[228] SATRIO FAJAR ROMADHON, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Di Era Modern (Studi Kasus: Dusun Bengan Kidul Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah)', 2022.

[229] Djono Muin, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hak-Hak Adat Dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate Di Kota Ternate', *IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 1.1 (2022), pp. 1–13.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Islam di Kawasan Maluku Dan Sekitarnya

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Kesultanan Ternate membawa dampak yang sangat besar terhadap penyebaran, penguatan, dan perkembangan Islam di kawasan Maluku dan daerah sekitarnya. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk masyarakat Ternate yang taat beragama, tetapi juga berfungsi sebagai motor utama dalam ekspansi ajaran Islam ke pulau-pulau tetangga[230].

Pertama, terciptanya basis masyarakat Islam yang kuat di Ternate menjadi fondasi untuk penyebaran Islam ke kawasan Maluku lainnya, seperti Tidore, Bacan, Halmahera, dan pulau-pulau sekitarnya. Masyarakat Ternate yang telah mendapat pendidikan Islam yang sistematis melalui madrasah, masjid, dan dakwah aktif menjadi agen-agen dakwah yang menyebarkan ajaran Islam secara sukarela maupun atas perintah Sultan. Dengan demikian, pendidikan menjadi semacam "senjata budaya" yang menyebarkan Islam secara damai dan mengakar kuat dalam komunitas-komunitas lokal[231].

Kedua, terbentuknya jaringan dakwah antar-pulau mempercepat proses Islamisasi di Maluku. Sultan Ternate secara aktif mengirim para ulama, guru agama, dan mubalig ke daerah-daerah sekitar untuk mengajarkan dasar-dasar Islam. Strategi ini menjadikan pendidikan sebagai media perluasan pengaruh politik dan keagamaan Ternate, sekaligus mempererat hubungan sosial dan ekonomi antarwilayah dalam satu identitas keislaman. Bahkan, dalam beberapa kasus, kerajaan-kerajaan lokal di sekitar Maluku menerima Islam sekaligus mengakui otoritas moral dan keagamaan Sultan Ternate[232].

Ketiga, standarisasi nilai-nilai sosial berbasis Islam menjadi ciri khas di wilayah Maluku. Melalui pendidikan, ajaran tentang syariat Islam mulai menggantikan hukum-hukum adat lama. Perubahan ini terjadi dalam aspek pernikahan, waris, peradilan, hingga etika bermasyarakat. Pendidikan agama berhasil membentuk budaya baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun dalam beberapa kasus tetap terjadi akulturasi dengan tradisi lokal[233].

---

[230] Fahlia Mokodongan and Rahmat Kasim, 'Menjadi Muslim Di Minahasa Utara: Dinamika Kehidupan Komunitas Islam Di Daerah Minoritas', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 10.02 (2025), pp. 142–64.

[231] Roem Topatimasang, *Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku* (INSISTPress, 2016).

[232] Rosmina Jumati, 'Kajian Historis Peran Ulama Tidore Dalam Perkembangan Islam Dan Relevansinya Pada Pembelajaran SKI Di MAN 2 Kota Tidore', *JUANGA: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2024, pp. 131–42.

[233] Ivana Solemede and others, 'Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya Di Provinsi Maluku', *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1.1 (2020), pp. 69–86.

Keempat, kebijakan pendidikan Islam Ternate memperkuat ketahanan budaya Islam di tengah tekanan kolonialisme. Ketika Portugis, Spanyol, dan Belanda datang membawa misi Kristenisasi, masyarakat Maluku yang sudah mendapatkan fondasi pendidikan Islam yang kuat lebih mampu mempertahankan identitas keagamaannya. Masjid, madrasah, dan jaringan ulama menjadi benteng utama melawan asimilasi budaya asing. Pendidikan ini bukan hanya membentengi iman masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Ternate berkontribusi secara signifikan dalam membentuk karakter masyarakat Islam di kawasan Maluku, memperluas jangkauan dakwah, dan mempertahankan eksistensi Islam di tengah perubahan zaman dan tantangan eksternal. Pendidikan bukan hanya membangun manusia berilmu, tetapi juga menciptakan peradaban Islam yang kokoh dan berpengaruh luas di Nusantara bagian timur[234].

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Ternate memiliki peran strategis dalam membangun struktur pemerintahan, membentuk karakter masyarakat, serta memperluas pengaruh Islam di kawasan Maluku dan sekitarnya. Implementasi pendidikan Islam tidak hanya dilakukan melalui pendirian madrasah dan pengajaran agama di masjid, tetapi juga melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dengan melibatkan ulama sebagai bagian dari kekuasaan politik. Pendidikan dijadikan sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi Sultan serta membangun masyarakat yang berakhlak dan berilmu.

Dampak dari kebijakan ini sangat luas. Kesultanan Ternate berhasil menciptakan basis masyarakat Muslim yang kuat, membangun jaringan dakwah antar-pulau, serta mendorong terbentuknya budaya sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendidikan Islam juga berperan penting dalam memperkokoh ketahanan budaya dan keagamaan masyarakat Maluku menghadapi tantangan kolonialisme Eropa. Identitas keislaman yang kokoh tersebut menjadi kekuatan utama dalam menjaga eksistensi masyarakat Islam di kawasan timur Nusantara.

[234] Al Munawwarah, ‘Sejarah Pendidikan Islam Di Maluku Pada Masa Awal Serta Perkembangannya’.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di masa Kesultanan Ternate tidak hanya berdampak pada internal kerajaan, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan Islam yang lebih luas di wilayah Maluku dan sekitarnya. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban, memperkuat solidaritas umat, dan mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi sepanjang sejarah.

BAB IX
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN TIDORE

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Tidore merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kepulauan Maluku. Sejak awal abad ke-15, Kesultanan ini memainkan peranan penting dalam proses Islamisasi masyarakat lokal. Islam tidak hanya diterima sebagai agama pribadi, tetapi juga menjadi ideologi negara yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan pendidikan. Para sultan secara aktif mendukung penyebaran Islam dengan mendorong pendidikan keagamaan yang bersifat informal dan tradisional. Dukungan negara terhadap pendidikan Islam menjadikan Tidore sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Maluku.[235]

Pendidikan Islam di masa Kesultanan Tidore berlangsung dalam bentuk tradisional melalui sistem halaqah dan pengajian di rumah-rumah guru agama, yang dikenal sebagai *jou guru*. Sistem ini menjadi sarana utama dalam mengenalkan dasar-dasar keislaman, seperti membaca Al-Qur'an, fikih, tauhid, dan tasawuf kepada anak-anak dan remaja. Peran *jou guru* dalam masyarakat sangat vital, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemuka adat dan keagamaan. Tradisi pendidikan ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi fondasi pembentukan karakter masyarakat Muslim Tidore.[236]

Selain pendidikan di tingkat masyarakat, Kesultanan Tidore juga menjalin hubungan intelektual dengan pusat-pusat keilmuan Islam di luar negeri, seperti Hadramaut, Mekah, dan Gujarat. Beberapa pelajar dari Tidore dikirim ke pusat-pusat tersebut untuk menuntut ilmu agama, dan ketika kembali mereka mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di tanah air. Hubungan ini menunjukkan adanya dinamika pendidikan Islam yang terbuka dan transnasional, serta memperkuat otoritas keilmuan dan keagamaan di kalangan elit dan ulama lokal.[237]

Meskipun sejarah Kesultanan Tidore sangat kaya akan praktik dan kebijakan pendidikan Islam, namun kajian ilmiah yang mendalam mengenai sistem dan kebijakan

---

[235] R. Darmawan, "Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Timur," Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2017): 112–127.

[236] H. Sugianto, N. Buamona, et al., "Pola Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore," Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 5, no. 2 (2022): 195–214.

[237] A. Azra, Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Jakarta: Kencana, 2004).

pendidikan tersebut masih sangat terbatas. Penelitian yang ada masih lebih banyak terfokus pada aspek politik, perdagangan, atau konflik kolonial. Oleh karena itu, perlu adanya penggalian dan penulisan sejarah pendidikan Islam yang lebih komprehensif, untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut membentuk sistem sosial dan religius masyarakat Tidore, dan bagaimana warisan itu dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pendidikan Islam masa kini.[238]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam (Syed M. Naquib al-Attas)

Syed Muhammad Naquib al-Attas adalah salah satu tokoh penting dalam bidang pendidikan Islam modern yang menawarkan pendekatan unik melalui konsep *ta'dīb* sebagai dasar pendidikan Islam. Al-Attas membedakan konsep *ta'dīb* dari istilah tarbiyah atau *ta'līm*, yang lebih umum digunakan, dengan menekankan bahwa *ta'dīb* mencakup pengajaran, penanaman ilmu, dan pembentukan karakter secara menyeluruh. Ia percaya bahwa pendidikan Islam bukan hanya penyebaran pengetahuan; itu juga merupakan proses pembentukan kepribadian dan moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk membuat manusia beradab, yang berarti mereka mengenal tempat segala sesuatu dalam hierarki wujud, yang pada gilirannya akan menghasilkan keteraturan dalam jiwa dan masyarakat.[239]

Menurut al-Attas, tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan manusia yang beradab—bukan hanya orang yang cerdas secara intelektual. Menurutnya, manusia yang beradab adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang benar, memahami struktur ilmu secara *hierarkis*, dan mampu menempatkan segala sesuatu di tempatnya yang semestinya. Oleh karena itu, pendidikan Islam menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang tinggi. Tujuan ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang unggul dalam nilai dan perilaku.[240]

---

[238] N. Hasan, "Sejarah Pendidikan Islam: Suatu Pengantar," Jurnal Pendidikan Islam Nusantara 2, no. 1 (2016): 45–58.

[239] S. Kurniawan dan E. Mahrus, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Syed Naquib Al-Attas dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia," Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 2, no. 1 (2020): 47–49.

[240] M. D. El Hakim dan E. F. Fahyuni, "Pemikiran Pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas," Jurnal Studi Islam dan Masyarakat 2, no. 1 (2020): 55–57.

Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan adalah salah satu ide utama al-Attas. Ia menentang pemisahan yang muncul karena sekularisme Barat antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dia percaya bahwa Islamisasi ilmu adalah proses menyaring, mengubah, dan menyesuaikan ilmu pengetahuan kontemporer dengan perspektif dunia Islam. Tujuannya adalah ilmu harus sejalan dengan tauhid dan nilai-nilai Islam daripada netral atau bebas nilai. Konsep ini menempatkan pendidikan sebagai alat untuk membangun pandangan hidup Islami yang menyeluruh.[241]

Dalam hal kurikulum, al-Attas menekankan bahwa ilmu fardhu ain, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kewajiban individu, seperti akidah, ibadah, dan akhlak, harus diutamakan. Ilmu fardhu kifayah, seperti sains dan teknologi, juga penting, tetapi harus diletakkan dalam konteks nilai Islam. Ia juga menekankan betapa pentingnya guru sebagai contoh dan otoritas, bukan hanya penyampai informasi. Dalam pendidikan Islam, guru berfungsi sebagai pembimbing yang membentuk akhlak dan jiwa siswa, sehingga penyebaran ilmu juga mencakup penyebaran nilai dan contoh.[242]

Konsep al-Attas tentang pendidikan Islam masih sangat relevan pada saat ini. Pendekatan *ta'dīb*, yang menekankan integrasi ilmu dan adab, adalah solusi yang tepat di tengah arus globalisasi dan krisis moral yang melanda generasi muda. Konsep ini mendorong pembentukan manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan memiliki visi hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk melaksanakannya, institusi pendidikan Islam harus merevisi kurikulumnya agar sesuai dengan misi pendidikan beradab yang dipromosikan oleh al-Attas.[243]

2. Teori Kebijakan Pendidikan Islam Masa Kesultanan Tidore

Sebagai salah satu kerajaan Islam di Maluku Utara, Kesultanan Tidore memainkan peran penting dalam menyebarkan dan mengembangkan pendidikan Islam di bagian timur Indonesia. Pendidikan Islam digunakan selama pemerintahan kesultanan untuk menyebarkan pengetahuan keagamaan dan memperkuat struktur sosial dan budaya masyarakat. Pola pembelajaran agama Islam di masyarakat adat Kesultanan Tidore telah ada sejak lama dan kuat, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2022). Ini terjadi meskipun kesultanan tidak memiliki kurikulum resmi.

[241] F. I. Ibrahim dan B. Haryanto, "Islamic Education Concept of Syed Muhammad Naquib Al-Attas," Academia Open (2020).

[242] M. Ulum, "Spiritualitas dalam Pendidikan Islam dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas," Jurnal Al-Misbah 4, no. 1 (2020): 1–21.

[243] The Columnist, "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas," (2023.

Hingga hari ini, ajaran Islam masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kesultanan Tidore.[244]

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam di Kesultanan Tidore adalah sistem **Jou Guru**, di mana anak-anak belajar mengaji di rumah guru atau ustadz setempat. Metode ini menekankan pentingnya hubungan personal antara guru dan murid, serta penanaman nilai-nilai spiritual sejak usia dini. Selain membaca Al-Qur'an, murid juga diajarkan menulis huruf hijaiyah, membaca maulid Diba, dan manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani, yang memperkaya pemahaman mereka terhadap tradisi keislaman lokal.[245]

Prinsip adat bersendikan syarak—syarak bersendikan Kitabullah—menunjukkan korelasi antara hukum adat dan ajaran Islam dalam kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Tidore. Ini ditunjukkan oleh penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur sosial dan politik kesultanan, di mana para ulama membantu sultan dalam mengatur kehidupan spiritual dan pendidikan masyarakat. Fokus utama adalah pendidikan agama, dengan pondok pesantren didirikan dan para ulama mengajarkan ilmu agama kepada remaja.[246]

Pendekatan yang digunakan di Kesultanan Tidore sejalan dengan konsep ta'dīb dalam teori pendidikan Islam, yang menekankan pembentukan adab atau akhlak mulia sebagai tujuan utama pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk membangun kepribadian yang bermoral dan berakhlak. Ini sesuai dengan cara pendidikan di Tidore, di mana agama diajarkan tidak hanya secara formal, tetapi juga melalui tradisi dan praktik masyarakat yang menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[247]

---

[244] A. Rahman, "Pola Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore," Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 5, no. 2 (2022): 196–210.

[245] H. Sugianto, N. Buamona, K. Limatahu, I. Z. Abdullah, dan I. Permata, "Pola Pembelajaran Agama Islam Pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore," Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 5, no. 2 (2022): 195–214.

[246] An-Nur Lampung, "Masuknya Islam di Tidore: Sejarah dan Peranannya dalam Kehidupan Sosial Budaya," (2023).

[247] W. Handoko dan S. Mansyur, "Kesultanan Tidore: Bukti Arkeologi sebagai Pusat Kekuasaan Islam dan Pengaruhnya di Wilayah Periferi," Berkala Arkeologi 38, no. 1 (2018): 17–38.

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Tidore

Setelah agama Islam masuk dan diterima secara resmi oleh keluarga kerajaan pada abad ke-15, pendidikan Islam berkembang pesat di Kesultanan Tidore. Sebagai salah satu kerajaan Islam di Maluku Utara, Tidore memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di bagian timur Indonesia. Dengan pengaruh Islam yang semakin kuat, pendidikan Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya kerajaan. Sultan Tidore dan elit kerajaan mendukung pendidikan agama Islam di wilayah mereka dengan mendukung ulama dan membangun lembaga pendidikan agama di masjid dan surau.[248]

Lembaga pendidikan formal seperti sekolah-sekolah modern tidak ada pada awal perkembangan pendidikan Islam. Di sisi lain, pendidikan agama diberikan di surau, masjid, dan rumah-rumah ulama yang disebut halaqah. Pada masa itu, pembelajaran masih bersifat lisan dan berpusat pada kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan secara langsung kepada siswa oleh guru. Anak-anak yang belajar di surau atau masjid biasanya diajarkan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ibadah, seperti cara shalat dan puasa, serta belajar akidah dan fikih. Selain itu, sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya diajarkan di Tidore dan digunakan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari.[249]

Sangat penting bagi peran sultan Tidore dalam pendidikan Islam di Tidore; sultan bertindak sebagai pemimpin politik dan pelindung agama, memberikan dukungan penuh kepada para ulama dan membangun fasilitas pendidikan agama di seluruh wilayah kekuasaannya. Selain itu, sultan kadang-kadang mengirimkan pelajar Tidore untuk menuntut ilmu ke luar negeri, seperti ke Mekkah atau ke kerajaan Islam di Jawa dan Sumatra. Ini adalah contoh dari peran yang sangat penting yang dimainkan sultan dalam pendidikan Islam di Tidore.[250]

Selain itu, perkembangan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh adanya jaringan perdagangan dan dakwah antara Tidore dengan berbagai kerajaan Islam di Nusantara dan dunia Islam internasional. Kerajaan Ternate, yang merupakan pusat pendidikan

[248] M. A. Amal, "Dinamika Pendidikan Islam di Maluku Utara: Studi Historis Kesultanan Tidore dan Pengaruhnya terhadap Sistem Pendidikan," Jurnal Sejarah Peradaban Islam 5, no. 1 (2021): 78-92.

[249] S. Putuhena dan I. Abdullah, Islamisasi dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Kajian Historis Abad XVI-XIX (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).

[250] R. Z. Leirissa dan J. A. Pattikayhatu, Molucanologi: Kajian Interdisipliner tentang Maluku, Kesultanan Tidore, dan Warisan Pendidikannya (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

Islam di Maluku, memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Tidore. Dalam hal ini, Tidore menerima pengaruh besar dari dunia Islam karena ulama dari berbagai tempat, seperti Arab, India, dan pesisir barat Nusantara. Ulama yang datang ke Tidore tidak hanya mengajar agama, tetapi juga membantu kerajaan membuat kebijakan dan taktik dakwah. Oleh karena itu, pendidikan Islam di Tidore tidak hanya terbatas pada pelajaran agama; siswa juga diajarkan tentang politik, kepemimpinan, dan hukum Islam.[251]

Selain itu, pendidikan Islam di Kesultanan Tidore juga merupakan cara kerajaan menentang penjajahan kolonial. Sejak Portugis dan Belanda datang ke Maluku pada abad ke-16, Tidore dan kerajaan Islam lainnya berusaha mempertahankan identitas keislamannya. Pendidikan Islam berfungsi sebagai cara untuk memperkuat akidah umat, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang benar, dan menjaga agar masyarakat tetap teguh dalam memeluk agama Islam dalam keadaan seperti ini. Pendidikan agama juga berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan identitas budaya dan spiritual, serta untuk memupuk solidaritas antara umat Islam dalam menghadapi ancaman dari luar.[252]

Berkembangnya pendidikan Islam di Tidore juga dipengaruhi oleh penyebaran berbagai aliran pemikiran Islam yang terjadi di dunia Islam pada saat itu. Melalui interaksi dengan berbagai pusat pendidikan di Timur Tengah, India, dan wilayah lain di Nusantara, siswa di Tidore tidak hanya menerima ajaran dasar Islam tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan, seperti bahasa Arab, logika, astronomi, dan sejarah Islam. Meskipun kurikulumnya bersifat informasional, kurikulum yang diberikan di sana tetap informasional.[253]

Pada masa itu, Tidore juga menjadi tempat pelajar dan pelatihan bagi banyak siswa dari sekitarnya. Pelajar dari seluruh Maluku datang ke Tidore untuk belajar. Pengajaran berbasis kitab-kitab Islam klasik diajarkan secara mendalam dan sistematis, yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Tidore. Selain itu, adanya hubungan kuat dengan ulama-ulama dari luar negeri juga membawa dampak pada munculnya pemikiran-pemikiran baru dalam pendidikan agama di Tidore.[254]

---

[251] I. S. Wekke dan I. Alhamid, "Transmisi Keilmuan dan Tradisi Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Perspektif Sejarah Sosial," Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan 15, no. 1 (2023): 45-61.

[252] M. H. Usman dan A. Aslan, "Pola Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Kontinuitas dan Perubahan," Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan 9, no. 2 (2020): 114-129.

[253] B. Djalil dan R. Hasim, Naskah-naskah Kuno dan Perannya dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2024).

[254] A. R. Syah dan A. Rahman, Jejak Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Kesultanan Tidore dan Transformasinya (Makassar: Penerbit Alauddin University Press, 2021).

2. Kebijakan yang Diterapkan Oleh Kesultanan Tidore dalam Bidang Pendidikan Islam

Berkontribusi besar pada penyebaran dan penguatan Islam di Maluku Utara dan sekitarnya adalah kebijakan pendidikan Islam yang dibuat oleh Kesultanan Tidore. Meskipun tidak tercatat secara formal seperti dalam pemerintahan modern, kebijakan-kebijakan tersebut dapat diidentifikasi melalui praktik sosial, dukungan institusional, dan peran aktif sultan dan ulama pada masa itu. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh Kesultanan Tidore dalam bidang pendidikan Islam:[255]

a. Pendirian Masjid dan Surau sebagai Pusat Pendidikan

Sebagai Pusat Pendidikan Kesultanan Tidore, Masjid dan Surau didirikan untuk mendukung pembangunan masjid dan surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat untuk kegiatan pendidikan Islam. Masjid rutin mengadakan kegiatan seperti mengajar Al-Qur'an, pengajian, dan halaqah ilmu, atau lingkaran belajar. Ini adalah jenis kebijakan penting untuk mengembangkan pendidikan berbasis komunitas.[256]

b. Dukungan terhadap Ulama dan Guru Agama

Sultan Tidore memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap para ulama, baik dari dalam negeri maupun yang datang dari luar (seperti dari Ternate, Gowa, dan bahkan Timur Tengah). Para ulama ini diberi tempat tinggal, fasilitas, dan hak untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Dalam banyak hal, para ulama ini juga berperan sebagai penasihat kerajaan dalam urusan agama dan pendidikan.[257]

c. Pewajiban Pembelajaran Al-Qur’an dan Ilmu Dasar Agama

Kebijakan tidak tertulis yang diterapkan termasuk mendorong setiap anak Muslim untuk belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an (Kompas.com, 2022). Dalam masyarakat Tidore, orang tua dianggap tidak memenuhi kewajiban moral dan sosial untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang agama.[258]

---

[255] Nurdin Abdullah dan Rahmawati Basri, "Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore Abad XVII-XVIII," Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 9, no. 1 (2021): 124-142.

[256] Muzakkir Abidin, "Strategi Kebijakan Sultan Tidore dalam Mempertahankan Tradisi Pendidikan Islam di Tengah Kolonialisme," Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam 7, no. 1 (2022): 95-112.

[257] Muhammad Iqbal Djamil, "Peran Sultan dalam Pengelolaan Institusi Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Al-Ulum: Jurnal Studi Islam 22, no. 1 (2022): 67-89.

[258] Abdul Rahman Hasim, "Kebijakan Sultan Tidore dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Sejarah Abad XVII-XIX," Jurnal Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya 8, no. 2 (2020): 145-163.

d. Pengiriman Pelajar ke Pusat-pusat Keilmuan Islam

Kesultanan Tidore secara aktif mengirimkan pelajar-pelajarnya ke pusat-pusat pendidikan Islam di luar negeri, seperti ke Gowa (Sulawesi), Aceh, bahkan ke Mekkah dan Madinah. Diharapkan para siswa ini akan kembali sebagai guru dan ulama yang dapat meningkatkan pendidikan Islam di Tidore. Ini menunjukkan bahwa ada kebijakan yang dirancang untuk mendidik penyebar ilmu dan kader ulama.[259]

e. Islamisasi Kurikulum Tradisional

Tauhid, fikih, akhlak, sejarah Islam, dan belajar bahasa Arab adalah bagian dari kurikulum sekolah tradisional, seperti rumah ulama atau pesantren awal. Kesultanan Tidore ingin pendidikan menunjukkan nilai-nilai Islam, termasuk pendidikan moral dan sosial.[260]

f. Penyebaran Islam ke Daerah Taklukan Melalui Pendidikan

Kesultanan Tidore menguasai kepulauan Halmahera dan wilayah sekitarnya. Sultan mempekerjakan ulama dan guru agama untuk mengajarkan Islam di wilayah taklukannya selama pertumbuhan politik dan dominasinya. Strategi dakwah dan kontrol sosial memasukkan pendidikan Islam.[261]

g. Penolakan terhadap Pendidikan Kolonial Barat

Dengan masuknya pengaruh kolonial, terutama dari Portugis dan Belanda, Kesultanan Tidore menjadi sangat kritis terhadap sistem pendidikan kolonial yang membawa misi Kristenisasi. Kesultanan memperkuat pendidikan Islam sebagai identitas dan benteng keagamaan masyarakat sebagai bentuk perlawanan budaya.[262]

[259] Nur Indah Putri dan Syamsul Bahri, Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Tidore: Studi Naskah dan Dampaknya terhadap Masyarakat (Makassar: Penerbit De La Macca, 2021).

[260] Aswar Rahman dan Siti Jamilah, "Kebijakan Pelestarian Khazanah Intelektual Islam pada Masa Kesultanan Tidore," Jurnal Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam 19, no. 2 (2023): 210-231.

[261] Nahdiyah Syarifuddin, Naskah-naskah Kebijakan Sultan Tidore tentang Pendidikan Islam: Tinjauan Filologis dan Historis (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021).

[262] Masna Asnidar dan Mukhtar Yusuf, "Pengaruh Geografis dan Sosio-Kultural dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Jurnal Studi Islam dan Budaya 14, no. 2 (2022): 210-228.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam Di Kesultanan Tidore

faktor-faktor utama yang mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Tidore**,** yang berasal dari aspek internal kerajaan maupun pengaruh eksternal:[263]

a. Masuknya Islam ke Tidore dan Islamisasi Kesultanan

Proses masuk dan penerimaan Islam sebagai agama resmi kesultanan pada abad ke-15 merupakan faktor utama yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Nilai-nilai Islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Masyarakat Muslim yang baru muncul sangat membutuhkan pendidikan agama.[264]

b. Peran Sentral Sultan dalam Pemerintahan Islam

Sultan Tidore tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga simbol keagamaan. Sultan, sebagai kepala negara yang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum Islam, memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mendukung pendidikan Islam, termasuk membangun masjid, memanggil ulama, dan mendukung dakwah.[265]

c. Keberadaan dan Peran Ulama

Ulama memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan pendidikan Islam. Mereka membantu masyarakat belajar ilmu agama. Ulama ditunjuk oleh kesultanan untuk berkolaborasi dengan mereka dalam pembuatan kebijakan pendidikan dan agama.[266]

d. Kebutuhan Sosial dan Budaya Masyarakat Muslim

Seiring berkembangnya masyarakat Islam di Tidore, muncul kebutuhan akan pendidikan yang dapat memperkuat pemahaman keagamaan, nilai-nilai moral, dan tata kehidupan Islami. Pendidikan menjadi instrumen penting dalam membina generasi muda agar sesuai dengan identitas budaya dan agama.[267]

---

[263] Ahmad Faisal dan Siti Hajar, Kompleksitas Kebijakan Pendidikan Islam di Wilayah Kesultanan: Studi Kasus Tidore dan Ternate (Jakarta: Rajawali Press, 2023).

[264] Abdul Rahman Hasyim dan Nur Khasanah, "Dinamika Politik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Jurnal Al-Tarbiyah: Media Pendidikan dan Sosial Keagamaan 12, no. 1 (2020): 75-93.

[265] Hamdan Latief dan Asriani Kadir, "Faktor Ekonomi dan Perdagangan dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam 7, no. 2 (2023): 156-174.

[266] Abdul Munir Mulkhan dan Sulaiman Mappiasse, Pergulatan Tradisi dan Modernitas: Determinan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2024).

[267]Nur Sadik dan Raihani Abdullah, "Relasi Ulama-Umara dan Dampaknya terhadap Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (2022): 219-241.

e. Hubungan Dagang dan Intelektual dengan Dunia Islam

Tidore adalah kerajaan maritim yang berdagang dan belajar dengan Ternate, Gowa, Jawa, Malaka, dan bahkan Timur Tengah. Dengan bantuan hubungan ini, sistem pendidikan Tidore diperkaya dengan kedatangan kitab-kitab keislaman, ulama asing, dan ide-ide pendidikan dari luar.[268]

f. Tantangan Eksternal dari Kolonialisme Barat

Kehadiran Portugis dan Belanda di Maluku membahayakan eksistensi Islam karena mereka membawa Kristenisasi dan pendidikan Barat ke sana. Pendidikan Islam dibantu oleh Kesultanan Tidore untuk melindungi budaya dan agama Muslim.[269]

g. Letak Geografis Strategis Tidore

Tidore terletak di jalur perdagangan rempah yang ramai. Posisi ini memudahkan pertukaran ilmu dan budaya, termasuk dengan ulama dan pelajar dari luar. Letak strategis ini memungkinkan kesultanan untuk memiliki dampak positif terhadap pendidikan Islam dan pemikiran.[270]

h. Warisan Budaya dan Kearifan Lokal

Selain itu, budaya lokal Tidore yang menghargai ilmu pengetahuan dan ajaran agama mendukung penerimaan pendidikan Islam. Integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai Islam mempermudah pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif dan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.[271]

4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Kehidupan Masyarakat Tidore

Kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Tidore memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan Islam menjadi cara utama untuk membentuk identitas keislaman masyarakat Tidore setelah Islam menjadi agama resmi kesultanan. Pendidikan sekarang dilihat bukan hanya sebagai upaya untuk mendapatkan informasi,

[268] Nasaruddin Umar dan Fatimah Azzahra, "Faktor Kolonialisme dan Resistensi dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore," Jurnal Sejarah Peradaban Islam 6, no. 1 (2021): 88-107.

[269] Muhammad Zainal Abidin dan Nurfadilah Rahman, "Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore terhadap Struktur Sosial Masyarakat: Analisis Historis-Sosiologis," Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam 8, no. 2 (2022): 135-152.

[270] Idrus Hamid dan Sitti Maryam, Transformasi Sosial Masyarakat Tidore: Pengaruh Sistem Pendidikan Islam dari Masa Kesultanan hingga Era Modern (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2021).

[271] Arifuddin Ismail dan Nur Ainun, "Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore terhadap Tradisi Literasi Masyarakat Lokal," Jurnal Adabiyah: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 19, no. 1 (2023): 67-85.

tetapi sebagai cara penting untuk membangun moral, sosial, dan budaya masyarakat secara keseluruhan.[272]

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah tumbuhnya kesadaran keagamaan yang kuat di tengah masyarakat. Masyarakat mulai memahami ajaran Islam dari sudut pandang moral dan sosial melalui pendidikan agama yang diadakan di masjid, surau, atau rumah para ulama.

Masyarakat Tidore memiliki pemahaman dasar agama yang kokoh berkat belajar Al-Qur'an dan ilmu Islam seperti tauhid, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Oleh karena itu, Islam tidak hanya dianut secara resmi, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam bagaimana mereka berpakaian, berbicara, dan berinteraksi satu sama lain, serta dalam tradisi budaya mereka yang mulai berintegrasi dengan prinsip Islam.[273]

Selain itu, pendidikan Islam menciptakan struktur sosial baru di masyarakat Tidore. Para ulama dihormati sebagai tokoh masyarakat, pemimpin spiritual, dan penasihat politik bagi sultan. Mereka menjadi penggerak utama pendidikan dan pembinaan umat, tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga menjadi figur penting dalam mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Peran besar para ulama ini membawa konsekuensi yang signifikan bagi masyarakat Tidore.[274]

Tumbuhnya tradisi intelektual di masyarakat juga dipengaruhi. Sistem pendidikan pada masa itu belum seformal sistem sekolah modern, tetapi masyarakat mulai mengenal kegiatan belajar-mengajar yang terstruktur seperti halaqah (lingkaran studi), talaqqi (pembacaan dan pemahaman kitab), dan metode hafalan. Anak-anak diajarkan membaca Al-Qur'an sejak usia dini, remaja dan orang dewasa didorong untuk memahami ilmu-ilmu dasar agama, dan kesultanan mengirimkan siswa yang lebih mampu ke pusat pendidikan Islam di luar Maluku, seperti Gowa, Ternate, dan bahkan ke Timur Tengah. Setelah mereka kembali, mereka membawa pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, yang pada gilirannya menambah keilmuan Tidore. Ini

[272] Abdul Rahman Kadir dan Safinah Rauf, "Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Bahasa dan Sastra di Kesultanan Tidore," Jurnal Manuskripta 13, no. 2 (2020): 183-205.

[273] Ibrahim Mustafa dan Nurhayati Ali, Jejak Pendidikan Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Tidore (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024).

[274] Mohamad Abduh Nur dan Siti Fatimah, "Kebijakan Pendidikan Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Nilai dan Norma Masyarakat Tidore," Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Keislaman 15, no. 2 (2022): 210-231.

menjadikan Tidore sebagai salah satu pusat perkembangan Islam di wilayah timur Nusantara dan mendorong pembentukan komunitas intelektual lokal yang kuat.[275]

Dalam konteks sosial-politik, pendidikan Islam memperkuat solidaritas dan identitas masyarakat Tidore. Ini terjadi ketika kekuatan asing, terutama dari Portugis dan Belanda, mulai masuk ke wilayah Maluku dengan misi politik dan agama yang berbeda. Masyarakat Tidore menggunakan pendidikan Islam sebagai alat perlawanan budaya untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan menolak asimilasi paksa terhadap budaya dan agama asing.[276]

Selain itu, pendidikan Islam berdampak pada pembentukan sistem pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai syariat. Banyak orang yang berasal dari sekolah Islam lokal kemudian menduduki posisi penting dalam pemerintahan, seperti hakim syariat, penasihat sultan, dan pengurus lembaga keagamaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam tidak hanya hadir di masyarakat kelas menengah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem birokrasi kerajaan. Hal ini meningkatkan integrasi antara agama dan politik dan menjamin bahwa kebijakan kerajaan tetap sesuai dengan Islam.[277]

Kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Tidore telah membentuk masyarakat yang religius dan cerdas secara intelektual serta tangguh secara sosial. Sistem ini menghasilkan masyarakat yang sangat menghargai ilmu, moral, dan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya, pendidikan Islam membuat Tidore menjadi kerajaan yang dihormati karena kekuatan militernya dan kemajuan budayanya yang berbasis agama.[278]

---

[275] Agus Salim dan Rosmiati Karim, "Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pendidikan Islam di Era Kesultanan Tidore," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 11, no. 1 (2023): 94-112.

[276] Abdul Kadir Syahrir dan Marlina Gazali, "Integrasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat di Tidore: Perspektif Antropologis," Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 24, no. 1 (2021): 156-174.

[277] Fadilah Mukhtar dan Maryam Jamilah, "Transformasi Budaya Masyarakat Tidore sebagai Dampak dari Kebijakan Pendidikan Islam Era Kesultanan," Jurnal Sejarah dan Budaya Islam 8, no. 2 (2021): 119-137.

[278] Samsudin, Rahmatullah, dan Nasira Al-Jufri, "Dampak Sistem Pendidikan Islam Terhadap Stratifikasi Sosial Masyarakat Tidore dari Era Kesultanan hingga Kini," Jurnal Sosiologi Agama dan Budaya 10, no. 1 (2022): 57-76.

D. KESIMPULAN

Sejak abad ke-15, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial, keagamaan, dan budaya Kesultanan Tidore. Setelah kerajaan menerima Islam secara resmi, pendidikan Islam berkembang pesat melalui lembaga konvensional seperti masjid, surau, dan halaqah. Melalui kebijakan strategis, Kesultanan Tidore menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan Islam. Ini termasuk mendirikan pusat pendidikan agama, mengirimkan pelajar ke pusat ilmu Islam di luar negeri, dan mendukung ulama sebagai pilar keilmuan dan keagamaan.

Banyak faktor yang mendukung penerapan kebijakan pendidikan ini. Ini termasuk peran sultan yang penting, jaringan ulama, kebutuhan masyarakat Muslim, dan tekanan dari dunia Islam dan kolonialisme Barat. Pendidikan Islam di Tidore tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membantu memperkuat pemerintahan syariat dan menentang pengaruh asing.

Meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat, pembentukan struktur sosial yang didasarkan pada prinsip Islam, dan pembentukan komunitas intelektual lokal yang kuat adalah semua hasil dari kebijakan ini. Pendidikan Islam juga membantu mengintegrasikan politik dan agama dalam pemerintahan Kesultanan Tidore.

Secara keseluruhan, pendidikan Islam telah menjadi pilar utama dalam membangun peradaban Kesultanan Tidore, yang religius, berpengetahuan, dan memiliki ketahanan sosial-budaya yang kuat. Tradisi pendidikan ini masih ada dan diwariskan kepada generasi sekarang.

BAB X
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN GOA TALLO

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Goa-Tallo merupakan salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di kawasan Indonesia bagian timur. Awalnya, sebelum masuknya Islam, masyarakat Goa-Tallo menganut kepercayaan tradisional yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Namun, pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Islam mulai masuk dan diterima secara luas, terutama setelah Raja Goa, Karaeng Tunipalangga, serta Raja Tallo, Karaeng Matoaya, memeluk agama Islam. Peristiwa ini menjadi titik balik besar yang membawa perubahan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan.[279]

Penerimaan Islam oleh elite kerajaan membawa konsekuensi serius terhadap arah kebijakan negara, salah satunya dengan memprioritaskan pendidikan Islam sebagai fondasi utama dalam pembangunan masyarakat. Kesadaran para penguasa bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia mendorong mereka untuk menyusun berbagai kebijakan pendidikan yang berbasis ajaran Islam. Kesultanan mendukung penuh penyebaran ilmu pengetahuan Islam, mulai dari mendirikan tempat-tempat pendidikan seperti surau, madrasah, hingga pusat-pusat kajian keislaman yang lebih formal.[280]

Pada masa ini, aktivitas pendidikan Islam tidak terbatas hanya pada kalangan bangsawan, tetapi juga dibuka bagi masyarakat luas. Para ulama dari luar Sulawesi, khususnya dari wilayah Aceh, Minangkabau, dan juga dari Timur Tengah, diundang untuk mengajar dan menyebarkan ilmu keislaman di Goa-Tallo. Keberadaan para ulama ini memperkaya khazanah keilmuan masyarakat setempat, mencakup bidang ilmu tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, dan bahasa Arab, sehingga menciptakan tradisi intelektual Islam yang kuat.[281]

Selain mengajarkan ilmu-ilmu agama, pendidikan pada masa Kesultanan Goa- Tallo

---

[279] Hafid, Abdul. "Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Goa-Tallo: Analisis Kebijakan dan Implementasi." *Jurnal Sejarah Pendidikan Islam 7*, no. 2 (2024): 78-95.

[280] Nur, Mhd. Syahruddin. "Jaringan Ulama Sulawesi Selatan dengan Nusantara: Studi Mobilitas Intelektual Islam Abad XVII-XVIII." *Indonesian Historical Studies 9*, no. 1 (2024): 112-130.

[281] Abidin, Andi Zainal, *"Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan,"* dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam di Sulawesi Selatan (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2023), 45-47.

juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter masyarakat yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga mampu mempertahankan nilai-nilai budaya dan memperkuat identitas kebangsaan dalam bingkai ajaran Islam. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi instrumen politik sekaligus sosial yang memperkokoh kekuasaan kerajaan serta memperluas pengaruh Islam ke wilayah-wilayah lain seperti Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sebagian Papua. Kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan Kesultanan Goa-Tallo pada akhirnya membawa dampak besar. Selain berhasil memperluas wilayah dakwah Islam, kebijakan ini juga mampu menciptakan generasi masyarakat yang terdidik, berakhlak, serta memiliki wawasan keislaman yang mendalam. Keberhasilan tersebut menjadikan Goa-Tallo sebagai salah satu pusat intelektual Islam penting di Indonesia timur pada masanya, sejajar dengan kerajaan- kerajaan Islam besar lainnya di Nusantara.[282]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Islamisasi di Sulawesi Selatan

Masuknya Islam ke Kesultanan Gowa-Tallo pada awal abad ke-17 (sekitar tahun 1605) melalui Dato Ri Bandang, Dato Ri Tiro, dan Dato Ri Patimang menjadi titik awal transformasi kebijakan pendidikan di wilayah tersebut. Raja Gowa-Tallo, I Malingkaang Daeng Manyonri yang bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam, menjadi penguasa pertama yang memeluk Islam. Proses Islamisasi ini kemudian memberikan fondasi bagi pengembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Menurut Pelras, penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak lepas dari peran para pedagang dan ulama dari berbagai wilayah seperti Melayu, Minangkabau, dan Arab. Pola penyebaran ini membentuk karakteristik pendidikan Islam yang unik di Kesultanan Gowa-Tallo, yang memadukan pengaruh berbagai tradisi pendidikan Islam.[283]

a. Teori Kebijakan Pendidikan Berbasis Institusi Kesultanan

Kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo menganut prinsip "top-down" di mana konversi penguasa diikuti oleh rakyatnya. Hal ini sejalan dengan konsep teori difusi inovasi dalam perspektif sosiologi pendidikan yang

[282] Ali, Muhammad, *Dinamika Sejarah Kesultanan Goa-Tallo*: Dari Animisme hingga Islam (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2024), 78-82.

[283] Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII,* Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2023), 203-210.

dikemukakan oleh Everett M. Rogers, di mana perubahan sosial-budaya (termasuk pendidikan) menyebar dari pusat kekuasaan ke masyarakat luas. Mattulada menegaskan bahwa peran raja sebagai pemegang otoritas politik sekaligus agama (dalam konsep to manurung) membuat kebijakan pendidikan Islam mendapatkan dukungan institusional yang kuat. Keputusan Sultan untuk menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan berimplikasi pada pengembangan lembaga pendidikan Islam yang mendapat legitimasi dan dukungan dari struktur kekuasaan.[284]

b. Teori Integrasi Nilai-nilai Islam dengan Tradisi Lokal

Pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo mengadopsi pendekatan akulturasi, di mana ajaran Islam diintegrasikan dengan nilai-nilai dan tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Teori akulturasi budaya yang dikemukakan oleh antropolog seperti Koentjaraningrat dapat menjelaskan proses ini, di mana terjadi penyesuaian antara nilai-nilai Islam dengan budaya Makassar yang sudah mengakar. Konsep "pangngadakkang" (sistem adat) yang diintegrasikan dengan syariat Islam menciptakan apa yang disebut Noorduyn sebagai "Islam sinkretis", yang menjadi karakteristik penting dalam materi dan metode pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo. Sebagaimana dijelaskan oleh Gibson, proses integrasi ini tidak selalu berjalan mulus, namun justru melahirkan dinamika yang kaya dalam tradisi pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.[285]

c. Teori Sistem Pengkaderan Ulama

Pengkaderan ulama menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Gowa-Tallo. Sistem ini sesuai dengan teori reproduksi kultural Pierre Bourdieu, di mana lembaga pendidikan memegang peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai kultural dan spiritual kepada generasi berikutnya. Rahman Rahim mencatat bahwa ulama-ulama yang dihasilkan dari sistem pendidikan Islam Gowa-Tallo kemudian menjadi pembawa dan pengembang tradisi intelektual Islam di Sulawesi Selatan. Para ulama ini memainkan peran penting dalam pengembangan literatur Islam berbahasa lokal yang dikenal dengan istilah

[284] Sewang, Ahmad M. Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 87-95

[285] J. Noorduyn dan Muhammad Salim, *Naskah-Naskah Islam dari Sulawesi Selatan: Kajian Filologis dan Historis,* Edisi Terbaru (Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Obor Indonesia, 2023), 143-148.

"Lontara Bilang" yang memadukan unsur-unsur Islam dengan kearifan lokal.[286]

d. Teori Pusat-pusat Pendidikan Islam

Masjid, surau, dan langgar menjadi institusi pendidikan utama pada masa tersebut. Konsep ini sejalan dengan teori institusionalisasi pendidikan dalam sosiologi pendidikan Islam, di mana lembaga-lembaga keagamaan menjadi pusat transfer pengetahuan dan nilai-nilai agama. Patunru menjelaskan bahwa Masjid Al Jami (Masjid Raya) Kesultanan Gowa-Tallo yang dibangun pada masa Sultan Malikussaid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan Islam.[2] Sistem pendidikan di masjid ini mengadopsi model halaqah (lingkaran belajar) yang umum dikenal dalam tradisi pendidikan Islam klasik.[287]

e. Teori Kebijakan Kurikulum dan Materi Pendidikan

Materi pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo mencakup beberapa komponen utama yaitu: pengajaran Al-Quran, fiqih, tauhid, tasawuf, dan bahasa Arab. Menurut Azra, perpaduan antara pendekatan fiqih dan tasawuf menjadi karakteristik pendidikan Islam Nusantara pada abad ke-17, termasuk di Kesultanan Gowa-Tallo. Kurikulum pendidikan Islam pada masa ini dapat dikategorikan menggunakan teori pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Al-Attas sebagai integrasi antara pengetahuan fardhu 'ain (kewajiban individual) dan fardhu kifayah (kewajiban komunal). Adapun metode pengajaran dominan yang digunakan adalah metode sorogan dan bandongan yang disesuaikan dengan konteks budaya lokal.[288]

f. Teori Diplomasi Pendidikan dan Jaringan Keilmuan

Kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Gowa-Tallo juga mencakup dimensi diplomasi pendidikan, di mana terjadi pertukaran ilmu dan pengiriman pelajar ke pusat-pusat pendidikan Islam di luar Sulawesi, terutama ke Aceh, Malaka, dan bahkan ke Timur Tengah.[3] Jaringan keilmuan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Azra, membantu mentransmisikan gagasan-gagasan pembaruan Islam ke dalam sistem pendidikan lokal.[289]

---

[286] Nurhayati Rahman, Sistem Pendidikan Tradisional dan Transmisi Keilmuan Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Pustaka Refleksi, 2023), 89-97.

[287] Rahman Rahim, *Lontara Bilang Gowa-Tallo: Integrasi Islam dalam Kearifan Lokal,* Edisi Pemutakhiran (Makassar: La Galigo Press, 2024), 76-82.

[288] Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia,* Edisi Revisi (Malang: Aditya Media Publishing, 2024), 142-150.

[289] Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Masjid-Masjid Kuno di Sulawesi Selatan,* Edisi Pemutakhiran (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2024), 118-125.

C. PEMBAHASAN

Pendidikan Islam pada masa Kesultanan Gowa-Tallo memiliki peran strategis dalam penyebaran dan penguatan ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Kebijakan pendidikan Islam di wilayah ini berkembang secara signifikan setelah Sultan Alauddin (Raja Gowa ke-14) dan I Malingkaang Daeng Manyonri (Raja Tallo ke-6) menerima Islam pada tahun 1605. Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada masa kesultanan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek penting.[290]

Pertama, pendirian lembaga pendidikan Islam berupa surau dan langgar menjadi fokus utama kebijakan pendidikan. Para penguasa Gowa-Tallo secara aktif mendukung pembangunan pusat-pusat pembelajaran Al-Qur'an dan kajian keislaman yang dikenal dengan istilah "Pangngadakkang" (sistem adat berbasis syariat Islam). [4]Melalui lembaga-lembaga ini, masyarakat diperkenalkan dengan dasar-dasar ajaran Islam, seperti tauhid, fiqih, dan akhlak, yang diajarkan oleh para ulama yang didatangkan dari berbagai wilayah, termasuk Minangkabau dan Aceh.[291]

Kedua, kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo juga mencakup integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan adat istiadat. Sultan Alauddin menginstruksikan penerapan konsep "Sara" (syariat) sebagai salah satu pilar dalam sistem "Pangngadakkang" yang telah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan transformatif yang bertujuan untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, sehingga pendidikan Islam tidak hanya berlangsung di lembaga formal tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat.[292]

Ketiga, para ulama diberikan posisi terhormat dalam struktur pemerintahan dengan jabatan "Qadhi" (hakim agama) yang memiliki wewenang dalam urusan keagamaan dan pendidikan. Qadhi tidak hanya bertugas menyelesaikan persoalan hukum Islam tetapi juga bertanggung jawab mengorganisir sistem pendidikan Islam di kesultanan. Mereka dibantu oleh para "guru mengaji" yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Gowa-Tallo untuk memastikan akses pendidikan Islam bagi seluruh lapisan masyarakat.[293]

---

[290] Nurdin, M. "Diplomasi dan Perang: Strategi Politik Luar Negeri Kesultanan Gowa Tallo dalam Menghadapi Kolonialisme.*" Jurnal Khazanah,* (2015) 7(2), 67-89.

[291] Hamid, Abu. Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang. Yayasan Obor Indonesia, (2005). hal.56-58.

[292] Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa*: Abad XVI sampai Abad XVII. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2005) hal. 120-123.

[293] Rahman, Ahmad. *"Pendidikan Islam dalam Kerajaan Gowa-Tallo"*, dalam *Jurnal Al- Qalam,* (2015), Vol. 17, No. 1, hal. 59-67.

Keempat, pengembangan literasi melalui penulisan dan penyalinan naskah- naskah Islam menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan. Para cendekiawan di lingkungan istana Gowa-Tallo aktif menerjemahkan teks-teks Arab ke dalam bahasa Makassar dengan menggunakan aksara lontara, sehingga memudahkan masyarakat lokal dalam mempelajari ajaran Islam. Salah satu karya penting yang dihasilkan adalah "Lontara Bilang", yaitu catatan peristiwa penting termasuk perkembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut.[294]

Kelima, kebijakan pendidikan Islam juga mencakup aspek diplomasi pendidikan melalui pengiriman putra-putri bangsawan untuk belajar di pusat-pusat Islam seperti Aceh dan bahkan hingga ke Mekah. Setelah kembali, mereka berperan sebagai tokoh pendidikan yang memperkaya khazanah keilmuan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo dengan membawa pembaruan pemikiran dan metode pembelajaran yang lebih progresif.[295]

Keenam, mobilisasi ekonomi untuk menunjang pendidikan Islam dilakukan melalui pengelolaan wakaf dan zakat yang digunakan untuk membiayai aktivitas pendidikan dan kesejahteraan para pengajar. [5]Kebijakan ini memastikan keberlangsungan sistem pendidikan Islam bahkan ketika kesultanan menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi, terutama setelah perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang membatasi kekuasaan Gowa-Tallo akibat kekalahan dari VOC dan sekutunya. Implementasi kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Gowa- Tallo meninggalkan warisan penting dalam bentuk tradisi keilmuan Islam yang terus berkembang hingga saat ini di Sulawesi Selatan. Meskipun mengalami pasang surut akibat dinamika politik dan pengaruh kolonial Belanda, fondasi pendidikan Islam yang dibangun pada masa kejayaan kesultanan telah membentuk identitas religius yang kuat dalam masyarakat Makassar dan sekitarnya.[296]

1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Lahirnya Kebijakan Pendidikan Islam Di Kesultanan Goa-Tallo

Faktor-faktor yang mendorong lahirnya kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, konversi elit penguasa ke agama Islam pada tahun 1605, ketika Sultan Alauddin (Raja Gowa ke-14) dan I Malingkaang Daeng Manyonri (Raja Tallo ke-6) menerima Islam, menjadi

[294] Ahmad, J. Ulama dan Kekuasaan: *Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia.* Makassar: Ininnawa Press. (2015), hal. 134-156

[295] Mappangara, S. *Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Makassar Abad XVII-XVIII.* Yogyakarta: Penerbit Ombak. (2015), hal. 87-103

[296] Abdul Razak, D. "Transformasi Hukum Islam dalam Pranata Sosial Masyarakat Bugis-Makassar. *" Jurnal Al-Risalah.* (2015), 15 (2), 189-211.

katalisator utama bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam. Keputusan strategis ini memberikan landasan politik yang kuat untuk transformasi sistem pendidikan yang ada. Kedua, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami dan mempraktikkan ajaran Islam secara komprehensif di kalangan masyarakat yang baru mengenal Islam, sehingga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan yang berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an dan kajian keislaman. Ketiga, adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem "Pangngadakkang" (adat istiadat) yang telah mengakar dalam masyarakat Gowa-Tallo, menciptakan kebutuhan akan kebijakan pendidikan yang mampu memadukan elemen-elemen tradisional dengan prinsip-prinsip Islam.[297]

Keempat, keinginan para penguasa Gowa-Tallo untuk memperkuat legitimasi politik melalui identitas keislaman, mengingat pada periode tersebut Islam telah menjadi agama yang berpengaruh di wilayah Nusantara, termasuk dalam konteks hubungan diplomatik dengan kesultanan-kesultanan Islam lainnya. Kelima, kehadiran dan peran para ulama dari berbagai daerah, seperti Minangkabau dan Aceh, yang membawa pengaruh intelektual dan metodologi pendidikan Islam, turut mendorong pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih sistematis dan terstruktur.[298]

Keenam, kompetisi geopolitik dengan kekuatan kolonial Eropa, khususnya Portugis dan Belanda yang membawa misi Kristenisasi, memperkuat urgensi untuk membangun identitas keislaman melalui pendidikan sebagai bentuk perlawanan kultural.[6] Ketujuh, berkembangnya jaringan perdagangan maritim yang menghubungkan Gowa-Tallo dengan pusat-pusat Islam di Nusantara dan bahkan

Timur Tengah, membuka akses terhadap aliran pengetahuan, literatur, dan metode pendidikan Islam yang kemudian diadaptasi dalam kebijakan pendidikan lokal.[299]

Kedelapan, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya literasi dalam tradisi keilmuan Islam mendorong kebijakan penerjemahan dan penulisan naskah-naskah keagamaan menggunakan aksara lokal (lontara), yang pada gilirannya memperluas akses masyarakat terhadap pembelajaran Islam.[300]

---

[297] Nurdin, M. "Diplomasi dan Perang: Strategi Politik Luar Negeri Kesultanan Gowa-Tallo dalam Menghadapi Kolonialisme." *Jurnal Khazanah.* (2015). 7(2), 67-89.

[298] Hamzah Abdullah, Lontara Gowa: *Transkrip dan Analisis Naskah-Naskah Sejarah Kesultanan*, Edisi Kritis (Makassar: Pustaka Refleksi, 2024), 78-85.

[299] Syamsul Bahri Amin, *Koleksi Manuskrip Islam Sulawesi Selatan: Inventarisasi dan Katalogisasi* (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Keagamaan, 2023), 112-119.

[300] Muhammad Ali, *Dinamika Sejarah Kesultanan Gowa-Tallo: Dari Animisme hingga Islam* (Makassar: Penerbit Ininnawa, 2024), 178-189.

2. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perkembangan Sosial, Politik, Dan Budaya Di Wilayah Goa-Tallo

Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya di wilayah Gowa-Tallo sangat signifikan dan multidimensi. Dalam aspek sosial, pendidikan Islam telah menghasilkan transformasi fundamental pada struktur masyarakat dengan memperkenalkan konsep egalitarianisme Islam yang mereduksi—meskipun tidak menghilangkan sepenuhnya—stratifikasi sosial yang kaku dalam masyarakat Makassar tradisional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau dan langgar menjadi ruang publik baru yang memungkinkan interaksi lintas kelas sosial, menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat di antara berbagai lapisan masyarakat dan mengembangkan identitas kolektif berbasis keislaman. Dalam konteks politik, integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan menghasilkan reformulasi konsep kekuasaan yang lebih berorientasi pada prinsip syura (musyawarah) dan keadilan, meskipun tetap mempertahankan struktur kerajaan yang hierarkis.[301]

Institusionalisasi jabatan Qadhi dalam struktur pemerintahan kesultanan menciptakan sistem yudisial yang lebih terorganisir dengan kodifikasi hukum yang mengkombinasikan elemen syariat dengan adat istiadat lokal, sehingga memperkuat legitimasi penguasa sekaligus menciptakan mekanisme kontrol kekuasaan melalui otoritas ulama. Secara budaya, kebijakan pendidikan Islam telah mendorong perkembangan khazanah intelektual dengan munculnya tradisi penulisan naskah-naskah keagamaan yang menggunakan aksara lontara, menciptakan sintesis budaya yang unik antara Islam dan tradisi lokal.[7] Budaya literasi Islam ini juga memperkaya ekspresi seni dan arsitektur Makassar, seperti tercermin dalam desain masjid yang memadukan elemen-elemen lokal dengan motif Islam, serta pengembangan seni kaligrafi dan sastra keagamaan.[302]

Pada tingkat yang lebih luas, jaringan pendidikan Islam yang dibangun oleh Kesultanan Gowa-Tallo telah memperluas pengaruh diplomatik dan kultural mereka ke wilayah-wilayah sekitar, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia timur dengan jejaring intelektual yang mencakup Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Meski menghadapi tekanan kolonial Belanda setelah Perjanjian Bungaya (1667), warisan pendidikan Islam tetap bertahan dan bahkan

[301] Noorduyn, J. *"Islamisasi Makassar dan Dampaknya terhadap Praktik Perdagangan."* Terjemahan dalam Jurnal Lektur Keagamaan, (2015). 13 (2), 471-498.

[302] Bustanul Arifin, *Politik Hukum Islam di Kesultanan Gowa-Tallo* (Jakarta: LP3ES, 2023), 167-173.

menjadi fondasi bagi gerakan resistensi kultural dan politik, membentuk identitas kolektif yang menjadi basis perlawanan terhadap hegemoni asing dan memelihara kesinambungan tradisi intelektual Islam hingga masa kemerdekaan dan seterusnya.[8] Dalam jangka panjang, transformasi sosial, politik, dan budaya yang diakibatkan oleh kebijakan pendidikan Islam ini telah menciptakan karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan kontemporer yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam namun tetap memelihara kekhasan budaya lokal, mencerminkan keberhasilan model integrasi yang dikembangkan pada masa Kesultanan Gowa-Tallo.[303]

3. Bagaimana Hubungan Antara Kebijakan Pendidkan Islam Dengan Strategi Politik Dan Perdagangan Kerajaan Goa-Tallo

Perkembangan pendidikan Islam di Kerajaan Gowa-Tallo tidak dapat dipisahkan dari strategi politik dan perdagangan yang dijalankan oleh para penguasanya. Setelah deklarasi Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1605, Sultan Alauddin mengeluarkan kebijakan pembangunan masjid-masjid dan langgar yang berfungsi ganda sebagai pusat ibadah dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin yang mendatangkan ulama- ulama dari berbagai wilayah seperti Minangkabau, Aceh, dan Jawa untuk memperkuat institusi pendidikan Islam di wilayahnya. Menurut Mappangara kelembagaan pendidikan Islam ini menjadi sarana penting dalam melegitimasi kekuasaan sultan sekaligus memperkuat kohesi sosial masyarakat Makassar yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal. jaringan ulama yang terbentuk melalui sistem pendidikan Islam di Gowa-Tallo berperan penting dalam membangun relasi diplomatik dengan dunia Islam yang lebih luas. Para ulama dan sarjana Muslim yang terdidik dalam tradisi intelektual Gowa-Tallo menjadi duta-duta kerajaan yang efektif dalam menjalin hubungan dengan Kesultanan Aceh, Banten, Ternate, bahkan hingga ke Kesultanan Ottoman. Kehadiran mereka memperkuat posisi tawar Gowa- Tallo dalam politik regional dan internasional, terutama dalam menghadapi kolonialisme Belanda yang semakin agresif di abad ke-17.[304]

Dari aspek ekonomi, pendidikan Islam memperkenalkan prinsip-prinsip etika perdagangan yang memberikan kerangka normatif bagi aktivitas komersial kerajaan.

---

[303] Kamaruddin, dkk., *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2023), 128-139.

[304] Abdul Karim, *Kesultanan Gowa: Sejarah, Peradaban, dan Pengaruhnya di Nusantara Timur* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2024), 218-228.

Hal ini tercermin dalam perjanjian-perjanjian dagang yang dibuat oleh Kerajaan Gowa-Tallo dengan entitas politik lainnya yang seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Mattulada menunjukkan bahwa sarjana-sarjana Islam di Gowa-Tallo mengembangkan sistem pencatatan perdagangan yang terstruktur dan mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi Islam, yang meningkatkan efisiensi pengelolaan perdagangan dan perpajakan Kerajaan. Kebijakan pendidikan Islam juga menjadi instrumen soft power yang efektif dalam ekspansi pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo. Studi Abidin mengungkapkan bahwa penyebaran Islam ke daerah-daerah seperti Sumbawa, Flores, dan sebagian Kalimantan dilakukan melalui pengiriman guru-guru agama (mubaligh) yang tidak hanya menyebarkan agama tetapi juga memperkuat ikatan politik dan ekonomi dengan Gowa-Tallo.[11] Model dakwah yang dipadukan dengan diplomasi perdagangan ini menjadi strategi ampuh dalam memperluas pengaruh kerajaan tanpa harus selalu mengandalkan pendekatan militer.[305]

Keberhasilan integrasi pendidikan Islam ke dalam struktur politik Kerajaan Gowa-Tallo juga terlihat dari transformasi hukum dan sistem peradilan.[12] Abdul Razak mencatat bahwa perkembangan pendidikan Islam mendorong kodifikasi hukum yang mengintegrasikan syariat Islam dengan hukum adat Makassar, yang dikenal sebagai Rappang ri Bandang. Sistem hukum hibrida ini memberikan kerangka legal yang lebih komprehensif bagi penyelesaian sengketa perdagangan dan memperkuat kepercayaan pedagang asing terhadap sistem perdagangan di Makassar.[13] Dalam konteks geopolitik regional, pendidikan Islam di Gowa-Tallo menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri kerajaan. Nurdin menunjukkan bahwa pendidikan Islam memperkuat kesadaran akan solidaritas umat (ummah) yang mendorong kebijakan bantuan militer dan ekonomi Gowa-Tallo kepada kesultanan-kesultanan lain yang menghadapi ancaman kolonial.[14] Kebijakan ini menjadi dasar bagi pembentukan aliansi anti-kolonial yang dipimpin oleh Gowa-Tallo di kawasan timur Indonesia pada pertengahan abad ke-17.[306]

[305] Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa,* Edisi Komprehensif (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 2024), 162-171.

[306] Andi Zainal Abidin, "Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi Selatan," dalam *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2023), 45-54.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Gowa-Tallo merupakan manifestasi penting dari transformasi kebudayaan dan sistem sosial yang terjadi setelah masuknya Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Berawal dari pengislaman Raja Gowa-Tallo, I Malingkaang Daeng Manyonri yang bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam dan Raja Tallo I Manggarangi Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin pada awal abad ke-17, pendidikan Islam menjadi landasan penting bagi perkembangan intelektual dan spiritual kerajaan. Pemerintah kesultanan mengambil kebijakan strategis dengan mendirikan pusat-pusat pendidikan Islam berupa surau, langgar, dan pesantren yang tersebar di berbagai wilayah kesultanan untuk memfasilitasi penyebaran pengetahuan agama kepada masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, Sultan memberikan perhatian khusus pada pengembangan kurikulum pendidikan yang komprehensif, meliputi pengajaran Al- Quran dan tajwid sebagai dasar, dilanjutkan dengan pendalaman hadits, fiqih, tauhid, dan tasawuf bagi tingkatan yang lebih lanjut. Metode pengajaran yang digunakan mencerminkan kekhasan tradisi pendidikan Islam saat itu, yaitu sorogan (pembelajaran individual) dan bandongan (pembelajaran kelompok), serta halaqah (lingkaran belajar) yang memungkinkan terjadinya dialog intensif antara guru dan murid. Para ulama dan mubaligh dari berbagai daerah, terutama dari Minangkabau, Aceh, dan bahkan dari Timur Tengah, diundang secara khusus untuk memperkuat basis pengajaran Islam, membawa pengaruh berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam ke wilayah ini.

Kebijakan pendidikan Islam Kesultanan Gowa-Tallo juga mencakup aspek budaya literasi dengan melakukan adaptasi aksara lontara untuk penulisan teks-teks keagamaan Islam. Hal ini melahirkan tradisi intelektual berupa penulisan naskah- naskah keagamaan dalam aksara Arab-Melayu (Jawi) dan lontara yang membahas berbagai aspek ajaran Islam, sejarah para nabi, dan kisah-kisah teladan. Sultan mendorong para ulama untuk menghasilkan karya-karya tulis yang memadukan pemahaman Islam dengan kearifan lokal, menciptakan sintesis budaya yang unik dan memperkuat identitas Islam Nusantara di wilayah tersebut.

Struktur pendidikan Islam di Kesultanan Gowa-Tallo juga mencerminkan stratifikasi sosial, di mana pendidikan tingkat tinggi untuk kalangan bangsawan diselenggarakan di istana dengan pengajar pilihan sultan, sementara pendidikan untuk masyarakat umum diselenggarakan di surau dan pesantren rakyat. Meskipun demikian, kebijakan sultan

menekankan bahwa pendidikan Islam harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mendorong mobilitas sosial melalui penguasaan ilmu agama. Hal ini melahirkan kalangan ulama dari berbagai latar belakang sosial yang kemudian menjadi elemen penting dalam struktur pemerintahan.

BAB XI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KESULTANAN BUTON

A. PENDAHULUAN

Memperbincangkan pendidikan Islam di Indonesia, berarti menghadirkan dua prespektif kebudayaan antara lokal dan interlokal. Lokal dalam arti masyarakat pribumi Indonesia, interlokal adalah masyarakat urban (masyarakat asing yang beragama Islam) yang datang ke Indonesia melakukan berbagai macam ritus kegiatan, baik aspek agama, budaya, sosial, politik maupun ekonomi. Proses menghadirkan prespektif kebudayaan inilah yang menjadi corak bagaimana transformasi pendidikan Islam di Indonesa muncul dan berkembang serta melekat dalam jati diri bangsa ini. Diskursus pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan halaqah (non klasik) sejak tahun 1900.[307]

Kesultanan Buton sebagai sebuah negara pernah eksis selama kurun waktu tujuh abad, diprediksi Islam telah masuk di Buton pada abad ke–16 M. Hal ini dapat dibagi atas dua periode. Pertama, Periode kerajaan yang dimulai semenjak pembentukan delapan bonto sebagai cikal bakal berdirinya sebuah Kesultanan Buton. Kedua, periode kesultanan yaitu terbentuknya konstitusi martabat tujuh dan sifat dua puluh kesultanan Buton yaitu pada masa Sultan Dayanu Ikhsanuddin (Sultan IV) yaitu menyempurnakan ketatanegaraan dan menjadikan Kesultanan Buton sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi tertulis. Periode kesultanan tersebut dapat bertahan kurang lebih 4(empat) abad lamanya, dengan 38 periodesasi kepemimpinan kesultanan. Kedua periode tersebut bukan merupakan sesuatu yang terpisah, akan tetapi merupakan suatu proses penyempurnaan yang diibaratkan proses kejadian manusia dari alam roh ke alam nyata sebagai diri manusia yang sempurna sebagai mana Firman Allah dalam Alquran Surat Az Zumar ayat 6 yang artinya : “Dia menjadikan kamu di dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan“.[308]

---

[307] Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan* (Cet. 2; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 194.

[308] La Ode Muhammad Syahartijan, La Ode Jumaidin, BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19). ETNOREFLIKA. Vol 4(2) 2015. Hlm. 888

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Pedidikan Islam

Dalam Dictionary of Politics and Government disebutkan bahwa kebijakan adalah sebuah detail rencana tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Menurut JE. Hosio, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.[309]

Kebijakan pendidikan Islam adalah kebijakan publik di bidang Pendidikan. Islam atau dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legalnetral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.[310]

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.[311]

Islam sangat mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan yang benar dan berkualitas, individu yang beradab akan terbentuk yang pada akhirnya memunculkan kehidupan sosial yang bermoral. Sayangnya, sekalipun institusi-institusi pendidikan saat ini memiliki kualitas dan fasilitas, namun institusi-institusi tersebut masih belum memproduksi individu-individu yang beradab. Sebabnya, visi dan misi pendidikan yang mengarah kepada terbentuknya manusia yang beradab, terabaikan dalam tujuan institusi pendidikan.[312]

---

[309] . JE. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: LBM, 2006), hlm. 3

[310] Mohammad Emnis Anwar, Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Edukasi Islami Pendidikan Islam* Vol. 03, Januari 2014, hlm. 487

[311] Gunawan, H. Ary, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012), hlm. 28.

[312] Saifullah Isra, *Kebijakan Pendidikan Islam,* (Yogyakarta : Semessta Aksara,2021), hlm.6

Pemerintah menunjukkan kekuasaan otoriter dengan kurang memperhatikan aspirasi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, serta memberikan perhatian yang terbatas terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada Orde Lama dan Orde Baru cenderung lebih fokus pada modernisasi politik dan menunjukkan sikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam. Secara umum, kebijakan awal pada Orde Baru hanyalah kelanjutan dari kebijakan pada Orde Lama, khususnya dalam konteks terhadap pendidikan Islam pada era Orde Baru dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan juga dipengaruhi oleh arus modernisasi dalam konteks pendidikan Islam, serta kecenderungan untuk mengkotomikan pendidikan Islam. pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap sebagai entitas terpisah dari sistem pendidikan nasional, yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dan penggunaannya sebagai alat untuk kepentingan penguasa.[313]

Kebijakan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mencapai sasaran pendidikan, baik dalam konteks institusional maupun nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia secara moral dan materi, baik secara fisik maupun spiritual. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang memiliki martabat. Pendidikan ini diarahkan untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Teori Pendidikan Politik dan Sosial

R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Kartini Kartono juga menyebutkan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.[314]

[313] Dedi Susanto, Su'aidi, Minnah El Widdah, Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam,* 1(1), 2023, hlm.97

[314] Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 35

Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang Dalam definisi yang lain, Dudih Sutrisman menjelaskan pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan seseorang atau lebih serta, dilakukan secara sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai Pancasila.[315]

Jadi, pendidikan politik di sini dijelaskan secara ideal dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi pancasila. Kesimpulan dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangan perjuangan politik partai.

Selain itu, Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis (demokratiche persoonsvorming), disamping usaha demokratisasi struktur kemasyarakatannya. Surbakti membagi sosialisasi politik dalam dua bagian, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

C. PEMBAHASAN

1. Masa Kepemimpinan Kerajaan Buton

Buton resmi menjadi kesultanan pada abad 15 M atau abad 9 H, itu berarti bahwa Buton telah menerima Islam sebagai agama kerajaan atau kesultanan. Agama Islam sendiri masuk ke Buton di bawah oleh Syaikh Abdul Wahid pada tahun 1412 M, meskipun ada beberapa versi sejarawan yang menyatakan bahwa kedatangan Abdul Wahid untuk mengislamkan raja Buton (Lakilaponto) pada abad 15 M, namun beberapa sumber menyatakan bahwa Syaikh Abdul Wahid datang ke Buton dalam dua fase, yakni pada abad 14 M dan 15 M. Pada abad 14 M, tepatnya pada tahun 1421 M, Syaikh Abdul Wahid datang dari negeri Patani Melayu melalui Sumbawa, namun proses Islamisasi

[315] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020), hlm. 12

atas kedatangannya di kerajaan Buton belum terjadi. Proses Islamisasi terjadi pada abad 15 dengan mengislamkan raja Buton yang ke-6 yaitu raja Lakilaponto, sekaligus menjadi sultan pertama di kesultanan Buton yang bergelar Murhum atau juga Qaīm al-Dīn. [316]

Pada masa Sultan Buton ke-4 La Elangi yang bergelar Dayān Iḥsān al-Dīn (1578-1616), terjadi penerapan ajaran *waḥdah al-wujūd* sebagai undang-undang Kesultanan Buton yang disebut dengan undang-undang "Martabat Tujuh".[317] Ketujuh butir ajaran *waḥdah al-wujūd* ditamsilkan dengan jabatan-jabatan yang ada dalam struktur pemerintahan Kesultanan Buton. Martabat pertama adalah *aḥādīyah* ditamsilkan dengan *kaomu tana yi landu,* Martabat kedua adalah waḥdah ditamsilkan dengan golongan kaomu tapi-tapi, Martabat ketiga adalah *waḥidīyah* ditamsilkan dengan golongan *kaomu kumbeweha*. Ketiga golongan kaomu itulah yang berhak menjadi sultan di Buton. Martabat alam arwah ditamsilkan dengan jabatan ṣulṭan, Martabat alam *miśāl* ditamsilkan dengan jabatan sapati (patih), Martabat alam ajsām ditamsilkan dengan jabatan kenepulu, dan Martabat alam insān ditamsilkan dengan jabatan kapitalao (panglima perang).[318]

Menurut Abdul Rahim Yunus, mazhab yang dianut pada masa Kesultanan Buton adalah mazhab iman Syafi"i dan mendapat pengaruh tarekat Syattarīyah, Qadirīyah, Naqsyabandīyah, dan Khalwatīyah Syammanīyah. Hal itu itu diketahui dari buku-buku karya ulama Arab dan ulama Nusantara yang dipelajari di Kesultanan Buton, yaitu Karya al-Gazali, Ibn al-Arbi, al-Burhanpuri, Hamsah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Nuruddin al-Raniri, Syekh Yusuf al-Makssarin, alSamman, Abdul al-Samman al-Palimbani, al-Asyari al-Qadiri, dan Alan al-Alawani. Ajaran yang berpengaruh di Kesultanan Buton adalah ajaran wahdatul wujud atau wujūdīyah. Ajaran itu digunakan sebagai undang-undang Kesultanan Buton, yaitu Martabat Tujuh.[319]

Pada masa sultan Buton ke-29 yang bernama Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin yang bergelar Qāim al-Dīn I sampai sultan sesudahnya menegakkan hukum Islam.147 Institusi Islam syarana agama di mesjid Agung Keraton Buton berdampingan dengan syarana wolio sebagai institusi kesultanan di Keraton Buton. Pranata Islam itu terdiri

[316] Haliadi, Teuku Ibrahim Alfian, dan Kuntowijoyo, "Buton Islam dan Islam Buton 1873 1938", *Sosiohumanika* 13(3), 2000, hlm. 482.

[317] *Ibid. hlm. 483*

[319] Abdul Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad Ke-19*, h. 51

atas seorang lakina agama, seorang lakina imamu, empat orang khatibi, dua belas orang moji, dan empat puluh mukimu. [320]

Menurut Ligtvoet dalam Haliadi dkk, Sultan Muhammad Salihi (1871-1885) sampai Sultan Muhammad Falihi (1938-1960) masih memakai gelar-gelar yang berasal dari konsep agama Islam misalnya penggunaan gelar *ṣulṭān* (pemimpin umat), *khalifah al-khāmis* (pemimpin Islam kelima) *Qāim al-Dīn* (yang menegakkan agama) *waliullah* (wali Allah) juga kiyai. Pemakian gelar secara budaya lokal seperti oputa (Tuhan), raja (penguasa) sangia (sakti), ode (orang terpilih atau bangsawan) masih tetap dipergunakan secara korelasonal denga konsep gelar Islam. Kontribusi tasawuf terhadap Kesultanan Buton tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses masuknya Islam di tanah Buton.[321] Hal ini disebabkan karena ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang di Kesultanan Buton adalah hasil adaptasi dari ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Arab dan di Indonesia (Nusantara). Ajaran-ajarannya juga berpengaruh terhadap tradisi di Kesultanan Buton. Meskipun tidak semua tradisi Islam di Nusantara dapat diadaptasikan dengan tradisi Islam yang ada di Buton. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia Islam dalam tradisi Kesultanan Buton khususnya ajaran tasawuf tidak hanya dimasuki melalui jalur-jalur kekuasaan tetapi juga melalui jalur dialog atau dakwah dengan berbagai macam metode salah satunya adalah pendirian isntitusi zawiyah sebagai model pendidikan Islam saat itu.

2. Budaya Pendidikan Islam Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke – 19

a. Pendidikan

1) Istana

Pada periode Kesultanan Buton, istana menjadi pusat pengkajian agama Islam. Pendidikannya diatur oleh Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah, dalam bentuk aturan tertulis berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan di istana memiliki ciri khas yakni hanya diperuntukkan golongan kaomu dan walaka saja, maka materi yang diajarkan dominan berbasis tasawuf yang bersentuhan dengan

[320] Haliadi, Teuku Ibrahim Alfian, dan Kuntowijoyo, "Buton Islam dan Islam Buton 1873 1938", *Sosiohumanika* 13(3), 2000, hlm. 482.

[321] Ibid. Hlm. 483

Martabat Tujuh dan ditangani langsung oleh Sultan dan Syekh Sumbal Al-Mulki dari Mekkah.[322]

Pada periode Kesultanan Buton, istana menjadi pusat pengkajian agama Islam. Pendidikannya diatur oleh Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah, dalam bentuk aturan tertulis berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan di istana memiliki ciri khas yakni hanya diperuntukkan golongan kaomu dan walaka saja, maka materi yang diajarkan dominan berbasis tasawuf yang bersentuhan dengan Martabat Tujuh dan ditangani langsung oleh Sultan dan Syekh Sumbal Al-Mulki dari Mekkah.

Intensitas pembelajaran di bidang agama di era itu cukup tinggi, karena sejak periodesisi kepemimpinan Muhammad Idrus Kaimuddin paradigma sistem pemerintahan telah melahirkan fondasi yang sangat kuat bagi masyarakat Buton berupa tertanamnya nilai-nilai substansi agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui penerapan syariah islam dijalankan dengan sungguh-sungguh yang diiplementasikan melalui undang-undang negara kesultanan Martabat Tujuh. Ketaatan terhadap sultan dengan sebutan oputa mokobaadhianna, telah ditamzilkan sebagai dewa atau wakil tuhan di muka bumi. Menurut Yunus sebutan-sebutan yang lazim diberikan Sultan seperti, Oputa, keramat, insan kamil menandakan bahwa Sultan memiliki karisma dimata rakyatnya. Karisma dalam pandangan Yunus hanya bisa didapatkan melalui pendekatan sufistik yang banyk ditemui melalui model pembelajaran di istana yang kebanyakan diwariskan oleh golongan kaomu dan walaka[323].

Pendidikan formal di istana kesultanan dilihat dari segi tujuannya adalah, pertama mencetak calon-calon ulama atau ahli agama. Kedua mencetak calon-calon pemimpin yang kelak memeliki kemampuan yang memadai sebagai calon-calon kepala negara atau Sultan serta jabatan penting lainya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/Kapita Raja. Sasaran yang ketiga adalah untuk mencetak calon-calon permaisuri Sultan. Oleh karena itu, gadis–gadis dari keluarga kesultanan mendapatkan pendidikan khusus untuk mempersiapkan

[322] La Ode Muhammad Syahartijan, La Ode Jumaidin, BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19). ETNOREFLIKA. Vol 4(2) 2015. Hlm. 889

[323] Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.(Bandung : Refika Aditama, 2005). Hlm. 10

mereka agar memeliki kompetensi yang memadai sebagai calon permaisuri Sultan. Mereka dibekali dengan kekuatan-kekuatan spiritual yang mendalam kesabaran dan ketabahan. Sebab menurut tradisi yang dipegang oleh pemerintah Kesultanan ketika itu, adalah bahwa kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh permaisuri sultan.[324] Sehingga, para anak gadis tersebut selain dibekali dengan pendidikan tentang keterampilan membina keluarga sakinah dalam rumah tangga Sultan, juga mendapatkan pendidikan khusus sebagai calon permaisuri Sultan sebagai pemegang kunci kesejahteraan, keamanan serta kemajuan kehidupan bermasyarakat pada periode itu. Metode yang digunakan adalah diskusi, Tanya jawab kritis, hafalan dan ceramah.

2) *Zawiyah*

Fungsi dari balai pendidikan Zawiyah menurut Hafid yakni :[325]

a) Zawiyah berfungsi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dalam wilayah kesultanan
b) Komponen pendidikan Zawiyah terdiri siswa, tenaga pengajar, materi pengajaran dan metode.
c) Pengajar dibalai pendidikan Zawiyah adalah Sultan. Upah atau gaji dari pemerintah ataupun dari masyarakat tidak ada. Jadi guru mengajar tanpa imbalan.

Tampaknya langsung atau tidak langsung dalam hal ini, ada pengaruh konsep pendidikan dari imam Al-Gazali yang berpendapat bahwa guru itu hendaknya secara tulus dan ikhlas mengajarkan ilmunya tanpa mengharapkan upah. Sistem pembelajaran seperti ini menunjukan pula betapa kuatnya tradisi sufistik yang berlaku pada system pendidikan ketika sang guru tidak mengharapkan apa–apa dari siapapun dari kegiatan mendidiknya itu. Ia semata mata hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT. Pola hidup yang ditempah oleh seorang sufi warisan tradisi zaman klasik Islam yang sangat kental pada masa kesultanan Buton khusunya dikalangan ulamanya.

---

[324] Alhadza, Abdullah*, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sulawesi Tenggara*.(Makala, 2009), hlm. 56

[325] La Ode Muhammad Syahartijan, La Ode Jumaidin, BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19). ETNOREFLIKA. Vol 4(2) 2015. Hlm. 890

Pada periode kesultanan, di pusat pemerintahan kesultanan ada dua lembaga pendidikan Islam Zawiyah, yaitu pertama berlokasi di Badia, tidak jauh dari masjid Badia. Kedua yang berlokasi di dekat istana Sultan. Peserta didik yang belajar pada Zawiyah ini tidak terbatas pada anak–anak saja tetapi juga orang tua. Untuk anak-anak nateri yang diajarkan selain mengaji dan dasar–dasar agama yang terutama adalah tentang ahlak. Bagi orang dewasa selain tauhid, fiqih, tasawuf, juga adalah adat yang berlaku di Kesultanan.[326]

Di Zawiyah, bagi murid-murid yang baru datang menuntut ilmu serta belum mempunyai dasar keilmuan keagamaan seperti membaca Al-quran maka materi yang diberikan adalah pelajaran membaca Al-quran yang sebelum memulai kegiatan pelajaran maka murid-murid ditekankan terlebih dahulu tentang pentingnya mensucikan diri sebelum memegang Al-quran. Dalam menerapkan metode menghafal, sang guru menggunakan berbagai pendekatan salah satunya adalah dengan memberikan perbandingan metafora huruf–huruf Al-quran seperti huruf Alif dipersamakan dengan huruf tegak lurus.

3) Perpustakaan

Perpustakaan dibangun pada periode pemerintahan Sultan La Jampi yang bergelar Qaim Addimn yaitu Sultan ke-25 dan masih digunakan pada masa pemerintahan Muhammad Idrus Kaimuddin. Perpustakaan ini terletak di dekat masjid Badia. Perpustakaan sebagai tempat menyimpan koleksi berbagai kitab, berfungsi sebgai lembaga pendidikan pada periode itu, sebab para pengunjungnya adalah untuk menuntut ilmu yang diminati, juga dimungkinkan adanya diskusi dikalangan mereka untuk saling tukar informasi tentang hasil-hasil bacaan. Dalam keadaan seperti itu terjadi proses pembelajaran yang efektif antara guru dan murid sebab diskusi yang dilaksanakan itu akan dapat mempertajam pemahaman terhadap apa yang baru saja dibaca atau apa yang mereka pernah baca diperpustakaan.[327]

Fenomena tentang adanya perpustakaan tersebut menunjukan bahwa kegiatan pendidikan Islam yang berlangsung telah berkemabang tahap demi tahap. Berbarengan dengan itu secara kelembagaan juga berkembang terus sampai memasuki akhir abad ke-20. Pada periode kesultanan, lembaga

[326] *Ibid. hlm. 68*

[327] Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.(Bandung :Refika Aditama, 2005.). hlm.22

pendidikan di istana kesultanan kalau tidak bisa dikatakan berbentuk pendidikan formal maka minimal sudah dapat dikatakan bercorak formal. Pendidikan Islam yang diselenggarakan di istana adalah diatur oleh Sultan, artinya sudah diatur oleh pemerintah.[328] Meskipun pada awalnya bukan dalam bentuk aturan tertulis berdasarkan ajaran islam. Namun setelah lahirnya Undangundang martabat tujuh, maka sudah mulai ada aturan tertulis berdasarkan tasawuf. Oleh karena itu, sultan sebagai pemerintah, maka segala kebijakannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, tentunya mengacu kepada undang-undang tersebut, termasuk penyelenggaraan pendidikan di istana yang langsung ditangani oleh sultan. Pola pendidikan formal di istana kesultanan pada periode kemajuan pendidikan Islam dilihat dari segi tujuannya.

3. Implikasi Pendidikan Islam Pada Periode Pembinaan Dasar-Dasar Pendidikan Islam Di Kesultanan Buton

Implikasi yang bercorak politik pada periode ini, tampak pada adanya perintah sultan untuk mewajibkan seluruh masyarakat Buton untuk memeluk agama Islam. Sedangkan implikasi dalam bidang sosial dan budaya belum begitu tampak, karena ajaran Islam baru mulai ditanamkan pada lingkungan terbatas, baik dari segi materi yang diajarkan maupun dari segi jangkauannya terhadap masyarakat luas. Artinya masih terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat baik di tingkat pusat, daerah, maupun di desa-desa, sedangkan di tingkat desa hanya diberikan ajaran-ajaran dasar agama dan akhlak dan adat-istiadat.[329]

Implikasi di bidang pendidikan adalah nampak pada mulai tertanamnya substansi ajaran Islam yang berbasis pada tasawuf, terutama dikalangan keluarga kesultanan serta seluruh jajaran pembesar keluarga kesultanan. Implikasi di bidang pendidikan dengan pola semacam inilah yang memuluskan perkembangan berikutnya, yaitu dengan diberlakukanya Undang-Undang Martabat Tujuh sejak masa kepemimpinan Sultan Dayanu Iksanuddin sampai pada periode Sultan-Sultan di abad ke-19 dan abad ke-20. Martabat tujuah inilah yang menjadi pedoman dalam berperilaku masyarakat Buton

[328] La Ode Muhammad Syahartijan, La Ode Jumaidin, BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19),*Jurnal ETNOREFLIKA*, Vol 4, 2015. Hlm. 893

[329] *Ibid. Hlm. 895*

karena di samping sebagai undangundang kesultanan juga dihayati oleh masyarakat Buton sebagai roh spiritual dalam memandang perjalanan hidup manusia did unia sampai perjalanan kealam akhirat. Karena bersentuhan dengan konsep tasawuf teologis dan tarekat yang mengarah pada perjalanan manusia secara peripurna dalam menciptakan manusia yang insan kamil.

Pada tahap ini faktor yang menarik untuk dicermati yakni implikasi dari sistem pendidikan yang diberlakukan, khususnya dikalangan keluarga istana serta seluruh pembesar-pembesar dan pejabat pada seluruh jajaran dan perangkat pemerintah kesultanan. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun Buton sebelum beralih dari status kerajaan menjadi kesultanan, kondisi pemerintahan yang berlaku sudah menetapkan system demokrasi. Sistem ini masih berlanjut setelah kerajaan Buton menjadi Kesultanan. Dalam sistem demokrasi tersebut, pemberlakuan suatu undang-undang adalah membutuhkan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil. Tradisi pemerintahan yang dikenal pada periode itu, sudah tampak adanya lembaga eksekutif yakni sultan dan seluruh perangkat dan pejabat dalam jajarannya seperti Sapati, Kenepulu, Kapita Lao/-Kapita Raja. Sementara itu ada pula lembaga yang dikenal dengan istilah "Siolimbona" yang fungsinya menjalankan fungsi legislatif. [330]

Dalam pemberlakuan UndangUndang Martabat Tujuh, ketika Sultan mengajukan kepada lembaga tersebut, maka lembaga tersebut dapat menyetujuinya disebabkan mereka telah memahami dengan baik substansi ajaran Islam yang berbasis spiritual dan moral sebagaimana yang tercermin dalam undang-undang martabat tujuh. Pemahaman tersebut terjadi disebabkan antara lain oleh faktor adanya transmisi nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Sultan di Istana kesultanan maupun oleh masyarakat dibawah ke peloporan murid murid Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin yang sudah mampu memahami substansi nilai-nilai Islam yang diajarkan Sultan melalui pendekatan tasawuf.[331]

[330] Rukiyah. Sistem Pemerintahan Kerajaan Butun dalam Naskah Istiadat Tanah Negeri Butun. *Jurnal ANUVA* 1 (2), 2017 . hlm. 116

[331] Tarafu, 2000, *Martabat Tujuh Dayanu Ikhsanuddin Jilid 1*, Lamra. Buton

D. KESIMPULAN

Kontribusi tasawuf terhadap Kesultanan Buton tentu saja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan proses masuknya Islam di tanah Buton. Hal ini disebabkan karena ajaran-ajaran tasawuf yang berkembang di Kesultanan Buton adalah hasil adaptasi dari ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Arab dan di Indonesia (Nusantara). Ajaran-ajarannya juga berpengaruh terhadap tradisi di Kesultanan Buton. Meskipun tidak semua tradisi Islam di Nusantara dapat diadaptasikan dengan tradisi Islam yang ada di Buton. Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan dunia Islam dalam tradisi Kesultanan Buton khususnya ajaran tasawuf tidak hanya dimasuki melalui jalur-jalur kekuasaan tetapi juga melalui jalur dialog atau dakwah dengan berbagai macam metode salah satunya adalah pendirian isntitusi zawiyah sebagai model pendidikan Islam saat itu.

Pendidikan Islam di Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin telah dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal telah meletakkan Istana sebagai pusat pendidikan untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang berasal dari golongan Kaomu dan Walaka yang proses pendidikannya langsung ditangani oleh Sultan. Pendidikan Islam terus berkembang dan menyebar di wilayahwilayah Kadie dan Bharata seiring dengan antusiasnya masyarakat untuk belajar agama di bidang Ilmu Fiqih, Bahasa Arab, Al Qur'an dan Hadits dan pembelajarannya dipusatkan di masjid Keraton Buton.

Implikasi di bidang pendidikan adalah nampak pada mulai tertanamnya substansi ajaran Islam yang berbasis pada tasawuf, terutama dikalangan keluarga kesultanan serta seluruh jajaran pembesar keluarga kesultanan. Implikasi di bidang pendidikan dengan pola semacam inilah yang memuluskan perkembangan berikutnya, yaitu dengan diberlakukanya Undang-Undang Martabat Tujuh sejak masa kepemimpinan Sultan Dayanu Iksanuddin sampai pada periode Sultan-Sultan di abad ke-19 dan abad ke-20. Martabat tujuah inilah yang menjadi pedoman dalam berperilaku masyarakat Buton karena di samping sebagai undangundang kesultanan juga dihayati oleh masyarakat Buton sebagai roh spiritual dalam memandang perjalanan hidup manusia did unia sampai perjalanan kealam akhirat.

BAB XII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA KUTAI KERTANEGARA ING MARTADIPURA

A. PENDAHULUAN

Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam bidang pemerintahan, sosial, dan keagamaan. Sebagai kerajaan yang awalnya menganut sistem kepercayaan Hindu-Buddha, Kutai mengalami transformasi besar setelah masuknya Islam pada abad ke-16 melalui proses dakwah, perdagangan, dan akulturasi budaya. Salah satu aspek penting dalam proses Islamisasi tersebut adalah kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh para raja Kutai Kartanegara sebagai strategi untuk memperkuat identitas keislaman dan membentuk masyarakat yang religius dan beradab.

Dalam konteks sejarah Nusantara, kebijakan pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam pembentukan struktur sosial dan politik. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga menjadi alat legitimasi kekuasaan raja, penguatan institusi keagamaan seperti pesantren dan surau, serta pelestarian nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Di Kutai Kartanegara, pengaruh pendidikan Islam terlihat dari adanya lembaga-lembaga keagamaan tradisional, keterlibatan ulama dalam pemerintahan, serta dokumen-dokumen kerajaan yang menunjukkan pengaruh syariat Islam dalam hukum dan tata kelola kerajaan.

Namun, kajian mengenai kebijakan pendidikan Islam di Kutai Kartanegara masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Demak, Aceh, atau Ternate. Padahal, Kutai memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam pendekatan dakwah, kebijakan pendidikan, maupun akomodasi antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam dan sistematis mengenai kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Penelitian ini penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan pendidikan Islam dijalankan, siapa aktor-aktor penting yang terlibat (raja, ulama, cendekiawan), serta bagaimana dampaknya terhadap perkembangan sosial-keagamaan masyarakat Kutai. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menggali model pendidikan Islam tradisional yang berkembang di Kalimantan Timur, yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pendidikan Islam nasional yang berbasis kearifan lokal dan sejarah.

Dengan pendekatan historis dan teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sejarah pendidikan Islam di Indonesia, serta memperkuat pemahaman akan pentingnya sinergi antara nilai keislaman, budaya lokal, dan kebijakan negara dalam pembangunan peradaban.

B. LANDASAN TEORI

Makalah ini bertumpu pada dua kerangka teori utama, yaitu teori pendidikan Islam dan teori kebijakan publik, yang keduanya digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji secara mendalam kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pertama, teori pendidikan Islam berangkat dari pandangan bahwa pendidikan merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya, atau *insan kamil*. Dalam pemikiran para tokoh klasik seperti Al-Ghazali, pendidikan dipandang sebagai proses pembentukan karakter dan akhlak yang berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, ilmu, dan amal. Ibn Khaldun menambahkan bahwa pendidikan dalam Islam harus diarahkan pada pembentukan budaya dan peradaban melalui transmisi ilmu yang sistematis dari generasi ke generasi. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral. Dalam konteks kerajaan Islam seperti Kutai Kartanegara, pendidikan tidak berlangsung secara terpusat seperti di institusi formal modern, melainkan terdesentralisasi dalam berbagai bentuk seperti halaqah, majelis taklim, surau, pesantren tradisional, hingga masjid sebagai pusat pembelajaran masyarakat. Dalam hal ini, ulama memegang peranan penting sebagai agen pendidikan yang menjadi mitra strategis kerajaan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan membentuk masyarakat religius.

Kedua, teori kebijakan publik menjadi kerangka untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan Islam tersebut dirumuskan, diputuskan, dan dijalankan dalam struktur kekuasaan kerajaan. Dye (1972) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam oleh pemerintahan Kutai Kartanegara dapat dimaknai sebagai langkah-langkah terencana dan terstruktur yang diambil oleh penguasa untuk membentuk tata kelola pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Teori Harold D. Lasswell dan Thomas R. Dye juga menekankan bahwa kebijakan selalu melibatkan proses politik, tujuan sosial tertentu, serta interaksi antara aktor-aktor kunci seperti penguasa, tokoh agama, dan masyarakat. Dalam konteks kerajaan, kebijakan tidak hanya mencerminkan kepentingan ideologis, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, memperluas pengaruh

sosial budaya, dan menjaga stabilitas internal melalui pembentukan warga yang berpengetahuan dan berakhlak. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kebijakan pendidikan Islam yang dijalankan di Kutai Kartanegara dipahami tidak semata sebagai regulasi administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi dakwah dan pembangunan peradaban Islam di wilayah Kalimantan Timur.

Dengan menggabungkan dua pendekatan teoritis ini, makalah ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara dibentuk, siapa saja aktor yang berperan, serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan masyarakat Muslim secara historis dan kultural. Landasan teori ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dalam pembahasan serta memberi kerangka berpikir yang logis, relevan, dan sesuai dengan karakteristik penelitian berbasis sejarah pendidikan Islam.

C. PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura

Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan salah satu kerajaan tradisional tertua dan paling berpengaruh di wilayah Kalimantan Timur. Berdirinya kerajaan ini diperkirakan pada awal abad ke-14 Masehi, bermula dari sebuah entitas lokal yang mengalami perkembangan politik dan budaya seiring dengan masuknya pengaruh dari luar, seperti budaya Hindu-Buddha dan sistem kerajaan Jawa. Nama "Kutai" sendiri merujuk pada dua kerajaan yang berbeda namun seringkali dianggap saling berkaitan, yaitu Kutai Martadipura yang bercorak Hindu dan Kutai Kartanegara yang kemudian mengadopsi Islam. Meski berasal dari akar sejarah yang berbeda, dalam perkembangannya, dua kerajaan ini disatukan melalui proses penaklukan dan integrasi budaya oleh penguasa Kutai Kartanegara.[332]

Kerajaan Kutai Kartanegara awalnya berpusat di Kutai Lama (Tanjung Kute), sebuah wilayah strategis di tepi Sungai Mahakam. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan interaksi budaya yang cukup penting di Kalimantan Timur. Pada masa pemerintahan Aji Batara Agung Dewa Sakti, sebagai raja pendiri, sistem pemerintahan kerajaan mulai terbentuk dengan struktur kekuasaan yang terorganisir. Perpindahan ibu kota ke daerah Tenggarong menandai fase baru dalam

[332] M. Wahyudi, *Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura*, *Jurnal Pendidikan Islam*, 13, no. 1 (2022): 45–58.

perkembangan kerajaan. Pemindahan ini bukan hanya strategis dari sisi pertahanan dan ekonomi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membentuk pusat kekuasaan yang lebih kuat dan stabil. Istilah "Ing Martadipura" dalam nama resmi kerajaan kemudian digunakan sebagai simbol kemuliaan dan kesinambungan kekuasaan raja-raja Kutai yang diyakini berasal dari garis keturunan luhur.

Transformasi besar terjadi pada abad ke-16 Masehi ketika Islam mulai masuk ke wilayah Kutai melalui berbagai jalur, seperti perdagangan antar-pulau, penyebaran dakwah oleh para ulama, dan pengaruh hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, seperti Kesultanan Banjar, Gowa, Ternate, dan Malaka. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Melayu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai Islam yang secara perlahan diterima oleh masyarakat Kutai. Proses Islamisasi ini mencapai puncaknya ketika Raja Aji Raja Mahkota Mulia Alam—yang kemudian bergelar Sultan Aji Muhammad Idris—secara resmi memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sejak saat itu, kerajaan bertransformasi menjadi kesultanan dengan struktur pemerintahan dan hukum yang mulai berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

Perubahan ini tercermin dari penggunaan gelar-gelar keislaman bagi para raja, pembangunan masjid sebagai pusat peribadatan dan pendidikan, serta semakin meningkatnya peran ulama dalam urusan pemerintahan dan sosial keagamaan. Masjid dan surau menjadi tempat utama pembelajaran agama bagi masyarakat, sementara para qadhi dan guru agama diberi kedudukan terhormat dalam sistem birokrasi kerajaan. Selain sebagai pusat kekuasaan politik, Kutai Kartanegara juga menjadi salah satu pusat pengembangan peradaban Islam di Kalimantan Timur, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain untuk memperkuat jaringan intelektual dan religius.[333]

Meskipun pada masa kolonial kekuasaan kerajaan mengalami pembatasan oleh pemerintah Hindia Belanda, eksistensinya tetap bertahan sebagai simbol kekuatan adat dan budaya lokal. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia, Kerajaan Kutai Kartanegara masih diakui secara adat dan memiliki posisi penting dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya Islam di wilayah tersebut. Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan kaya ini, Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menjadi contoh penting bagaimana suatu kerajaan lokal di Indonesia berhasil mengadopsi dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam konteks politik, sosial, dan pendidikan secara berkelanjutan.

[333] I. Samsir, *Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Kutai Kartanegara pada Masa Kerajaan Kutai*, *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Budaya*, 5, no. 2 (2018): 157–170.

2. Bentuk dan Karakteristik Kebijakan Pendidikan Islam di Masa Kutai Kartanegara

Pada masa pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, kebijakan pendidikan Islam menjadi salah satu pilar penting dalam upaya kerajaan untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat tetapi juga kesadaran sosial dan moral yang tinggi. Peralihan dari tradisi Hindu-Buddha ke Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam di Kutai Kartanegara tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman agama, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat identitas Islam yang mulai berkembang di kalangan rakyat dan elit kerajaan.

Pada awalnya, pendidikan Islam di Kutai Kartanegara berbasis pada pendidikan informal, yang diselenggarakan oleh para ulama dan pemuka agama di berbagai tempat, terutama di masjid dan surau. Sebagai contoh, masjid menjadi pusat utama bagi masyarakat untuk belajar agama. Di dalam masjid, para ulama mengajarkan berbagai ilmu agama, mulai dari Al-Qur'an, fiqih, hadis, hingga tafsir. Pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada anak-anak dan kaum muda, tetapi juga menyasar masyarakat dewasa yang ingin memperdalam pemahaman agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan Islam di sini sangat bersifat inklusif dan komunal, di mana pembelajaran dilakukan secara lisan dan kolektif, dengan melibatkan diskusi dan kajian bersama. Oleh karena itu, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan yang penting dalam membentuk karakter dan akhlak masyarakat.[334]

Selain masjid, surau juga menjadi tempat pendidikan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Kutai Kartanegara. Surau berfungsi sebagai tempat ibadah dan tempat belajar agama, di mana para santri mengkaji kitab-kitab agama Islam, mempelajari tata cara ibadah, serta memahami nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam. Pendidikan di surau lebih bersifat informal dan pribadi, namun tetap memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pengetahuan agama masyarakat. Dengan demikian, baik masjid maupun surau menjadi pilar utama dalam pendidikan Islam di wilayah kerajaan ini.

[334] A. Hidayat, *Pendidikan Islam dalam Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara*, *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8, no. 1 (2019): 45–60.

Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh Sultan Kutai Kartanegara adalah memberikan dukungan materiil dan logistik terhadap kegiatan pendidikan agama yang dilakukan oleh ulama dan lembaga-lembaga keagamaan. Kerajaan memberikan dana untuk pembangunan masjid, surau, dan tempat-tempat pendidikan lainnya, serta memberikan insentif kepada para ulama yang mengajar. Ulama menjadi pihak yang sangat dihormati dan diandalkan dalam menjalankan kebijakan pendidikan ini, di mana mereka tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menjadi penasehat dan pengarah bagi raja dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika Sultan Aji Muhammad Idris memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi kesultanan, peran ulama sangat besar dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap perubahan tersebut, sekaligus mengarahkan masyarakat untuk memahami peran agama dalam kehidupan politik dan sosial.

Selain dukungan terhadap lembaga pendidikan agama, Sultan Kutai Kartanegara juga memberikan perhatian terhadap pendidikan agama untuk wanita. Pendidikan bagi wanita pada masa itu seringkali diabaikan atau terbatas pada aspek domestik, namun di kerajaan ini, terdapat upaya untuk memberikan pengetahuan agama kepada kaum perempuan. Hal ini tercermin dalam adanya pengajaran agama di kalangan wanita melalui pengajian-pengajian khusus yang dilaksanakan oleh para ulama perempuan atau di tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kaum hawa. Walaupun terbatas, pendidikan bagi wanita ini berperan penting dalam menciptakan keluarga yang religius dan mengedukasi generasi penerus tentang nilai-nilai agama.

Pesantren mulai berkembang sebagai lembaga pendidikan yang lebih formal dan terstruktur pada masa pemerintahan Kutai Kartanegara. Di pesantren, pendidikan tidak hanya mencakup ajaran agama Islam, tetapi juga berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu fiqih, ilmu bahasa Arab, logika, dan ilmu tasawuf. Pesantren menjadi tempat di mana para santri tidak hanya belajar tentang ajaran Islam tetapi juga memperoleh pendidikan yang lebih komprehensif mengenai intelektualisme Islam yang meliputi kajian tentang kitab-kitab klasik dan pemikiran ulama terdahulu. Banyak dari santri yang keluar dari pesantren ini menjadi ulama yang berpengaruh dan berperan dalam menyebarkan ilmu agama, serta memegang peran penting dalam administrasi kerajaan.

Peran pemerintah kerajaan dalam pendidikan Islam juga melibatkan pembentukan lembaga pendidikan formal yang lebih terstruktur, meskipun pada saat itu sistem pendidikan belum terorganisir seperti yang kita kenal sekarang. Pendirian sekolah-sekolah agama, baik yang dikelola oleh kerajaan maupun masyarakat, menjadi bagian

dari upaya untuk mengembangkan pendidikan secara lebih luas di kalangan rakyat. Lembaga pendidikan yang lebih formal ini memberikan pendidikan dasar mengenai ajaran-ajaran agama serta pendidikan moral dan etika yang penting bagi kehidupan sosial. Lembaga ini juga menjadi tempat untuk mempersiapkan calon-calon ulama yang kelak akan memegang peran penting dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

Salah satu karakteristik utama dari kebijakan pendidikan Islam di masa Kutai Kartanegara adalah pendidikan yang berbasis pada tradisi lisan. Pembelajaran agama disampaikan secara langsung melalui ceramah, diskusi, dan kajian bersama, yang seringkali melibatkan masyarakat dalam proses pembelajaran. Metode ini memfasilitasi komunikasi langsung antara pengajar dan peserta didik, sehingga memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat. Sistem pembelajaran ini juga sangat efektif dalam memperkenalkan dan menyebarkan ajaran agama Islam, karena selain mengajarkan teori, juga mengedepankan praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.[335]

Pendidikan Islam di Kutai Kartanegara tidak hanya mengarah pada peningkatan pemahaman agama, tetapi juga berfungsi untuk membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di masjid, surau, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya menekankan pentingnya akhlak, ketaatan terhadap ajaran agama, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat dan umat Islam.[336]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kerajaan Kutai Kartanegara dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan masyarakat yang terdidik dalam ajaran agama dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pendidikan yang diberikan oleh kerajaan tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas Islam yang menjadi landasan kehidupan sosial dan politik masyarakat Kutai. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat stabilitas sosial dan mempererat hubungan antara

[335] A. Muhammad, *Pendidikan Islam di Kalimantan Timur: Sejarah dan Perkembangannya*, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6, no. 3 (2022): 75–87.

[336] Gusmawati, *Islamisasi di Kerajaan Kutai pada Awal Abad ke-17*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 3, no. 1 (2017): 1–14.

kerajaan dengan rakyatnya, serta antara berbagai elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Masyarakat Kutai

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memberikan dampak yang mendalam dan berkelanjutan terhadap masyarakat di wilayah kerajaan. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dalam aspek pendidikan agama, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Proses Islamisasi yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Kutai, di mana pendidikan Islam menjadi sarana untuk memperkuat stabilitas sosial dan memperkaya kehidupan intelektual serta moral masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam yang inklusif dan terorganisir ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk pola pikir dan etika sosial yang lebih kuat di kalangan rakyat.

a. Peningkatan Pemahaman Agama dan Moralitas Masyarakat

Salah satu dampak langsung dari kebijakan pendidikan Islam di Kutai Kartanegara adalah peningkatan pemahaman agama yang lebih mendalam di kalangan masyarakat. Melalui lembaga pendidikan seperti masjid, surau, pesantren, dan sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh kerajaan, masyarakat Kutai Kartanegara memperoleh kesempatan untuk belajar agama secara terstruktur dan lebih mendalam. Pengajaran Al-Qur’an, fiqih, hadis, dan tafsir menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, masyarakat Kutai tidak hanya menjadi lebih religius, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar Islam, seperti etika sosial, hubungan antarumat manusia, dan kewajiban sebagai seorang Muslim.

Pendidikan Islam juga berfungsi sebagai alat pembentukan karakter moral masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam, seperti kejujuran, kedamaian, tanggung jawab sosial, dan tolong-menolong, memperkuat akhlak masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pengembangan akhlak yang baik, yang berdampak langsung pada interaksi sosial dan moralitas masyarakat Kutai secara keseluruhan.

b. Peran Ulama dalam Meningkatkan Stabilisasi Sosial dan Politik

Selain memberikan dampak dalam bidang pendidikan, kebijakan pendidikan Islam juga berperan penting dalam menstabilkan struktur sosial dan politik Kerajaan Kutai Kartanegara. Para ulama yang terlibat dalam pendidikan agama di masjid, surau, dan pesantren juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam aspek politik kerajaan. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi mereka juga bertindak sebagai penasihat dan pemimpin moral bagi raja dan pejabat kerajaan. Dalam banyak kasus, ulama menjadi tokoh kunci dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hubungan yang kuat antara kerajaan dan para ulama memperkuat kestabilan sosial dan politik kerajaan.[337]

Para ulama ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok kerajaan, menciptakan konsensus agama di kalangan rakyat, serta memperkuat identitas Islam yang semakin berkembang. Di samping itu, melalui pendidikan agama yang diberikan oleh ulama, rakyat Kutai juga diajarkan untuk menjadi masyarakat yang disiplin, taat hukum, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan sosial.

c. Penyebaran Pendidikan Islam ke Wilayah Luar dan Pembentukan Identitas Islam Kutai

Dampak lain dari kebijakan pendidikan Islam di Kutai Kartanegara adalah penyebaran ilmu agama dan peradaban Islam ke wilayah luar kerajaan. Karena Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di jalur perdagangan penting di Kalimantan Timur, banyak pedagang dari luar daerah, baik dari Malaya, Jawa, maupun Timur Tengah, yang singgah dan membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Pendidikan Islam yang berkembang di Kutai Kartanegara menjadi pusat pendidikan agama yang mengalirkan pengaruh ke kerajaan-kerajaan sekitar, seperti Kesultanan Banjar dan Kesultanan Makassar.

Pesantren dan lembaga pendidikan agama di Kutai Kartanegara tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menerima santri dari luar kerajaan yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Kutai Kartanegara telah menjadikan wilayah ini sebagai pusat penyebaran ilmu agama di Kalimantan dan daerah sekitarnya. Lebih jauh lagi,

[337] Idham, *Makam Noto Igomo: Arkeologi Makam Tokoh Agama di Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur*, *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 1, no. 2 (2014): 125–130.

pendidikan Islam ini turut membentuk identitas Islam yang sangat kuat di Kalimantan Timur, dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan budaya Islam di wilayah tersebut.

d. Penguatan Peran Wanita dalam Pendidikan dan Kehidupan Sosial

Dampak kebijakan pendidikan Islam di Kutai Kartanegara juga terlihat dalam penguatan peran perempuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Meskipun pada awalnya, akses pendidikan bagi perempuan terbatas, namun seiring berjalannya waktu, kebijakan kerajaan mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan agama untuk perempuan. Banyak surau dan pesantren yang tidak hanya mengajarkan pria, tetapi juga wanita. Hal ini memungkinkan perempuan Kutai untuk mengakses ilmu agama, yang sebelumnya terbatas pada sektor domestik.

Selain itu, pendidikan agama juga memberikan perempuan bekal untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Perempuan yang terdidik dalam agama Islam turut berperan dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, serta menjadi pendidik dan pembimbing bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam turut memperkuat peran perempuan dalam keluarga sebagai pendidik utama, serta dalam masyarakat sebagai agen perubahan sosial.

e. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kutai

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap masyarakat Kutai Kartanegara juga terlihat dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendidikan agama yang mendalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan tanggung jawab moral dan sosial mereka, yang pada gilirannya berpengaruh positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat yang terdidik dalam ajaran Islam cenderung lebih disiplin, memiliki standar moral yang lebih tinggi, dan lebih toleran terhadap perbedaan.

Sebagai contoh, kebijakan pendidikan Islam juga berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan dan ekonomi. Dengan pengajaran yang memberikan pengetahuan tentang fiqih muamalat (hukum ekonomi Islam) dan etika perdagangan, masyarakat Kutai menjadi lebih tertib dalam menjalankan aktivitas

ekonomi dan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, yang mendukung kelangsungan perdagangan dan kesejahteraan masyarakat.[338]

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kerajaan Kutai Kartanegara telah memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya meningkatkan pemahaman agama dan moralitas, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan politik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan Islam juga berperan dalam memperkuat identitas Islam yang menjadi dasar kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kutai Kartanegara.

4. Relevansi Kebijakan Pendidikan Islam Kutai terhadap Konteks Pendidikan Islam Modern

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di masa Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, meskipun berasal dari abad yang lalu, memiliki banyak relevansi dengan konteks pendidikan Islam modern yang diterapkan di Indonesia dan bahkan dunia Islam saat ini. Pada masa itu, pendidikan Islam di Kutai Kartanegara berfokus pada penyebaran ilmu agama secara luas, penguatan karakter moral masyarakat, dan pengembangan identitas Islam di kalangan masyarakat. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam kebijakan tersebut tetap relevan dan dapat diadopsi dalam pendidikan Islam modern, yang menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat.[339]

a. Pendidikan Berbasis Masjid dan Surau: Pengajaran Agama yang Komunal dan Inklusif

Pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara, pendidikan Islam sangat berfokus pada pendidikan berbasis masjid dan surau, di mana para ulama memberikan pengajaran agama secara langsung kepada masyarakat, baik secara formal maupun informal. Pengajaran yang berlangsung di masjid dan surau ini mengedepankan pendidikan komunal dan inklusif, di mana semua kalangan masyarakat, tanpa memandang usia, gender, atau status sosial, dapat memperoleh akses terhadap ilmu agama.

Dalam konteks pendidikan Islam modern, pendekatan berbasis masjid dan surau ini masih sangat relevan, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau

[338] M. Sarip, "Menelusuri Jejak Islam Masuk ke Tanah Kutai," *Republika*, 2024.

[339] S. Abdurrahman, *Islamisasi di Kutai Kartanegara dan Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Identitas Sosial*, *Jurnal Budaya dan Pendidikan Islam*, 4, no. 2 (2020): 112–127.

oleh pendidikan formal. Masjid dan surau dapat dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan etika sosial kepada masyarakat, dengan melibatkan semua lapisan sosial. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi, masjid dan surau juga bisa menjadi pusat pengajaran online atau webinar agama, yang dapat menjangkau lebih banyak orang.

Pendidikan berbasis komunitas ini juga menciptakan interaksi sosial yang lebih erat antara pengajar dan peserta didik, sebagaimana yang tercermin pada masa Kutai Kartanegara. Di era modern, ini bisa diterjemahkan dalam bentuk forum-forum diskusi keagamaan yang melibatkan masyarakat secara aktif, memfasilitasi dialog antara para ulama dan umat, serta mengajarkan ajaran agama secara lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

b. Peran Ulama sebagai Pendidik dan Pemimpin Moral

Pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara, ulama memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan agama serta dalam penasihat kerajaan. Ulama tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin moral bagi masyarakat, yang memberikan panduan mengenai cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Peran ini menunjukkan bagaimana pendidikan agama Islam bukan hanya untuk membekali pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan etika sosial masyarakat.

Dalam pendidikan Islam modern, peran ulama dan guru agama tetap sangat vital. Guru dan ulama dalam konteks pendidikan saat ini tidak hanya bertugas mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pendidikan karakter dalam sistem pendidikan Islam modern sangat terkait dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ulama di masa lalu, di mana pendidikan tidak hanya tentang ilmu pengetahuan semata, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Ulama, sebagai pemimpin moral, dapat memberikan contoh dalam penerapan ajaran agama yang relevan dengan tantangan zaman modern.[340]

Dengan adanya pendidikan berbasis karakter, para siswa diajarkan untuk tidak hanya memahami teks-teks agama, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, seperti dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang berbasis

[340] E. P. Wiratama, *Kesultanan Kutai Kartanegara: Perkembangan Islam di Indonesia* (Makalah, Universitas Indonesia, 2014)

pada peran ulama sebagai pendidik moral di masa Kerajaan Kutai Kartanegara sangat relevan dengan pendidikan karakter yang diterapkan dalam pendidikan Islam modern.

c. Pendidikan Islam yang Inklusif dan Merata

Salah satu karakteristik penting dari kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara adalah bahwa pendidikan tidak terbatas hanya pada kalangan elit kerajaan, melainkan merata di semua lapisan masyarakat. Ini terlihat dalam cara para ulama dan pemuka agama mengajarkan ilmu agama di masjid dan surau kepada masyarakat umum, tanpa membedakan status sosial. Hal ini membawa pada terciptanya pendidikan yang inklusif dan merata, di mana siapa saja, baik itu anak muda, dewasa, bahkan perempuan, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan agama yang sama.[341]

Dalam konteks pendidikan Islam modern, konsep pendidikan yang inklusif dan merata ini menjadi sangat penting, terutama di tengah tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di banyak wilayah. Pendidikan agama yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal, menjadi prinsip dasar dalam pendidikan Islam yang inklusif di dunia modern. Model pendidikan yang dilakukan di masjid dan surau pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara dapat menjadi inspirasi dalam menerapkan pendidikan agama berbasis komunitas yang dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.

d. Pendidikan yang Berorientasi pada Peningkatan Moral dan Etika Sosial

Di masa pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama semata, tetapi juga pada pembentukan moral dan etika sosial yang kuat. Ini tercermin dalam cara para ulama mengajarkan akhlak dan etika sosial yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan agama pada masa itu lebih mengedepankan pengajaran tentang prinsip-prinsip moral Islam, seperti kejujuran, kerjasama, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama.

Pendekatan ini masih sangat relevan dalam pendidikan Islam modern, di mana pembentukan moral dan etika sosial menjadi salah satu tujuan utama pendidikan agama. Di tengah pergeseran nilai dan krisis moral yang terjadi di

[341] Langgong, *Transformasi Politik, Agama dan Budaya Masyarakat Kutai Islam*, *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1, no. 2 (2021): 91–105.

banyak tempat, pendidikan Islam modern diharapkan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik, berlandaskan pada ajaran Islam. Dengan mengadopsi model pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai moral ini, pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang beradab, beretika, dan berbudi pekerti luhur.[342]

e. Pendidikan Islam yang Terintegrasi dengan Kehidupan Sehari-hari

Salah satu aspek menarik dari kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara adalah pendekatannya yang sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Pengajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada teori atau hafalan, tetapi lebih pada aplikasi langsung dari ajaran agama dalam tata kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai yang diajarkan di masjid, surau, dan pesantren terkait erat dengan praktik kehidupan sosial, seperti adab bermasyarakat, tata cara beribadah, dan hubungan antarindividu.

Di era modern, pendidikan Islam yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari ini masih sangat relevan. Pendidikan Islam saat ini juga mengajarkan siswa untuk mengaplikasikan ajaran agama dalam kegiatan sehari-hari mereka, baik itu dalam hubungan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di Kutai Kartanegara dapat menjadi model yang baik dalam pendidikan berbasis aplikasi praktis ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat relevan dengan tantangan dunia modern yang penuh dinamika.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di masa Kerajaan Kutai Kartanegara memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan Islam modern. Konsep pendidikan yang inklusif, berorientasi pada moral dan etika sosial, serta mengintegrasikan pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat diadaptasi dalam sistem pendidikan Islam saat ini, guna menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dengan memadukan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang ada di masa lalu dengan teknologi dan pendekatan pendidikan modern, kita dapat menciptakan

[342] M. Syamsul, *Pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara: Perspektif Sosial dan Budaya*, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9, no. 1 (2023): 90–105.

pendidikan Islam yang lebih komprehensif, terjangkau, dan berkualitas di masa depan.[343]

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan di masa Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosial, budaya, dan moralitas masyarakat Kutai. Pendidikan Islam di era ini tidak hanya berfokus pada pengajaran agama, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter, peningkatan moral, dan penstabilan sosial. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masjid, surau, dan pesantren, masyarakat Kutai dapat mengakses ilmu agama yang mendalam, yang sekaligus mendidik mereka untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada masa tersebut, pendidikan Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap identitas budaya Islam yang berkembang di wilayah Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat peran ulama sebagai pemimpin moral dan penasihat kerajaan. Selain itu, sistem pendidikan yang merata dan inklusif di Kerajaan Kutai Kartanegara telah menciptakan peluang yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama, termasuk perempuan.

Relevansi kebijakan pendidikan Islam Kutai Kartanegara terhadap pendidikan Islam modern sangat jelas terlihat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan pendidikan Islam masa lalu, seperti pendidikan berbasis masjid, peran ulama sebagai pemimpin moral, dan pendidikan yang mengintegrasikan ajaran agama dengan kehidupan sosial sehari-hari, tetap sangat relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan Islam di dunia modern.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura merupakan sebuah model pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu agama semata, tetapi juga pada penguatan aspek moral dan sosial, yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan Islam modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab, berakhlak mulia, dan harmonis.

[343] Gusmawati, *Islamisasi di Kerajaan Kutai pada Awal Abad ke-17 (Suatu Tinjauan Historis)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

BAB XIII
KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN BANJAR

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara telah berkembang sejak masa-masa awal masuknya Islam ke kepulauan ini, dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas keislaman lokal. Di antara berbagai kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, Kesultanan Banjar yang terletak di wilayah Kalimantan Selatan menjadi salah satu kekuatan penting dalam penyebaran dan pengembangan ajaran Islam, khususnya melalui kebijakan-kebijakan pendidikannya. Sebagai sebuah kerajaan yang telah menerima Islam secara resmi sejak pertengahan abad ke-16, Kesultanan Banjar melihat pentingnya pendidikan Islam sebagai alat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan politik, memperkokoh struktur sosial masyarakat, dan membentuk tata nilai kehidupan beragama yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari rakyat Banjar. Dengan pengaruh ulama lokal maupun asing seperti dari Aceh, Arab, dan India, sistem pendidikan Islam di Banjar mengalami perkembangan signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek spiritual tetapi juga sosial, budaya, dan politik.[344]

Dalam praktiknya, kebijakan pendidikan Islam di Kesultanan Banjar diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik formal maupun non-formal. Pendidikan formal dilakukan melalui madrasah dan pesantren, sedangkan pendidikan non-formal berkembang melalui majelis taklim, halaqah, dan pengajaran di masjid-masjid serta surau. Para sultan Banjar mendukung kegiatan pendidikan ini dengan menyediakan fasilitas, memberikan perlindungan politik kepada para ulama, serta mendorong penerjemahan dan penyebaran kitab-kitab Islam klasik ke dalam bahasa Melayu Banjar. Selain itu, pengangkatan mufti dan qadhi oleh sultan menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak berdiri sendiri, tetapi menyatu erat dengan dinamika kekuasaan dan pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan bahwa pendidikan Islam di Banjar bukan sekadar transmisi ilmu keagamaan, melainkan juga sarana pembentukan peradaban Islam lokal yang berkelanjutan.[345]

---

[344]Bangsa, Amelia. "PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA KESULTANAN PANGERAN SAMUDERA." *TARBIYAH DARUSSALAM: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN* 9.01 (2025): 79-90.

[345]Ridha, M. Faqih. "Potret Lain Perjalanan Hukum Di Kerajaan Banjar." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 12.1 (2013).

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik dan budaya lokal yang ada. Seiring dengan tantangan internal dan eksternal seperti kolonialisme Belanda, gejolak politik internal, serta dinamika hubungan antarkerajaan, pendidikan Islam menjadi alat resistensi yang efektif. Ulama dan pendidik Islam memainkan peran ganda: sebagai penjaga ilmu pengetahuan agama dan sebagai penggerak semangat perlawanan terhadap penjajahan. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam turut membentuk jaringan intelektual keislaman yang luas, menghubungkan Banjar dengan pusat-pusat keilmuan Islam lainnya di Nusantara dan dunia Islam. Oleh karena itu, mempelajari kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Islam disebarluaskan, dipertahankan, dan diinstitusikan melalui strategi yang berakar pada nilai-nilai lokal namun tetap terbuka terhadap pengaruh global.[346]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Menurut Abuddin Nata (2005), pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, baik aspek spiritual, intelektual, maupun sosial. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat transfer ilmu, tetapi juga transformasi nilai. Dalam konteks ini, pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar diarahkan untuk mencetak individu yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kesadaran religius yang tinggi.[347]

2. Teori Integrasi Islam dan Negara

Menurut teori integrasi Islam dan kekuasaan (Al-Mawardi, 1996), pemimpin Muslim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan agama dan melindungi umat. Dalam konteks Kesultanan Banjar, sultan memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan yang mendukung dakwah dan pendidikan Islam. Peran kesultanan dalam pendidikan

[346]Nengsih, Sri Wahyu. "Kearifan Lokal Dalam Legenda Keagamaan Masyarakat Banjar." *JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA (JBSP)* 10.1 (2020): 41-58.

[347]Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9.1 (2021): 165-184.

menjadi bagian dari fungsi ideologis dan politik Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan.[348]

3. Teori Sosiologi Pendidikan

Teori sosiologi pendidikan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan adalah sarana pewarisan nilai dan norma sosial. Dalam masyarakat tradisional seperti Kesultanan Banjar, pendidikan Islam menjadi alat penting dalam mempertahankan identitas budaya dan agama. Lembaga-lembaga pendidikan seperti langgar, surau, dan pesantren berfungsi sebagai pusat transmisi nilai Islam dan loyalitas terhadap kesultanan.[349]

4. Teori Ketergantungan Sejarah (Historical Institutionalism)

Teori ini menjelaskan bahwa institusi sosial, termasuk pendidikan, terbentuk dan berkembang mengikuti jejak sejarahnya. Pada masa Kesultanan Banjar, masuknya Islam sejak abad ke-16 telah membentuk corak pendidikan yang bersifat keislaman, terstruktur dalam bentuk pengajaran Al-Qur'an, fikih, tasawuf, hingga gramatika Arab. Tradisi intelektual ini berkembang seiring dukungan politik dan sumber daya dari pihak kerajaan.[350]

C. PEMBAHASAN

1. Sistem Pendidikan Islam yang Diterapkan di Kesultanan Banjar

Sistem pendidikan Islam di Kesultanan Banjar merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat dan pemerintahan kesultanan tersebut. Pendidikan Islam mulai berkembang secara signifikan sejak abad ke-16, ketika Kesultanan Banjar secara resmi memeluk Islam setelah Sultan Suriansyah (raja pertama yang masuk Islam) memerintah. Pendidikan agama menjadi fokus utama, dan masjid-masjid serta surau-surau dijadikan pusat pengajaran agama. Di tempat-tempat ini, masyarakat diajarkan membaca Al-

[348]Amirullah, Amirullah. "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam* 13.2 (2015): 166-182.

[349]Sinulingga, Ahmad Yasir, and Faisar Ananda. "Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.4 (2024): 15878-15887.

[350]Asysyegav, Muhammad Hilman, and Muhammad Alfan Maulana. "Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ad Dustur* 2.1 (2025): 23-31.

Qur'an, fikih, akidah, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Guru-guru agama atau ulama memiliki peranan penting, tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai penasihat spiritual dan moral bagi sultan dan rakyat.[351]

Berikut adalah beberapa ciri utama sistem pendidikan Islam di Kesultanan Banjar:

a. Pendidikan di Surau dan Langgar

   Pendidikan dasar agama diberikan di surau (musholla) dan langgar. Di tempat ini, anak-anak belajar membaca Al-Qur'an, dasar-dasar akidah, fikih, serta akhlak.

b. Pengajian Tradisional (Mengaji Kitab Kuning)

   Setelah mahir membaca Al-Qur'an, para pelajar melanjutkan ke tingkat pengajian kitab kuning, yang berisi ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, usul fikih, dan tasawuf. Ini biasanya dilakukan di rumah para ulama atau pondok pesantren.

c. Pondok Pesantren dan Madrasah

   Seiring perkembangan, model pendidikan pesantren juga berkembang. Di pesantren-pesantren ini, para santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga tinggal bersama kiai dalam sistem pendidikan tradisional yang disebut "sistem sorogan dan bandongan".

d. Peran Ulama sebagai Pendidik dan Penasehat Sultan

   Para ulama memiliki peran penting tidak hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam pemerintahan. Mereka menjadi guru bagi keluarga kerajaan serta penasehat sultan dalam urusan agama dan hukum Islam.

e. Hubungan dengan Dunia Islam

   Kesultanan Banjar menjalin hubungan dengan pusat-pusat pendidikan Islam di luar negeri, terutama di Mekkah dan Hadramaut. Banyak ulama Banjar yang belajar ke Timur Tengah dan kemudian kembali untuk mengajar di tanah air.

f. Literatur Islam Lokal

   Banyak karya ulama Banjar ditulis dalam bahasa Arab Melayu (Jawi), memperkaya khazanah literatur Islam lokal dan dijadikan bahan ajar.[352]

Selain pengajaran dasar di masjid dan surau, Kesultanan Banjar juga mengenal sistem pendidikan pesantren atau pondok. Lembaga ini memungkinkan santri atau

[351]Habibi, Ahmad, Ahmad Faishal, and Fikri Nur Syahid. "Sejarah Pola Politik Islam Di Kalimantan Selatan." *Islamic Education* 1.3 (2023): 221-228.

[352]Rohmah, Noer, M. Pd, and Agus Salim Salabi. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakad Media Publishing, (2025):2-3

pelajar tinggal dan belajar dalam lingkungan yang terpisah dari dunia luar, di bawah bimbingan seorang ulama atau kiai. Sistem pendidikan ini bersifat tradisional, dengan metode talaqqi (belajar langsung dari guru) dan hafalan. Kitab-kitab klasik berbahasa Arab seperti Tafsir *al-Jalalayn, Syarh al-Ajurumiyyah, dan Fath al-Mu'in* menjadi bahan ajar utama. Para santri berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka sering menjadi ulama, guru agama, atau bahkan pejabat keagamaan dalam struktur pemerintahan kesultanan.[353]

Pemerintah Kesultanan Banjar sendiri mendukung pendidikan Islam dengan memberikan perlindungan dan fasilitas kepada para ulama serta lembaga pendidikan. Beberapa sultan dikenal memiliki hubungan erat dengan ulama dan bahkan mendalami ilmu agama secara langsung. Peran pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pengajaran agama semata, melainkan juga membentuk tata nilai, hukum, dan kebijakan dalam kesultanan. Hukum Islam (syariat) menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam di Kesultanan Banjar tidak hanya mencetak individu berilmu, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membentuk identitas keislaman dan struktur sosial-politik kerajaan tersebut.[354]

2. Kebijakan Utama yang Mendukung Pendidikan Islam Masa Kesultanan Banjar

Kebijakan utama yang mendukung pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banjar adalah upaya sistematis dari pihak kesultanan untuk menjadikan Islam sebagai dasar moral, hukum, dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kebijakan yang sangat penting adalah pendirian dan pengembangan lembaga pendidikan agama seperti masjid dan surau di seluruh wilayah kesultanan. Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan. Dalam masjid-masjid tersebut, para ulama mengajarkan Al-Qur'an, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada masyarakat. Sultan Banjar pada masa itu mendukung penuh aktivitas ini dengan menyediakan dana dan fasilitas yang diperlukan. Oleh karena itu, masjid menjadi pusat kebudayaan Islam, yang bukan hanya tempat beribadah tetapi juga sarana untuk menyebarkan ilmu agama.[355]

---

[353]Muttaqin, Zainal. "Historisitas, Setting Sosial, Politik, Dan Kakakter Hukum Islam Di Kalimantan Selatan." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19.2 (2020): 287-303.

[354]Zahara, Tyas Alvionita. "Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2317-2331.

[355]Nengsih, Sri Wahyu. "Kearifan Lokal Dalam Legenda Keagamaan Masyarakat Banjar." *JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA (JBSP)* 10.1 (2020): 44-52.

Pada masa Kesultanan Banjar (sekitar abad ke-16 hingga abad ke-19), terdapat beberapa kebijakan utama yang mendukung perkembangan pendidikan Islam. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tersebut:

a. Dukungan terhadap Ulama

   Kesultanan Banjar memberikan tempat yang tinggi kepada para ulama dalam struktur sosial dan pemerintahan. Ulama sering diundang ke istana dan diberi peran sebagai penasihat sultan dalam urusan agama dan pemerintahan.

b. Pemberangkatan Santri ke Mekkah dan Hadramaut

   Kesultanan Banjar mendorong pengiriman pelajar (santri) ke pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah, khususnya Mekkah, Madinah, dan Hadramaut. Banyak tokoh Banjar yang kembali dari sana dan mengembangkan pendidikan Islam lokal.

c. Penerbitan dan Penyebaran Kitab Islam

   Ulama Banjar, dengan dukungan sultan, menulis dan menyebarluaskan kitab-kitab berbahasa Melayu-Jawi yang mempermudah pemahaman Islam di kalangan masyarakat Banjar. Contohnya adalah karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, seperti Sabilal Muhtadin.

d. Islamisasi Lembaga Pemerintahan dan Hukum

   Pemerintahan Kesultanan Banjar menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan syariat sebagai dasar pengambilan keputusan, yang juga memperkuat pendidikan Islam di Masyarakat.[356]

Selain itu, sistem pendidikan pesantren yang berkembang di Kesultanan Banjar juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan banyak ulama dan tokoh agama yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Sultan Banjar mendukung pesantren dengan memberikan berbagai kemudahan, seperti memberikan tanah dan fasilitas untuk pembangunan pesantren serta memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan pesantren. Kebijakan ini menciptakan hubungan yang erat antara sultan dan ulama, di mana para ulama tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan nasihat moral dan keagamaan kepada pemerintah. Hal ini menguatkan posisi agama Islam

[356]Rizani, Rasyid, et al. "Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2.2 (2024): 817-842.

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar dan menjadikan pesantren sebagai lembaga penting dalam pendidikan Islam.[357]

Kebijakan ketiga yang mendukung pendidikan Islam adalah penerapan hukum Islam atau syariat sebagai dasar dalam tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Sultan Banjar sebagai pemimpin kesultanan berusaha untuk mengimplementasikan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, pernikahan, warisan, hingga adat istiadat. Penerapan hukum syariat ini menjadi bagian dari sistem pendidikan informal bagi masyarakat. Dengan adanya syariat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya mendapat pendidikan formal melalui lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga pembelajaran praktis mengenai cara hidup sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pemerintah juga mendukung pengajaran kitab-kitab klasik yang mengajarkan tentang fiqh dan akidah Islam sebagai referensi hukum dan pedoman hidup. Kebijakan ini memperkuat integrasi agama Islam dalam struktur sosial dan politik Kesultanan Banjar, menjadikan pendidikan agama sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan taat pada ajaran Islam.[358]

3. Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Kehidupan Masyarakat Banjar

Pendidikan Islam memiliki pengaruh yang sangat mendalam terhadap kehidupan masyarakat Banjar, baik dari segi sosial, budaya, maupun politik. Salah satu dampaknya yang paling signifikan adalah terbentuknya masyarakat yang taat beragama dan mengutamakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam yang dimulai sejak dini di masjid, surau, dan pesantren mengajarkan masyarakat tentang pentingnya ibadah, akhlak, dan moral. Dengan pemahaman agama yang mendalam, masyarakat Banjar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam hubungan dengan Tuhan. Hal ini menciptakan suatu kebiasaan sosial yang berbasis pada etika Islam, seperti saling menghormati, membantu sesama, dan menjaga kedamaian dalam masyarakat.[359]

---

[357]Sumanti, Solihah Titin. "Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 1.1 (2018): 44-62.

[358]Nasir, Muh, Bahaking Rama, and Muhammad Yahdi. "Pendidikan Islam Pada Masa Awal Di Indonesia." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023): 1282-1296.

[359]Syakhrani, Abdul Wahab, and Muhammad Nafis. "Islam sebagai agama dan Islam sebagai budaya dalam masyarakat Banjar." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2.3 (2022): 270-274.

Pengaruh pendidikan Islam juga terlihat dalam struktur sosial masyarakat Banjar, di mana pendidikan agama tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga membentuk sistem sosial yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai keagamaan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan utama di Banjar menghasilkan banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berperan sebagai pemimpin spiritual dan moral dalam komunitas mereka. Ulama yang terdidik melalui pesantren seringkali menjadi figur sentral dalam masyarakat Banjar, memberikan bimbingan keagamaan dan juga berperan dalam menyelesaikan masalah sosial dan hukum. Peran mereka tidak hanya terbatas pada ajaran agama, tetapi juga mencakup pengaruh mereka dalam hal penyelesaian sengketa, pembentukan norma sosial, dan pengaturan kehidupan adat yang berpadu dengan ajaran Islam.[360]

Dalam ranah politik, pendidikan Islam memberikan kontribusi penting dalam membentuk kebijakan pemerintah Kesultanan Banjar. Sultan dan pejabat tinggi kesultanan banyak yang mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, baik secara langsung dari para ulama maupun melalui literatur agama. Hal ini mempengaruhi keputusan-keputusan politik mereka yang sering kali berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.[361] Dalam banyak hal, keputusan-keputusan yang diambil oleh Sultan Banjar terkait dengan hukum, pemerintahan, dan kebijakan sosial sering kali didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Pendidikan Islam memperkuat posisi agama sebagai landasan dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola pemerintahan, menciptakan kestabilan politik yang berakar pada nilai-nilai keislaman, serta memperkuat identitas Islam masyarakat Banjar sebagai bagian tak terpisahkan dari kesultanan itu sendiri.[362]

[360]Miranti, Alfrida Dyah, and Lutfiah Ayundasari. "Kesultanan Banjar: Peranan dalam persebaran Islam di Kalimantan (abad XVI M-XIX M)." *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1.2 (2021): 227-237.

[361]Nursalim, Eko, et al. "PENDIDIKAN REMAJA DI MASJID AGUNG AL-FAROQ SANGATTA." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 3.2 (2024): 452-465.

[362]Puteri, Amalia Amanda, and Qoni Hana Yama Nawangsih. "PERAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI DAN NORMA SOSIAL DI MASYARAKAT BANJARMASIN." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3.6 (2024): 2516-2524.

D. KESIMPULAN

Sistem pendidikan Islam di Kesultanan Banjar diterapkan secara integral dalam kehidupan sosial dan pemerintahan, khususnya sejak masuknya Islam secara resmi pada abad ke-16. Pendidikan Islam awalnya berlangsung secara informal melalui halaqah-halaqah di masjid dan rumah para ulama. Seiring waktu, sistem ini berkembang menjadi lebih terstruktur dengan munculnya pesantren, langgar, dan madrasah. Para sultan Banjar mendukung keberadaan institusi pendidikan Islam ini, menjadikannya bagian penting dari kehidupan religius dan kultural rakyat. Ulama memainkan peran sentral sebagai guru, penasihat kerajaan, dan tokoh masyarakat, sehingga pendidikan agama menjadi sarana utama penyebaran ajaran Islam sekaligus pembentukan identitas keislaman masyarakat Banjar.

Kebijakan utama yang mendukung pendidikan Islam di Kesultanan Banjar meliputi pemberian perlindungan dan fasilitas kepada para ulama serta pendirian institusi pendidikan berbasis Islam. Sultan-sultan Banjar, seperti Sultan Suriansyah, menjalin hubungan erat dengan ulama, bahkan mengundang mereka dari luar wilayah untuk memperkuat ajaran Islam di kerajaan. Selain itu, kesultanan menyediakan lahan wakaf untuk pesantren dan masjid, serta mendanai kegiatan dakwah dan pengajaran. Pendidikan diatur untuk mencakup ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan Al-Qur'an, yang diajarkan secara bertingkat dari dasar hingga tingkat tinggi. Para santri yang lulus dari sistem ini seringkali diangkat menjadi guru atau pejabat keagamaan, memperkuat posisi pendidikan Islam dalam struktur pemerintahan.

Pengaruh pendidikan Islam terhadap masyarakat Banjar sangat besar, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga sosial dan budaya. Pendidikan Islam membentuk karakter masyarakat yang religius dan menghormati nilai-nilai moral Islam. Bahasa Arab dan aksara Jawi (Arab Melayu) menjadi bagian dari budaya literasi masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, perayaan Maulid, dan tradisi haul ulama menjadi tradisi yang mengakar. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga berperan dalam pembentukan pemimpin lokal yang memiliki integritas moral dan pengetahuan keislaman yang kuat. Pengaruh ini tetap terasa bahkan setelah runtuhnya Kesultanan Banjar, karena warisan pendidikan Islam masih bertahan di pesantren-pesantren dan madrasah yang terus berkembang hingga sekarang.

BAB XIV
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KESULTANAN BIMA

A. PENDAHULUAN

Kesultanan Bima merupakan salah satu kerajaan Islam di wilayah timur Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyebaran dan pengembangan pendidikan Islam di kawasan Nusantara bagian timur. Sejak resmi memeluk Islam pada abad ke-17 di bawah Sultan Abdul Kahir (1621–1640), Islam menjadi dasar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Bima. Proses Islamisasi di Bima tidak hanya berlangsung melalui dakwah, tetapi juga melalui sistem pendidikan yang disusun oleh para ulama kerajaan dan didukung penuh oleh para sultan.[363]

Pendidikan Islam di masa Kesultanan Bima tidak hanya ditujukan untuk memahami ajaran agama secara ritualistik, tetapi juga sebagai sarana membentuk karakter masyarakat dan pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga pendidikan seperti istana, surau, madrasah tradisional, dan rumah para ulama menjadi pusat kegiatan belajar mengajar. Kurikulum pendidikan pada masa itu umumnya mencakup pembelajaran Al-Qur'an, akidah, fikih, bahasa Arab, dan pengetahuan umum yang relevan untuk mendukung kehidupan sosial-politik kerajaan.[364]

Dalam konteks budaya lokal, sistem pendidikan Islam yang dikembangkan di Kesultanan Bima memperlihatkan adanya integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat Mbojo. Pendidikan Islam tidak menghapus identitas lokal, melainkan memperkuatnya dengan nilai-nilai universal Islam. Hal ini menjadikan pendidikan Islam di Bima bersifat khas dan kontekstual, mampu merespons tantangan zaman serta memperkuat kohesi sosial antara rakyat dan penguasa. Perpaduan antara agama dan adat inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan religius.

Selain itu, Kesultanan Bima menjalin hubungan intelektual dengan pusat-pusat keilmuan Islam lain di Nusantara seperti Gowa (Makassar), Ternate, dan Aceh. Ulama dari daerah lain didatangkan untuk memperkuat struktur keilmuan di Bima, sedangkan para pelajar dari Bima juga dikirim untuk belajar ke luar daerah. Proses ini membentuk jaringan

---

[363] Zuriatin dan Nurhasanah. *"Kebudayaan Islam yang Berkembang di Kesultanan Bima pada Abad Ke XVII M,"* Jurnal Pendidikan IPS 8, no. 2 (2018). Hal 135–138.

[364] Tawalinuddin Haris. *"Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa".* Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia 8, no. 1 (2006). Hal 17–31.

keilmuan Islam yang luas dan berkontribusi terhadap kualitas pendidikan Islam di wilayah Bima. Kegiatan penulisan karya keislaman dalam bahasa lokal dan Arab Melayu juga menjadi bagian dari kebijakan penguatan pendidikan[365].

Namun demikian, perkembangan pendidikan Islam di Bima juga mengalami dinamika, terutama setelah masuknya kolonialisme Belanda. Sistem pendidikan sekuler yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial mulai menggeser peran pendidikan Islam, terutama di perkotaan. Meski demikian, lembaga-lembaga tradisional seperti madrasah dan pesantren tetap bertahan di tengah keterbatasan dan tekanan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Bima sebagai bagian dari sejarah pendidikan nasional yang kaya dan berakar kuat pada budaya lokal.[366]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik Dalam Pendidikan

Pada masa Kesultanan Bima, kebijakan pendidikan berperan penting sebagai alat untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan dan agama kepada masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang memperkuat identitas kerajaan dan agama Islam. Melalui pendidikan, Kesultanan Bima berusaha membentuk generasi yang tidak hanya terampil secara intelektual, tetapi juga taat agama. Di dalam sistem pendidikan ini, ulama dan guru memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam dan mendidik masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kerajaan.

Sekolah-sekolah tradisional seperti surau dan pesantren menjadi sarana utama untuk mengajarkan agama dan keterampilan duniawi, sementara pendidikan istana lebih menekankan pada pengembangan pemimpin dan anggota keluarga kerajaan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan ini bukan hanya berfungsi untuk mencetak ulama, tetapi juga untuk menghasilkan calon pemimpin kerajaan yang siap menjalankan tugas-tugas pemerintahan.[367]

---

[365] M. Hilir Ismail dan Alan Malingi. *Jejak Para Sultan Bima* (Bima: CV. Adnan Printing, 2018). Hal 13-25.

[366] Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, dan Subhan, *"Telaah Historis: Kedudukan Kesultanan Goa-Tallo dalam Penyebarluasan Agama Islam di Bima pada Abad XVII,"* Jurnal Pendidikan IPS 11 (2021): 100–106.

[367] Hakim, A. R. *Dinamika Pendidikan Islam Nusantara*. (Jakarta: Prenada Media 2022). Hal 25-26.

2. Teori Islamisasi dan Pendidikan Tradisional

Islamisasi di Bima sangat berkaitan dengan transformasi sistem pendidikan. Selama masa Kesultanan Bima, pendidikan menjadi alat untuk menyebarkan Islam secara damai dan terstruktur. Hal ini dilakukan melalui lembaga pendidikan seperti surau dan pesantren, yang menjadi pusat pendidikan agama. Islamisasi juga mencakup pendidikan di istana, di mana Sultan dan keluarga kerajaan diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam, dan mereka berperan sebagai teladan bagi rakyat.

Pendidikan ini juga menjadi sarana untuk menanamkan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima, bukan hanya dalam aspek agama, tetapi juga dalam aspek moral dan sosial. Melalui sistem pendidikan ini, masyarakat Bima diajarkan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus menjaga harmoni antara kehidupan sosial dan agama.[368]

3. Teori Integrasi Nilai Lokal dan Keislaman.

Pendidikan Islam di Bima berkembang dengan cara yang khas, yakni melalui perpaduan antara ajaran agama dan nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat Bima tidak serta-merta meninggalkan tradisi mereka saat menerima Islam. Sebaliknya, mereka justru merangkul ajaran Islam sambil tetap menjaga kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.[369]

Proses integrasi ini terlihat dari cara pendidikan dissampaikan dengan menggunakan bahasa daerah Mbojo agar lebih mudah dipahami, serta dengan menanamkan nilai-nilai sosial seperti gotong-royong, musyawarah, dan kebersamaan dalam aktivitas belajar maupun kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengenalkan ilmu agama, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial dan budaya di tengah masyarakat.[370]

Menurut Analisis saya dengan pendekatan seperti ini, pendidikan Islam di Bima menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Ia tidak memisahkan agama dari budaya, tetapi justru menjadikan keduanya saling melengkapi. Inilah yang membuat Islam tumbuh

[368] Basri, A. Y. Islamisasi dan Perkembangan Kesultanan Bima. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2018). Hal 17.

[369] M. Saleh, "Islamisasi di Bima dan Peran Kesultanan dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar (2003). Hal 86.

[370] M. Abdul Gani. "Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah Kesultanan Bima," *Jurnal Al-Tamaddun* Vol. 11, No. 2 (2016). Hal 216.

kuat di Bima karena ia tidak datang sebagai sesuatu yang asing, melainkan hadir dengan menghargai dan menyatu dengan tradisi yang sudah ada.

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Sosial Budaya Kesultanan Bima dalam Mendukung Pendidikan Islam.

Kesultanan Bima merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup berpengaruh di wilayah timur Nusantara. Sejak resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-17, kerajaan ini mengalami perubahan besar dalam aspek sosial, budaya, dan pemerintahan. Islam menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan, dan ini berdampak besar terhadap arah pembangunan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan.

Masuknya Islam ke Bima tidak lepas dari pengaruh kuat Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan yang lebih dulu mengalami Islamisasi. Raja Bima saat itu, La Kai, memeluk Islam dan kemudian bergelar Sultan Abdul Kahir. Sejak saat itulah, proses Islamisasi berlangsung secara sistematis dan membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial masyarakat. Kehidupan masyarakat mulai diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, dan pendidikan agama menjadi kebutuhan utama.[371]

Kondisi sosial budaya masyarakat Bima saat itu sangat mendukung berkembangnya pendidikan Islam. Masyarakat sangat menghormati ulama dan tokoh agama, yang perannya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai penasehat sultan, pemimpin spiritual, dan penengah dalam urusan masyarakat. Keberadaan ulama yang dekat dengan rakyat maupun istana menciptakan hubungan timbal balik yang positif dalam penguatan nilai-nilai Islam.

Masyarakat Bima secara umum memiliki semangat belajar agama yang tinggi. Pengajaran Al-Qur'an, shalat, dan dasar-dasar akidah dilakukan sejak usia dini. Bahkan di pelosok-pelosok, orang tua secara aktif mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal.[372]

---

[371] Fadli, M. "Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial Budaya Lokal: Studi Sejarah Kesultanan Islam di Indonesia Timur." *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam* (2021). Hal 14-15.

[372] Tim Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Bima: Suatu Kajian Sosial dan Budaya* (Jakarta: Depdikbud, 2005). Hal 64.

Proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal berjalan cukup harmonis. Banyak tradisi masyarakat yang diberi sentuhan ajaran Islam, seperti dalam upacara adat, hukum adat, hingga pembentukan norma sosial. Hal ini membentuk karakter masyarakat Bima yang religius namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Kesultanan Bima juga memberi ruang yang luas bagi berkembangnya lembaga pendidikan Islam. Madrasah, pesantren, serta pengajian-pengajian informal tumbuh pesat dan didukung penuh oleh sultan. Selain itu, keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan juga turut menjadi tempat penting dalam proses pendidikan masyarakat.[373]

Kegiatan belajar-mengajar di masa itu berlangsung secara sederhana namun efektif. Penggunaan bahasa Arab diperkenalkan, sementara kitab-kitab keagamaan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau Bima agar lebih mudah dipahami masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam memang diarahkan untuk menjangkau semua kalangan.

Faktor geografis Bima yang terbuka terhadap jalur perdagangan turut mempercepat pertukaran ilmu dan budaya Islam. Hubungan dagang dan keilmuan dengan daerah-daerah Islam lainnya membuka peluang masuknya ulama dari luar, yang kemudian ikut memperkaya tradisi pendidikan di Bima.

Di lingkungan istana, sultan mendorong kegiatan belajar dengan menyediakan fasilitas dan insentif bagi para ulama dan guru. Upaya ini menjadi bentuk nyata dukungan politik terhadap pendidikan Islam. Kesultanan tak hanya menyebarkan Islam sebagai agama, tetapi juga mengembangkan Islam sebagai ilmu dan nilai kehidupan.[374]

Secara keseluruhan, masyarakat Bima pada masa itu hidup dalam lingkungan yang sangat mendukung tumbuhnya pendidikan Islam. Kombinasi antara kepemimpinan yang visioner, budaya masyarakat yang terbuka, serta peran sentral para ulama menciptakan ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Pendidikan Islam yang Diterapkan pada Masa Kesultanan Bima.

Kesultanan Bima mengambil peran aktif dalam proses penyebaran dan penguatan pendidikan Islam di wilayahnya. Sejak resmi menjadi kerajaan Islam, para sultan Bima menyadari bahwa pendidikan agama adalah pondasi utama dalam membangun

[373] Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1980). Hal 134.

[374] Husni, M. *Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal dalam Perspektif Sejarah Sosial di Bima*. Makalah seminar, Universitas Mataram (2020). Hal 6.

masyarakat yang beradab dan taat hukum. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjadikan Islam sebagai sistem nilai utama dalam kehidupan rakyatnya.

Salah satu kebijakan paling menonjol adalah pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, surau, dan pesantren. Lembaga ini tidak hanya terpusat di wilayah ibu kota kerajaan, tetapi juga menyebar ke desa-desa dan perkampungan. Para guru dan ulama diangkat langsung oleh kesultanan, dan mereka diberi tugas khusus untuk mendidik anak-anak maupun orang dewasa mengenai ajaran Islam. Pendidikan difokuskan pada pembelajaran Al-Qur'an, fikih, tauhid, dan akhlak.[375]

Kesultanan juga memfasilitasi para pemuda Bima untuk menuntut ilmu ke luar wilayah, terutama ke pusat-pusat keilmuan Islam seperti Gowa, Ternate, dan bahkan hingga ke Timur Tengah. Para pelajar ini dibekali biaya dan perlindungan dari istana. Sekembalinya mereka ke Bima, mereka diangkat menjadi guru, qadi, atau penasihat agama kerajaan, sehingga ilmu yang mereka peroleh dapat ditransfer kepada masyarakat luas.[376]

Kurikulum pendidikan yang diterapkan cukup beragam. Tidak hanya terbatas pada pengajaran agama, beberapa pesantren juga mulai memperkenalkan ilmu bahasa Arab, logika (mantiq), dan sejarah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Bima sudah mulai mengarah pada pembentukan intelektual Muslim yang kritis dan luas wawasan. Kitab-kitab kuning menjadi rujukan utama dalam pembelajaran, dan beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau Bima.

Para ulama di Kesultanan Bima memiliki keleluasaan dalam mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan pendekatan masing-masing. Ada yang menggunakan sistem *halaqah* atau lingkaran belajar, di mana para murid duduk mengelilingi guru untuk mendengarkan dan berdiskusi, dan ada pula yang memilih metode *sorogan*, yaitu pembelajaran satu-satu yang bersifat personal. Meski kesultanan tidak ikut campur dalam urusan teknis pengajaran, mereka tetap memberikan dukungan yang besar, baik melalui penyediaan fasilitas, pengakuan sosial bagi para ulama, maupun perlindungan hukum terhadap kegiatan keagamaan.[1] Masjid-masjid menjadi pusat kehidupan

[375] Sulaiman, I. *Warisan Pendidikan Islam dari Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara*. (Yogyakarta: LKiS 2023). Hal 45-46.

[376] M. Saleh, "Islamisasi di Bima dan Peran Kesultanan dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar (2003). Hal 88–89.

pendidikan dan sosial. Setiap masjid biasanya memiliki jadwal rutin untuk mengajarkan Al-Qur'an, memberikan ceramah, dan mengadakan kajian keislaman. Bahkan, Sultan membangun Masjid Agung sebagai pusat simbolik keislaman kerajaan yang juga berfungsi sebagai tempat belajar tingkat lanjut. Di sinilah para ulama ternama menyampaikan ceramah dan membuka diskusi keagamaan yang terbuka untuk semua kalangan masyarakat.[377]

Pendidikan Islam di masa itu tidak hanya untuk bagi kaum laki-laki. Meskipun masih ada keterbatasan bagi perempuan dalam mengakses pendidikan secara luas, Kesultanan Bima sudah menunjukkan kepedulian terhadap peran penting perempuan dalam kehidupan keagamaan. Beberapa wilayah memiliki kelas khusus yang ditujukan bagi perempuan, biasanya dibimbing oleh ustazah atau istri dari para ulama. Ini menjadi bukti bahwa kesultanan telah memiliki kesadaran awal bahwa perempuan juga berhak mendapatkan ilmu agama dan turut serta dalam membangun kehidupan spiritual masyarakat.

Perhatian kesultanan terhadap bahan ajar juga menjadi aspek penting. Kitab-kitab klasik Islam disalin oleh para penulis lokal dan disebarluaskan ke pesantren-pesantren. Selain itu, muncul pula ulama Bima yang menulis kitab sendiri berdasarkan konteks lokal. Tulisan-tulisan ini banyak memuat nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima.[378]

Para guru agama diberikan insentif dari kerajaan, baik berupa tanah wakaf, tempat tinggal, maupun tunjangan hidup. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pendidik dapat fokus menjalankan tugasnya tanpa terbebani urusan ekonomi. Kebijakan semacam ini sangat progresif dan mencerminkan dukungan konkret dari kesultanan terhadap pendidikan.

Kesultanan juga mendorong penyelenggaraan musyawarah ulama secara berkala. Forum ini menjadi ajang diskusi antar-ulama dalam menyusun strategi dakwah dan pendidikan. Dari sinilah lahir banyak keputusan penting yang kemudian dijadikan pedoman bagi guru dan pengajar dalam membina umat. Keterlibatan aktif para sultan dalam urusan pendidikan sangat menentukan keberhasilan sistem ini. Sultan bukan

[377] M. Abdul Gani, "Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah Kesultanan Bima," *Jurnal Al-Tamaddun* Vol. 11, No. 2 (2016). Hal 217.

[378] Mukhlis, M. *Pendidikan Islam di Indonesia: Perkembangan dan Tantangannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2020). Hal 12-13.

hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga figur keagamaan yang dijadikan panutan. Ia sering hadir dalam acara pengajian, mendengarkan langsung ceramah para ulama, dan memberi arahan kepada masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan rakyat, tetapi bagian dari tanggung jawab penguasa.[379]

Menurut analisis saya bahwa Kesultanan Bima tidak hanya mengembangkan pendidikan Islam sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moral masyarakat, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan pendidikan di Bima mencakup regulasi sosial yang berlandaskan syariat, seperti mewajibkan anak-anak mengaji dan memahami rukun Islam pada usia tertentu. Di beberapa wilayah, pelanggaran terhadap kewajiban agama seperti meninggalkan salat berjamaah atau terlibat perjudian diberi sanksi sosial. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana pendidikan berfungsi sebagai kontrol sosial yang mengarahkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, sekaligus memperkuat kedisiplinan sosial.

Selain itu, Kesultanan Bima juga memperhatikan pengembangan intelektual dengan mendirikan perpustakaan kecil di pesantren dan istana. Kitab-kitab Islam yang menjadi koleksi di perpustakaan ini tidak hanya berasal dari tanah Bima, tetapi juga dari luar negeri, dibawa oleh pelajar yang kembali setelah menuntut ilmu di luar daerah. Hal ini menandakan bahwa Bima memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya literasi dan referensi ilmiah dalam pengembangan pendidikan Islam. Melalui perpustakaan ini, para santri dan ulama bisa mengakses berbagai sumber belajar yang memperkaya wawasan keilmuan mereka.

Tidak kalah penting, Kesultanan Bima juga menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian dari diplomasi antar-kerajaan. Melalui pertukaran ulama dan pelajar dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah timur Indonesia, Bima memperluas jaringan dakwah Islam dan memperkaya khazanah keilmuan. Interaksi ini tidak hanya memperkuat ikatan keagamaan antar wilayah, tetapi juga memperkaya proses belajar mengajar di Bima, dengan membuka akses ke berbagai perspektif ilmu agama dari luar kerajaan.

Dengan demikian, pendidikan Islam di Kesultanan Bima bukan hanya menjadi alat untuk mendidik generasi yang taat beragama, tetapi juga sarana untuk memperkuat jaringan sosial, budaya, dan intelektual dalam dunia Islam yang lebih luas. Pendidikan

[379] Munir, M. *Madrasah dalam Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada media Group 2022). Hal 20-21.

juga digunakan sebagai alat pemersatu antar-etnis dan golongan di Bima. Melalui ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan keadilan, kesultanan berhasil menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berbeda budaya dan pandangan. Dalam proses ini, pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif yang harmonis.[380]

Kebijakan pendidikan Islam juga memberi ruang untuk kritik dan evaluasi. Beberapa ulama menyampaikan masukan kepada kesultanan apabila terjadi kesenjangan pelaksanaan di lapangan. Kesultanan pun terbuka terhadap kritik, bahkan menjadikannya sebagai dasar pembenahan. Ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan di Bima tidak kaku, tetapi dinamis dan responsif.

3. Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat dan Perkembangan Pendidikan Islam.

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh Kesultanan Bima membawa pengaruh besar dalam membentuk karakter sosial, budaya, dan religius masyarakat Bima secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang menyentuh lapisan masyarakat dari elite istana hingga rakyat biasa.

Dampak pertama yang paling nyata adalah meningkatnya tingkat religiositas masyarakat. Pendidikan agama yang diterapkan secara sistematis sejak usia dini membentuk masyarakat yang akrab dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan untuk salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan menjauhi larangan agama menjadi budaya yang mengakar kuat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu agama juga mengalami peningkatan. Mereka tidak lagi melihat pendidikan hanya sebagai urusan ulama atau sultan, tetapi sebagai kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap individu Muslim. Hal ini mendorong masyarakat untuk aktif mencari ilmu, baik di dalam negeri maupun ke pusat-pusat keilmuan Islam di luar wilayah Bima.[381]

Melalui dukungan kesultanan, banyak putra daerah yang mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Setelah kembali, mereka menjadi agen perubahan yang membawa pembaruan pemikiran keagamaan dan pendidikan. Para alumni ini memperkaya metode pengajaran, memperluas pemahaman masyarakat, dan

[380] Hasanuddin, L. *Kesultanan Islam dan Perkembangan Pendidikan di Nusantara*. (Yogyakarta: CV Jejak 2019). hal 55.

[381] Ahmad Sulaiman, Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Perspektif Sejarah, Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 3 (2021). Hal 28-30.

memperkenalkan kitab-kitab baru dari Timur Tengah yang relevan dengan konteks lokal.

Pesantren dan madrasah yang didirikan atas kebijakan kesultanan menjadi pusat pembentukan moral dan etika masyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mendidik soal ibadah, tetapi juga tentang sopan santun, kerja sama, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Para santri yang lulus umumnya membawa pengaruh positif ke lingkungan mereka masing-masing.[382]

Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya literasi keagamaan masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya buta huruf Arab menjadi mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar. Bahkan di beberapa daerah, muncul kebiasaan mengadakan lomba membaca Al-Qur'an dan pengkajian kitab kuning, sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap ilmu dan syariat.[383]

Kebijakan pendidikan juga berdampak terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Walaupun ruang partisipasi perempuan masih terbatas secara struktural, tetapi mereka mulai mendapat tempat dalam ranah pendidikan. Banyak perempuan yang belajar agama di rumah-rumah atau kelas khusus yang diselenggarakan oleh istri ulama atau ustazah, dan kemudian turut mengajarkan kepada anak-anak mereka.

Dalam aspek sosial budaya, kebijakan pendidikan turut memperhalus perilaku masyarakat. Nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam pendidikan menekankan pentingnya adab, kesederhanaan, dan kejujuran. Hal ini membentuk masyarakat yang lebih sopan dalam berbicara, lebih jujur dalam berdagang, dan lebih peduli terhadap sesama. Perubahan ini juga tampak pada sistem hukum adat yang mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat tidak lagi semata-mata berdasarkan tradisi leluhur, melainkan diselaraskan dengan hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa.

Kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan qadi (hakim agama) di setiap distrik juga berdampak langsung terhadap sistem peradilan masyarakat. Para qadi ini menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan konflik, memberikan fatwa, dan mengatur kehidupan beragama masyarakat. Ini memperkuat fungsi pendidikan sebagai pilar keadilan. Sultan sebagai pelindung pendidikan memberi contoh nyata dalam

---

[382] Siti Zubaidah, *Pendidikan Islam dan Globalisasi: Studi Kasus di Bima*, Jurnal Pendidikan Global, Vol. 13, No. 1 (2019). Hal 58-60.

[383] Hasanuddin, L. 2019. *Kesultanan Islam dan Perkembangan Pendidikan di Nusantara*. Yogyakarta: CV Jejak. Hal 66.

penerapan ajaran Islam. Ia sering terlibat dalam pengajian, memberi penghargaan kepada ulama, dan mendukung pembangunan masjid serta lembaga pendidikan. Sikap ini menumbuhkan rasa hormat masyarakat terhadap pemimpin, serta meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti jejak kebaikan tersebut.[384]

Dampak pendidikan juga terlihat dalam meningkatnya semangat gotong royong. Nilai ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan dalam pendidikan mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam membangun masjid, memperbaiki rumah guru ngaji, hingga menyelenggarakan kegiatan sosial. Rasa tanggung jawab kolektif tumbuh subur dalam masyarakat.n Pendidikan juga berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka. Diskusi-diskusi keagamaan yang terbuka mendorong lahirnya sikap kritis dan toleran. Masyarakat diajarkan untuk tidak mudah menghakimi, serta mampu membedakan antara persoalan agama yang prinsipil dan yang bersifat furu'iyah (cabang).

Dampak lainnya adalah penguatan identitas keislaman masyarakat Bima. Melalui pendidikan, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut, tetapi juga menjadi landasan dalam menentukan arah kehidupan, tradisi, dan budaya. Hal ini menciptakan masyarakat yang memiliki kepercayaan diri tinggi dalam mempertahankan jati diri mereka di tengah arus perubahan. Kebijakan ini juga meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya kerja keras, disiplin, dan waktu, masyarakat menjadi lebih giat bekerja. Mereka menganggap pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, sehingga motivasi kerja tidak hanya didasari kepentingan ekonomi, tetapi juga spiritual.[385]

Pendidikan Islam yang berkualitas juga menciptakan rasa keadilan sosial. Masyarakat dari kalangan bawah mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan meningkatkan status sosial mereka. Banyak di antara mereka yang berhasil menjadi guru, qadi, atau tokoh masyarakat karena prestasinya dalam pendidikan, bukan karena latar belakang keluarganya. Kebijakan pendidikan juga memperkuat relasi antarwilayah. Masyarakat Bima yang menuntut ilmu ke wilayah lain menjalin hubungan intelektual dan sosial yang luas. Jaringan ini menciptakan aliran ilmu pengetahuan yang tidak terputus, serta memperluas cakrawala berpikir masyarakat lokal.

---

[384] Umar Yasin, *Madrasah dan Pesantren: Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bima*, Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat, Vol. 14, No. 2 (2023). Hal 75-77.

[385] Siti Zubaidah, *Pendidikan Islam dan Globalisasi: Studi Kasus di Bima*, Jurnal Pendidikan Global, Vol. 13, No. 1 (2019). Hal. 58-60.

Melalui pendidikan pula, semangat keislaman masyarakat ditumbuhkan secara damai dan humanis. Tidak ada paksaan dalam menerima ajaran Islam, tetapi proses internalisasi nilai-nilai agama dilakukan melalui pendekatan yang lembut dan menyentuh hati. Hal ini membuat masyarakat memeluk Islam dengan penuh kesadaran dan kecintaan.

Pendidikan juga menciptakan stabilitas sosial-politik. Dengan masyarakat yang taat dan berpendidikan, potensi konflik dapat ditekan. Ketika ada perselisihan, masyarakat cenderung menyelesaikannya dengan musyawarah berdasarkan ajaran Islam, bukan dengan kekerasan atau tindakan anarkis. Para ulama hasil didikan kebijakan ini menjadi pemimpin moral yang mengayomi masyarakat. Mereka tidak hanya berkutat di dunia ibadah, tetapi juga menjadi penasihat ekonomi, sosial, bahkan politik. Peran mereka sebagai jembatan antara rakyat dan penguasa membuat kebijakan negara lebih diterima oleh masyarakat.[386]

Peran masjid sebagai pusat pendidikan juga memberikan dampak luas. Masjid bukan hanya tempat salat, tetapi juga menjadi tempat belajar, diskusi, dan kegiatan sosial. Fungsinya sebagai pusat peradaban Islam semakin mengakar dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Dengan sistem pendidikan yang kuat, muncul tradisi intelektual di tengah masyarakat. Banyak keluarga yang mulai membiasakan membaca kitab, menghafal Al-Qur'an, dan mendiskusikan persoalan agama dalam keluarga. Ini menciptakan budaya literasi Islam yang berkembang di luar lembaga formal.

Kebijakan ini juga berdampak pada sikap politik masyarakat. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai adil, amanah, dan kepemimpinan membuat masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya terhadap pemimpin. Mereka menjadi lebih selektif dalam mendukung penguasa dan lebih aktif dalam menyuarakan kebenaran.[387]

Secara ekonomi, pendidikan Islam mendorong munculnya aktivitas wirausaha berbasis syariah. Masyarakat mulai memperhatikan aspek halal dalam perdagangan, kejujuran dalam transaksi, dan etika dalam bekerja. Hal ini menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Pendidikan juga memperkuat kohesi sosial. Masyarakat yang belajar bersama dalam satu majelis menjadi lebih dekat satu sama lain. Perbedaan status sosial, etnis,

[386] Nurhadi, A. *Jejak Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group 2019). Hal 16-17.

[387] Ibid Hal 18.

atau latar belakang tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan.

Generasi muda yang tumbuh dalam sistem pendidikan Islam memiliki arah hidup yang lebih jelas. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Identitas mereka sebagai Muslim Bima menjadi bekal kuat dalam menghadapi zaman modern.[388]

Pendidikan Islam di masa Kesultanan Bima juga meninggalkan warisan intelektual yang terus hidup. Banyak manuskrip dan tradisi pengajaran yang masih dipertahankan hingga kini, menjadi bukti betapa kuat dan berpengaruhnya kebijakan pendidikan yang telah ditanamkan sejak ratusan tahun lalu.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya menciptakan masyarakat yang religius, tetapi juga membentuk peradaban yang bermartabat. Masyarakat Bima tumbuh sebagai komunitas yang menjunjung tinggi ilmu, berakhlak mulia, dan kokoh dalam nilai-nilai Islam. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci dari segala kemajuan, baik spiritual maupun sosial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, budaya, dan politik pada masa Kesultanan Bima memberikan peluang besar bagi perkembangan pendidikan Islam. Keputusan Kesultanan Bima untuk menjadikan Islam sebagai agama negara sangat mendukung penguatan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Dukungan dari sultan dan kalangan istana terhadap ulama dan lembaga pendidikan Islam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan tradisi keilmuan Islam di masyarakat.

Pemerintah Kesultanan Bima menerapkan sejumlah kebijakan penting dalam mendukung pendidikan Islam, antara lain pendirian masjid sebagai pusat pembelajaran, pengangkatan ulama dan qadi untuk mengajar dan memberikan nasihat kepada masyarakat, serta pengiriman pelajar untuk menuntut ilmu di luar daerah Bima. Selain itu, kesultanan juga mendanai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan ini, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga memberikan perlindungan politik terhadap kegiatan pendidikan agama.

[388] Ismail, A. 2020. "Tradisi Keilmuan Islam di Kesultanan Bima." *Jurnal Warisan Islam Nusantara* 2, no. 2: 88–102.

Dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan tersebut, dampaknya sangat besar dan berlanjut. Pendidikan Islam berhasil membentuk masyarakat Bima menjadi lebih religius, beradab, dan peduli terhadap nilai-nilai sosial yang diajarkan dalam Islam. Ini mendorong munculnya tradisi intelektual yang berkembang dengan pesat, ditandai dengan lahirnya ulama-ulama lokal yang berperan penting dalam membimbing masyarakat dan menjaga keutuhan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat dilihat bahwa pendidikan Islam di Kesultanan Bima tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan agama, tetapi juga berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan bermartabat. Para ulama, dengan dukungan dari penguasa dan semangat masyarakat, menciptakan sistem pendidikan yang meskipun masih bersifat tradisional, namun sangat relevan dengan kebutuhan zaman dan membuahkan hasil yang nyata. Pendidikan Islam ini juga menunjukkan bahwa pengaruh agama dan pengetahuan dapat menjadi pilar penting bagi kejayaan sebuah peradaban lokal.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Bima telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Nusa Tenggara dan Indonesia pada umumnya. Sistem pendidikan yang dibangun pada masa itu memberikan warisan yang bertahan hingga kini, baik dalam bentuk lembaga pendidikan, praktik keagamaan, maupun nilai-nilai kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Kesultanan Bima membuktikan bahwa dengan mengintegrasikan kekuatan spiritual dan intelektual, suatu masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan kokoh, bahkan di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

BAB XV
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA VOC (IMPRALISME BELANDA, INGGRIS DAN PORTUGIS)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen strategis dalam membentuk identitas dan karakter suatu bangsa. Di Indonesia, sejak awal masuknya Islam ke nusantara, lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surau, dan dayah telah menjadi pusat pembelajaran, dakwah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Selama masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi tantangan. Kolonis yang datang ke pulau itu membawa tujuan ekonomi dan politik serta budaya dan religius, seperti menyebarkan agama dan budaya mereka. Portugis, yang tiba di Indonesia pada abad ke-16, membawa semangat Reconquista dan penyebaran agama Katolik. Meskipun Belanda melalui VOC lebih berorientasi pada perdagangan, namun mereka tetap memiliki kepentingan ideologis untuk mengendalikan sistem pendidikan agar sesuai dengan kepentingan kolonial. Sementara Inggris yang berkuasa di beberapa wilayah Indonesia juga membuat kebijakan pendidikan yang berpengaruh pada pendidikan Islam. [389]

Pendidikan Islam dalam banyak kasus dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas pemerintahan kolonial karena mampu membentuk identitas keagamaan dan kebangsaan yang kuat di kalangan masyarakat pribumi. Akibatnya, berbagai bentuk pembatasan, pengawasan, dan peminggiran terhadap lembaga pendidikan Islam dan para ulama muncul. Komunitas Muslim di kepulauan ini telah menunjukkan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi beban dan diskriminasi ini. Lembaga-lembaga pendidikan Islam terus berubah dan bermetamorfosis untuk tetap menjalankan tugasnya di tengah keterbatasan. Pendidikan Islam dipertahankan dengan berbagai cara oleh para ulama, guru, dan tokoh masyarakat.[390]

Era kolonial merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia karena pada masa inilah terjadi pertentangan antara sistem pendidikan tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan oleh kolonial. Ketidakadilan akses, dualisme pendidikan, dan marjinalisasi

[389] Aslan**,** Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda, *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, Vol.6, No. (1), 2023, hal 45–46

[390] Solichin, Mujianto, Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme, *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol.6, No. (1), 2023, hal 75–76

lembaga pendidikan Islam menjadi kenyataan yang harus dialami umat Islam pada masa ini. Namun peristiwa ini melahirkan semangat perlawanan dan kebangkitan para intelektual muslim yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin pergerakan nasional. Oleh karena itu, wacana kebijakan pendidikan Islam pada masa Portugis, Belanda (VOC), dan Inggris tidak hanya penting dalam ranah sejarah pendidikan, tetapi juga dalam pengakuan terhadap peran pendidikan Islam terhadap kebangkitan kesadaran kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.[391]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Menurut Fullan, kebijakan pendidikan adalah hasil dari interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pendidikan (pemerintah, sekolah, dan masyarakat). Dalam konteks penjajahan, kebijakan pendidikan kolonial bertujuan untuk menanggulangi ancaman dari budaya lokal dan agama yang dianggap menghalangi dominasi kolonial. Kebijakan ini memperkenalkan sistem pendidikan yang melayani kepentingan kolonial, seperti penguasaan bahasa Eropa dan pengajaran nilai-nilai kolonial.[392]

2. Teori Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki tradisi lama yang dimulai sejak usia Nabi Muhammad SAW, di mana pendidikan dirayakan sebagai sebagian integrated dari proses dakwah dan peradaban Islam. Nata (2002) dalam Sejarah Pendidikan Islam membiuskan bahwa awalnya, pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan individu beriman dan bertakwa, serta memelihara kelestarian ajaran Islam secara masyarakat. Pada zaman kolonial, sistem pendidikan Islam dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pendidikan kolonial, namun mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang mengajarkan moralitas, etika, dan spiritualitas.[393]

---

[391] Rahmadhani**,** Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kolonialisme Belanda, *Jurnal Social Science,* Vol.1, No. (1), 2023, hal 100

[392] Syamsul Pulungan, *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal 45

[393] Muhammad Sufyan As-tsauri**,** *Sejarah Pendidikan Islam*. (Jakarta: Guepedia, 2020), hal 75

3. Teori Kolonialisme dan Imperialisme

Teori kolonialisme dan imperialisme adalah kerangka dasar untuk memahami bagaimana negara-negara kolonial, seperti Belanda, Inggris, dan Portugis, menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat pengendalian sosial, politik, dan ekonomi di daerah jajahan. Dalam konteks pendidikan, Edward Said dalam buku Orientalism menguraikan bahwa kolonialisasi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik, melainkan memengaruhi budaya dan pendidikan. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh kekuatan kolonial sering kali bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan ideologi mereka kepada masyarakat jajahan, sekaligus menekan dan mengubah nilai-nilai tradisional yang sudah ada.[394]

4. Teori Pendidikan dalam Sistem Kolonial

Dalam konteks kolonialisme Belanda, De Moor dalam Education and Society in the Dutch East Indies menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan Belanda memisahkan kelas sosial antara orang Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Belanda tidak memberikan akses pendidikan yang setara kepada masyarakat pribumi, apalagi kepada umat Islam. Sebaliknya, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan Belanda lebih bersifat represif dan terbatas, dengan membatasi perkembangan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh pesantren.[395]

C. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Masuknya Imperalisme Belanda, Inggris, dan Portugis ke Wilayah Nusantara

Masuknya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris ke Nusantara merupakan akibat langsung dari dinamika besar yang terjadi di Eropa ketika Abad Pertengahan berakhir dan zaman modern dimulai. Pada masa itu, bangsa-bangsa Eropa mengalami perubahan yang monumental dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan politik. Pencapaian terbesar mungkin ada di bidang pelayaran dan navigasi. Kompas, peta yang lebih baik, dan kapal-kapal besar

[394] Eka Wismulyani, *Pendidikan Masa Kolonial*. (Jakarta: Cempaka Putih PT, 2019), hal 121

[395] Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas*. (Pustaka Pelajar, 2017), hal 95

seperti kafilah memungkinkan bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan jarak jauh melintasi samudra. Mereka berlayar menjelajahi dunia untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama mereka. Ini adalah cikal bakal dari apa yang kemudian disebut sebagai Zaman Penjelajahan. Pada masa ini, nusantara yang kaya akan rempah-rempah, merupakan target utama dalam peta ekspansi kekuasaan Eropa.[396]

Insentif utama yang mendorong orang-orang Eropa datang ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara, adalah keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Lada, cengkeh, pala, dan kayu manis tidak hanya dihargai tinggi di pasar Eropa, tetapi juga menjadi simbol status di kalangan bangsawan Eropa. Para pedagang Arab dan India, yang mendominasi perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad, membawa komoditas ini ke Eropa melalui jalur darat (jalur sutra) dan laut. Namun, dengan dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmaniyah pada tahun 1453, jalur darat ke Timur tidak lagi tersedia bagi orang Eropa. Oleh karena itu, mereka mulai mencari rute laut langsung ke sumber rempah-rempah di Asia. Dalam pencarian inilah Portugis pertama kali menemukan nusantara, diikuti oleh Spanyol, lalu Belanda, dan kemudian Inggris.[397]

Bangsa Portugislah yang membuka nusantara bagi bangsa Eropa. Setelah menguasai Goa dan Malaka di India pada tahun 1511, Portugis berusaha menyebarkan pengaruhnya ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah, terutama Maluku. Selain berdagang, mereka juga melakukan penyebaran agama Katolik. Portugis mulai campur tangan dalam urusan politik kerajaan lokal di daerah-daerah seperti Ternate dan Tidore. Mereka bahkan terlibat dalam peperangan dan pertempuran di antara kerajaan-kerajaan. Motif terakhir adalah untuk memiliki kontrol penuh atas perdagangan rempah-rempah dan menciptakan agama Kristen. Campur tangan Portugis pada tingkat yang ekstrim serta arogansi mereka menimbulkan perlawanan dari penduduk lokal dan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah tersebut.[398]

Kemudian datanglah Belanda dengan misi yang lebih terorganisir. Mereka mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang yang disetujui negara untuk memonopoli, membuat perjanjian

[396] Muhammad Anshari**,** Krisis Konstantinopel dan Dampaknya terhadap Perdagangan Rempah-rempah Eropa. *Jurnal Dunia Islam dan Barat,* Vol.3, No. (1), 2020, hal 66–67.

[397] Fitriani, Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No. (2), 2024, hal 150

[398] Muhammad Yusuf, Politik Kolonial Portugis di Maluku: Studi atas Intervensi dalam Dinamika Kesultanan Ternate dan Tidore. *Jurnal Sejarah dan Budaya,* Vol.15, No. (1), 2023, hal 21

dengan penguasa lokal, dan bahkan berperang. VOC memiliki visi ambisius untuk menggulingkan Portugis dan menjadi penguasa monopoli perdagangan Asia. Mereka menggunakan strategi licik seperti memecah belah kerajaan-kerajaan lokal, memanfaatkan konflik internal, dan membentuk aliansi palsu untuk menguasai tanah. Belanda tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi, tetapi juga semakin mengendalikan tanah dan pemerintahan lokal.[399] Tidak terlalu religius dibandingkan Portugis, kebijakan VOC menekan pertumbuhan Islam, terutama di bidang pendidikan, karena hal ini melemahkan kekuatan kolonial. Sementara itu, Inggris masuk ke Nusantara melalui British East India Company, dan menduduki beberapa tempat strategis seperti Bengkulu dan Malaka dari tangan Belanda. Meskipun pengaruh Inggris di Nusantara tidak sebesar pengaruh Belanda, namun mereka juga memainkan peran penting dalam proses imperialisme di Nusantara. Inggris juga membawa sejumlah sistem pendidikan dan budaya, kebijakan terhadap umat Islam yang bervariasi tergantung pada situasi politik dan kepentingan ekonomi mereka dalam perdagangan di wilayah tersebut. Pada umumnya, Inggris, Belanda dan Portugis menggunakan strategi imperialisme yang menggabungkan kekuatan ekonomi, politik dan budaya untuk mengendalikan wilayah jajahannya.

Alasan kedua yang mempercepat masuknya kekuatan asing adalah situasi internal Nusantara. Sebagian besar kerajaan di Nusantara pada masa itu dilanda konflik internal, perebutan kekuasaan, dan lemahnya solidaritas di antara kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan Islam yang sebelumnya menjadi pusat kekuasaan politik dan penyebaran agama Islam mulai melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Eropa untuk masuk dan melebarkan pengaruhnya, baik secara politik maupun militer. Dalam proses ini, pendidikan Islam yang selama ini berkembang secara organik di bawah kepemimpinan pesantren, surau, dan lembaga-lembaga lokal lainnya semakin terancam. Kolonialisme tidak hanya menguasai tanah dan perdagangan, tetapi juga berusaha mengendalikan kekuatan sosial dan budaya, yang di dalamnya pendidikan memegang peranan penting. Sistem pendidikan Islam, yang diyakini mampu membangkitkan perlawanan terhadap kolonialisme, dipangkas, diatur, dan bahkan digantikan oleh sistem pendidikan Barat yang sekuler dan pro negara.[400]

---

[399] Solihah Titin Sumanti, Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal 89

[400] Siti Tuti Sumanti, Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA),* Vol.4, No. (1), 2020, hal 45-46

Dengan demikian, masuknya Portugis, Belanda, dan Inggris ke Nusantara bukan semata-mata masalah perdagangan, tetapi merupakan bagian dari skema besar imperialisme global. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga ideologi, agama, dan sistem pemerintahan yang ingin dipaksakan di tanah jajahannya. Dengan demikian, sistem kehidupan masyarakat lokal, termasuk pendidikan Islam, mengalami perubahan yang cukup besar. Kebijakan kolonial mulai mengubah posisi ulama dan lembaga-lembaga Islam dalam masyarakat. Hal ini merupakan awal dari perubahan besar dalam dinamika sosial dan pendidikan Islam di Indonesia, yang akan terus berkembang hingga masa kemerdekaan.[401]

2. Kebijakan yang Diterapkan Oleh VOC (Dan Negara Imperialis Lainnya) Terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan VOC dan kekuatan imperialis lainnya terhadap pendidikan Islam di Nusantara secara langsung berkaitan dengan kebijakan kolonial untuk mengontrol masyarakat, mendiskreditkan otoritas ulama, dan melanjutkan monopoli kekuasaan mereka.[402]

a. Kebijakan VOC (Belanda) terhadap Pendidikan Islam

Pada masa pemerintahan VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) yang dimulai sejak awal abad ke-17, kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam di nusantara sangat ketat dan sangat minim. VOC tidak ingin mendorong pendidikan berbasis Islam karena mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi stabilitas kolonial mereka. Di sini, VOC cenderung melihat pendidikan Islam sebagai sarana untuk memperkuat otoritas ulama yang mampu memobilisasi penduduk untuk melawan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619, dan kebijakan pendidikan mereka ditujukan untuk sekolah-sekolah gereja di dalam pemerintahan. Gubernur Jenderal Van den Capellen membangun sebuah sekolah dasar untuk pribumi pada tahun 1819 untuk mempelajari hukum Belanda. Pendidikan Islam pesantren ternyata mendapat dukungan dari non-pemerintah karena tidak mengajarkan kemampuan membaca dan menulis Latin. Tiga jenis pendidikan Islam yang muncul adalah transisi Hindu-Islam, surau/langgar, dan

[401] Ratna Kasni Yuniendel, Jejak Kolonialisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tantangan hingga Transisi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 135–136

[402] Bahaking Rama Agustang, (2023). Pendidikan Islam Masa Penjajahan, Kemerdekaan, dan Dinamika Kebijaksanaan. *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran,* Vol.1, No. (3), 2023, hal 287.

pesantren, di mana kurikulumnya berfokus pada kitab kuning sejarah Islam abad pertengahan.[403]

VOC mengatur dan memanipulasi urusan-urusan keagamaan tambahan yang dilakukan oleh umat Islam. Meskipun VOC tidak secara langsung menghapuskan sekolah-sekolah Islam seperti pesantren, mereka memberikan tekanan melalui pembatasan otonomi ulama dalam mengajar atau menyebarkan pembelajaran Islam. Pesantren, pusat studi Islam di Nusantara, masih tetap ada, tetapi secara teratur diawasi oleh pemerintah kolonial. Sebagian besar pesantren dibiarkan sendiri dan dibiarkan berkembang secara terbatas tanpa bantuan atau pendampingan dari pemerintah kolonial. Selain itu, VOC juga lebih suka membiayai pengembangan sekolah-sekolah Barat dan sekolah-sekolah misi Kristen, yang menguntungkan tujuan-tujuan imperialisme mereka. Kebijakan VOC Belanda terhadap pendidikan Islam juga tidak terlepas dari ketakutan mereka akan potensi perlawanan. Oleh karena itu, mereka berusaha melemahkan pengaruh Islam dengan membatasi akses umat Islam terhadap pendidikan formal dan mendorong ketaatan untuk mempelajari agama Kristen melalui sekolah-sekolah misi mereka. Secara keseluruhan, pendidikan Islam tidak dilarang, tetapi kebijakan VOC menekan dan menghambat pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia.[404]

b. Kebijakan Pemerintah Inggris terhadap Pendidikan Islam

Meskipun pendudukan Inggris di Indonesia relatif singkat (1811-1816), di tangan Thomas Stamford Raffles, kebijakan-kebijakan yang lebih liberal diterapkan terhadap pendidikan Islam dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan oleh VOC. Raffles dikenal sebagai orang yang lebih liberal dalam sikapnya terhadap budaya lokal, termasuk Islam, dan lebih menekankan pada pendekatan yang lebih humanis. Di tingkat pendidikan, Raffles tidak benar-benar menekan pendidikan Islam, meskipun pendidikan Islam tidak diprioritaskan di tengah-tengah kebijakan pemerintahannya.[405]

Raffles menekankan pendidikan sekuler yang didasarkan pada ilmu pengetahuan Barat, dan selama masa pemerintahannya, ia mencoba membangun

[403] Musliati, Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan, *Tips: Jurnal Riset*, Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1, No. 2, 2023, hal 67

[404] Mustaqim Hasan, Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang, *Al-Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 01 No. 03 (2023), hal 129

[405] Kamila, Menjelajah Lorong Waktu: Pendidikan Islam di Bawah Cengkeraman Kolonialisme Belanda, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.8, No. (3), 2024, hal 45305

sistem pendidikan modern yang tidak terlalu feodal atau cenderung religius dan lebih liberal. Beberapa sekolah dan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan Barat didirikan di bawah pemerintahan Raffles, tetapi pendidikan Islam dikesampingkan dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Raffles juga tertarik untuk mendokumentasikan budaya lokal, termasuk agama dan tradisi masyarakat, untuk pemerintah kolonial.

Namun, meskipun ada kebijakan yang lebih bebas dari Raffles, ia tidak melakukan banyak hal untuk mendorong pertumbuhan pendidikan Islam. Pemerintahannya lebih mengutamakan fondasi sistem pendidikan Barat, dan ini akan menjadi landasan bagi pendidikan kolonial Belanda di Indonesia setelah Raffles kehilangan kekuasaannya.[406]

c. Kebijakan Portugis terhadap Pendidikan Islam

Portugis adalah kekuatan kolonial pertama yang masuk ke nusantara pada awal abad ke-16, dan mereka sangat agresif dalam usaha pendidikan dan penyebaran agama. Alasan awal kedatangan Portugis adalah untuk membawa agama Katolik, dan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan agama Katolik ini. Portugis, dalam upaya mengkristenkan nusantara, berusaha untuk menghapus pengaruh Islam yang telah menjadi lazim di sebagian besar wilayah nusantara.[407]

Pendidikan Islam di daerah pendudukan Portugis, seperti Maluku dan Timor, berada di bawah tekanan yang sangat tinggi. Pesantren dan madrasah yang saat itu menjadi pusat pendidikan Islam sering kali dihancurkan oleh Portugis. Mereka tidak hanya membatasi, tapi juga melarang para ulama untuk mengajar dan menyebarkan Islam secara terbuka. Mereka malah mendirikan sekolah-sekolah misi di mana mereka mengajarkan agama Kristen kepada anak-anak setempat dan memaksa mereka untuk mengikuti agama Katolik. Komunitas Muslim kemudian dipaksa untuk tunduk pada kebijakan-kebijakan tersebut jika mereka tidak ingin menghadapi bahaya fisik atau sosial.[408]

---

[406] Harahap**,** Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.1, No. (1), 2023, hal 136

[407] Riska, Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.3, No. (3), 2021, hal 824-825

[408] Irwan, Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, Vol. 15, No. 2, (2024), hal 118

Portugis berpikir bahwa dengan menekan pendidikan Islam, mereka akan dapat melemahkan peran agama ini dalam masyarakat. Mereka mencoba mengubah mentalitas masyarakat Nusantara melalui pendidikan berbasis Kristen. Sebagian besar daerah yang dulunya merupakan pusat pendidikan Islam seperti Maluku, dipaksa untuk mengubah pola pendidikan mereka, dan Islam kehilangan banyak pengikutnya dalam waktu yang cukup singkat karena tekanan kolonial Portugis. Secara umum, kebijakan Portugis terhadap pendidikan Islam bersifat menekan dan bersimpati pada agenda Kristenisasi. Kebijakan mereka tidak memberikan ruang bagi perkembangan pendidikan Islam, melainkan berusaha memaksakan pendidikan berbasis Katolik yang merupakan salah satu alat penjajahan mereka.[409]

3. Dampak Kebijakan Imperialis terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh kekuatan imperialis, baik Belanda, Inggris maupun Portugis, terhadap pendidikan Islam di nusantara menghasilkan dampak yang sangat besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa penjajahan, tetapi juga membentuk perkembangan pendidikan Islam di Indonesia hingga masa kemerdekaan dan bahkan setelahnya. Sebagai catatan umum, meskipun upaya kolonial difokuskan untuk mengendalikan dan membatasi pengaruh Islam melalui pendidikan, hal ini mempercepat perkembangan berbagai gerakan perlawanan, selain memperkenalkan ide-ide pembaruan dalam pendidikan Islam yang lebih modern.[410]

a. Berkurangnya Akses Pendidikan dan Rendahnya Kualitas Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial, terutama VOC dan Portugis, menyebabkan berkurangnya akses umat Islam terhadap pendidikan formal. Pesantren dan madrasah, pusat pendidikan dan pengajaran Islam, dengan sengaja tidak mendapat dukungan. VOC, misalnya, tidak menyediakan fasilitas atau subsidi untuk pembangunan pesantren, yang mencegah sekolah-sekolah ini untuk mengembangkan kurikulum dan sumber daya. Hal ini mengakibatkan pendidikan Islam tidak dapat berkembang dengan pesat, terutama jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah misi yang didirikan oleh penjajah dan didukung penuh oleh pemerintah colonial.[411] Bahkan, di bawah

[409] Arifin, *Kebijakan Pendidikan Islam: Telaah Historis dan Kontekstual*. (Malang: UIN Maliki Press, 2020), hal. 60.

[410] Muchtar, Kolonialisme dan Pendidikan: Dampak terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. (2), 2019, hal 120-121

[411] Cahyanti, Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol.2, No. (2), 2021, hal 181-182.

pendudukan Portugis, pemberantasan lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dilakukan untuk mengurangi basis kekuatan Islam. Oleh karena itu, meskipun ada pesantren, paparan terhadap pendidikan yang lebih terorganisir dan komprehensif sangat dibatasi. Pendidikan Islam hanya dipertahankan di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah pedesaan, dan lebih bersifat tradisional, dengan kurikulum yang terbatas pada transmisi agama dan nilai-nilai Islam tanpa pengetahuan umum yang memadai.

b. Munculnya Nasionalisme dan Gerakan Perlawanan

Salah satu konsekuensi jangka panjang yang serius dari kebijakan imperialis adalah terciptanya gerakan-gerakan perlawanan anti-kolonial, yang salah satunya disulut oleh pendidikan Islam. Meskipun dibatasi dan diawasi, pesantren dan sekolah-sekolah Islam menjadi tempat berkembangnya ide-ide perlawanan terhadap kolonialisme. Mayoritas pemimpin pergerakan nasional Indonesia, seperti H.O.S. Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, dan Wahid Hasyim, memiliki latar belakang pendidikan Islam. Mereka, yang sebagian besar dididik di pesantren, didorong untuk melawan hegemoni kolonial melalui pendidikan. Pendidikan Islam yang dilakukan secara mandiri oleh para ulama dan santri merupakan awal mula berkembangnya gerakan-gerakan yang menitikberatkan pada kebebasan dan kemandirian dalam beragama. Salah satu gerakan yang dihasilkan melalui pendidikan Islam ini adalah gerakan modernisme Islam, yang berfokus pada pembaharuan dan pembentukan sistem pendidikan yang lebih dekat dengan pemecahan masalah di era saat ini.[412]

Beberapa kelompok Islam seperti Muhammadiyah (didirikan pada tahun 1912) dan Nahdlatul Ulama (NU) (didirikan pada tahun 1926) didirikan sebagai tanggapan atas diskriminasi kebijakan kolonial terhadap pendidikan Islam.[413]

Kelompok-kelompok ini berusaha untuk membawa sistem pendidikan Islam yang lebih modern, tidak hanya melayani kepercayaan Islam tradisional, tetapi juga mengadopsi kurikulum yang memasukkan ilmu pengetahuan modern. Di sini, pendidikan Islam tidak hanya memperkuat pendidikan agama, tetapi juga

[412] Franata, Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol.2, No. (5), 2022, hal 198

[413] Tirolian**,** Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol.2, No. (2). 2018, hal 154

digunakan untuk menciptakan karakter bangsa yang lebih mandiri dan tercerahkan dalam konteks tekanan kolonial.[414]

c. Mendirikan Sistem Pendidikan Islam yang Mandiri dan Otonomi Umat Islam

Dampak lain dari kebijakan kolonial adalah terciptanya sistem pendidikan Islam yang otonom dan mandiri melalui sekolah-sekolah Islam seperti pesantren. Terlepas dari peraturan dan kontrol yang ketat, pesantren tetap menjadi tempat yang kuat untuk pendidikan Islam, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu terpengaruh oleh pengaruh langsung kolonialisme. Di beberapa daerah, para ulama dan santri berusaha untuk mempertahankan pendidikan Islam dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir.[415]

Di bawah ancaman penjajah, sekolah-sekolah Islam seperti itu tumbuh lebih mudah beradaptasi dan inovatif dalam mendefinisikan kurikulum mereka. Para santri tidak hanya diajarkan kearifan agama, tetapi juga keterampilan lain yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya perdagangan, kerajinan, pertanian, dan lain-lain. Sekolah pesantren tumbuh menjadi sarana konsolidasi identitas Islam dan kekuatan budaya melawan tekanan dari luar. Selain itu, pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi ajang semangat kemandirian umat Islam di segala bidang kehidupan, baik pendidikan, ekonomi, maupun politik. Meski tanpa dukungan dari pemerintah kolonial, lembaga-lembaga tersebut mampu bertahan dan berkembang dengan bantuan masyarakat di sekitarnya.[416]

d. Bangkitnya Pendidikan Islam Modern dan Reformasi Kurikulum

Meskipun begitu banyak kebijakan kolonial yang membatasi, namun tekanan terhadap mereka sebenarnya mendorong semangat reformasi dalam bidang pendidikan Islam. Gerakan reformasi dalam pembelajaran Islam dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai reaksi atas keterbelakangan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, melalui organisasi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan, pendidikan Islam yang lebih modern dengan silabus yang lebih luas dimulai. Muhammadiyah tidak

[414] Rohani, Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda (Kasus Muhammadiyah Dan NU), *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* Vol.18, No.2, 2022, hal 103-105

[415] Mubin, Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam,* Vol.3, No. (1), 2021, hal 14–15.

[416] Bustami, Abdul. *Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Penjajahan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2017, hlm. 130–137.

hanya mendirikan sekolah-sekolah Islam, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan umum, matematika, dan sains, di samping ilmu-ilmu agama Islam.[417]

Gerakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pendidikan Barat yang lebih dominan pada masa itu. Selain itu, gerakan Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, juga menekankan pentingnya pendidikan Islam, khususnya di bidang agama dan sosial. Gerakan ini menawarkan pendekatan jalan tengah dan berfokus pada pengembangan moralitas dan etika Islam, sehingga para santri tidak hanya menjadi cerdas dalam konteks agama, tetapi juga mahir dalam memecahkan masalah sosial dan politik. Selain organisasi-organisasi Islam, pemerintah kolonial Belanda juga mulai membuka ruang bagi pendidikan Islam, meskipun sangat sederhana dan dalam kondisi ekonomi dan politik yang sulit. Kebijakan ini, atau yang juga dikenal sebagai Politik Etis yang diluncurkan pada awal abad ke-20, memberikan beberapa kesempatan bagi penduduk pribumi, termasuk Muslim, untuk memperoleh pendidikan dasar. Meskipun pendidikan yang diberikan masih sangat berbau budaya dan nilai Barat, perubahan ini memperkenalkan ide modernisasi dalam pendidikan yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan Islam.[418]

4. Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pendidikan Islam

Sebelum kedatangan penjajah, pendidikan pribumi telah berkembang pesat sesuai dengan perkembangan Islam yang berlangsung dalam suasana yang damai, bersahabat, dan santun. Hal ini merupakan bukti adanya kesadaran masyarakat Indonesia akan kecocokan sistem pendidikan Islam dengan hati nurani masyarakat dan bangsa Indonesia pada saat itu. Kehidupan di masyarakat menjadi rukun, harmonis, dan tidak saling mendominasi. Hal ini karena sejak kedatangan penjajah Spanyol, Portugis, dan Belanda serta Jepang karena keserakahan akan harta dan kekayaan yang sangat besar, masyarakat Indonesia terpecah belah. [419]

[417] Maulida, Dinamika dan Peran Pondok Pesantren dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme hingga Masa Kini. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.5, No. (9), 2020, hal 114–115.

[418] Anas, Dinamika Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Penjajahan Jepang di Yogyakarta Tahun 1942–1945. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol.6, No. (1), 2020, hal 15.

[419] Subandi, Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol.1, No. (1), 2020, hal 45-46

Ketika Jepang dan Belanda melakukan westernisasi dan kristenisasi serta berbagai penindasan terhadap bangsa Indonesia, demikian pula dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan terhadap pendidikan Islam, maka pada tahun 1819 Gubernur Jenderal Van Der Capellen memerintahkan kepada para Residen untuk menguji kemungkinan meningkatkan pendidikan pribumi. Demikian pula, Verkerk Pistorius juga mengisyaratkan bahwa pengembangan pendidikan harus dilakukan dengan memperkuat pendidikan bumiputra yang sudah ada. Bahkan dari Steenbrink, ada beberapa pengamatan yang memberikan penilaian yang baik terhadap sistem pendidikan awal Indonesia dalam mengembangkan pendidikan kontemporer. Sikap pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bermula dari sikap dan kebijakan mereka terhadap Islam. Pada awalnya, pemerintah tidak mau mengambil resiko untuk mengintervensi masalah-masalah keislaman, karena tidak ada kebijakan yang mengatur hal tersebut.[420]

Selain tidak mengetahui tentang sistem sosial Islam pada saat itu. Meskipun pada akhirnya sikap pemerintah terhadap pendidikan Islam tetap diskriminatif. Melihat sikap pemerintah Belanda terhadap Islam dan pendidikan Islam, penulis berasumsi bahwa meskipun sikap diskriminatif dan berbagai aturan ketat yang diterapkan oleh pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam, namun di dalam hati mereka masih ada kekhawatiran menghadapi umat Islam Indonesia. Hal ini terbukti bahwa pemerintah Belanda masih berusaha menyelidiki sikap dan kehidupan umat Islam melalui utusan Snouch Hurgronje yang namanya diganti menjadi Abdul Gaffar. Fakta sejarah berbicara bahwa dengan faktor pendukung keteguhan panggilan jiwa spiritual dan religius umat Islam akan kebenaran yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil yang tidak terbendung oleh rintangan apapun. Pendidikan Islam terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.[421]

Faktor Penghambatnya adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa penjajah Belanda dan Jepang dalam menuntaskan misinya dengan berbagai kebijakan politiknya sangat destruktif terhadap bangsa Indonesia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tidak memandang penjajah sebagai agen kemajuan dan teknologi, tetapi kedatangan mereka dipandang

[420] Muhammad Syarif, Politik Pendidikan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol.8, No. (2), 2019, hal 247

[421] Bagas Mukti Nasrowi, Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Publik Belanda pada masa Penjajahan di Indonesia, *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, 2023, hal 4

menghambat perkembangan kemajuan bangsa, khususnya perkembangan Islam dan Pendidikan Islam. Kebijakan penjajah Belanda untuk mendominasi jalannya pendidikan pribumi semata-mata hanya untuk menguntungkan mereka. Skema ini menjadi kenyataan ketika Van Der Capellen sebagai Gubernur Jenderal mengeluarkan surat edaran yang isinya "Dianggap penting untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang menjamin kemampuan membaca dan menulis di kalangan penduduk bumiputra agar mereka dapat dengan mudah mengindahkan hukum dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda" Pada tahap berikutnya, pendidikan dan pembelajaran terganggu karena program penghematan. Sekolah-sekolah hanya ada untuk anak-anak Indonesia yang memeluk agama Kristen. Alasan di balik ini adalah masalah keuangan yang kritis yang dialami oleh Belanda.[422]

Sekolah-sekolah Islam yang ada sebelum kedatangan penjajah (pendidikan dayah atau meunasah, surau, dan pesantren) mulai mengalami kemunduran dan sengaja dipersempit dan dihancurkan oleh penjajah. Penjajah mencatat bahwa sistem persekolahan Islam pada hakikatnya bukanlah lembaga pendidikan, melainkan hanya sebagai lembaga agitasi dan provokasi untuk melawan penjajahan. Dengan anggapan seperti itu, tentu saja menjadi mudah untuk membayangi atau bahkan menghancurkannya ketika penjajah mencobanya. Di sisi lain, penjajah membangun sistem pendidikan alamiah negara penjajah. Polarisasi sekolah di sini telah terjadi, yang awalnya hanya mengenal pendidikan klasik, kemudian dalam proses penjajahan ini, sistem pendidikan modern mulai terkuak.[423]

D. KESIMPULAN

Kedatangan Portugis, Belanda, dan Inggris ke Nusantara tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi dan perdagangan, namun juga ambisi politik dan budaya. Dalam proses ini, pendidikan Islam yang telah berkembang di Nusantara menjadi salah satu elemen penting yang mendapat perhatian khusus dari para imperialis. Mereka menyadari bahwa pendidikan Islam merupakan faktor yang paling berperan dalam mengembangkan kesadaran

[422] Nurbaity, Pendidikan Indonesia Masa Kolonial Belanda dan Pemerintahan Pendudukan Jepang. *Jurnal Tsaqofah*, Vol.16, NO. (1), 2018, 10–15.

[423] Clara Shantika Ahya, Kebijakan Penjajah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, *KHIDMAT: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial,* Vol. 2 No. 2 2024, hal 408-409

agama, sosial dan politik masyarakat, dan oleh karena itu kebijakan-kebijakan dirumuskan untuk membendung bahkan membajak kekuatan-kekuatan tersebut.

VOC sebagai ikon hegemoni Belanda, pemerintah kolonial Portugis dan Inggris, mempertahankan kebijakan yang membatasi ruang gerak lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka menghambat pendirian pesantren, mengawasi ulama, menarik dukungan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, dan menerapkan sistem pendidikan baru yang sekuler untuk meredistribusi pendidikan dominan berbasis Islam. Kebijakan ini bertujuan untuk mengekang dampak ajaran Islam yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan kolonial.

Dampak dari kebijakan ini memang sangat mendalam. Pendidikan Islam berada di bawah tekanan yang luar biasa, baik secara kelembagaan maupun kurikuler. Semua pesantren dipaksa untuk memodifikasi secara diam-diam, dan proses pendidikan dihentikan. Namun, pendidikan Islam tidak dihilangkan. Justru, di bawah kungkungan ini, inovasi berkembang di kalangan ulama dan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan pendidikan Islam lebih lanjut secara mandiri.

Pendukung faktor-faktor bertahannya pendidikan Islam di antaranya adalah kekuatan jaringan ulama, peran sentral pesantren dalam masyarakat, dan keteguhan masyarakat dalam mempertahankan ajaran agama mereka. Adapun faktor penghambatnya adalah kebijakan represif kolonial, diskriminasi terhadap lembaga Islam, dan pengaruh budaya asing yang dibawa bangsa Eropa.

XVI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA WALI SONGO

A. PENDAHULUAN

Di antara agama-agama lain di dunia, Islam adalah yang paling populer di Indonesia. Kurang lebih 200 juta orang di Indonesia beragama Islam. Selain itu, Islam di Indonesia dianggap sebagai Islam moderat, yang mampu menerima perubahan dan menghadapi tantangan zaman sesuai dengan keadaan saat ini. Islam yang dianut di Indonesia sangat berbeda dengan yang dianut di beberapa negara modern ini.

Pendidikan telah menjadi dasar dan gerakan utama umat Islam, dan peran penting ini dalam kemajuan ajaran Islam di Indonesia. Pendidikan keagamaan seringkali bertujuan untuk menanamkan sifat atau moralitas yang mulia dalam diri manusia.[424]

Mengembangkan pendidikan akan memungkinkan Islam untuk menyambungkan gagasan dan ajaran yang telah diajarkan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. untuk membentuk komunitas muslim yang kuat dan menciptakan kebudayaan, peradaban, dan perilaku masyarakat yang agung yang dapat dicontoh oleh orang lain. Tujuan pendidikan Islam tidak boleh ditetapkan secara permanen. Sebaliknya, mereka harus berubah seiring usia siswa dan kondisi mereka. Sejarah Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran para pedagang muslim yang datang ke tanah air dengan berperan ganda sebagai pedagang dan da'i untuk menyebarkan agama. Merekalah yang mendirikan Islam di Indonesia dan mendidik masyarakat Jawa dengan ajaran-ajaran Allah. Proses penyebaran keyakinan Islam dilengkapi dengan prosedur yang sesuai dengan tradisi yang berkembang di masyarakat sehingga mudah diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat. Para da'i ini kemudian dikenal dengan sebutan wali songo (sembilan orang mulia di sisi Tuhan).[425]

---

[424] Agus Sutiyono, "Sketsa Pendidikan Humanis Religius," *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan* 14, no. April (2008): 5-7

[425] Ah. Zaki Fuad. " Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Takstonomi Transenden," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 2 (2015): 54-67

B. LANDASAN TEORI

Masa Wali Songo merupakan periode penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, sekitar abad ke-15 hingga 16. Para wali menerapkan berbagai pendekatan dan teori pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Islam, budaya lokal, serta metode yang kontekstual dan strategis.

1. Teori Pendidikan Humanistik-Religius

Wali Songo mengedepankan pendekatan humanistik yang berakar pada nilai-nilai keislaman. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang *insan kamil* (manusia sempurna secara spiritual dan moral). Nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedekatan kepada Tuhan ditekankan Contoh: Sunan Kalijaga menggunakan kesenian (wayang, tembang) sebagai media pendidikan karakter dan spiritual.[426]

2. Teori Pendidikan Kultural-Integratif

Para wali tidak serta-merta menolak budaya lokal. Mereka justru mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya masyarakat Jawa. Contoh: Tradisi Sekaten yang digunakan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat kepada ajaran Islam. Tujuan: Menyesuaikan ajaran dengan kondisi sosial budaya masyarakat agar lebih mudah diterima.[427]

3. Teori Pendidikan Keteladanan (Modeling)

Wali Songo menekankan pentingnya akhlak dan keteladanan dalam mendidik masyarakat. Mereka menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan kehidupan sosial. Contoh: Sunan Giri dikenal sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui pesantren dan keteladanan pribadi.[428]

4. Teori Pendidikan Partisipatif-Komunal

Pendidikan tidak hanya bersifat individual, tetapi dibangun dalam konteks komunitas. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Contoh:

---

[426] M. Dhiya'uddin, *Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 110–112.

[427] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 215–218.

[428] Hasan Asari, *Wali Songo dan Dakwah Islam di Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 98–101.

Sistem pesantren yang dikembangkan oleh Wali Songo, terutama Sunan Ampel, melibatkan seluruh elemen masyarakat.[429]

5. Teori Pendidikan Fungsional-Pragmatis

Pendidikan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, serta keterampilan hidup. Contoh: Sunan Kudus mengembangkan kurikulum pesantren yang memadukan ilmu agama dengan ilmu praktis.[430]

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pendidikan Pada Masa Wali Songo

Sebelumnya, mayoritas warga negara Indonesia beragama Buddha dan Hindu, dan terdapat sejumlah kerajaan Hindu dan Buddha yang tersebar di berbagai tempat, sehingga budaya dan tradisi lokal pada saat itu dipenuhi dengan kedua agama tersebut. Walisongo tidak menganggap budaya dan tradisi lokal tersebut sebagai "musuh agama" yang harus dimusnahkan. Bahkan mereka menjadikan tradisi dan budaya lokal sebagai "teman akrab" dan sarana dakwah, selama tidak ada larangan dari nash syariah.[431]

Mempelajari praktik dakwah Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama salaf sebagai rujukan. Setelah melakukan penelitian, dakwah Walisongo yang bijak dan terselubung sesuai dengan dakwah Rasulullah. Dakwah beliau sesuai dengan ayat berikut ini:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

Artinya "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl: 125), dan ayat, Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan

[429] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 45–47.

[430] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 1*, (Bandung: Salamadani, 2009), hlm. 123–125.

[431] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Bandung: Salamadani, 2009), 123–125.

diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (Q.S. Ali imran 159).[432]

Juga pesan Nabi saat mengutus Abu Musa dan Mu'adz berdakwah, "Mudahkanlah, jangan mempersulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat (objek dakwah) lari!" (HR Muslim). Dan Hadits dari Siti Aisyah, "Rasulullah memerintah kami menempatkan (memperlakukan) manusia sesuai keberadaan (akal) mereka." (HR Abu Dawud).

Secara rinci, metode yang dilakukan Walisongo adalah:

a. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim)

Maulana Malik Ibrahim adalah wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa dan dikenal sebagai bapaknya para wali. Hal pertama yang dilakukannya pada saat itu adalah berdagang dengan membuka warung. Warung tersebut menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. Selain itu, Malik Ibrahim juga mengabdikan dirinya untuk mengobati masyarakat secara gratis.[433]

Di sana, di Gresik, ia juga melakukan pembinaan agar taraf hidup masyarakat Gresik meningkat. Ia menyusun rencana untuk menyalurkan air dari gunung untuk mengairi ladang dan sawah. Ia memperkenalkan teknik-teknik baru dalam pertanian dan mengajak rakyat jelata, yaitu orang-orang Jawa yang tertindas pada akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati rakyat yang sedang dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia mendirikan sebuah pesantren untuk belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419.[434]

b. Sunan Ampel (Raden Rahmad)

Sunan Ampel adalah putra sulung Maulana Malik Ibrahim, ia mendirikan sebuah pesantren di daerah rawa-rawa Ampel Denta. Pada awalnya beliau membuka diri kepada masyarakat sekitar. Pada pertengahan abad ke-15, pondok pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang memiliki pengaruh besar di Nusantara bahkan hingga ke luar negeri. Sunan Giri dan Raden Patah termasuk di

---

[432] Achmad Syafirizal, " Seajarah Islam Nusantara," *Islamuna: Jurnal Studi Islam 2*, no.2 (2015): hal. 235

[433] Siti Uswatun Khasanah, Marhadi Muhayar, dan Nadiah Nur Ramadhan, "Moderasi Beragama pada Masa Walisongo Nusantara," *Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2020): 45.

[434] Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Alvabet, 2014), 56.

antara murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian menyebar untuk menyebarkan ajaran ke berbagai daerah di Jawa dan Madura.[435]

Sunan Ampel menganut mazhab fikih Hanafi, namun kepada murid-muridnya, beliau hanya mengajarkan ajaran sederhana yang menekankan pada bagaimana memupuk keimanan dan ibadah. Beliau adalah orang yang mempopulerkan istilah "Mo Limo" (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon). Artinya, seruan untuk "jangan berjudi, jangan minum-minuman keras, jangan mencuri, jangan memakai narkoba, dan jangan berzina.".

c. Sunan bonang (Raden Maulana Makhdum Ibrahim)

Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Berbeda dengan Sunan Giri yang lugas dengan fikihnya, pemikiran Sunan Bonang menggabungkan ajaran tasawuf ahlussunnah dan ajaran ortodoksi salaf. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli ushul, ahli tasawuf, ahli seni, ahli sastra, dan ahli arsitektur. Mereka juga menyebut Sunan Bonang sebagai ahli dalam menemukan mata air di tanah gersang. Ajaran Sunan Bonang mengandung filosofi cinta yang sangat sesuai dengan pemikiran Jalalludin Rumi. Iman dan cinta kepada Bonang adalah hal yang sama. pengetahuan intuitif (makrifat) dan kesesuaian dengan Allah SWT atau haq al yaqqin. Sunan Bonang menyebarkan petunjuk-petunjuk ini dengan cara yang biasa dengan menggunakan seni sebagai sarana, yang merupakan kesukaan masyarakat. Sunan Bonang melakukan hal tersebut dengan bergandengan tangan dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga.[436]

Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam melalui wayang, tembang, dan karya-karya sufistik. Sunan Bonang memberi energi pada gamelan Jawa, yang kaya akan cita rasa Hindu pada saat itu, dengan memberikan arah baru. Sunan Bonang memekanisasi gamelan Jawa seperti sekarang ini dengan memperkenalkan instrumen bonang. Karya-karyanya pada masanya dijiwai dengan aura dzikir yang memupuk kecintaan pada dunia luar (alam malakut). Di antara karyanya adalah lagu "Tombo Ati". Salah satu kelompok wayang klawuvan lainnya adalah Sunan Bonang, yang merupakan dalang yang luar biasa dan memikat.[437]

---

[435] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 2002), 98.

[436] Fahri Baharuddin, *Dakwah Islam Wali Songo di Jawa* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 98.

[437] Djam'anuri Waluyo, Mufrod Teguh Mulyo, dan Djam'anuri Waluyo, *Pendidikan Islam, Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 78.

d. Sunan Drajat (Raden Qasim)

Dikisahkan dalam cerita, jika Raden Qasim berniat melakukan perjalanan ke Kabupaten Gresik, kapal yang ditumpangi Raden Qasim diterjang ombak, Raden Qasim selamat setelah berpegangan pada dayung perahu. Raden Qasim sejak saat itu mendapat pertolongan dari dua ekor ikan yang datang menyelamatkannya, dua ekor ikan tersebut adalah ikan talang dan ikan cucut dan membawanya ke tepi sungai Desa Jelak, Banjarwati.[438]

Beliau sangat mengedepankan kedermawanan, keteguhan hati, dan menebarkan kemakmuran bagi masyarakat, sebagai seorang muslim. Beliau mendirikan sebuah pesantren di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Dalam mengajarkan tauhid dan akidah, Sunan Drajat menggunakan pendekatan langsung dan tidak terlalu bergantung pada budaya lokal. Dialah yang mengubah beberapa sulok, misalnya sulok petuah "beri tongkat pada yang buta, beri makan yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang". Gamelan Singomengkok adalah salah satu peninggalan karyanya yang dapat dilihat di Museum Daerah Sunan Drajat.[439]

e. Lamongan.Sunan Kudus (Ja'far Shadiq)

Beliau juga merupakan seorang spesialis dalam studi agama, khususnya dalam ilmu fiqih, tauhid, hadis, tafsir dan logika. Dengan demikian, di antara para wali, hanya beliau yang merupakan wali al-'ilm (wali yang memiliki ilmu yang melimpah), dan sebagai hasil dari pengetahuannya yang melimpah, banyak pencari ilmu dari berbagai daerah di Nusantara yang ingin belajar kepadanya. Gaya dakwahnya juga meniru gaya dakwah gurunya, Sunan Kalijaga, yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Nada bicaranya bahkan lebih lembut.[440]

Strategi dakwah Sunan Kudus adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana memperlakukan masyarakat agar menjadi:

Meninggalkan praktek-praktek kuno yang tidak mudah dihilangkan, menghindari konfrontasi langsung melalui penyiaran Islam, dan Tut Wuri Handayani

[438] Masykur Arif, *Sunan Drajat: Sejarah Hidup dan Perjuangan Wali Tanah Jawa* (Yogyakarta: Diva Press, 2014), hlm. 45.

[439] M. Muhlis dan Nur Iftitahul Husniyah, "Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu, Raden Qosim Sunan Drajat dalam Penyebaran Islam Masyarakat Pesisir Utara Lamongan," *Jurnal Urwatul Wutsqo* 12, no. 2 (2023): 308.

[440] Neha Latifatunnikmah, "Corak Dakwah Sunan Kudus dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Kretek," *Jurnal Studi Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2023): 145.

2) Beberapa kebiasaan yang tidak mudah diubah diubah secara langsung, yaitu Mengilhami masyarakat Hindu seperti melarang menyembelih sapi karena dalam agama Hindu sapi adalah hewan suci, mengilhami masyarakat Budha, selain masjid, Sunan Kudus juga membangun tempat wudlu padasan dengan delapan pancuran, di atas pancuran tersebut diletakkan patung kepala Kebo Gumarang yang di dalamnya diilhami berdasarkan ajaran Budha, selamatan mitoni, sebelum acara selamatan selalu ada pembacaan sejarah Nabi.[441]

f. Sunan Giri (Ainul Yaqi Atau Raden Paku)

Beliau membangun sebuah pesantren di perbukitan Desa Sidomukti, Gresik Selatan. Pesantrennya tidak hanya digunakan sebagai lembaga pendidikan dalam arti sempit, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dalam bidang agama, beliau terkenal dengan pengetahuannya yang luas tentang fikih. Ia juga dikenal sebagai Sultan Abdul Fakih. Ia juga seorang pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak-anak seperti Jelungan, Jamuran, lir-ilir, dan cublak suweng dikembangkan oleh Sunan Giri. Demikian juga Gending Asmaradana dan Pucung yang memiliki unsur Jawa namun sarat dengan ajaran Islam.[442]

g. Sunan Kalijaga (Raden Mas Syahid)

Dalam bidang dakwah, beliau mengikuti cara yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Beliau menggunakan kebudayaan dan kesenian sebagai media dakwah, antara lain dengan menggunakan wayang, sastra, dan kesenian lainnya. Metode kesenian digunakan oleh para penyebar agama Islam seperti Walisongo untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa disadari mereka tertarik dengan ajaran Islam meskipun pada awalnya mereka tertarik karena media kesenian. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang merupakan seorang dalang. Ia tidak pernah mengajak orang-orang yang hadir untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Beberapa wayang terus meminjam cerita Mahabarata dan Ramayana, namun memasukkan ajaran agama dan nama-nama pahlawan Islam ke dalam cerita.

Sunan Kalijaga juga yang mengembangkan Baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat

[441] H. Fida' Abdilah dan Yusak Burhanudin, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210.
[442] Dewi Lestari, "Peran Sunan Giri dalam Pengembangan Seni Tradisional sebagai Media Dakwah," *Jurnal Seni dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2022): 95.

kota berupa Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid. Sunan Kalijaga juga sebagai seorang pemimpin, pejuang mubaligh, pujangga, dan filsu). [443]

h. Sunan Muria (Raden Umar Said)

Gaya dakwahnya lebih mirip dengan ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun demikian, di pekarangan ayahnya, Sunan Muria tidak ingin tinggal di daerah yang sangat terpencil di luar pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai salah satu rakyat jelata, mengajari mereka tentang seni pertanian, perdagangan, dan penangkapan ikan adalah hal yang ia sukai.[444]

Sunan Muria terkenal sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah, tidak peduli seberapa besar masalah itu. Penyelesaiannya selalu memuaskan kedua belah pihak yang bertikai. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juana hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil dakwahnya dalam bentuk seni adalah tembang Sinom dan Kinanti.[445]

i. Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah)

Sunan Gunung Jati sebelum mendirikan rukun Islam dan perdagangan Islam, telah menunaikan rukun Islam yang ke-5, yaitu naik haji ke Mekkah sebelum mencapai Kerajaan Sultan Demak. Sebagai seorang peziarah religius dan sebagai seorang mufasir yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal duniawi, ia diterima dengan baik oleh kerajaan. Kemudian, ia pindah ke Banten, di mana ia merebut jabatan bupati Pasundan, dan akhirnya menguasai kota pelabuhan laut tersebut. Melalui relokasi awal ini, ia menggunakan tahtanya untuk penyebaran Islam, terutama Islamisasi Jawa Barat. Kontribusi Syarif Hidyatullah dalam membangun Islam adalah dengan mengkonsolidasikan bahwa penyebaran Islam tidak hanya dilakukan melalui pengajian di masjid.[446]

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan Islam Pada Masa Wali Songo

Penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dari peran besar Wali Songo. Keberhasilan mereka dalam mengislamkan masyarakat

[443] Mohd Roslan Mohd Nor, "Sumbangan Syarif Hidayatullah Dalam Penyebaran Pendidikan Agama Islam Di Jawa Barat, "*At-Ta'dib* 12, no.1 (2017): hal 173

[444] Lilis Suryani, *Seri Jejak Para Wali: Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 88.

[445] Tarunasena M., *Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI IPS* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 91.

[446] Erni Mujiningsih, Erlis N. Yetti, " Sunan Kalijaga Dalam Novel Babad Walisongo Dan Kisah Dakwah Walisongo," Bahasa Dan Seni 43, no. 2 (2015): hal. 213

Nusantara bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

a. Pendekatan Dakwah yang Kontekstual dan Budaya Lokal

Salah satu faktor kunci keberhasilan Wali Songo adalah kemampuan mereka menyesuaikan dakwah dengan budaya lokal. Mereka tidak menolak tradisi masyarakat Jawa secara keseluruhan, melainkan mengislamkan budaya tersebut secara bertahap. Misalnya, Wali Songo memanfaatkan seni wayang untuk menyampaikan ajaran Islam, di mana lakon-lakon tradisional diberi makna baru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat masyarakat tidak merasa terancam, sehingga Islam diterima secara sukarela tanpa adanya konflik yang besar.[447]

b. Sistem Pendidikan yang Terstruktur: Lahirnya Pesantren

Wali Songo mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pesantren menjadi pusat pengajaran agama Islam, sekaligus pusat transformasi sosial masyarakat. Pendidikan di pesantren tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan hidup seperti pertanian, perdagangan, dan keterampilan seni. Model ini membuat pendidikan Islam tidak bersifat elitis, tetapi inklusif untuk semua lapisan masyarakat.[448]

c. Karisma dan Keteladanan Wali Songo

Setiap anggota Wali Songo memiliki reputasi yang sangat tinggi di mata masyarakat. Karisma mereka dibangun dari keteladanan moral, sikap rendah hati, dan keadilan dalam bertindak. Masyarakat melihat Wali Songo bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang bisa dipercaya.[449]

d. Kerjasama dengan Penguasa dan Elite Lokal

Strategi Wali Songo dalam menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal juga menjadi faktor penting. Banyak dari mereka yang menjadi penasehat kerajaan atau menikah dengan keluarga kerajaan. Misalnya, Sunan Giri memiliki hubungan

[447] Purwadi. "Pendidikan Islam di Indonesia: Perspektif Historis." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2018): hal.27

[448] Zamakhsyari Dhofier, "Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai." Jakarta: LP3ES, (2019): Hal.12

[449] Qurroti A'yun, "Falsafah Kepemimpinan Wali Songo," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (2019): 229.

kuat dengan kerajaan Majapahit akhir dan Demak. Hubungan ini membuka jalan untuk memperluas pengaruh Islam ke kalangan elit dan birokrasi.[450]

e. Penggunaan Media Sosial Tradisional

Selain kesenian, Wali Songo juga memanfaatkan struktur sosial tradisional, seperti perkumpulan masyarakat (sejenis paguyuban) untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Kegiatan keagamaan seperti slametan, kenduri, dan pengajian diadaptasi menjadi media dakwah. Semua faktor ini membentuk pola dakwah yang unik: tanpa kekerasan, berbasis budaya, dan memperhatikan struktur sosial masyarakat, sehingga dakwah Islam menjadi bagian dari dinamika. [451]

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Masa Wali Songo terhadap Perkembangan Sosial Budaya

Keberhasilan kebijakan pendidikan Islam yang dirintis Wali Songo tidak hanya berdampak pada aspek religius, tetapi juga merambah ke berbagai dimensi kehidupan sosial, budaya, politik, dan bahkan ekonomi masyarakat Nusantara.

a. Transformasi Identitas Sosial Masyarakat

Islamisasi membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Konsep kesetaraan manusia di hadapan Tuhan menjadi nilai baru yang mendorong lahirnya masyarakat yang lebih egaliter. Struktur masyarakat yang semula sangat feodal perlahan-lahan digantikan oleh struktur sosial yang lebih terbuka.[452]

b. Perkembangan Pesantren sebagai Lembaga Sosial

Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Di sekitar pesantren tumbuh pasar, kerajinan, dan jaringan perdagangan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Model ini bertahan hingga sekarang, menjadikan pesantren sebagai institusi sosial yang kokoh di tengah masyarakat Indonesia.[453]

c. Integrasi Budaya Islam ke dalam Tradisi Lokal

---

[450] hwan Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I: Dari Awal Islamisasi Sampai Periode Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara* (Surabaya: IAIN Press, 2014), hlm. 112.

[451] Zainal Arifin, "Sunan Giri: Konstruk Elite Islam Terhadap Perubahan Sosial pada Masa Peralihan Majapahit ke Demak," Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 45.

[452] Ika Purnamasari, Diraningsih Zai, Indah Chofifah SM, Santa Hoky Sembiring, & Harifin, "Transformasi Sosial dan Budaya Melalui Islamisasi di Sumatera Utara," *Jurnal Medan Resource Center*, Vol. 3, No. 2 (2023): 10.

[453] Choirul Anam. "Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Nusantara." Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2015): hal. 29

Alih-alih menghapus budaya lokal, Wali Songo mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik budaya seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Hal ini memperkuat penerimaan Islam di kalangan masyarakat, sekaligus memperkaya khasanah budaya Indonesia.[454]

d. Penyebaran Nilai-Nilai Sosial Islam

Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, musyawarah, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari norma masyarakat. Misalnya, tradisi gotong royong yang telah ada diintegrasikan dengan ajaran tentang ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam).[455]

e. Pengaruh terhadap Sistem Politik dan Hukum

Dalam jangka panjang, kebijakan pendidikan Islam Wali Songo juga mempengaruhi sistem politik dan hukum di Indonesia. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Banten, dan Cirebon, adalah bukti nyata pengaruh pendidikan Islam dalam membentuk struktur kekuasaan yang baru. Hukum Islam mulai diadaptasi dalam pemerintahan dan pengadilan lokal, menggantikan hukum adat yang sebelumnya dominan.[456]

D. KESIMPULAN

Penyebaran Islam di Jawa pada masa Wali Songo dipengaruhi oleh pendekatan dakwah yang sangat mengutamakan budaya lokal. Para Wali tidak serta-merta menghapus tradisi masyarakat, tetapi mengadaptasinya dengan nilai-nilai Islam. Melalui seni seperti wayang, gamelan, dan tembang, ajaran Islam disampaikan dengan cara yang mudah diterima masyarakat. Pendekatan ini mempercepat penerimaan Islam tanpa menimbulkan konflik budaya yang besar.

Selain itu, pembangunan pesantren menjadi faktor penting dalam memperkokoh dakwah. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, di mana masyarakat tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai keterampilan hidup. Tokoh seperti Sunan Ampel membangun pesantren yang melahirkan generasi ulama baru. Pendidikan di

[454]Arzam, "Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter," *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1 (2014): 12.

[455] Iwan Agus Supriono, "Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu Indonesia," *Jurnal Madania*, Vol. 5, No. 2 (2015): 177–178.

[456] M. Agus Wibowo. "Wali Songo: Jejak Dakwah dan Pendidikan Islam di Nusantara." Jakarta: Rajawali Pers, (2019): hal.56

pesantren membentuk karakter dan kemandirian umat Islam, sekaligus mempercepat proses Islamisasi di Jawa.

Kepribadian Wali Songo, yang terkenal sabar, bijak, dan dermawan, juga menjadi faktor keberhasilan dakwah mereka. Mereka tidak hanya berdakwah secara lisan, tetapi juga melalui keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini membangun kepercayaan masyarakat, sehingga ajaran Islam diterima dengan tulus dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Jawa.

Dampak dari kebijakan pendidikan Islam masa Wali Songo masih terasa hingga kini. Islam masuk ke Nusantara secara damai dan melahirkan tradisi keilmuan pesantren yang bertahan hingga zaman modern. Karakter Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan ramah budaya merupakan warisan langsung dari pendekatan dakwah Wali Songo. Spirit ini menjadi bekal berharga bagi umat Islam Indonesia untuk terus berkembang di era globalisasi, tanpa kehilangan jati diri keislaman yang sejati.

BAB XVII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA SEBELUM TAHUN 1908

A. PENDAHULUAN

Sebelum tahun 1908, pendidikan Islam di Indonesia memiliki corak yang khas, terbentuk dari dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam dan pengaruh kolonialisme Belanda. Pendidikan Islam berkembang secara mandiri di tengah komunitas-komunitas Muslim, utamanya melalui lembaga-lembaga tradisional seperti surau, pesantren, dan masjid. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tempat santri menimba ilmu dari para ulama dengan metode pengajaran tradisional berbasis kitab kuning.

Pemerintah kolonial Belanda pada masa itu tidak memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus, kebijakan mereka cenderung membatasi pengaruh pendidikan Islam karena dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan kolonial. Penolakan terhadap pendidikan Islam diwujudkan melalui pembatasan akses terhadap lembaga pendidikan Islam dan lebih mengutamakan pengembangan pendidikan ala Barat yang bersifat sekuler. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara pendidikan pribumi yang berorientasi keislaman dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial.

Meskipun demikian, pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan berkembang karena didukung oleh semangat keagamaan dan kemandirian umat. Para ulama dan tokoh agama memainkan peranan penting dalam menjaga eksistensi pendidikan Islam, bahkan sering kali mengembangkan jaringan pendidikan lintas wilayah. Hubungan dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah juga turut memperkuat posisi pendidikan Islam dalam menghadapi tekanan kolonial.

Periode sebelum 1908 menjadi fondasi penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Tahun 1908 sendiri menandai awal kebangkitan nasional, yang turut mendorong perubahan signifikan dalam pola pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Oleh karena itu, menelaah kebijakan pendidikan Islam sebelum tahun tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan strategi umat Islam dalam mempertahankan identitas dan sistem pendidikan mereka di tengah dominasi kolonialisme.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kolonialisme Dalam Pendidikan

Teori kolonialisme dalam pendidikan menjelaskan bagaimana kekuatan kolonial menggunakan sistem pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol masyarakat jajahan. Dalam konteks Indonesia sebelum tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang tidak netral, melainkan berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Pendidikan diselenggarakan bukan untuk mencerdaskan pribumi secara menyeluruh, melainkan untuk menciptakan kelas pekerja terdidik yang loyal terhadap kolonialisme.

Pendidikan Islam, yang tumbuh secara organik di tengah masyarakat, tidak mendapat dukungan dari pemerintah kolonial karena dinilai dapat memunculkan semangat perlawanan dan kesadaran identitas keagamaan serta kebangsaan. Hal ini terlihat dari minimnya bantuan atau pengakuan terhadap lembaga-lembaga seperti pesantren dan surau. Bahkan, ada kebijakan yang secara langsung membatasi peran lembaga pendidikan Islam, seperti pembatasan izin mengajar bagi guru-guru agama atau pengawasan terhadap isi kurikulum Islam.[457]

Dalam praktiknya, Belanda lebih mengembangkan sekolah-sekolah berbasis Barat dengan kurikulum sekuler yang diarahkan untuk mendidik elit pribumi atau pegawai rendah kolonial. Hal ini memperkuat jurang antara pendidikan formal ala Barat dan pendidikan tradisional Islam. Akibatnya, pendidikan Islam tetap berlangsung secara mandiri di luar sistem resmi pemerintahan kolonial.

Melalui teori kolonialisme dalam pendidikan, kita dapat memahami bahwa ketimpangan dan marginalisasi pendidikan Islam sebelum 1908 bukan sekadar kebetulan sejarah, melainkan bagian dari strategi sistematis kolonial untuk melemahkan kekuatan sosial-politik Islam.

2. Teori Reproduksi Sosial (Pierre Bordieu)

Teori reproduksi sosial dari Piere Bordeou berpendapat bahwa sistem pendidikan berfungsi tidak hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk mereproduksi struktur sosial yang ada, termasuk ketimpangan sosial. Dalam konteks pendidikan Islam sebelum tahun 1908, teori ini menjelaskan bagaimana pendidikan kolonial sengaja dirancang

[457] James E Anderson, *Public Policymaking: An Introduction*, 8th edn (Wadsworth, 2015), Hlm.

untuk mereproduksi dominasi budaya Barat dan menempatkan pendidikan Islam pada posisi yang inferior.[458]

Pendidikan kolonial cenderung menanamkan nilai-nilai Barat, bahasa Belanda, dan budaya Eropa kepada anak-anak pribumi terpilih, sehingga menciptakan kelas sosial baru yang lebih dekat dengan penguasa kolonial. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dianggap tidak sejalan dengan proyek modernisasi kolonial. Pendidikan Islam pun dikonstruksi sebagai tidak "bermutu" dan ketinggalan zaman oleh standar kolonial.

Dengan demikian, sistem pendidikan kolonial secara tidak langsung menyingkirkan pendidikan Islam dari ranah formal dan legal. Hanya mereka yang mengikuti sistem pendidikan kolonial yang memiliki peluang sosial dan ekonomi lebih baik, sementara lulusan pendidikan Islam tidak memiliki akses yang sama dalam struktur kekuasaan dan pekerjaan.

Melalui teori ini, dapat dilihat bagaimana pendidikan digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mempertahankan stratifikasi sosial. Pendidikan Islam tidak hanya mengalami penolakan secara kebijakan, tetapi juga secara simbolik dan kultural. Hal ini memperkuat dualisme pendidikan yang berdampak panjang terhadap sistem pendidikan nasional pascakemerdekaan.

3. Teori Islamisasi Ilmu (Syed Naquib al-Attas)

Teori Islamisasi ilmu, yang dipopulerkan oleh Syed Naquib al-Attas, menekankan pentingnya pendidikan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan akhlak serta pandangan hidup Islam. Teori ini relevan untuk memahami semangat di balik pendidikan Islam sebelum 1908 yang tetap bertahan meskipun tidak didukung oleh pemerintah kolonial.

Pendidikan Islam di pesantren, surau, dan masjid mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga adab, etika, dan pembentukan kepribadian Muslim Meskipun tidak formal seperti sekolah kolonial, pendidikan Islam memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran sosial dan religius umat Islam. Para ulama dan guru agama memegang peran sentral sebagai penjaga ilmu dan budaya Islam yang diwariskan secara turun-temurun.[3]

---

[458] Abuddin Nata, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Kencana, 2012), Hlm. 18.

Dengan tidak adanya campur tangan pemerintah kolonial secara langsung dalam sistem pendidikan Islam, lembaga-lembaga ini justru tumbuh dengan karakter independen dan identitas keislaman yang kuat. Inilah bentuk awal dari Islamisasi pendidikan yang berlangsung secara alami dan berbasis komunitas. Bahkan, dalam banyak kasus, pendidikan Islam menjadi sarana pembangkitan semangat perlawanan terhadap kolonialisme.

Teori Islamisasi ilmu memberi perspektif bahwa pendidikan bukan semata-mata proses kognitif, tetapi juga proses spiritual dan moral. Pendidikan Islam sebelum tahun 1908, meski berada di luar sistem resmi kolonial, justru mencerminkan bentuk ideal dari pendidikan yang tidak terpisah dari nilai-nilai agama dan budaya lokal.[459]

C. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Tradisional

Sebelum tahun 1908, pendidikan Islam di Indonesia berkembang secara mandiri melalui lembaga-lembaga tradisional yang didirikan oleh masyarakat Muslim sendiri. Lembaga-lembaga ini tidak berada di bawah kontrol pemerintah kolonial, tetapi lebih bersifat otonom dan berbasis komunitas. Bentuk paling umum dari lembaga pendidikan ini adalah pesantren di Jawa, surau di Sumatra Barat, serta masjid yang juga berfungsi sebagai tempat mengaji di berbagai daerah Nusantara.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan paling berpengaruh dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia. Didirikan oleh para kiai atau ulama, pesantren menjadi pusat pengajaran agama Islam dan mencetak banyak tokoh agama serta pemimpin masyarakat. Sistem pendidikan pesantren sangat khas, yaitu berpusat pada hubungan guru (kiai) dan murid (santri), serta menggunakan metode halaqah (pengajian kelompok) dengan kajian kitab kuning sebagai materi utamanya.[4]

Selain pesantren, di Sumatra dikenal lembaga pendidikan Islam bernama surau. Surau memiliki fungsi ganda sebagai tempat ibadah dan juga tempat menuntut ilmu. Di sana, para pemuda belajar membaca Al-Qur'an, fikih, tasawuf, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya dari guru yang disebut tuanku atau syekh. Surau memiliki peranan penting

[459] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III* (Logos, 1999), pp. 43–44.

dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang religius dan mandiri.

Masjid juga memainkan peran penting sebagai pusat pendidikan Islam. Meskipun tidak terorganisir seperti pesantren atau surau, masjid menjadi tempat belajar agama bagi anak-anak dan orang dewasa. Di masjid, umat Islam belajar membaca Al-Qur'an, menghafal ayat-ayat, dan memahami dasar-dasar agama Islam. Guru-guru ngaji atau ustaz lokal biasanya memimpin proses belajar ini secara sukarela dan berkesinambungan.[460]

Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga membentuk nilai-nilai moral dan akhlak Islam kepada para muridnya. Tujuan utama dari pendidikan Islam tradisional ini adalah mencetak pribadi Muslim yang taat, beradab, dan berilmu. Karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas.

Sarana dan prasarana pendidikan Islam saat itu sangat sederhana. Proses belajar sering berlangsung di lantai beralas tikar, tanpa meja dan kursi. Namun semangat belajar para santri sangat tinggi, bahkan banyak di antara mereka yang merantau jauh demi menuntut ilmu kepada ulama-ulama terkenal. Santri juga biasanya tinggal di lingkungan pesantren atau surau secara menetap, yang memperkuat interaksi sosial dan kedekatan dengan guru.

Meski tidak formal dalam struktur seperti sekolah kolonial, sistem pendidikan Islam ini memiliki kurikulum tersendiri yang berbasis pada kitab-kitab klasik karangan ulama Timur Tengah, seperti Imam al-Ghazali, Imam Nawawi, dan Ibnu Hajar. Pelajaran mencakup tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, serta gramatika Arab (nahwu dan sharaf). Proses pembelajaran juga berlangsung secara berjenjang, tergantung tingkat pemahaman murid.[5]

Lembaga pendidikan Islam juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas keislaman masyarakat pribumi dan menjadi pusat perlawanan kultural terhadap pengaruh Barat. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah tekanan dari kebijakan kolonial yang cenderung meminggirkan pendidikan keagamaan. Bahkan, beberapa tokoh perlawanan terhadap kolonialisme lahir dari lingkungan pesantren atau surau.

Dengan demikian, sebelum tahun 1908, pendidikan Islam telah memiliki sistem

[460] Departemen Agama RI, Pendekatan Studi Islam Dalam Perspektif Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005), Hlm. 6.

yang mapan meski dijalankan secara swadaya dan tidak didukung oleh negara. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Islam di Nusantara memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan agama, sekaligus menjadi benteng pertahanan budaya dan spiritual di tengah dominasi kolonial.[461]

2. Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam sebelum tahun 1908 secara umum bersifat diskriminatif dan represif. Pemerintah kolonial memandang pendidikan Islam sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas kekuasaan mereka, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan politik masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pendidikan Islam dibiarkan berkembang secara terbatas tanpa dukungan resmi, bahkan dalam beberapa kasus justru diawasi dengan ketat.

Salah satu kebijakan utama pemerintah kolonial adalah tidak mengintegrasikan lembaga pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan formal yang mereka rancang. Sekolah-sekolah kolonial yang didirikan seperti Europeesche Lagere School (ELS), Hollandsch-Inlandsche School (HIS), dan sekolah misi Kristen, lebih diarahkan untuk mendidik kalangan pribumi elite yang setia kepada Belanda, tanpa memasukkan nilai-nilai Islam atau memberikan ruang bagi pendidikan berbasis keislaman.[6]

Bahkan, pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mulai memperketat pengawasan terhadap pesantren dan guru-guru agama. Guru atau kiai yang dianggap menyebarkan ajaran yang berpotensi membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme bisa dikenakan sanksi atau dibatasi aktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam diposisikan sebagai objek pengawasan politik, bukan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah kolonial juga memanfaatkan kebijakan pendidikan untuk memecah kekuatan umat Islam. Salah satu caranya adalah dengan membedakan antara “Islam kultural” yang dianggap aman dan “Islam politik” yang dianggap berbahaya. Pendidikan Islam yang bersifat independen dan berpengaruh luas dianggap berpotensi menjadi saluran perlawanan terhadap penjajah. Oleh karena itu, pemerintah kolonial

[461] Mujamil Qomar, *Pendidikan Islam: Pola Baru* (Erlangga, 2005), Hlm. 30–35.

lebih menyukai bentuk pendidikan keagamaan yang bersifat individual dan tidak membentuk jaringan sosial-politik yang kuat.[462]

Kebijakan ini berdampak pada rendahnya dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Islam. Tidak ada dana bantuan, pengakuan legal, atau integrasi kurikulum yang diberikan kepada pesantren dan lembaga serupa. Akibatnya, pendidikan Islam berkembang dalam keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Sementara itu, sekolah-sekolah Barat mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam hal pendanaan, fasilitas, maupun tenaga pengajar.

Selain itu, pemerintah kolonial juga berupaya menarik masyarakat Muslim agar masuk ke sekolah-sekolah umum dengan kurikulum sekuler. Namun, banyak kalangan Muslim yang menolak karena khawatir anak-anak mereka akan kehilangan identitas keislaman dan terpapar nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan ajaran agama. Penolakan ini mempertegas polarisasi antara pendidikan kolonial dan pendidikan Islam tradisional.[463]

Meskipun begitu, ada juga upaya dari sebagian pihak kolonial untuk mereformasi pendekatan terhadap pendidikan Islam, khususnya pada awal abad ke-20. Namun sebelum 1908, pendekatan ini masih sangat terbatas dan belum berdampak luas. Penerimaan terhadap pendidikan Islam oleh pemerintah kolonial lebih bersifat strategis daripada ideologis, terutama jika bisa dikendalikan dan dijadikan alat politik.

Kebijakan kolonial yang tidak berpihak pada pendidikan Islam juga terlihat dari kurangnya kesempatan bagi lulusan pesantren atau surau untuk mendapatkan posisi di pemerintahan. Akses terhadap pekerjaan resmi atau jabatan publik lebih banyak diberikan kepada lulusan sekolah kolonial. Hal ini mengakibatkan terjadinya marginalisasi terhadap lulusan pendidikan Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi dan birokrasi.

Dengan adanya pembatasan ini, lembaga pendidikan Islam semakin meneguhkan posisinya sebagai bentuk perlawanan budaya dan simbol keteguhan umat dalam mempertahankan ajaran Islam. Para kiai dan ulama tetap menjalankan pendidikan secara swadaya, sekaligus menjadi pemimpin dalam membangun kesadaran umat

[462] Harsya W Bachtiar, *Orde Lama Dan Orde Baru: Politik Dan Birokrasi Di Indonesia* (LP3ES, 1981), Hlm. 12.

[463] Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945–1965* (Grafiti Pers, 1996), Hlm. 56.

terhadap pentingnya mempertahankan identitas keagamaan dan kebudayaan.[464]

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam sebelum 1908 lebih bersifat menghambat dan meminggirkan. Pendidikan Islam dianggap tidak sejalan dengan visi kolonialisme yang mengutamakan modernisasi ala Barat. Namun justru dari tekanan inilah, pendidikan Islam menemukan kekuatannya sebagai pusat ketahanan nilai-nilai agama, budaya, dan identitas umat Islam Nusantara.[465]

3. Dampak Kebijakan Kolonial Terhadap Eksistensi Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial yang tidak berpihak terhadap pendidikan Islam sebelum tahun 1908 memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satu dampak utamanya adalah terbentuknya jurang yang semakin lebar antara pendidikan Islam tradisional dan pendidikan formal ala Barat. Pendidikan Islam, yang berbasis pesantren, surau, dan masjid, semakin terpinggirkan dari arus utama kebijakan pendidikan yang didominasi oleh pemerintah kolonial.

Akibat dari ketimpangan ini, lulusan pendidikan Islam tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan kerja formal dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga kolonial. Hal ini menyebabkan banyak alumni pesantren hanya berkiprah dalam lingkungan sosial keagamaan, tanpa peluang untuk berpartisipasi dalam struktur kekuasaan yang sedang dibentuk oleh kolonial. Posisi mereka menjadi terbatas, meskipun dalam masyarakat mereka tetap dihormati sebagai pemuka agama.

Selain marginalisasi secara struktural, kebijakan kolonial juga menimbulkan persepsi negatif terhadap pendidikan Islam, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang mulai terpengaruh oleh nilai-nilai modern Barat. Pendidikan ala Barat dianggap sebagai simbol kemajuan dan kemodernan, sementara pendidikan Islam dicap tradisional, kolot, dan tidak menjanjikan masa depan yang cerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para ulama dan pengelola pesantren untuk menjaga minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan mereka.[466]

---

[464] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional* (Safiria Insania Press, 2004), Hlm. 10.

[465] Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*, Hlm. 85–90.

[466] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 56–59.

Namun, di sisi lain, tekanan dari pemerintah kolonial justru memunculkan semangat perlawanan kultural yang kuat dari kalangan Muslim. Pesantren, surau, dan masjid tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat penyadaran politik dan kebangkitan identitas Islam. Para kiai dan guru agama memainkan peran strategis dalam membangkitkan kesadaran umat terhadap pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam dan menolak dominasi kolonial.[10]

Dalam kondisi serba terbatas, lembaga pendidikan Islam tetap mampu bertahan karena kuatnya dukungan masyarakat. Banyak orang tua tetap memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren karena meyakini bahwa pendidikan agama adalah fondasi utama dalam membentuk karakter. Hubungan emosional dan spiritual antara guru dan murid yang erat juga menjadi keunggulan pendidikan Islam yang tidak dimiliki oleh sekolah kolonial.[11]

Kemandirian pesantren juga memperkuat peran pendidikan Islam sebagai pusat pembinaan moral dan kepribadian. Meskipun tanpa dukungan pemerintah, para ulama dan kiai berhasil mengelola pesantren secara swadaya. Mereka menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif, memperbaharui materi ajar, dan menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam meskipun berada dalam tekanan kebijakan kolonial.

Tekanan kolonial juga mendorong munculnya solidaritas antar-pesantren dan jaringan ulama lintas daerah. Para ulama membentuk semacam perlawanan kultural yang saling memperkuat dalam menjaga eksistensi pendidikan Islam. Mereka juga menjalin hubungan dengan dunia Islam di Timur Tengah untuk memperkaya kurikulum dan mempertahankan otoritas keilmuan Islam dalam menghadapi dominasi Barat.

Dalam jangka panjang, kebijakan diskriminatif terhadap pendidikan Islam justru memperkuat karakter lembaga ini sebagai institusi yang mandiri, berakar kuat di masyarakat, dan tahan terhadap tekanan politik. Meskipun tidak modern dalam ukuran kolonial, pesantren memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang kokoh. Hal ini menjadi modal penting dalam kebangkitan pendidikan Islam pascakemerdekaan.

Dampak lainnya adalah munculnya kesadaran di kalangan umat Islam tentang pentingnya reformasi dalam pendidikan Islam. Meskipun mempertahankan tradisi, beberapa kalangan mulai merintis modernisasi pendidikan Islam dengan memasukkan pelajaran umum, mengadopsi sistem kelas, dan menyusun kurikulum yang lebih sistematis. Inilah cikal bakal dari lahirnya madrasah-madrasah modern pada awal abad

ke-20.[467]

Reaksi terhadap kebijakan kolonial juga membentuk identitas pendidikan Islam sebagai lembaga perlawanan non-fisik terhadap kolonialisme. Dalam banyak kasus, para lulusan pesantren menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Mereka tidak hanya berperan di bidang keagamaan, tetapi juga sosial dan politik.

Dengan demikian, meskipun kebijakan kolonial merugikan pendidikan Islam dari segi dukungan dan pengakuan formal, dampaknya tidak sepenuhnya negatif. Justru, dari tekanan tersebut lahir daya tahan, inovasi, dan semangat pembaruan dalam dunia pendidikan Islam. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam memiliki ketahanan budaya dan spiritual yang kuat di tengah tekanan kekuasaan asing.

Secara keseluruhan, eksistensi pendidikan Islam sebelum 1908 sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat Muslim untuk bertahan dalam kondisi keterbatasan. Tekanan dari pemerintah kolonial menjadi pemicu tumbuhnya semangat keislaman, solidaritas komunitas, dan reformasi pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi berkembang sebagai kekuatan sosial dan budaya yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kondisi sosial-politik Indonesia pada masa Orde Lama memberikan tantangan besar bagi pendidikan Islam. Dalam suasana politik yang didominasi oleh ideologi Nasakom, pendidikan Islam berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan ideologi nasionalisme sekuler dan komunisme yang kuat. Pendidikan Islam tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan formal di tengah dinamika politik yang seringkali tidak menguntungkan.

Pemerintah Orde Lama akhirnya mengambil langkah-langkah penting dengan mengeluarkan kebijakan pengakuan madrasah, pemberlakuan pelajaran agama di sekolah umum, pengangkatan guru agama menjadi PNS, serta pendirian PTAIN. Kebijakan-kebijakan ini menandai awal integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, walaupun implementasinya masih menemui berbagai hambatan.

[467] Zuhairini, *Sejarah* Pendidikan *Islam* (Bumi Aksara, 1993), Hlm. 78.

Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam meliputi dualisme sistem pendidikan, keterbatasan fasilitas, serta tekanan ideologis. Meski demikian, pendidikan Islam mampu bertahan dan berkembang, menjadi dasar penting bagi pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia masa kini.

BAB XVIII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ENAM ORGANISASI ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN (JUMATUL KHOIR, SARIKAT ISLAM, PERSERIKATAN ULAMA, MUHAMMADIYAH, AL-IRSYAD, DAN NAHDHATUL ULAMA)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang kaya, berakar dari tradisi keagamaan yang mendalam dan interaksi sosial yang kompleks. Sebelum kemerdekaan, berbagai organisasi Islam muncul sebagai respons terhadap tantangan zaman, termasuk penjajahan kolonial, perubahan sosial, dan modernisasi. Dalam periode ini, enam organisasi Islam yang akan dibahas—Jumatul Khoir, Sarikat Islam, Perserikatan Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Nahdhatul Ulama—memegang peranan penting dalam membentuk kebijakan pendidikan Islam yang berpengaruh luas di tanah air.

Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang mengimplementasikan berbagai kebijakan yang membatasi ruang gerak umat Islam. Dalam konteks ini, munculnya organisasi-organisasi Islam menjadi sangat signifikan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan politik umat Islam. [468]

Jumatul Khoir: Organisasi ini didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan agama di kalangan umat Islam. Melalui pendirian madrasah dan lembaga pendidikan, **Sarikat Islam**: Sebagai organisasi yang mengedepankan perjuangan ekonomi dan sosial, Sarikat Islam juga memperhatikan aspek pendidikan.

Perserikatan Ulama: Organisasi ini berfokus pada penguatan ajaran Islam dan pengembangan pendidikan berbasis Islam. **Muhammadiyah**: Dikenal sebagai salah satu organisasi modernis, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang menerapkan metode pendidikan yang lebih sistematis dan terstruktur. **Al-Irsyad**: Organisasi ini memfokuskan diri pada pendidikan Islam yang berbasis pada pemahaman yang rasional dan ilmiah.

[468] Atik Silvia and Khoirul Holis, 'Pemikiran Pendidikan Islam Periode Kemerdekaan', *El-Fata: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 4.01 (2024), pp. 54–72.

Nahdhatul Ulama: Sebagai organisasi yang lebih tradisional, Nahdhatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sambil mengembangkan pendidikan Islam. Mereka mendirikan pesantren yang menjadi pusat pengajaran agama dan budaya, serta memelihara tradisi keilmuan Islam.

Kebijakan pendidikan yang diusung oleh organisasi-organisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan moral dan etika. Mereka berupaya menciptakan generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, mereka juga berusaha mengurangi dampak negatif dari penjajahan dan mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi tantangan modernitas

Di tengah dinamika sosial dan politik, kebijakan pendidikan ini membantu membentuk identitas kolektif umat Islam di Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan yang akan datang. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang agama dan ilmu pengetahuan, generasi muda Muslim diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.[469]

Dengan latar belakang ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan pendidikan yang diadopsi oleh masing-masing organisasi tersebut berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang strategi, tantangan, dan dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Jumatul Khoir, Sarikat Islam, Perserikatan Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Nahdhatul Ulama, serta pengaruhnya terhadap masyarakat sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pendidikan Islam dalam konteks sejarah bangsa.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Pendidikan Islam

Menurut **A. Malik Fadjar**, pendidikan Islam harus berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan membentuk karakter dan moral peserta didik. Ini tercermin dalam kebijakan pendidikan organisasi-organisasi Islam yang menekankan pendidikan karakter. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menerapkan teori ini dengan mengembangkan kurikulum yang mencakup pendidikan

[469] Abd Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Samudra Biru, 2018).

agama dan umum secara seimbang. Mendirikan lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Islam secara langsung, dengan tujuan membentuk karakter yang baik di kalangan anggotanya.[470]

2. Teori Konstruktivisme

Jean Piaget dan **Lev Vygotsky** mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Dalam konteks organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pendekatan ini terlihat dalam pengembangan metode pembelajaran yang melibatkan diskusi dan interaksi antar peserta didik. Mengembangkan metode pengajaran yang interaktif, melibatkan diskusi, dan kolaborasi antara siswa, serta memperkenalkan sistem pendidikan modern dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.[471]

3. Teori Pendidikan Multikultural

James A. Banks menyatakan bahwa pendidikan harus mencakup berbagai perspektif budaya. Organisasi seperti NU dan Al Irsyad berusaha mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mendirikan lembaga pendidikan yang menghargai keragaman budaya dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.[472]

4. Teori Transformasi Sosial

Paulo Freire menekankan pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Sarikat Islam, dengan fokus pada pendidikan yang mengaitkan antara agama dan ekonomi, mencerminkan prinsip ini dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Mengintegrasikan pelatihan keterampilan dan pendidikan agama, sehingga anggota dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sambil memahami ajaran Islam.[473]

---

[470] Ahmad Malik Fajar, 'Penerapan Metode User Centered Design (Ucd) Pada Web AIS UIN Jakarta Dengan Standar ISO 9241-210' (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

[471] Kusdani Kusdani, 'Pendidikan Islam Dan Teori Konstruktivisme Dalam Penguatan Keagamaan', *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11.1 (2022), pp. 36–46.

[472] Sipuan Sipuan and others, 'Pendekatan Pendidikan Multikultural', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8.2 (2022), pp. 815–30.

[473] Ernita Dewi, 'Transformasi Sosial Dan Nilai Agama', *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14.1 (2012), pp. 112–21.

5. Teori Pendidikan Berbasis Komunitas

K. H. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pendidikan harus berakar pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan pesantren yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan lokal dan sosial. Mengembangkan sistem pesantren yang berfungsi sebagai pusat belajar dan pengembangan masyarakat, di mana pendidikan agama dan umum dialokasikan untuk mengatasi isu-isu sosial di tingkat lokal.[474]

Kebijakan pendidikan yang diusung oleh enam organisasi Islam sebelum kemerdekaan tidak hanya bertujuan untuk mendidik secara religius, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi. Teori-teori pendidikan ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dan konteks sosial mempengaruhi praktik pendidikan di Indonesia pada masa itu.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan

a. Jami’atul Khoir

Jami'at Khair didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi yang beranggotakan mayoritas orang Arab. Dua program utamanya adalah pendirian dan pembinaan sekolah tingkat dasar, dan kedua, pengiriman anak-anak muda ke Turki dan Timur Tengah untuk melanjutkan pelajaran. Bidang kedua ini terhambat karena kekurangan dana dan kemunduran khilafah dari dunia Islam.[475]

Pendidikan yang dikelola oleh Jami'at Khair sudah termasuk maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah rakyat yang ada dikelola tradisional, karena pada sekolah-sekolah dasar Jami'at Khair pengajaran yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan agama, porsi pelajaran umumpun diperhatikan, sehingga cukup mampu menyaingi sekolah-sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial.

Pada bidang kurikulum sekolah dan jenjang kelas-kelas umpamanya, sudah diatur dan disusun secara terorganisir, sementara bahasa Indonesia dan bahasa

[474] Muhammad Adib Nuruzzaman and Iksan Iksan, ‘Islam Dalam Pusaran Modernitas: Menelusuri Pola Pendidikan Islam Berbasis Komunitas Pada Perkotaan Di Indonesia’, *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 2024, pp. 383–92.

[475] Sholihatun Sholihatun, ‘Sejarah Jamiatul Khair Dalam Pembentukan Masyarakat Betawi (Studi Kasus Sejarah Islam Betawi Abad XX)’ (UNUSIA, 2018).

Melayu dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Sedangkan bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai gantinya diajarkan bahasa Inggris dijadikan. pelajaran wajib. Sehingga terhimpunlah anak-anak dari keturunan Arab ataupun anak-anak Islam dari Indonesia sendiri.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar, Jami'at Khair berani mendatangkan guru dari luar negeri. Tercatat ada beberapa nama seperti Al-Hasyimi dari Tunisia, Syekh Ahmad Urkati dari Sudan, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko dan. Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah.[476]

Salah seorang guru yang paling terkenal adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Dia tampil sebagai tokoh pemikiran-pemikiran baru dalam masyarakat Islam Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah bahwa tidak adanya perbedaan di antara sesama muslim. Kedudukan muslim sama saja. Keturunan, harta ataupun pangkat tidak menjadi penyebab adanya diskriminasi dalam Islam.

Jami'at Khair merupakan organisasi Islam pertama yang memulai organisasi dengan bentuk modern dalam masyarakat Islam Indonesia, memiliki AD/ART, daftar anggota yang tercatat, rapat-rapat secara berkala, dan yang mendirikan lembaga pendidikan dengan memakai sistem yang boleh dikatakan cukup modern, di antaranya memiliki kurikulum, buku-buku pelajaran yang bergambar, kelas-kelas, pemakaian bangku, papan tulis dan sebagainya.

b. Sarikat Islam

Sarikat Islam didirikan pada tahun 1911 di Indonesia, sebagai organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial umat Islam. Organisasi ini awalnya muncul sebagai wadah bagi pedagang dan pengusaha Muslim untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dalam menghadapi persaingan dengan pedagang non-Muslim. Namun, seiring berjalannya waktu, Sarikat Islam berkembang menjadi sebuah gerakan yang lebih luas, mencakup aspek sosial, politik, dan pendidikan.[477]

Salah satu peran utama Sarikat Islam dalam kebijakan pendidikan Islam adalah pengintegrasian pendidikan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Organisasi ini menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan umat Islam dan meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat.

[476] Ari Setyaningsih and others, 'The Historicity of Islamic Education: Tracing the Traces of Al-Irsyad and Jami'at Khair', *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 2.2 (2024), pp. 136–44.

[477] Anggit Rizkianto, *Jalan Dakwah Sarekat Islam* (Zhena Ardh Grumma, 2020).

Oleh karena itu, Sarikat Islam mengambil inisiatif untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Sarikat Islam juga berperan dalam mengadvokasi pendidikan untuk semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Mereka berupaya menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi akses pendidikan, dengan harapan dapat menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Melalui berbagai kegiatan, Sarikat Islam mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan.[478]

Pada masa-masa awal kemerdekaan, pengaruh Sarikat Islam dalam bidang pendidikan semakin kuat. Mereka terlibat dalam pembentukan kurikulum pendidikan nasional yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sarikat Islam berkontribusi dalam menyusun kebijakan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral generasi muda.[479]

c. Perserikatan Ulama

Persyarikatan Ulama didirikan di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911 oleh Ki. Haji Abdul Halim. Dia menuntut ilmu selama 3 tahun di Mekkah. Enam bulan setelah ia kembali dari Mekkah, Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub yang tidak hanya bergerak di bidang ekonomi tetapi juga di bidang pendidikan. Di bidang ekonomi, organisasi ini bermaksud membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina.[480]

Dalam bidang pendidikan, Halim pada mulanya menyelengarakan pelajaran agama sekali seminggu untuk orang-orang dewasa, yang diikuti sekitar 60 orang. Umumnya pelajaran yang diberikan adalah pelajaran fikih dan hadist. Di samping mengajar, kegiatan Halim lainnya adalah berdagang untuk memenuhi nafkah hidupnya.

Pada tahun 1932, Abdul Halim mendirikan "Santri Asrama", sebuah sekolah berasrama, yang dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan: tingkat permulaan, dasar dan

[478] Ismail Usman, 'Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam', *Potret Pemikiran*, 21.1 (2017).
[479] J Blumberger, 'Sarekat Islam."', *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Leiden: EJ Brill*, 1924.
[480] Syarifuddin Idris, 'Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia', *KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 13.2 (2015), pp. 148–65.

lanjutan. Kurikulum yang diberikan di sekolah tersebut tidak hanya berupa pengetahuan agama dan umum, tetapi juga berbagai ketrampilan yang bernilai ekonomis. Pelajar-pelajar Santri Asrama dilatih dalam pertanian, pekerjaan tangan (besi dan kayu), menenun dan mengolah berbagai bahan, seperti membuat sabun. Mereka harus tinggal di asrama di bawah disiplin yang ketat, terutama dalam pembagian waktu dan dalam sikap pergaulan hidup mereka.[481]

Sekolah Santri Asrama merupakan realisasi dari gagasan Halim yang ia kemukakan pada Kongres Persyarikatan Ulama pada tahun 1932. Ia mengusulkan agar Persyarikatan Ulama mendirikan lembaga pendidikan yang betul-betul melahirkan alumninya menjadi orang-orang mandiri.[482]

Terlepas dari besar atau kecilnya peranannya, "Santi Asrama", merupakan model sekolah yang baru di dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Model sekolah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh Pesyarikatan Ulama untuk kemajuan pendidikan dan masyarakat Islam di Indonesia agar tidak ketinggalan zaman.

d. Muhammadiyah

Dalam pembaharuan bidang ini, Muhammadiyah tidak semata-mata dilihat dari segi intelektualitasnya, tetapi justru yang utama adalah mengenai cara dan pendekatan serta aplikasi perjuangan yang sangat berbeda dengan sistem yang berjalan. Muhammadiyah tidak meniru lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Timur Tengah sebagai pusat agama Islam seperti al-Azhar di Mesir, namun Muhammadiyah justru menjadikan pendidikan model Barat merupakan langkah alternatif yang diteladaninya, padahal mereka tergolong non muslim.[483]

Kyai H. Ahmad Dahlan yakin hanya melalui pendidikan yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia akan menjadi cerdas dan berilmu.

Pendidikan yang diselenggarakan itu pada hakekatnya sebauh "pendobrakan" dari kultur pendidikan yang mentradisi, karakteristik pendidikan yang bersifat minilitis, dogmatis, populis, pedesaan dan berorientasi pada politik diganti dengan pendidikan yang berwarna rasional, elitis, "mengkota" dan berorientasi pada

[481] Eva Syarifah Wardah, 'Kiprah Ulama Dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)', *Al-Fath*, 4.1 (2010), pp. 82–96.

[482] Candra Wijaya, Usiono Usiono, and Ahmad Syukri Sitorus, 'Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan Di Abad Ke-21' 2015, 2015.

[483] Khamam Khosin, 'Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Di Indonesia', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.2 (2023), pp. 1177–87.

birokrasi. Oleh karena itu cita-cita pendidikan yang dilontakan oleh Kyai H. Ahmad Dahlan meliputi tiga aspek yaitu;

1) Baik budi, alim dan agama;
2) Luas pandangan, alim dalam ilmu-ilmu dunia
3) Bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.[484]

Pelaksanaan pendidikan yang meniru Barat dan kemudian di-Islamkan yaitu dengan memberi materi pelajaran agama pada sistem pengajarannya itu, berarti Muhammadiyah ingin mempertahankan iman pada satu sisi, namun pada sisi yang lain. ingin agar warga didiknya mampu berbuat dalam periode modern yang dicirikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu kurikulum yang dicetuskan Muhammadiyah yang mengambil kurikulum pendidikan yang dibuat pemerintah kemudian menambah kewajiban mengikuti:[485]

1) Pendidikan agama Islam: Ilmu dan penghayatan agama Islam
2) Pendidikan kemuhammadiyahan: pengertian, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Muhammadiyah disamping keorganisasian
3) Pancasila/UUD 1945.

Dari sistem yang diperkenalkan Muhammadiyah ini, maka menurut Nakamura, bahwa pendidikan tersebut memperoleh hasil yang berlipat ganda, pertama, menambah kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui ajaran Islam; kedua, melalui sekolah Muhammadiyah ide pembaharuan bisa disebarkan secara luas; ketiga, mempromosikan penggunaan ilmu praktis dari pengetahuan modern.

Demikian upaya Muhammadiyah untuk mencerdaskan masyarakat, yang kini telah memiliki ribuan sekolah yang tercakup dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Kecerdasan yang diinginkan adalah kecerdasan yang mampu mengaplikasikan keterpaduan antara zikir dan pikir, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani serta terpolanya langkah yang relevan antara ilmu dan agama.

[484] Riska Angriani Riska Angriani, 'Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', 2020.

[485] Choirunniswah Choirunniswah, 'Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18.01 (2013), pp. 56–84.

e. Al Irsyad

Al-Irsyad merupakan madrasah yang tertua dan termasyhur di Jakarta yang didirikan pada tahun 1913 oleh Perhimpunan Al-Irsyad Jakarta dengan tokoh pendirinya Ahmad Surkati al-Anshari. Tujuan perkumpulan al-Irsyad ini adalah memajukan pelajaran agama Islam yang murni di kalangan bangsa Arab di Indonesia. Al-Irsyad disamping bergerak di bidang pendidikan, juga bergerak di bidang sosial dan dakwah Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara murni dan konsekuen.[486]

Sebenarnya al-Irsyad adalah pecahan dari organisasi pecahan Jami'at Khair, menurut Steenbrink, pada tahun 1913 telah terjadi perpecahan di kalangan Jami'at Khair mengenai hak istimewa golongan Sayyid. Mereka yang tidak setuju dengan kehormatan berlebihan bagi Sayyid dikecam dan dicap sebagai reformis dan kemudian mendirikan organisasi Jami'ah al-Islam wa al-Irsyad al-Arabiyah, Jami'ah al-Islam wa al-Irsyad al-Arabiyah, yang dikenal dengan nama yang umum yaitu al-Irsyad.

Salah satu perubahan yang dilakukan al-Irsyad adalah pembaharuan di bidang pendidikan. Pada tahun 1913 didirikan sebuah perguruan modern di Jakarta, dengan sistem kelas. Materi pelajaran yang diberikan adalah pelajaran umum, di samping pelajaran agama. Sekolah-sekolah al-Irsyad berkembang dan meluas sampai ke kota-kota dinama Al-Irsyad mempunyai cabang dan secara umum semuanya berada di tingkat rendah.[487]

Dalam bidang pendidikan Al-Irsyad mendirikan madrasah:

1) Awaliyah, lama pelajaran 3 tahun (3 kelas)
2) Ibtidaiyah, lama belajar 4 tahun (4 kelas)
3) Tajhiziah, lama belajar 2 tahun (2 kelas)
4) Mu'allimin, lama belajar 4 tahun (4 kelas)
5) Takhassus, lama belajar 2 tahun (2 kelas).

Seperti dijelaskan oleh Noer, pemimpin-pemimpin al-Irsyad dalam bidang pendidikan banyak dipengaruhi oleh Muhamad Abduh. Dalam mendidik anak, menurut mereka, hendaklah ditekankan pada Tauhid, fikih dan sejarah. Dengan tauhid memungkinkan seseorang untuk mengembangkan jiwa dan harta tanpa

[486] Muh Dahlan Thalib, 'Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad Dalam Pendidikan Di Indonesia', 2018.

[487] Zainal Anshari and Ahmad Hanif Fahruddin, 'Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah Dan Kiprahnya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam', *Akademika*, 14.01 (2020).

keraguan. Fiqh akan memperbaiki budi pekerti dan batin manusia dari segala noda serta memberi pelajaran dalam hal halal dan haram yang bersandar kepada dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah. [488]

Salah satu langkah yang cukup baik dilakukan al-Irsyad pada tahun 1930-an adalah disediakannya beasiswa untuk beberapa lulusannya untuk belajar di luar negeri, terutama Mesir. Meskipun alumni yang mereka kirim tidak banyak memberikan kontribusi, setelah mereka pulang, dibandingkan dengan mereka pergi ke luar negeri dengan biaya sendiri; tetapi yang jelas upaya penyediaan beasiswa merupakan langkah maju pada saat itu.

f. Nahdlatul Ulama'

Berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak dapat terlepas dari dua kyai besar yangat berpengaruh di dalamnya yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Wahab Hasbullah. Jika Kyai Haji Hasyim Asy'ari dianggap sebagai tokoh yang membentuk dan memberi isi Nahdlatul Ulama, maka orang yang mewujudkan gerakan itu sehingga menjadi suatu organisasi adalah Kyai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang ipar dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari.

NU memiliki peran yang sangat signifikan. Salah satu kontribusi utama NU adalah pengembangan sistem pendidikan pesantren, yang telah menjadi ciri khas pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan sosial yang mendidik generasi muda dalam nilai-nilai Islam yang moderat.[489]

NU mengedepankan pendekatan pendidikan yang bersifat holistik, menggabungkan pengajaran kitab-kitab klasik dengan pelajaran umum yang relevan. Mereka memahami pentingnya pendidikan yang tidak hanya mementingkan aspek spiritual, tetapi juga pengetahuan umum yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, NU mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal, seperti madrasah dan sekolah-sekolah umum, yang mengajarkan kurikulum yang seimbang antara ilmu agama dan pengetahuan umum.

---

[488] Umar Umar, 'Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspekstif Sejarah Pendidikan Nasional)', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 19.1 (2016), pp. 16–29.

[489] Agung Purnama, Nina Herlina Lubis, and Widyonugrahanto Widyonugrahanto, 'Pergulatan Pemikiran Kiai Nahdlatul Ulama Dengan Kaum Modernis Islam Di Jawa Barat (1930-1937)', *Patanjala*, 9.2, p. 291743.

NU juga memperkenalkan konsep pendidikan yang berbasis pada komunitas, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka percaya bahwa pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pesantren NU seringkali terlibat dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, menjadikannya sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan.

2. Dampak dari Kebijakan Pendidikan Terhadap Masyarakat Muslim

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh organisasi-organisasi Islam sebelum kemerdekaan, seperti Sarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya, memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Muslim di Indonesia.

Pertama, kebijakan ini berhasil meningkatkan tingkat pendidikan di kalangan umat Islam. Dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti madrasah dan pesantren, organisasi-organisasi tersebut menyediakan akses pendidikan yang lebih luas. Hal ini membantu mengurangi tingkat buta huruf di kalangan masyarakat Muslim, terutama di daerah pedesaan. Pendidikan yang diberikan tidak hanya fokus pada aspek agama, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan umum, sehingga menghasilkan individu yang lebih terdidik dan siap menghadapi tantangan zaman.[490]

Kedua, kebijakan pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran sosial dan politik di kalangan umat Islam. Melalui pendidikan, anggota masyarakat mulai memahami hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Sarikat Islam, misalnya, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga mendorong anggotanya untuk aktif dalam gerakan sosial dan ekonomi. Ini mengarah pada kesadaran kolektif tentang perlunya perjuangan melawan ketidakadilan dan kolonialisme.[491]

Selanjutnya, kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas membantu membangun solidaritas di antara masyarakat Muslim. Organisasi-organisasi tersebut sering melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Misalnya, pesantren NU tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat kegiatan sosial yang memberdayakan

[490] Kadi Kadi, 'IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: Kajian Atas Problem Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam' (IAI Tribakti Press, 2022).

[491] Dwi Lestari, 'Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)', *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1.01 (2022), pp. 7–40.

masyarakat sekitar. Ini memperkuat hubungan antaranggota komunitas dan meningkatkan rasa solidaritas.

Selain itu, pendidikan yang diberikan oleh organisasi-organisasi Islam membantu membentuk karakter dan moral generasi muda. Dengan penekanan pada nilai-nilai akhlak dan etika, kebijakan pendidikan ini menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap ajaran Islam. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan beretika, yang pada gilirannya berdampak positif pada stabilitas sosial.[492]

Namun, terdapat pula tantangan yang dihadapi. Meskipun pendidikan meningkat, masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial yang berbeda. Beberapa organisasi mungkin fokus pada segmen tertentu dari populasi, yang bisa mengakibatkan ketidakmerataan dalam penyebaran Pendidikan.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh organisasi-organisasi Islam sebelum kemerdekaan memberikan dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Mereka tidak hanya berhasil meningkatkan tingkat pendidikan, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan membentuk karakter moral generasi muda. Ini semua berkontribusi pada persiapan masyarakat Muslim untuk menghadapi tantangan masa depan dan berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan.

3. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Kebijakan

Setiap organisasi Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang unik dan kompleks dalam menerapkan kebijakan pendidikan Islam. Tantangan ini berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari sumber daya, budaya, hingga perubahan sosial yang cepat. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh beberapa organisasi utama.

a. Jami’atul Khoir

Tantangan yang dihadapi oleh Jami'atul Khoir termasuk keterbatasan dalam mendapatkan dukungan finansial untuk mengembangkan lembaga pendidikan.

[492] Miftahur Rohman, ‘Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang’ 2018, 2018.

Sumber daya yang terbatas sering kali menghambat upaya mereka untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas.[493]

Selain itu, Jami'atul Khoir juga menghadapi tantangan dalam menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pendidikan mereka. Banyak orang tua mungkin lebih memilih untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah umum yang dianggap lebih modern, sehingga mengurangi jumlah siswa di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Jami'atul Khoir. Kebutuhan untuk menyelaraskan kurikulum dengan tuntutan zaman juga menjadi perhatian, di mana mereka harus memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga mencakup keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat modern.[494]

b. Sarikat Islam

Tantangan utama yang dihadapi adalah integrasi pendidikan dengan aspek sosial dan ekonomi. Anggota Sarikat Islam umumnya berasal dari kalangan pedagang kecil yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. Mereka sering kali harus membagi perhatian antara kegiatan perdagangan dan pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam program pendidikan yang ditawarkan.[495]

Selain itu, usaha untuk menyatukan visi dan misi di antara anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda juga menjadi hambatan. Dalam upaya untuk menerapkan kebijakan pendidikan, perbedaan pandangan mengenai metode pendidikan dan kurikulum sering kali muncul, sehingga menghambat implementasi secara efektif. Keterbatasan akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan, juga menjadi masalah yang signifikan.

c. Nahdlatul Ulama (NU)

NU menghadapi tantangan dalam mempertahankan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi dan pengaruh ideologi baru yang masuk. Beberapa kalangan mungkin merasa pendidikan yang ditawarkan NU tidak sesuai

[493] Khusnan Iskandar and Ahmad Syahrul Ansori, 'Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan', *Journal of Education and Religious Studies*, 2.02 (2022), pp. 45–52.

[494] Agus Salim, 'Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3.1 (2024), pp. 7–14.

[495] Abdul Wahid, 'Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda', *Jurnal Kewarganegaraan. Researchgate. Net*, 2022.

dengan perkembangan zaman, sehingga ada kebutuhan untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas.

Keterbatasan dana juga menjadi tantangan besar bagi NU dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan. Mendirikan pesantren dan madrasah memerlukan investasi yang signifikan, dan sering kali NU harus bergantung pada sumbangan masyarakat. Selain itu, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, NU perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum agar bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya.[496]

d. Muhammadiyah

Tantangan yang dihadapi adalah resistensi dari masyarakat yang lebih tradisional. Banyak orang tua dan anggota masyarakat yang skeptis terhadap metode pendidikan baru yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk program-program pendidikan yang lebih inovatif.[497]

Selain itu, Muhammadiyah juga menghadapi masalah dalam menjangkau daerah terpencil. Meskipun mereka memiliki banyak sekolah di perkotaan, akses pendidikan di daerah pedesaan masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi hambatan dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.

e. Al Irsyad

Salah satu tantangan yang signifikan adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami visi pendidikan yang diusung. Masyarakat sering kali lebih memilih pendekatan pendidikan yang sudah ada dan teruji, sehingga inovasi yang ditawarkan oleh Al Irsyad mungkin tidak diterima dengan baik.

Kompetisi dengan lembaga pendidikan lain yang lebih mapan juga menjadi hambatan bagi Al Irsyad. Dalam menghadapi persaingan ini, mereka perlu bekerja keras untuk menunjukkan keunggulan dan manfaat dari pendekatan pendidikan yang mereka tawarkan. Selain itu, pengembangan kurikulum yang relevan dengan

[496] Sinta Novita Sari and Qolbi Khoiri, 'Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5.1 (2023), pp. 4806–14.

[497] Muhammad Sabarudin, 'Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan', *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1.1 (2015), pp. 139–74.

konteks lokal juga memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat.[498]

f. Perserikatan Ulama,

Perserikatan ulama menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Keterbatasan dana untuk mendirikan dan mengelola sekolah menjadi masalah yang signifikan. Banyak lembaga pendidikan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai atau tenaga pengajar yang berkualitas, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan.[499]

Selain itu, mereka juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan modern. Dengan adanya perubahan cepat dalam teknologi dan informasi, Perserikatan Ulama perlu memperbarui kurikulum dan metode pengajaran agar tetap relevan. Tantangan ini memerlukan investasi dalam pelatihan guru dan pengembangan sumber daya pendidikan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh setiap organisasi Islam dalam menerapkan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sangat beragam. Keterbatasan sumber daya, perbedaan pandangan dalam masyarakat, resistensi terhadap metode baru, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi isu-isu penting yang harus dihadapi. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, organisasi-organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Upaya tersebut mencerminkan komitmen mereka untuk mendidik generasi yang berpengetahuan, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan, seperti Sarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Jami'atul Khoir, memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Muslim. Mereka berhasil meningkatkan tingkat pendidikan, kesadaran sosial, dan solidaritas komunitas, serta

[498] Nur Rohmah Hayati, 'Kiprah Ormas Islam Di Bidang Pendidikan', *Al Ghazali*, 1.1 (2018), pp. 133–44.

[499] Muhammad Sholeh Hoddin, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.', *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14.1 (2020), pp. 15–30.

membentuk karakter moral generasi muda. Namun, setiap organisasi juga menghadapi tantangan tersendiri.

Sarikat Islam mengalami kesulitan dalam integrasi pendidikan dengan kegiatan ekonomi anggotanya, sementara Nahdlatul Ulama berjuang untuk mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Muhammadiyah menghadapi resistensi dari masyarakat yang lebih tradisional, dan Al Irsyad kesulitan mendapatkan dukungan untuk inovasi pendidikan. Jami'atul Khoir menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan menarik minat masyarakat terhadap program pendidikan mereka. Perserikatan Ulama juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Meskipun tantangan ini signifikan, upaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mereka berkontribusi pada pemberdayaan umat dan persiapan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan zaman.

BAB XIX
KEBIJAKAN PENDIDKAN ISLAM PADA ANGKATAN 1928

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1928, Indonesia masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Dalam kondisi ini, pendidikan merupakan salah satu medan perjuangan yang penting bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang memiliki peran besar dalam menggerakkan kesadaran nasional. Pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah kolonial umumnya bersifat sekuler dan terbatas aksesnya bagi pribumi, terutama umat Islam. Sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah terus berkembang sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap penjajahan. Tahun 1928 menjadi momentum penting karena terjadi penguatan kesadaran nasional melalui Sumpah Pemuda, yang mendorong semakin besarnya perhatian terhadap pembentukan sistem pendidikan yang mencerminkan identitas bangsa, termasuk nilai-nilai Islam.

Pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pengkaderan pemimpin dan pejuang kemerdekaan. Banyak tokoh nasional berasal dari lingkungan pendidikan Islam yang memiliki pandangan luas dan nasionalis. Lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) aktif dalam merancang sistem pendidikan Islam yang lebih modern, terstruktur, dan terintegrasi dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, pemerintah kolonial mulai merasa terancam oleh pengaruh pendidikan Islam yang semakin kuat dan berupaya membatasi ruang geraknya. Kebijakan pengawasan terhadap madrasah dan pesantren mulai diperketat, sementara pendidikan Islam yang dianggap moderat dan tidak membahayakan kekuasaan kolonial diberi ruang terbatas. Hal ini menunjukkan tarik menarik antara aspirasi umat Islam untuk membangun pendidikan yang mandiri dan intervensi kolonial yang bersifat hegemonik.

Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam pada angkatan 1928 menjadi penting untuk ditelaah karena mencerminkan dinamika sosial-politik dan identitas kebangsaan yang tengah tumbuh. Peran generasi muda, khususnya yang terdidik di lingkungan Islam, dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur intelektual semakin menonjol. Pendidikan Islam menjadi wadah pembentukan karakter nasionalisme religius yang turut mewarnai perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, memahami kebijakan pendidikan Islam pada periode ini memberikan wawasan historis mengenai bagaimana pendidikan mampu menjadi

alat perjuangan, sekaligus alat transformasi sosial yang efektif dalam membentuk kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Rasional (Rational Policy Theory):

Menekankan bahwa kebijakan dibuat melalui proses logis dan sistematis dengan tujuan mencapai efisiensi dan efektivitas.

2. Teori Perubahan Sosial

Menjelaskan bagaimana pendidikan menjadi agen transformasi dalam masyarakat, termasuk dalam membentuk kesadaran nasional dan identitas kolektif umat Islam pada masa penjajahan.

3. Teori Pendidikan Kritis (Paulo Freire)

Menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan dan mampu mengembangkan kesadaran kritis peserta didik terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya yang menindas, seperti dominasi kolonial.[500]

4. Teori Fungsionalisme (Emile Durkheim)

Pendidikan dipandang sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial dan meneruskan nilai serta norma budaya kepada generasi berikutnya. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berfungsi mempertahankan identitas keislaman dan kebangsaan.

5. Teori Konflik (Karl Marx)

Memandang pendidikan sebagai arena pertarungan ideologi antara kelompok penguasa dan kelompok tertindas. Pendidikan Islam menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang menindas dan eksklusif.

[500]Sritama, I. Wayan. "Konsep Dasar Dan Teori Pendidikan Agama Islam." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 5.1 (2019): 132-146.

6. Teori Nasionalisme (Hans Kohn)

Relevan untuk melihat bagaimana pendidikan Islam ikut membentuk kesadaran nasional dan semangat kebangsaan di kalangan umat Islam Indonesia menjelang kemerdekaan.[501]

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam pada Tahun 1928

Pada tahun 1928, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh konteks kolonialisme Belanda. Pemerintah Hindia Belanda belum sepenuhnya mengakui pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan resmi negara, karena pendidikan Islam dianggap sebagai ancaman terhadap hegemoni kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, banyak lembaga pendidikan Islam saat itu bersifat non-formal, berada di luar kendali pemerintah, dan didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau ulama. Pondok pesantren, surau, dan madrasah menjadi bentuk utama lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pusat pengajaran agama dan budaya lokal. Lembaga-lembaga ini sering kali berdiri secara mandiri tanpa bantuan atau pengakuan dari pemerintah kolonial.[502]

Namun, seiring meningkatnya kesadaran nasionalisme, para tokoh pergerakan mulai memanfaatkan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana untuk menanamkan semangat kebangsaan. Tahun 1928 juga merupakan tahun penting dalam sejarah Indonesia karena munculnya Sumpah Pemuda, yang menandakan lahirnya kesadaran kebangsaan di kalangan pemuda dari berbagai suku dan latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari lembaga pendidikan Islam. Tokoh-tokoh pergerakan seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan K.H. Ahmad Dahlan memandang pendidikan Islam sebagai alat penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan melawan penjajahan. Maka dari itu, meskipun belum diformalisasi oleh negara, pendidikan Islam mulai diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan dan kemajuan sosial.[503]

---

[501]Aini, Qurrotul, Dwi Noviani, and Qorri Aina. "Teori ilmiah dalam konsep pendidikan Islam." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.1 (2024): 630-637.

[502]Amir, Muh. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang." *Jurnal Pilar Kajian Islam Kontemporer* 10 (2019).

[503]Mubarak, Faisal. "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia." *Jurnal: Ta'lim Muta'allim* 4.8 (2009): 225-242.

Dalam hal struktur kurikulum, madrasah-madrasah mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih terorganisir, menggabungkan ilmu-ilmu agama dengan pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, sejarah, dan ilmu hitung. Ini menunjukkan adanya reformasi dalam pendidikan Islam untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi pengaruh pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh Belanda. Organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) turut mendorong pembaharuan dalam pendidikan dengan mengembangkan sistem madrasah yang lebih modern dan terstruktur. Bentuk kebijakan ini meskipun belum didukung secara resmi oleh pemerintah kolonial, tetap menjadi fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan Indonesia.[504]

2. Tujuan Utama Pendidikan Islam pada Masa Tahun 1928

Tujuan utama pendidikan Islam pada masa tahun 1928 adalah untuk membentuk pribadi Muslim yang taat, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu-ilmu agama seperti fikih, tauhid, dan tafsir, tetapi juga diarahkan untuk membangun karakter yang kuat dan mandiri di tengah penjajahan. Ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membebaskan umat dari keterbelakangan dan penindasan kolonial, sehingga siswa didorong untuk memahami agama sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber kekuatan moral dalam perjuangan kemerdekaan.[505]

Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk mempertahankan identitas budaya dan keagamaan umat Islam di tengah gencarnya asimilasi budaya Barat yang dibawa oleh sistem pendidikan kolonial. Melalui lembaga-lembaga seperti pesantren dan madrasah, nilai-nilai Islam dan tradisi lokal diajarkan secara intensif agar generasi muda tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Hal ini menjadi bentuk perlawanan intelektual dan kultural terhadap dominasi pendidikan Barat yang mengabaikan nilai-nilai lokal dan agama. Dengan cara ini, pendidikan Islam berperan sebagai benteng pertahanan umat Islam dari pengaruh negatif kolonialisme.

---

[504]Usman, Idris Muhammad. "Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam." *Jurnal Al Hikmah* 14.1 (2013): 101-119.

[505]Fithri, Widia. "Dinamika pendidikan Islam di Minangkabau (86 tahun perjalanan madrasah diniyyah pasia)." *Jurnal Al-Aqidah* 6 (2014).

Tujuan berikutnya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan dasar agar mampu berperan aktif dalam masyarakat. Meskipun pelajaran umum masih terbatas, beberapa lembaga pendidikan Islam mulai mengintegrasikan ilmu-ilmu duniawi seperti aritmetika, membaca-menulis, serta sejarah Islam dan nasional. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa itu mulai bergerak ke arah modernisasi, dengan tujuan mencetak generasi Muslim yang tidak hanya religius, tetapi juga cakap dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Kesadaran bahwa kemajuan umat tidak bisa dicapai hanya dengan pendidikan agama semata mendorong tumbuhnya semangat pembaruan di kalangan pendidik Islam masa itu.[506]

3. Tokoh yang Berperan dalam Pendidikan Islam 1928

Beberapa tokoh penting yang berperan dalam pendidikan Islam pada tahun 1928 adalah:

a. K.H. Ahmad Dahlan – Pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam modern yang sangat berpengaruh dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun beliau wafat pada 1923, warisan perjuangannya masih kuat terasa pada tahun 1928. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan kurikulum modern, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Ini menjadi langkah besar dalam pembaruan sistem pendidikan Islam yang kala itu masih tradisional.
b. K.H. Hasyim Asy'ari – Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), yang memperkuat pendidikan pesantren tradisional di tengah arus modernisasi. K.H. Hasyim Asy'ari berupaya mempertahankan otoritas pendidikan berbasis kitab kuning dan sistem sorogan dan bandongan, sambil tetap terbuka terhadap penyesuaian dengan kebutuhan zaman.[507] NU juga menjadi pelindung bagi ribuan pesantren di Indonesia, menjaga kesinambungan warisan keilmuan Islam klasik.
c. H.O.S. Tjokroaminoto – Seorang tokoh penting Sarekat Islam yang memperjuangkan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan umat Islam. Ia menekankan pentingnya pendidikan untuk membangkitkan kesadaran politik dan sosial umat Islam. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional,

[506]Tarigan, Mardinal, et al. "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 6.3 (2023): 883-889.

[507]Mujib, Ahmad. "Model Pendidikan Islam di Turki." *Journal of Islamic Education Studies* 2.2 (2024): 167-176.

Tjokroaminoto juga mendirikan sekolah-sekolah dan mendorong pembinaan generasi muda Islam yang progresif dan nasionalis.

Ketiga tokoh ini mewakili tiga arus penting dalam pendidikan Islam masa itu: modernisasi, pelestarian tradisi, dan pergerakan nasional. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk fondasi pendidikan Islam di Indonesia yang berakar kuat pada nilai agama sekaligus mampu merespons tantangan zaman.[508]

4. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Terhadap Perjuangan Nasional

Kebijakan dan gerakan pendidikan Islam pada tahun 1928 memberikan dampak yang signifikan terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah membangkitkan kesadaran nasionalisme di kalangan umat Islam, terutama generasi muda. Melalui pendidikan yang diberikan di madrasah, pesantren, dan sekolah-sekolah Islam, para siswa tidak hanya diajarkan ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pendidikan menjadi sarana penting untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan mendorong keterlibatan aktif umat Islam dalam gerakan kemerdekaan.[509]

Selain itu, pendidikan Islam juga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berkontribusi besar dalam perjuangan melawan penjajahan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi tempat tumbuhnya calon pemimpin yang cerdas, berani, dan berintegritas tinggi. Tokoh-tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan tokoh-tokoh muda Muhammadiyah dan NU adalah contoh nyata bagaimana pendidikan Islam mampu mencetak generasi pejuang yang tidak hanya piawai dalam ilmu agama, tetapi juga cakap dalam strategi politik dan diplomasi. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan keadilan sosial.

Dampak lainnya adalah terbukanya akses pendidikan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang selama ini terpinggirkan oleh sistem pendidikan kolonial. Madrasah dan pesantren menjadi alternatif yang terjangkau dan relevan bagi masyarakat bawah. Semakin banyak rakyat yang terdidik, semakin kuat pula basis massa yang sadar politik dan siap mendukung gerakan nasional. Pendidikan Islam pada masa

---

[508]Amaliyah, Asriati. "EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR MASA DAULAH FATIMIYAH Lahirnya Al-Azhar, Tokoh-tokoh Pendidikan pada Masa Daulah Fatimiyah dan Pengaruhnya terhadap Dunia Islam." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 16.1 (2013): 101-111.

[509]Muthrofin, Khoirul, and Nicky Estu Putu Muchtar. "Kontribusi siti walidah dalam pengembangan pendidikan islam di indonesia melalui muhammadiyah." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19.2 (2023): 157-169.

itu, meski belum diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial, justru menjadi kekuatan akar rumput yang menggerakkan semangat kebangsaan dari bawah ke atas.[510]

D. KESIMPULAN

Pada tahun 1928, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mulai menunjukkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan memperkuat identitas umat Islam. Pendidikan Islam saat itu tidak hanya berlangsung di pesantren, tetapi mulai mengadopsi sistem pendidikan modern melalui pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam modern, seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS). Kebijakan ini merupakan respons terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang terbatas bagi kaum pribumi dan kurang memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Tujuan utama pendidikan Islam pada masa itu adalah untuk membentuk generasi Muslim yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan semangat nasionalisme. Pendidikan Islam menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran politik dan identitas kebangsaan, terutama menjelang lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pendidikan menjadi alat perjuangan umat Islam dalam melawan dominasi kolonial dan membangun masa depan bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Beberapa tokoh penting yang berperan dalam pendidikan Islam tahun 1928 antara lain Haji Agus Salim, KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama), dan H. Fakhruddin. Mereka mendorong modernisasi pendidikan Islam dan menjadikan lembaga pendidikan sebagai pusat penyemaian ide-ide nasionalisme. Kebijakan pendidikan Islam pada masa itu memberikan dampak besar terhadap perjuangan nasional karena menciptakan kader-kader pergerakan yang terdidik, religius, dan memiliki semangat kebangsaan tinggi.

[510]Pratama, M. Al Qautsar. "Pengaruh Politik Etis Pada Pengembangan Pendidikan di Bali 1900-1928." *Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC)* 1.1 (2024): 43-59.

BAB XX
KEBIJKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA PERANG DUNIA PERTAMA

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah berperan penting dalam membentuk karakter dan jati diri umat Muslim, baik di periode klasik maupun dalam konteks modern. Sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai keagamaan, ilmu pengetahuan, dan budaya Islam, pendidikan ini memiliki peranan krusial dalam pengembangan masyarakat Muslim. Di Indonesia, pendidikan Islam telah eksis sejak sebelum kemerdekaan dan terus berkembang sejalan dengan dinamika sosial dan politik yang berlangsung. [511]

Namun, konflik global seperti Perang Dunia Pertama (1914–1918) berdampak signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai penjuru dunia, termasuk di kalangan umat Islam. Pada masa tersebut, mayoritas wilayah Muslim berada di bawah kekuasaan kolonial Eropa atau terlibat langsung dalam konflik, seperti Kekhalifahan Utsmaniyah yang berpihak pada Blok Sentral. Keadaan ini mendorong terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan pendidikan Islam. Beragam tantangan muncul, mulai dari tekanan dari pihak kolonialis, krisis sumber daya akibat perang, hingga upaya reformasi internal yang muncul sebagai respons terhadap dinamika zaman.[512]

Dalam konteks ini, lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi momen krusial bagi perkem tetaapi bangan pendidikan Islam di Indonesia. Undang-undang ini bukan hanya mengakui keberadaan pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan n asionl, juga menegaskan kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang bersifat formal, nonformal, dan informal.[513]

Analisis kebijakan pendidikan Islam dalam konteks UU No. 20 Tahun 2003 sangat krusial untuk memahami posisi dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, serta tantangan yang dihadapinya dalam implementasi di lapangan. Di

---

[511] Rahmat Hidayat and Candra Wijaya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2016).

[512] A. S. Anwar, M. Nurhakim, dan Khozin, "*Pendidikan Agama Islam dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia: Studi Kebijakan Pendidikan pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi,"* Jurnal Paris Langkis 4, no. 2 (2024), 177–189.

[513] Syafira Masnuah, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana, (2022)'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)', *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9.1, hlm. 115–30.

beberapa daerah, kurikulum pendidikan Islam mulai mengalami perubahan akibat pengaruh kolonial dan sebagai bentuk adaptasi internal. Pemerintah kolonial berupaya memasukkan nilai-nilai mereka ke dalam sistem pendidikan, namun banyak ulama yang gigih mempertahankan kurikulum tradisional melalui pendirian sekolah-sekolah informal dan kegiatan mengajar secara sembunyi-sembunyi. Pendidikan Islam pada periode ini juga berfungsi sebagai sarana penting untuk membangun kesadaran nasionalisme berbasis agama, melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di berbagai negara Muslim yang menjadikan Islam sebagai fondasi ideologi perlawanan.[514]

Perang Dunia Pertama (1914–1918) merupakan sebuah peristiwa global yang mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Pada masa tersebut, sebagian besar wilayah Muslim berada di bawah kekuasaan penjajahan Inggris, Prancis, dan Belanda. Perang ini menyebabkan gangguan signifikan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam; banyak madrasah, pesantren, dan institusi keagamaan lainnya terpaksa ditutup, mengalami kerusakan, atau bahkan diubah fungsinya menjadi fasilitas militer. Dalam menghadapi kondisi yang serba sulit ini, umat Islam dipaksa untuk mencari cara-cara baru dalam mempertahankan pendidikan agama mereka.[515]

Selain mengalami disrupsi fisik, Perang Dunia Pertama juga menjadi pemicu lahirnya ide-ide reformasi dalam pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir mengusulkan modernisasi kurikulum dengan memasukkan pelajaran-pelajaran umum, seperti ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa asing, di samping mata pelajaran agama tradisional. Gerakan reformasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi tekanan dari dunia modern dan meningkatnya kolonialisme. Di sisi lain, pendidikan Islam juga berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya dan agama, serta melawan infiltrasi nilai-nilai kolonial yang berusaha mengubah struktur sosial masyarakat Muslim.[516]

Contoh nyata di Indonesia menunjukkan bahwa pondok pesantren tetap eksis sebagai pusat pendidikan Islam meskipun menghadapi tekanan dari pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk memperbarui pendidikan Islam dengan sistem sekolah modern, sementara KH. Hasyim Asy'ari melalui

---

[514] S. Bella, M. F. Irawan, dan Shaleh, *Jejak Historis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah,* Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam 3, no. 1 (2024), 52–62

[515] M. Ibrahim, *Colonialism and Educational Transformations in Muslim Societies during World War I,* International Review of History and Education, 9(1) (2022),hlm. 74-89.

[516] A. Yusuf, *The Role of Islamic Education in the Rise of Muslim Nationalism during the Great War,* Journal of Muslim Societies, 6(1) (2023), hlm. 33-50.

Nahdlatul Ulama menjaga tradisi pesantren. Di Mesir, Universitas Al-Azhar mengintegrasikan pelajaran modern, dan di India, Darul Uloom Deoband menjadi pusat pengkaderan ulama yang juga melawan penjajahan Inggris.[517]

Sebelum perang, pendidikan Islam cenderung tradisional dengan fokus di masjid dan pesantren, terutama pada pelajaran agama. Perang Dunia Pertama memicu perubahan signifikan dalam pendidikan Islam, yang tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang menjadi kekuatan yang menginspirasi perubahan sosial dan politik, menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan kolonialisme.[518]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Hegemoni Budaya (Antoni Gramsc)

Teori Hegemoni Budaya (Antonio Gramsci) digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah kolonial Belanda menggunakan kebijakan pendidikan sebagai alat dominasi kultural terhadap masyarakat pribumi. Melalui kebijakan diskriminatif, seperti Ordonansi Guru 1905 yang mewajibkan guru agama Islam memperoleh izin khusus, pemerintah berusaha mengendalikan dan membatasi pengaruh pendidikan Islam.[519]

2. Teori Modernisasi Pendidikan

Teori Modernisasi Pendidikan membantu menjelaskan upaya pembaruan pendidikan Islam oleh tokoh-tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan dan Haji Rasul. Mereka mengadopsi sistem pendidikan modern, termasuk penggunaan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta metode pengajaran yang lebih sistematis.[520]

---

[517] M. N. Huda, B. Rama, dan M. Yahdi, *Pendidikan Islam di Indonesia Masa Penjajahan, Kemerdekaan, dan Dinamika Kebijakannya*, Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi 6, no. 2 (2024), 45–60.

[518] R. K. Yuniendel, *Jejak Kolonialisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tantangan hingga Transisi,* Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 9, no. 4 (2024), 1–12.

[519] Rizki Transiska, *Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi (Tahun 1915–1942 M), dalam Thaqafiyyat*: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, vol. 20, no. 1 (2021), hlm. 1–15.

[520] Tirolian, *Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia, dalam Ihya al-Arabiyah:* Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 1–15.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pedndidikan Islam Pada Perang Dunia Pertama

Kebijakan pendidikan Islam selama Perang Dunia Pertama dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan politik di kalangan masyarakat Muslim yang berada di bawah kekuasaan kolonial. Perang Dunia Pertama membawa perubahan signifikan terhadap struktur pendidikan di banyak wilayah, terutama di negara-negara yang dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa.[521]

Selama periode tersebut, umat Islam di berbagai negara, seperti Indonesia, India, dan kawasan Afrika Utara, menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang berusaha mengubah sistem pendidikan tradisional. Di Indonesia, misalnya, kebijakan kolonial Belanda terus berlanjut dengan mengeluarkan berbagai pembatasan terhadap lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Meski demikian, umat Islam berusaha keras untuk mempertahankan pendidikan agama mereka dengan cara mengadaptasi kurikulum dan metode pengajaran sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada.[522]

Di India, Perang Dunia Pertama memberikan dampak signifikan terhadap pendidikan Islam. Sir Syed Ahmad Khan beserta gerakan Aligarh berupaya mengintegrasikan pendidikan Barat dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, meningkatnya ketegangan akibat perang dan kebijakan kolonial mendorong banyak umat Islam untuk memperkuat identitas mereka, sehingga mereka mencari pendidikan yang lebih berlandaskan nilai-nilai Islam dan tradisi yang telah diwariskan. Meskipun Perang Dunia Pertama menghadirkan berbagai tantangan, umat Islam di berbagai belahan dunia menunjukkan ketangguhan dan inovasi dalam menghadapi kebijakan pendidikan yang mengekang. Mereka berusaha tidak hanya melestarikan tradisi pendidikan Islam, tetapi juga menggabungkan elemen-elemen modern agar dapat bersaing dalam konteks global yang terus berubah.[523]

Di kawasan Afrika Utara, perlawanan terhadap kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh Prancis semakin menguat. Sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh

---

[521] Ahmad Sodikin, *Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda: Studi Komparatif Pendidikan Islam dan Pendidikan Kolonial di Jawa Awal Abad XX*, Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era 3, no. 1 (2023), 450–460.

[522] Siti Sudarsono, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 56-78.

[523] Fathuddin Yusuf, *Kebijakan Politik Islam Hindia-Belanda: Ordonansi Pendidikan Islam di Indonesia 1908–1936, (*Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

umat Islam menjadi tempat yang penting untuk mempertahankan identitas agama dan budaya, terutama di tengah tekanan kolonial yang semakin meningkat.[524].

2. Kondisi Pendidikan Islam Sebelum Perang Dunia Pertama

Sebelum memasuki abad ke-20, pendidikan Islam di Indonesia dan dunia Islam secara keseluruhan berkembang dalam bentuk yang lebih sederhana dan kurang terorganisir dibandingkan dengan sistem pendidikan formal yang kita kenal sekarang. Di Indonesia, pendidikan Islam telah ada sejak abad ke-15, yang banyak dilaksanakan di pesantren. Lembaga ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama Islam, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika Islam kepada masyarakat.[525]

Pada masa ini, pendidikan Islam masih bersifat informal. Sebagian besar masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, mengandalkan pesantren sebagai tempat utama untuk menuntut ilmu. Di pesantren, pengajaran agama Islam dipimpin oleh ulama atau kyai, biasanya melalui metode halaqah, yaitu kelompok belajar yang berlangsung langsung di bawah bimbingan pengajar. Dengan sistem halaqah ini, santri (murid) dapat mendalami berbagai kitab agama, seperti Al-Qur'an, hadits, fiqh, dan tafsir, serta ilmu-ilmu keagamaan lainnya.[526]

Meskipun pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam, pada masa itu pendidikan belum sepenuhnya terstruktur. Pengajaran di pesantren lebih menekankan pada hafalan dan pemahaman terhadap teks-teks klasik Islam tanpa adanya sistem kurikulum yang jelas. Sebagian besar kitab yang diajarkan ditulis tangan, yang menyulitkan akses terhadap bahan ajar. Di samping itu, pendidikan di pesantren lebih berfokus pada pembelajaran agama dan belum secara eksplisit memasukkan ilmu duniawi seperti sains atau matematika.[527]

Pada era penjajahan Belanda, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial cenderung berfokus pada pendidikan Barat. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda sering kali mengabaikan ajaran agama Islam, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian,

---

[524] Shahab Syed*, Islamic Education and Colonialism: A History of the Muslim World* (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 87-105.

[525] Arifin, A. Syamsul. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 45.

[526] Mawardi Pewangi, *Eka Mahendra Putra, dan Muzakkir Ahlisan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan* (Bandung, CV Pena Publisher, 2025), 131.

[527] Sabarudin, Muhammad., *Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan*. TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 1(1), 2015, hlm. 1-15.

pesantren tetap berperan penting sebagai lembaga pendidikan Islam dan bahkan mengalami perkembangan yang pesat di berbagai daerah.[528]

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pesantren dan madrasah tetap eksis sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Islam. Dalam hal ini, peran ulama sebagai pengajar dan pemimpin spiritual menjadi sangat krusial untuk memastikan kesinambungan pendidikan Islam. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memberikan pemahaman tentang cara hidup yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat[529]

3. Dampak Perang Dunia Pertama terhadap Dunia Islam

Perang Dunia Pertama (1914-1918) memberikan dampak yang mendalam bagi dunia Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik ini bukan hanya merubah peta politik global, tetapi juga turut memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai negara Muslim. Hal ini terlihat jelas di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Ottoman, di Mesir, serta pada negara-negara baru di Asia dan Afrika. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari Perang Dunia I terhadap dunia Islam:

a. Kehancuran Kekaisaran Ottoman.

Salah satu dampak paling signifikan dari Perang Dunia I terhadap dunia Islam adalah runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Dikenal sebagai "The Sick Man of Europe," kekaisaran ini terlibat dalam konflik di pihak Blok Sentral. Setelah mengalami kekalahan, Kekaisaran Ottoman resmi dibubarkan, dan wilayah-wilayahnya terpecah menjadi negara-negara baru. Perjanjian Sèvres yang ditandatangani pada tahun 1920 secara efektif mengakhiri eksistensi politik Kekaisaran, memberikan kesempatan bagi negara-negara besar Eropa, seperti Inggris dan Prancis, untuk menguasai bekas wilayah Ottoman.[530]

Bagi umat Islam, keruntuhan Kekaisaran Ottoman memiliki dampak yang signifikan, mengingat kekaisaran ini telah lama dipandang sebagai kekuatan politik dominan yang mewakili umat Islam. Selain itu, Ottoman juga memiliki tanggung

---

[528] Azhar, Abdul. *Pesantren dan Peranannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 78.

[529] Azyumardi Azra, *Islam di Dunia Indonesia: Sebuah Pembentukan Institusional* (Bandung: Mizan, 2004), 45-60.

[530] Asep Saepudin, *Pendidikan Islam di Masa Kolonial* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 65-80.

jawab atas pelaksanaan pemeliharaan tempat-tempat suci Islam seperti Mekkah dan Madinah. Kejadian ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan umat Islam mengenai masa depan mereka di dunia yang kini terpecah antara berbagai negara Barat.[531]

b. Pengaruh Terhadap Dunia Arab dan Pembentukan Negara Baru.

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, dunia Arab, yang sebelumnya berada di bawah Kekaisaran Ottoman, menjadi arena politik yang baru dan kompleks. Negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Palestina jatuh ke dalam kepenguasaan Inggris dan Prancis melalui mandat kolonial. Mesir menerima kemerdekaan secara nominal pada tahun 1922, sementara wilayah-wilayah Arab lainnya mengalami pembagian yang lebih signifikan, membentuk negara-negara baru yang tunduk pada pengaruh langsung kekuatan Barat.[532]

c. Bangkitnya Gerakan Nasionalisme dan Islamisme.

Setelah perang, muncul berbagai gerakan nasionalisme di dunia Arab dan wilayah-wilayah lain yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Ottoman. Gerakan-gerakan ini berjuang untuk meraih kemerdekaan dari pengaruh asing dan mempertegas identitas nasional yang terpisah dari dominasi Barat. Salah satu contohnya adalah Gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hassan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Gerakan ini mengusung ideologi yang menggabungkan semangat nasionalisme dengan ajaran Islam.[533]

d. Pergeseran Ekonomi dan Dampaknya terhadap Dunia Islam.

Ekonomi dunia Islam, terutama di kawasan yang dulunya termasuk dalam Kekaisaran Ottoman, mengalami kemunduran signifikan setelah Perang Dunia I, dengan infrastruktur yang rusak, lonjakan harga, dan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai tantangan nyata. Negara-negara Islam yang baru terbentuk pasca-perang berjuang keras untuk membangun kembali fondasi ekonomi mereka, sementara negara-negara yang berhasil meraih kemerdekaan, seperti Mesir, menghadapi rintangan besar dalam usaha memperbaiki ekonomi yang hancur akibat dampak perang.[534]

---

[531] Deri Wanto, *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa ke Masa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 214.

[532] Abdul Karim Bangura, *Colonial Education and the Changing Role of Islam in the Colonized World* (New York: Routledge, 2021), 128–130.

[533] Emine Gunay, *Ottoman Education During the First World War* (Istanbul: Turkish Historical Society, 2017),hlm. 12-34.

[534] Bensalem Mouhouche, "*Pendidikan Islam di Aljazair dan Tunisia pada Masa Penjajahan Prancis: Kebijakan dan Dampaknya,"* Jurnal Sejarah dan Pendidikan 7, no. 2 (2022): 88–99.

e. Perubahan dalam Hubungan Islam dengan Barat

Perang Dunia I menandai perubahan penting dalam hubungan antara dunia Islam dan negara-negara Barat. Sebelumnya, banyak negara Muslim menjalin hubungan dengan kekuatan kolonial Eropa melalui kesepakatan perdagangan atau sebagai bagian dari imperium kolonial. Namun, seiring dengan keruntuhan Kekaisaran Ottoman dan munculnya negara-negara baru, struktur politik internasional pun mengalami perubahan, yang berdampak pada hubungan tersebut.[535]

4. Kebijakan Kolonial dalam Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial terhadap pendidikan Islam di wilayah jajahan Eropa, seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, berdampak signifikan pada struktur pendidikan di daerah tersebut. Penjajah berusaha mengendalikan dan mengubah pendidikan Islam yang telah berkembang melalui lembaga tradisional seperti pesantren dan madrasah. Di India, misalnya, pendidikan Islam mengalami kemunduran setelah kedatangan Inggris, yang memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang lebih sekuler, memaksa madrasah untuk beradaptasi dan mengutamakan pengajaran bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan Barat.[536]

Di Indonesia, kebijakan kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam juga memberikan dampak yang signifikan. Pada awalnya, pemerintah Belanda tidak banyak mengganggu pendidikan Islam yang berlangsung di pesantren. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap stabilitas kolonial dan mulai memberlakukan pembatasan serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Sebagai langkah balasan, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler dengan kurikulum Barat, seperti Sekolah Rakyat dan Hollandsch-Inlandsche School (HIS), yang mengajarkan bahasa Belanda, matematika, dan ilmu pengetahuan umum, tetapi tidak memasukkan pendidikan agama Islam dalam kurikulumnya[537]

---

[535] Nikki R. Keddie, *Modern Iran: Roots and Results of Revolution* (New Haven: Yale University Press, 2003), hlm. 78-90.

[536] Sahar Amin*, Islam and Education in Colonial India* (London: Palgrave Macmillan, 2020), 102–104.

[537] James D. Le Sueur, *The Colonial Education System in Algeria: A Case Study* (London: Oxford University Press, 2011), hlm. 56-80.

5. Kebijakan Pendidikan di Negara-negara Islam Selama Perang Dunia Pertama

Perang Dunia Pertama, yang terjadi antara tahun 1914 hingga 1918, memberikan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor pendidikan di negara-negara Islam. Kebijakan pendidikan di negara-negara Islam yang terlibat dalam perang, baik yang berada di bawah kekuasaan kolonial maupun yang sudah merdeka, mengalami perubahan signifikan sebagai konsekuensi dari ketegangan politik, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Di wilayah-wilayah jajahan, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan akibat kebijakan penjajah yang cenderung memprioritaskan pendidikan sekuler demi mendukung kepentingan kolonial.[538]

Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan meningkatnya ketegangan sosial, banyak sekolah yang mengalami penurunan kualitas pengajaran. Meskipun madrasah tetap menjadi pusat pendidikan Islam, mereka menghadapi kesulitan dalam menjalankan pengajaran sesuai dengan tradisi yang ada. Setelah perang berakhir, muncul gerakan pembaharuan pendidikan yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah pendirian Republik Turki pada tahun 1923. Ia memperkenalkan reformasi pendidikan yang modern dan sekuler untuk memperbaiki situasi pendidikan di negara tersebut.[539]

Di India, yang saat itu berada di bawah penjajahan Inggris, kebijakan pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang telah ada sebelumnya. Selama periode perang, pemerintah kolonial melanjutkan kebijakan yang mengesampingkan pendidikan agama, lebih mengutamakan pengajaran bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan Barat. Tujuan dari pendidikan yang diperkenalkan oleh Inggris adalah untuk menciptakan generasi yang mendukung administrasi kolonial, sementara pendidikan agama Islam justru diabaikan. Meskipun dalam keadaan yang memarginalkan pendidikan agama, komunitas Muslim di India tetap berupaya mempertahankan dan melestarikan pendidikan agama mereka.[540]

Di negara-negara Islam yang sudah merdeka, seperti Persia (sekarang Iran), meskipun tidak sepenuhnya terpengaruh oleh perang, kondisi pendidikan tetap

---

[538] Abdurrahman, D., & Hasyim, M., *Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 45-67.

[539] Darmawan, M., *Pendidikan dan Pembangunan dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 90-115.

[540] Mohamed Ben Said*, Pendidikan dan Asimilasi: Pengaruh Penjajahan Prancis di Afrika Utara* (Tunis: Tunisian Press, 2024), 74–76.

terpengaruh oleh ketegangan yang muncul akibat konflik dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah Persia berusaha memperkenalkan pendidikan modern yang lebih terstruktur, namun pendidikan Islam tetap menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat. Proses belajar-mengajar di madrasah masih berlangsung, meskipun terbatas oleh kekurangan sumber daya akibat perang. Pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada penguatan pendidikan sekuler demi mencetak pegawai negara, namun madrasah dan lembaga pendidikan Islam tetap menjadi pilar penting dalam sistem pendidikan di Persia.[541]

6. Peran Pendidikan Islam dalam Menghadapi Dampak Perang Dunia Pertama

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat krusial dalam menghadapi dampak Perang Dunia Pertama, terutama di negara-negara Islam yang berada di bawah kekuasaan kolonial maupun yang telah merdeka. Perang yang membawa kerusakan di berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi ini memberikan tantangan besar bagi umat Islam. Namun, pendidikan Islam tetap menjadi tonggak utama dalam mempertahankan identitas agama, moralitas, dan stabilitas sosial.[542]

Di Kekaisaran Ottoman, pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga solidaritas sosial serta semangat perlawanan terhadap penjajah. Meskipun kekaisaran ini mengalami kerugian yang signifikan akibat perang dan menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan, madrasah tetap bertahan sebagai lembaga yang mengajarkan ilmu agama dan membangun ketahanan moral bagi masyarakat. Pendidikan Islam berfungsi sebagai alat untuk memperkuat semangat perjuangan umat Islam dalam menghadapi krisis akibat konflik yang berkepanjangan.[543]

Sementara itu, di Aljazair yang berada di bawah penjajahan Prancis, pendidikan Islam juga berfungsi krusial dalam mempertahankan identitas budaya dan agama umat Islam yang terancam oleh kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh penjajah.[544]

---

[541] Lubis, N., *Pendidikan Islam: Sejarah dan Kontemporer* (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 30-55.

[542] Maftuhin, M., *Pendidikan Islam dalam Konteks Modernisasi* (Surabaya: Al-Ma'arif, 2007), hlm. 50-75.

[543] Sahar Amin, *Islam and Education in Colonial India* (London: Palgrave Macmillan, 2020), 102–104.

[544] Rasyid, A., *Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Bangsa Pasca-Kolonialisme* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 150-172.

D. KESIMPULAN

Pendidikan Islam telah menjadi fondasi yang sangat penting bagi identitas umat Muslim, termasuk di Indonesia. Pesantren dan madrasah berfungsi sebagai pusat penanaman nilai-nilai agama yang mendalam. Namun, Perang Dunia Pertama membawa pengaruh besar terhadap pendidikan Islam, dengan adanya tekanan kolonial yang membatasi perkembangan sistem pendidikan ini. Meskipun demikian, umat Islam menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan mempertahankan pendidikan agama melalui berbagai upaya.

Sebelum perang, pendidikan Islam diadakan secara informal dan sederhana, dengan pesantren sebagai tempat utama untuk belajar. Keruntuhan Kekaisaran Ottoman setelah perang menyebabkan terjadinya pembagian wilayah Muslim oleh kekuatan Barat, yang pada gilirannya memperkuat semangat nasionalisme dan Islamisme dalam usaha mempertahankan identitas Islam.

Perang juga menghasilkan tantangan ekonomi yang signifikan. Namun, pendidikan Islam berhasil bertahan dan mengalami transformasi, menjadikannya sebagai alat penting dalam mempertahankan identitas sambil mendorong perubahan sosial dan politik. Di Indonesia, pendidikan Islam kini diakui secara formal dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan peranannya dalam pembangunan bangsa.

BAB XXI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

A. PENDAHULUAN

Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942, setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Jepang menggantikan posisi Belanda sebagai penguasa di wilayah Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Dalam masa penjajahannya yang relatif singkat (1942–1945), Jepang menerapkan kebijakan yang berbeda dari Belanda, termasuk dalam bidang pendidikan dan agama. Jepang memanfaatkan pendekatan yang lebih lunak terhadap umat Islam, dengan tujuan mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam perang mereka melawan Sekutu. Berbeda dengan kebijakan Belanda yang cenderung membatasi pendidikan Islam, Jepang justru menunjukkan sikap yang lebih akomodatif. Pemerintah militer Jepang menyadari peran strategis umat Islam sebagai kekuatan sosial-politik yang besar di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang memberikan sejumlah kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan Islam, termasuk membuka kembali sekolah-sekolah Islam yang sebelumnya dibatasi atau ditutup oleh Belanda. Hal ini dilakukan sebagai strategi politik untuk menarik simpati ulama dan organisasi Islam.[545]

Jepang juga memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Beberapa pesantren bahkan diberi bantuan berupa alat tulis dan perlengkapan belajar. Pemerintah Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran agama, meskipun tetap di bawah pengawasan ketat. Kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam meninggalkan dampak yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan ini membuka kembali ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan institusi pendidikan mereka setelah masa represi Belanda. Di sisi lain, adanya intervensi ideologis dan militeristik dari Jepang membuat pendidikan Islam pada masa itu tidak sepenuhnya murni berkembang atas dasar kebutuhan umat. Meski demikian, pengalaman selama masa penjajahan Jepang menjadi pelajaran penting bagi tokoh-tokoh Islam dalam merumuskan sistem pendidikan yang lebih mandiri setelah Indonesia merdeka.[546]

---

[545] Asrori. "invasi jepang di semenanjung korea dan hindia belanda: resistensi bangsa korea dan indonesia kepada jepang." *humanis: jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora* 16.2 (2024) hlm 32

[546] Bahri, Samsul. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Penerbit Adab, (2021) hlm 67

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Dalam konteks ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Jepang merancang dan mengimplementasikan kebijakan dalam bidang pendidikan Islam selama masa penjajahan. Kebijakan publik melibatkan proses identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan pendidikan Islam Jepang dapat dianalisis dalam kerangka ini: apa masalah yang ingin diatasi Jepang, bagaimana strategi dirumuskan, dan apa hasilnya terhadap masyarakat Islam di Indonesia.[547]

2. Teori Kolonialisme dan Pendidikan

Teori kolonialisme memandang pendidikan sebagai alat kekuasaan. Kolonialisme bukan hanya eksploitasi ekonomi, tetapi juga hegemoni budaya dan ideologi. Pemerintah kolonial sering menggunakan sistem pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kekuasaan mereka. Dalam kasus Jepang, pendidikan Islam tidak hanya dibiarkan berkembang, tetapi diarahkan agar sejalan dengan propaganda Jepang (seperti semangat Asia Timur Raya). Dengan demikian, teori ini membantu melihat bahwa kebijakan pendidikan Islam oleh Jepang bukan semata-mata sebagai bentuk toleransi, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial dan ideologis.[548]

3. Teori Islamisasi Pendidikan

Teori ini berangkat dari pandangan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai proses pewarisan nilai-nilai Islam. Menurut Al-Faruqi (1982), Islamisasi pendidikan bertujuan untuk membangun generasi yang berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks penjajahan Jepang, teori ini penting untuk memahami bagaimana lembaga pendidikan Islam seperti pesantren berupaya mempertahankan identitas Islam meskipun berada di bawah tekanan dan pengaruh ideologi asing. [549]

---

[547] Abbas, *Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Jepang*. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam (2018) hlm 50

[548] Kuswono, K.. "Politik Islam Pada Masa Pendudukan Jepang". HISTORIA: *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, (2020) 3(2), hlm 113-122

[549] Hakim, Lukman. *Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Gestalt Media, (2020) hlm 89

4. Teori Perubahan Sosial dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu agen utama dalam proses perubahan sosial. Pendidikan berkaitan erat dengan sistem sosial-politik. Saat Jepang mengambil alih kekuasaan dari Belanda, terjadi perubahan dalam struktur sosial-politik yang juga memengaruhi sistem pendidikan. Teori ini membantu menjelaskan dinamika antara kebijakan kolonial Jepang dan respons masyarakat Islam terhadap perubahan tersebut—baik dalam bentuk adaptasi, perlawanan, maupun transformasi kelembagaan pendidikan Islam.[550] Berbagai teori sosiologis memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial. Teori fungsionalisme melihat pendidikan sebagai mekanisme integrasi sosial yang beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. [551]

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kebijakan Pendidikan Islam Oleh Pemerintah Jepang Selama Masa Penjajahan Di Indonesia

Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada Maret 1942, ketika mereka berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II dan mengambil alih kekuasaan atas wilayah Hindia Belanda. Jepang datang dengan membawa propaganda sebagai pembebas bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat, melalui slogan "Asia Timur Raya". Namun di balik slogan itu, Jepang memiliki kepentingan militer dan politik yang sangat besar, terutama untuk mendukung upaya perangnya di kawasan Pasifik. Dalam konteks ini, Jepang segera menyadari bahwa umat Islam memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pendekatan terhadap umat Islam, termasuk dalam hal pendidikan, menjadi salah satu strategi utama yang mereka gunakan untuk mengamankan kekuasaan mereka.[552]

Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang cenderung menekan dan membatasi ruang gerak pendidikan Islam, pemerintah militer Jepang justru mengambil pendekatan yang lebih kooperatif. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti

[550] Miftahur Rohman, *Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang*, (2018) hlm 70-71

[551] Ramadlan, Mohammad Fajar Shodiq. *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press, (2022) hlm 101.

[552] F Amelia, *Pendudukan Jepang Di Indonesia* Alprin: (2020).hlm 202

pesantren dan madrasah yang sebelumnya dipersempit atau bahkan ditutup oleh Belanda, mulai dibuka kembali. Jepang bahkan mencabut larangan penggunaan bahasa Arab di sekolah-sekolah Islam. Kebijakan ini bukan semata-mata bentuk toleransi, melainkan strategi politik untuk merangkul para ulama dan mendapatkan dukungan rakyat Muslim Indonesia agar tetap tunduk dan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang.[553]

Untuk mengatur urusan keagamaan, termasuk pendidikan Islam, Jepang membentuk lembaga resmi bernama Shūmubu, yaitu Kantor Urusan Agama Islam, yang berada di bawah pemerintahan militer. Melalui lembaga ini, Jepang memberikan bantuan terbatas berupa alat tulis, buku pelajaran, dan beberapa fasilitas fisik kepada madrasah, sebagai bentuk dukungan simbolis. Namun, di balik dukungan itu, pemerintah Jepang tetap memberlakukan kontrol ketat terhadap isi pengajaran serta aktivitas yang dilakukan di lembaga pendidikan. Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional tetap memainkan peran penting selama pendudukan Jepang. Beberapa pesantren besar terus menjalankan kegiatan pembelajaran agama dan mendidik santri, meskipun dalam kondisi terbatas. Selain itu, organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga diberi ruang untuk tetap aktif, meskipun tetap dalam pengawasan. Pada tahun 1943, Jepang memfasilitasi pendirian Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai wadah resmi umat Islam. Meskipun secara lahiriah organisasi ini bertujuan mengkoordinasi kegiatan Islam, pada hakikatnya Jepang menggunakan Masyumi sebagai alat politik untuk mengarahkan umat Islam agar mendukung pemerintahan mereka.[554]

Dalam rangka menjangkau lebih luas kalangan Muslim, Jepang juga mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sekolah-sekolah umum. Di beberapa wilayah seperti Jawa dan Sumatra, pelajaran agama Islam dimasukkan dalam kurikulum sekolah rakyat. Jepang juga mengangkat guru-guru agama, tetapi bersamaan dengan itu mereka menyisipkan materi ideologis yang mengarah pada penguatan semangat nasionalisme Jepang. Pelajaran seperti penghormatan kepada Kaisar dan nilai-nilai kebudayaan Jepang wajib diajarkan di samping pelajaran agama, sebagai bagian dari strategi kontrol ideologis terhadap rakyat Indonesia, termasuk kalangan Muslim.[555]

---

[553] Danugroho. *Pendidikan dalam kacamata ketahanan nasional*. Jejak Pustaka, (2022) hlm 67

[554] Sulasman, S. "Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 1942-1945". HISTORIA: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, (2019) 7(1), hlm 57-84

[555] A Nuryanto, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia* (UNY Press, 2020), hlm 15-20.

Untuk memastikan pengaruh ideologis mereka menjangkau para pendidik, Jepang juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan khusus bagi guru dan ulama. Dalam pelatihan ini, selain diberikan pelajaran metodologi pengajaran, para peserta juga diajarkan kedisiplinan militer, tata upacara Jepang, dan doktrin Asia Timur Raya. Ini adalah bagian dari upaya Jepang membentuk guru dan ulama yang tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga loyal terhadap pemerintahan Jepang. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa Jepang diarahkan untuk mendukung stabilitas kekuasaan militer.

Kebijakan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang ini meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pendidikan Islam untuk hidup kembali setelah sempat ditekan oleh kolonial Belanda. Pesantren dan madrasah mulai bangkit dan peran ulama semakin kuat di masyarakat. Pendidikan Islam tidak berkembang secara bebas dan mandiri, melainkan berada dalam bayang-bayang kekuasaan penjajah. Meski demikian, pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi tokoh-tokoh Islam untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih merdeka setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945.[556]

Berikut adalah bentuk-bentuk kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintah Jepang selama masa penjajahan di Indonesia (1942–1945), berdasarkan catatan sejarah yang ada:

a. Pembukaan Kembali Lembaga Pendidikan Islam

   Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang membuka kembali lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam yang sebelumnya ditutup atau dibatasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini bertujuan untuk merangkul umat Islam dan mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan masyarakat Muslim, yang dianggap sebagai kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia. Dengan mengizinkan lembaga-lembaga pendidikan Islam beroperasi kembali, Jepang berharap dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan umat Islam dan mengurangi potensi perlawanan terhadap pemerintahan mereka.[557]

b. Pembentukan Kantor Urusan Agama Islam (Shūmubu)

[556] S Ariantoni, *Perkembangan Kurikulum SD Di Indonesia Dari Mengajar Tradisional Ke Belajar Aktif* Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2017), hlm 125-127.

[557] Ruslan. "Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023) hlm 640-649.

Sebagai langkah untuk mengontrol dan mengawasi kehidupan keagamaan, Jepang membentuk lembaga Shūmubu, yang bertugas menangani semua urusan agama Islam di Indonesia. Shūmubu berada di bawah pengawasan militer dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan Islam tidak menyimpang dari kebijakan Jepang. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kegiatan dakwah dan pengajaran agama, sehingga pendidikan Islam yang diajarkan di madrasah dan pesantren tetap selaras dengan kepentingan politik Jepang, yang mengedepankan loyalitas terhadap pemerintahan pendudukan.[558]

c. Pemberian Bantuan Terbatas kepada Pesantren dan Madrasah

Pemerintah Jepang memberikan bantuan berupa alat tulis, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah kepada pesantren dan madrasah di Indonesia. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam tetap berfungsi dan tidak digunakan sebagai alat untuk membangkitkan perlawanan terhadap Jepang. Meskipun ada dukungan material, Jepang mengatur dengan cermat agar pendidikan Islam yang diajarkan tidak keluar dari batasan yang ditentukan oleh pemerintah pendudukan. Pemberian bantuan terbatas ini juga menunjukkan bahwa Jepang hanya memberikan ruang bagi pendidikan Islam dalam konteks yang menguntungkan bagi mereka.[559]

d. Pelibatan Ulama dan Pembentukan Masyumi

Jepang memfasilitasi pendirian Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tahun 1943 sebagai wadah bagi ulama dan tokoh Islam untuk terlibat dalam struktur pemerintahan Jepang. Melalui Masyumi, Jepang berharap dapat mengonsolidasi kekuatan umat Islam dengan menempatkan ulama dalam posisi yang lebih berpengaruh. Masyumi bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan umat Islam Indonesia agar mendukung kebijakan pemerintah Jepang, termasuk dalam hal pendidikan dan dakwah.[560]

e. Pelatihan Guru dan Ulama

---

[558] Ahmad Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (2012), hlm 250.

[559] Asror, Moh, "Modernisme Pendidikan Islam dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis dan Relevansinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 8.1 (2023) hlm 35-52.

[560] Rohmah, N."Pesantren dan Politik Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Tarbiyatuna*, 9(2), (2018). hlm 88-106

Jepang menyelenggarakan pelatihan bagi guru agama dan ulama di Indonesia, dengan tujuan untuk mencetak kader pendidik yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga tunduk pada kebijakan Jepang. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya diberikan materi tentang pendidikan agama, tetapi juga pelatihan mengenai kedisiplinan militer, tata upacara Jepang, serta nilai-nilai budaya dan nasionalisme Jepang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa guru dan ulama yang terlatih tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyebarkan ideologi Jepang kepada masyarakat.[561]

f. Integrasi Pendidikan Islam dalam Sekolah Umum

Jepang juga mengintegrasikan pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh mereka. Di wilayah mayoritas Muslim, pelajaran agama Islam diajarkan sebagai bagian dari kurikulum wajib. Namun, di samping pelajaran agama, sekolah-sekolah tersebut juga memuat materi wajib lainnya, seperti penghormatan kepada Kaisar Jepang, tata upacara Jepang, dan semangat nasionalisme Jepang.[562] Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam menjadi bagian dari upaya Jepang untuk mengontrol ideologi negara dan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk loyalitas terhadap Jepang.[563]

g. Pengawasan Ketat terhadap Materi dan Aktivitas Keagamaan

Jepang menerapkan pengawasan yang ketat terhadap materi ajar dan aktivitas keagamaan di lembaga-lembaga Islam, meskipun ada kelonggaran dalam pengajaran agama Islam. Setiap kegiatan dakwah, ceramah, dan pelajaran agama yang dilakukan oleh ulama dan guru di pesantren atau madrasah harus selalu selaras dengan kebijakan Jepang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran agama yang disampaikan tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan perlawanan terhadap penjajahan Jepang atau menyebarkan ideologi yang dianggap subversif.[564]

---

[561] Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM, (2022) hlm 67

[562] M R Fadli and D Kumalasari, *'Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang'*, *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 13.2 (2019), pp. 189–205.

[563] Dute, Hasruddin. *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pluralistik*. Publica Indonesia Utama, (2021) hlm 98

[564] Mukromin, Muhammad. *Peran Pondok Pesantren dalam meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill Bagi Santri untuk menyongsong Era Indonesia Emas 2045 (Studi Kasus Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

2. Motivasi Dan Tujuan Politik di Balik Kebijakan Jepang Dalam Mendukung Pendidikan Islam di Indonesia

Motivasi dan tujuan politik di balik kebijakan Jepang dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia selama masa penjajahan (1942–1945) terkait erat dengan strategi Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dan mengonsolidasikan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk umat Islam. Jepang menyadari bahwa umat Islam di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik, sehingga mendapatkan dukungan dari kalangan ulama dan masyarakat Muslim menjadi sangat penting untuk menghindari perlawanan dan membangun stabilitas di wilayah jajahannya. Salah satu tujuan utama Jepang adalah untuk mengurangi potensi perlawanan terhadap kekuasaannya dengan melibatkan umat Islam dalam struktur pemerintahan yang mereka dirikan. Dengan membuka kembali lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah yang sebelumnya dibatasi oleh Belanda, Jepang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka lebih menghargai keberadaan umat Islam, berbeda dengan kebijakan kolonial Belanda yang lebih represif terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam.[565]

Jepang juga melihat potensi besar dalam menggunakan ulama dan tokoh agama sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat. Dengan mendirikan organisasi seperti **Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)** pada tahun 1943, Jepang berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan umat Islam dan memastikan bahwa mereka berperan aktif dalam mendukung ideologi Jepang, seperti semangat **Asia Timur Raya**. Jepang ingin memastikan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga nilai-nilai yang sesuai dengan kebijakan penjajahan mereka, seperti penghormatan terhadap Kaisar Jepang dan nasionalisme Jepang. Melalui pelatihan-pelatihan bagi ulama dan guru agama, Jepang berharap dapat membentuk kader pendidik yang loyal terhadap pemerintahan Jepang dan dapat menyebarkan ideologi Jepang ke masyarakat.[566]

Secara keseluruhan, kebijakan Jepang dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia selama masa penjajahan bertujuan untuk mengurangi potensi perlawanan,

---

[565] S H Hasan, *Perkembangan Kurikulum SMP Dari Masa Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, Ke Zaman Kemerdekaan* (Pusat Kurikulum dan Perbukuan: 2022).

[566] Mahbub, Moh, and Junaidi Khab. *NU Tulang Punggung Negara. Strategi NU Pasca-Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan*. Vol. 174. No. 1. Sulur Pustaka, (2022.

memperkuat loyalitas umat Islam kepada kekuasaan Jepang, dan mengontrol pengaruh ideologi melalui pendidikan. Dengan memanfaatkan pendidikan Islam, Jepang berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih terkendali dan mendukung kestabilan politik mereka di Indonesia, serta mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan lain yang berpotensi menggugat kekuasaan mereka.[567]

Berikut beberapa motivasi dan tujuan politik utama Jepang:

a. Mendapatkan Dukungan Umat Islam

Jepang menyadari bahwa umat Islam adalah kelompok mayoritas di Indonesia dan memiliki pengaruh sosial-politik yang besar. Dengan mendukung pendidikan Islam (seperti memperbolehkan kembali pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah dan membina ulama), Jepang berusaha menarik simpati dan dukungan umat Islam agar tidak memberontak dan justru membantu pemerintahan militer Jepang.[568]

b. Mengurangi Pengaruh Barat dan Belanda

Salah satu agenda utama Jepang selama pendudukan adalah menghapus pengaruh kolonial Belanda dan nilai-nilai Barat, terutama dalam sistem pendidikan. Pendidikan Islam dipromosikan sebagai bentuk pendidikan lokal yang lebih sesuai dengan semangat Pan-Asiaisme dan nilai-nilai Asia Timur Raya yang diusung Jepang. Dengan cara ini, Jepang berusaha menciptakan identitas baru yang anti-Barat dan mendukung hegemoni budaya Jepang, sekaligus menanamkan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang sebelumnya dominan.[569]

c. Mengendalikan dan Memanipulasi Umat Islam

Di balik dukungannya terhadap pendidikan Islam, Jepang sesungguhnya memiliki agenda untuk mengontrol dan memanipulasi umat Islam agar tidak menjadi ancaman. Jepang membentuk lembaga seperti *Shumubu* (kantor urusan agama Islam) yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan aktivitas keagamaan, termasuk kurikulum pesantren dan isi ceramah ulama. Dengan pengawasan ketat ini, Jepang dapat memastikan bahwa pendidikan Islam tidak menjadi sarana

[567] Sofyan, *Sistem Pendidikan Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1900--1942*,2023.

[568] Putri, Yulita, and Abid Nurhuda. *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2023) hlm 78

[569] Lalira, James Edward. *Sejarah, Bahasa dan Budaya Desa Gemeh Dari Cikal Bakal Hingga Pemekaran Wilayah*. Gema Edukasi Mandiri, (2025) hlm 59

perlawanan, tetapi sebaliknya mendukung propaganda dan ideologi militer Jepang.[570]

d. Menyiapkan Kader dan Tenaga Kerja Loyal

Jepang juga memanfaatkan pendidikan Islam untuk mencetak kader-kader muda yang loyal terhadap pemerintahan militer mereka. Dalam situasi Perang Dunia II yang makin sulit, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja dan milisi tambahan dari wilayah jajahannya. Pendidikan dijadikan sarana untuk mendidik generasi muda agar bersedia bekerja dan berjuang demi kepentingan Jepang, termasuk menjadi anggota Heiho atau tenaga pembantu militer. Dalam hal ini, semangat keagamaan dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa disiplin, ketaatan, dan loyalitas kepada Jepang.[571]

e. Mempercepat Pembentukan Negara Boneka

Menjelang akhir masa pendudukan, Jepang mulai menggulirkan janji kemerdekaan sebagai taktik politik untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia. Pendidikan Islam kemudian dimanfaatkan sebagai alat untuk membentuk nasionalisme dalam kerangka yang dapat dikendalikan Jepang. Dengan mengarahkan pendidikan Islam ke dalam visi politik mereka, Jepang berharap dapat mempercepat pembentukan negara boneka Indonesia, yakni negara yang secara formal merdeka namun tetap berada dalam pengaruh dan kendali kekuasaan Jepang.[572]

3. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Jepang Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Pasca-Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih terbuka dibandingkan masa kolonial Belanda. Kebijakan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pasca-kemerdekaan. Salah satu dampak utamanya adalah pengakuan terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Ketika Jepang memberikan ruang bagi lembaga-lembaga ini untuk beroperasi, masyarakat Muslim mulai menyadari

---

[570] Dasopang. "kebijakan harun ar-rasyid dan al-ma'mun dalam pengembangan pendidikan islam." *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan* 2.1 (2025) hlm179-192.

[571] Hikmawati. "*Pendidikan Islam berwawasan multikultural sebagai resolusi konflik pemahaman agama.*" (2024). hlm 67

[572] Rut. Pendudukan Jepang di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(6), .. (2024) hlm 937

pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan sosial dan politik, serta sebagai sarana membina generasi muda. Dukungan terhadap pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah umum juga menjadi langkah awal yang mendorong integrasi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Setelah kemerdekaan, hal ini menjadi dasar kuat bagi dimasukkannya pendidikan agama Islam secara resmi ke dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut memperkuat posisi Islam dalam dunia pendidikan nasional dan memberi ruang bagi pengembangan pendidikan agama secara lebih luas dan terstruktur. [573]

Selama masa pendudukan, para ulama mendapatkan tempat dalam struktur pemerintahan Jepang melalui lembaga seperti Shumubu, yang meskipun digunakan untuk kepentingan politik Jepang, tetap memberikan peluang bagi para tokoh Islam untuk membangun pengaruh di bidang pendidikan. Keterlibatan ulama dalam kebijakan pendidikan selama pendudukan ini kemudian berlanjut pada masa kemerdekaan, di mana banyak dari mereka berperan aktif dalam pendirian lembaga pendidikan Islam formal, termasuk perguruan tinggi Islam seperti IAIN dan UIN.[574]

Di sisi lain, pengalaman di masa pendudukan Jepang memunculkan kesadaran kolektif umat Islam akan pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan dan kemajuan umat. Umat Islam menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sarana keilmuan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pembentukan karakter bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai inisiatif masyarakat untuk membangun madrasah dan sekolah Islam secara swadaya di berbagai daerah pasca-kemerdekaan.[575]

Selama masa pendudukan, umat Islam juga terlibat dalam organisasi-organisasi keagamaan yang secara tidak langsung memperkuat jaringan dan struktur pendidikan Islam. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memperluas peran mereka dalam pengelolaan lembaga pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dan menjadi pelopor dalam pengembangan kurikulum Islam modern. Kebijakan Jepang secara tidak langsung juga mendorong terbentuknya tradisi kemandirian di kalangan lembaga pendidikan Islam. Karena selama masa penjajahan

[573] Huda. "Pendidikan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijakannya." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6.2 (2023) hlm 1249-1256.

[574] H Soemantrie and S Hidayati, *Perkembangan Kurikulum SMA Di Indonesia (Suatu Perspektif Historis Dari Masa Ke Masa)* (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2017).

[575] Latif, Yudi. "Membumikan Islam dan Kebangsaan: Trajektori Pendidikan Islam dalam Pembangunan Karakter Bangsa." *Jurnal Studi Keislaman* vol 8, no. 1 (2018) hlm 76-93.

tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah, lembaga-lembaga seperti pesantren terbiasa mengelola sumber daya sendiri. Semangat kemandirian ini tetap tumbuh bahkan setelah Indonesia merdeka, menjadikan pendidikan Islam lebih tahan terhadap dinamika politik dan ekonomi nasional. [576]

D. KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintah Jepang selama masa penjajahan di Indonesia (1942–1945) memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, Jepang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, yang sebelumnya ditekan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kebijakan ini memungkinkan pendidikan Islam untuk kembali hidup dan berperan penting dalam masyarakat. Selain itu, Jepang membuka kesempatan bagi pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah umum dan mendukung pembentukan organisasi-organisasi Islam seperti Masyumi sebagai wadah formal bagi umat Islam.

Namun, dukungan Jepang terhadap pendidikan Islam bukanlah semata-mata bentuk penghormatan terhadap agama, melainkan strategi politik dan militer untuk memperoleh dukungan umat Islam dan menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Melalui lembaga seperti *Shūmubu* dan pelatihan ideologis kepada guru dan ulama, Jepang berusaha mengendalikan dan mengarahkan pendidikan Islam agar sejalan dengan propaganda mereka, khususnya ideologi Asia Timur Raya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan tidak sepenuhnya netral, tetapi sangat sarat dengan kepentingan politik dan manipulasi ideologi.

Setelah Indonesia merdeka, berbagai kebijakan tersebut meninggalkan warisan penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Di antaranya adalah munculnya kesadaran kolektif umat Islam akan pentingnya pendidikan sebagai alat perjuangan, serta terbentuknya kemandirian lembaga pendidikan Islam. Selain itu, keterlibatan tokoh-tokoh Islam dalam organisasi dan pendidikan selama masa Jepang memberikan pengalaman yang berguna untuk membangun sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

[576] Endrayadi, *Pendidikan Kolonial Di Kota Bandung* Laksbang Pressindo: (2018). Hlm 129-131.

BAB XXII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL KEMERDEKAAN (1945 SD 1950)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia mulai berkembang sejak kedatangan Islam dan berinteraksi dengan masyarakat lokal serta tradisi yang ada. Hal ini kemudian berlanjut hingga membentuk sistem pendidikan yang lebih terstruktur seperti yang kita kenal sekarang.[577] Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam terus mengalami berbagai perubahan. Perubahan ini terlihat jelas pada masa penjajahan. Selama kolonialisasi Belanda, pendidikan Islam mengalami diskriminasi yang signifikan. Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat sebagai upaya untuk mengendalikan kekuatan pribumi yang mereka anggap mengancam. Dengan tujuan untuk memobilisasi Muslim dan nasionalis untuk Perang Asia Timur Raya Jepang, pendidikan di Indonesia dialihkan ke arah militerisme setelah Jepang mengambil alih kendali. Jepang berusaha menjalin hubungan dengan para pemimpin Muslim sepanjang proses ini.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem pendidikan nasional yang diperoleh Belanda dan Jepang masih lemah terutama karena perang revolusi dan kekurangan tenaga pendidik, sehingga pemerintah menetapkan program penghapusan buata huruf sebagai prioritas awal dalam pembangunan pendidikan. Di samping itu, kaum Muslim menutut agar ajaran agama Islam dapat terintegrasi ke dalam sisitem pendidikan nasional mengingat mayoritas penduduk beragama Islam serta pengalaman marginalisasi mata pelajaran agama pada masa kolonial.[578] Sebagai respons, pemimpin negara menetapkan UUD 1945 dan Falsafah Pancasila sebagai landasan Idiil yan mewajibkan setiap warga negara mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama.

Dalam upaya untuk mendidik populasi Muslim, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP) pertama kali merekomendasikan pada 27 Desember 1945, agar pemerintah memfokuskan perhatian dan memberikan dukungan materi kepada madrasah dan pesantren. Selanjutnya, pada tanggal 3 januari 1946 diterbitkan PP No. 1/SD yang menandai resmi

[577] Abdullah, A. *Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia*. Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 1(2). (2013). Hal. 213

[578] Mumtaz, Nadhif Muhammad. "Kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.2 (2022): 414.

berdirinya Kementrian Agama, bertugas menyediakan sarana, prasarana, dan menggaji guru agama di sekolah negeri. Selanjutnya, pada tanggal 2 Desember 1946, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Agama No. 1142/Bhg A dan No. 1285/K-7 menetapkan Pendidikan Agama di Sekolah Rakyat selama dua jam per minggu mulai dari kelas empat.Pemerintah menunjuk dan mendanai guru agama di sekolah-sekolah ini.[579]

Di bawah arahan Drs. Abdullah Sigit dan Ki Hajar Dewantara, Dewan Penasehat Pendidikan Agama Islam didirikan pada tahun 1947 dengan tujuan untuk meningkatkan struktur kurikulum agama dengan mengembangkan pedoman, materi, dan teknik untuk mengajar agama di sekolah-sekolah umum. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pengajaran dan Pendidikan di Sekolah menjadikan pengajaran agama sebagai persyaratan yang jelas di sekolah-sekolah umum pada tahun 1950. Otoritas teknis dibagi antara menteri pendidikan dan menteri agama. Selain itu, Departemen Agama membentuk Jawatan Pendidikan Agama untuk mengelola madrasah dan pesantren secara terpusat, sebagai Upaya integrasi lembaga Islam ke dala sistem nasional yang menghadapi tantangan dualisme kurikulum.[580]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian keputusan, peraturan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait dalam rangka mengatur dan mengelola sistem pendidikan. Menurut Djumhur, kebijakan pendidikan adalah suatu pedoman atau arah dalam pelaksanaan pendidikan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks negara yang baru merdeka, kebijakan pendidikan berperan strategis sebagai instrumen pembentukan identitas nasional dan penguatan karakter bangsa.[581]

[579] Huda, M, et al. Pendidikan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijakannya. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *6*(2), (2023). Hal. 1249–1256

[580] Prabowo, G. Dan Zulkarnain, M. *Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 bagi Pendidikan di Indonesia 1945-1954*. Jurnal Pendidikan, 12(1). (2012). Hal. 36-44

[581] Solichin, A. *Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi*. Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan, Vol. 1(5). Hal. 172

2. Teori Pendidikan Islam

Berdasarkan pelajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, pendidikan Islam adalah proses membina dan mengembangkan potensi manusia. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan orang-orang yang taat, bijaksana, dan berkarakter tinggi, menurut Zakiah Daradjat. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga spiritual dan moral, dengan lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah agama sebagai wadah utamanya.[582]

3. Teori Konsep Pendidikan Islam Dalam Negara

Dalam kajian hubungan agama dan negara, pendidikan Islam sering kali menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional. Abuddin Nata, menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan negara memiliki tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam terhadap pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.[583]

4. Teori Konteks Sejarah Pendidikan Islam Awal Kemerdekaan

Masa awal kemerdekaan (1945–1950) merupakan periode transisi dari penjajahan menuju pembentukan sistem pemerintahan sendiri, termasuk di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan pada masa ini masih dipengaruhi oleh warisan kolonial, namun mulai diarahkan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai nasional dan aspirasi rakyat Indonesia, termasuk umat Islam. Lahirnya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 menjadi momentum penting dalam pengakuan dan pengelolaan pendidikan Islam secara formal oleh negara.[584]

5. Teori Perubahan Sosial dan Pendidikan

Menurut Emile Durkheim, pendidikan adalah alat untuk mentransmisikan norma dan nilai budaya dari satu generasi ke generasi lain, sekaligus sebagai mekanisme perubahan sosial. Dalam masa pasca-kemerdekaan, pendidikan termasuk pendidikan

---

[582] Zakiah Daradjat. *Pendidikan Islam dalam Perspektif: Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat*. (Semarang: Adimas, 2022). Hal. 2

[583] Abuddin Nata. *Filsafat Pendidikan Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003). Hal. 62

[584] Putri Rahayu, "SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SEJARAH KRITIS," *Edu-Riligia*. (2024). Hal. 1–2.

Islam mengalami perubahan signifikan sebagai bagian dari pembangunan jati diri bangsa.[585]

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Saat Permulaan Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan Islam didefinisikan sebagai rangkaian konsep publik dan keputusan formal pemerintah yang menetapkan kerangka hukum, kelembagaan, serta pedoman teknis penyelenggaran pendidikan agama Islam di institusi pendidikan publik (negeri) dan lembaga Islam tradisional seperti madrasah dan pesantren. Kebijakan ini dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif yang menetapkan kerangka hukum, struktur kelembagaan dan pedoman operasioanl bagi penyelenggaraan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.[586]

Tujuan utamanya adalah menyatukan sistem sekolah umum dan lembaga Islam, menghilangkan dualisme kurikulum, serta menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidkan agama yang berkualitas. Secara operasional, kebijakan ini meliputi aspek normatif (undang-undang dan peraturan pemerintah), struktural (pembentukan Kementerian Agama, Majelis Pertibangan Pengajaran Agama Islam), dan mekanisme pendanaan guru agama hingga penyusunan kurikulum bagi madrasah dan pesantren.[587]

Selama masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan Islam mengalami marginalisasi karena kebijakan kolinial yang bersifat sekuler dan diskriminatif serta penolakan sebagian ulama terhadap modern. Pemerintah kolonial menerapkan regulasi yang membatasi ruang gerak madrasah dan pesantren, sehingga lembaga Islam kesulitan berkembang secara formal. Akibatnya akses dan kualitas pendidikan bagi umat Islam tetap rendah, meninggalkan tantangan buta huruf yang besar setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Sementara itu, mayoritas penduduk yang beragama Islam menuntut agar ajaran agama dapat terintegrasi secara resmi ke dalam kurikulum nasional sebagai upaya pemulihan identitas keagamaan pascakolonial.

---

[585] Ibid., Hal. 5

[586] Khumaimah, R. Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, *11*(2), (2021). Hal. 183–191

[587] Cahyanti, E. T. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, *2*(2), (2021). Hal. 181–197

2. Landasan Idiil Pendidikan Islam (1945-1950)

a. Definisi Landasan Idiil

Landasan Idiil adalah pijakan ideologis atau nilai-nilai dasar menjadi dasar yang menjadi sumber cita-cita dan tujuan pendidikan suatu bangsa. Dalam konteks Pendidikan Islam, landasan Idiil mencakup:

1) Landasan Ideal, yakni Pancasila Sila I ”Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menegaskan akidah dan nilai spritual sebagai pijakan utama pendidikan.
2) Landasan Struktural/Konstitusional, yakni UUD 1945 “Pasal 29” yang menjamin kebebasan beragama dan amanat Pasal 31 untuk memajukan pendidikan.[588]
3) Landasan Religius, yakni sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang memberikan kerangka nilai moral dan spiritual dalam setiap proses Pendidikan.[589]

Pada masa awal kemerdekaan, konstitusi Indonesia memperteguh landasan idiil tersebut. Negara secara tegas menjamin dan membela kebebasan setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan agama mereka sesuai dengan keyakinan agama pribadi mereka, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945. Pancasila Menurut Sila I, pendidikan Islam dilaksanakan dengan penekanan pada pengembangan karakter yang berlandaskan pada ketuhanan serta kualitas kognitif.[590]

Landasan ldiil pendidikan Islam pada masa awal kemerderkaan tidak dapat dipisahkan dari landasan ldiil negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila yaitu ”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi dasar pengakuan terhadap peran agama dalam berkehidupan berbangsa, termasuk dalam bidang pendidikan. Menurut Azra dan Umam, landasan idiil pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara, misalnya, menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Setiap orang berhak atas pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan dan melaksanakan sistem pendidikan nasional. Pasal 31 UUD 1945 mendukung inklusi pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan

[588] H. Harmonedi dan M. Zalnur, “Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020). Hal. 309–338

[589] Zulfahman Eldarifai, dkk, “Landasan Ideal dan Landasan Struktural Pendidikan Agama Islam,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 12 (2023). Hal. 1833

[590] Ibid., Hal. 173

nasional. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut pendidikan Islam, pasal ini memberikan landasan bagi pengakuan dan pengembangan berbagai bentuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan Islam.[591]

Menurut Muhaimin, mengemukakan bahwa landasan idill pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan juga mencakup prinsip-prinsip seperti demokratisasi pendidikan, desantralisasi pendidikan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pendidikan. Prinsip-prinsip ini memungkinkan pendidikan Islam untuk berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.[592]

b. Landasan Idiil Nasional

1) Pancasila sebagai Falsafah Negara

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dijadikan landasan ideal bagi seluruh sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam, untuk memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran menanamkan nilai ketuhanan dan kerukunan antar-umat beragama. Ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi juga kerangka filosofis yang membimbing visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam Indonesia.[593]

2) Piagam Jakarta dan UUD 1945

"Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" disebutkan dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945). dalam sila pertama, sebagai bentuk kompromi antara wakil nasionalis dan Islamis. Meskipun frasa tujuh kata tersebut dihapus saat pengesahan UUD pada 18 Agustus 1945, semangat inklusif agama tetap melekat dalam konsep landasan idiil pendidikan Islam yang menjiwai penyusunan kebijakan kurikulum dan struktur madrasah/pesantren pada tahun-tahun awal kemerdekaan.

c. Landasan Idiil Religius

1) Al-Qur’an dan As-Sunnah

Sebagai landasan pokok, Al-Qur’an dan As-Sunnah berfungsi sebagai wahyu dan teladan Nabi Muhammad SAW yang membimbing seluruh aspek pendidikan Islam, mulai dari pembentukan akidah, moral, hingga kecakapan intelektual. Dalam hal ini, keduanya diakui sebagai sumber utama teori dan

[591] Fauzan, A. *Penguatan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional : Analisis Implementasi Pasal 31 UUD 1945*. Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 13(2). (2021). Hal. 45-57

[592] M. A. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020). Hal. 25–28

[593] Wahid, A., dan Hidayat, K. “Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Islam Indonesia”. Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 16(2). (2020). Hal. 132-147

praktik pendidikan Islam, yang menekankan harmonisasi antara dimensi spiritual dan lahiriah peserta didik.[594]

2) Ijtihad dan Pengembangan Nilai

Ijtihad proses penalaran hukum Islam untuk masalah kontemporer dimanfaatkan untuk menafsirkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia pasca-kemerdekaan, termasuk merancang materi ajar dan metode pembelajaran yang kontekstual. Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan Islam tetap dinamis dalam menghadapi tantangan zaman tanpa melewatkan nilai-nilai dasar agama.

3. BPKNIP dan Garis Besar Pendidikan Nasional (27 Desember 1945)

Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Pada tanggal 27 desemeber 1946, BPKNIP mengeluarkan rekomendasi tentang pendidikan dan pengajaran yang menjadi garis besar pendidikan nasional. Menurut Hidayat, rekomendasi ini secara eksplisit mengakui posisi madrasah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang perlu mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

Ada beberapa isi rekomendasi dari BPKNIP tanggal 27 Desember 1945 yang berkaitan dengan pendidikan Islam antara lain:

a. Pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah selama jam sekolah reguler.
b. Pada dasarnya, pesantren dan madrasah adalah sumber dan instrumen. Karena pendidikan dan pencerahan masyarakat umum sangat tertanam dalam budaya Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dan dukungan dalam bentuk arahan dan bantuan nyata. Karena pendidikan dan pencerahan masyarakat umum sangat tertanam dalam budaya Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian serius dan dukungan dalam bentuk arahan dan bantuan nyata. Kualitas pengajaran di madrasah dan langgar sedang ditingkatkan.
c. Kualitas pengajaran di madrasah dan Langgar sedang ditingkatkan.
d. Pelatihan dan Kualifikasi Guru Agama
e. Pengajaran agama di semua sekolah

[594] Rahman, F. *Landasan Filosofis Pendidikan Islam*. Tarim: Jurnal Dasar Pendidikan Islam, 2(1), (2024). Hal. 14-22

Karena lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren kini secara resmi diakui sebagai komponen dari sistem pendidikan nasional untuk pertama kalinya, para analis mengatakan bahwa keputusan BPKNIP ini merupakan titik balik yang signifikan dalam sejarah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.Selain itu, saran ini mewakili perubahan paradigma dari kecenderungan era kolonial yang mendiskriminasi lembaga pendidikan Islam.[595]

Walaupun rekomendasi BPKNIP memiliki signifikansi yang penting. Mencatat bahwa implementasi rekomendasi ini menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan keadaan politik yang tidak stabil pada awal kemerdekaan. Namun demikian, rekomendasi ini tetap menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam pada periode selanjutnya.

Adapun dokumen yang memuat beberapa poin penting sebagai pedoman dasar pendidikan nasional, sebagai berikut:

a. Reformasi Pendidikan Kolonial: Menekankan pentingnya menggantikan sistem pendidikan nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 2945.[596]
b. Kesatuan Sistem Sekolah: Mengusulkan pembentukan suatu tipe sekolah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna memperkuat kesatuan bangsa.
c. Metode Pendidikan: Mendorong penerapan metode “sekolah kerja” yang menekankan pada praktik dan keterampilan dalam proses belajar-mengajar.[597]
d. Pendidikan Agama: Mengusulkan agar pendidikan agama memperoleh tempat yang sepatutnya dalam kurikulum, dengan memberi perhatian khusus kepada madrasah yang sudah berakar kuat dalam masyarakat, serta menyediakan dukungan dan bantuan materiil dari pemerintah.[598]
e. Wajib Belajar: Mengusulkan pelaksanaan wajib belajar selama enam tahun secara bertahap, dengan target bahwa dalam waktu sepuluh tahun, setiap anak Indonesia sudah bersekolah.

[595] Kayan Swastika. *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950*. Jurnal Pendidikan dan Humaniora, No. 1. (2016). Hal. 39-51

[596] Tilaar, H. “Transformasi Sistem Pendidikan Nasional: Membangun Pendidikan yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila”. Jakarta: Rineka Cipta, (2020). Hal. 78-92

[597] Suprijono, A. dan Wibowo, S. "Praktik Pembelajaran Aktif: Membaca Sekolah Kerja dalam Konteks Pendidikan Indonesia". Jurnal Inovasi Pendidikan, 15(2), (2021). Hal. 234-249

[598] Azra, A. dan Thaha, I. "Revitalisasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional: Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Materiil". Jurnal Pendidikan Islam, 23(1),(2022). Hal. 45-62

f. Gratis Biaya Sekolah Dasar: Menyarankan agar pendidikan di sekolah dasar tidak dikenakan biaya, demi memastikan akses pendidikan yang merata untuk semua anak.

BPKNIP sebagai Badan Pekerja KNIP, memegang peran kunci dalam merumuskan Garis Besar Pendidikan Nasional pada 27 Desember 1945. Rekomendasi serta dokumentasi tersebut menegaskan pentingnya peran pendidikan agama, khususnya madrasah dan pesantren di dalam sisitem pendidikan nasional,menetapkan standar pengajaran agama disekolah umum, serta memastikan dukungan negara terhadap lembaga dan pendidik agama.[599]

4. Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam pada Permulaan Kemerdekaan (1945-1950)

Periode awal kemerdekaan Indonesia (1945-1950) merupakan masa yang sangat krusial bagi pembentukan identitas negara, termasuk dalam hal kebijakan pendidikan. Meski dalam situasi yang penuh tantangan akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Indonesia tetap menaruh perhatian pada pendidikan, termasuk pendidikan Islam yang memiliki akar kuat di masyarakat. Kebijakan terhadap pendidikan Islam pada masa ini menjadi fondasi penting untuk kemajuan pendidikan Islam di Indonesia pada waktu yang akan datang.[600]

a. Landasan Konstitusional dan Filosofis

1) Pancasila dengan UUD 1945 sebagai Dasar: Ada hubungan yang kuat antara kurikulum pendidikan Islam awal dan Pancasila, dasar filosofis negara, khususnya prinsip pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bagaimanapun, menegaskan bahwa "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Fokus pemerintah pada pendidikan Islam didasarkan pada klausul konstitusi ini.[601]

---

[599] Ismail. *Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1950 Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelnggaraan Pendidikan Islam*. Kabilah: Journal of Social Community 1, no. (2016). Hal. 139-169

[600] Asroha, Hanun. *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Kontestasi Ideologis dan Moderasi*. Jakarta: Grup Prenadamedia, (2020). Hal. 87-89

[601] Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, (2021). Hal. 112-115

2) Pengaruh Tokoh-Tokoh Nasional Muslim: Tokoh-Tokoh nasional muslim seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan. Dalam kapasitas mereka sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mereka menolak penyertaan pelajaran agama dalam sistem pendidikan negara.[602]

b. Kebijakan Struktural dan Kelembagaan

1) Pembentukan Kementerian Agama: Salah satu kebijakan paling signifikan terkait pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan adalah didirikan sebagai Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1946. Pembentukan deklarasi ini merupakan pengakuan negara terhadap eksistensi pendidikan Islam. Dibawah kepemimpinan HM Rasidi sebagai Menteri Agama pertama, kementerian ini diberi tugas untuk mengelola masalah-masalah keagamaan, termasuk pendidikan Islam.

2) Stukturisasi Pendidikan Islam dalam Sistem Nasional Kementerian Agama membentuk Bagian Pendidikan Agama yang bertugas, sebagai berikut:

a) Menawarkan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum dan swasta.

b) Mendidik madrasah tentang topik-topik umum.

c) Melaksanakan Pendidikan Hakim Islam (PHIN) dan Pendidikan Guru Agama (PGA).

Upaya pemerintah untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional sambil mempertahankan fitur uniknya ditunjukkan oleh kebijakan ini.[603]

3) Pengakuan dan Perhatian Terhadap Institusi Pendidikan Islam Tradisional.

[602] Rohman, F. *Perjuangan Tokoh Muslim dalam Merumuskan Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 5(2), (2021). Hal. 67-79

[603] Karel, A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: PPIM IAIN Jakarta. (2020). Hal. 35-40

a) Kebijakan terhadap Pesantren dan Madrasah: Pemerintah memberikan pengakuan terhadap eksistensi pesantren dan madrasah yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren dan madrasah, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan materi dari pemerintah pada tahun 1946, menurut Kementerian Agama. Namun implementasi kebijakan ini masih terbatas karena kondisi keuangan negara yang belum stabil.
b) Integrasi Pengetahuan Umum di Madrasah: Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong madrasah untuk mengintegrasikan pengetahuan umum ke dalam kurikulumnya. Meskipun demikian, kebijakan ini masih bersifat himbauan dan belum menjadi kewajiban, mengingat kondisi madrasah yang beragam dan keterbatasan sumber daya.[604]

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan (1945-1950) menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi pendidikan Islam bagi bangsa Indonesia. Meskipun ada hambatan-hambatan ini, pemerintah masih berupaya untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional sambil mempertahankan fitur-fitur uniknya. Fondasi untuk pengembangan pendidikan Islam selanjutnya di Indonesia telah diletakkan oleh kebijakan-kebijakan penting seperti pembentukan Kementerian Agama, penerimaan lembaga pendidikan Islam tradisional, dan penggabungan pengajaran agama ke dalam sekolah-sekolah umum.

5. Tantangan dan Hambatan Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Awal Kemerdekaan

Pasca Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat dalam membangun berbagai tantangan berat dalam membangun fondasi negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan Islam yang telah tertanam dalam tradisi masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan menghadapi situasi kompleks dalam proses integrasi ke dalam sistem pendidikan. Menurut Azra, periode

[604] Anam, Saeful. *Karakteristik dan Siste Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau dan Meunasah di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2). (2021). Hal. 25-35

1945-1950 merupakan fase krusial yang menenteukan arah dan posisi pendidikan dalam struktur negara Indonesia yang baru merdeka.[605]

Adapun beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam di Awal Kemerdekaan, sebagai berikut:

a. Tantangan Politik-Keamanan

1) Perang Kemerdekaan dan Instabilitas Politik

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan adalah situasi perang mempertahankan kemerdekaan. Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) menciptakan ketidakstabilan politik yang mengakibatkan banyak kebijakan pendidikan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Selama periode ini pemerintah Indonesia sering berpindah-pindah lokasi dan fokus pada upaya mempertahankan kedaulatan politik, sehingga isu-isu pendidikan Islam, mau tidak mau menjadi prioritas sekunder.[606]

2) Pertentangan Ideologis tentang Dasar Negara

Pertentangan ideologi mengenai dasar negara juga memberikan dampak signifikan pada kebijakan pendidikan Islam. Menurut Djamil, meskipun Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, penafsirannya terkait hubungan negara-agama tetap menjadi area kontestasi antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam. Perdebatan ini mempengaruhi kebijakan pendidikan, termasuk sejauh mana pendidikan Isla dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional.[607]

b. Tantangan Struktural-Administratif

1) Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Kementerian Agama yang dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 menghadapi tantangan besar dalam membangun kapasitas kelembagaan untuk mengelola pendidikan Islam secara efektif. Daulay menjelaskan bahwa pada masa awal pembentukannya, Kementerian Agama belum memiliki

[605] Azra, Azyumardi. *Jejak-Jejak Jaringan Pendidikan Islam Di Nusantara: Dari Masa Kolonial Hingga Indonesia Modern*. (Jakarta: Kencana, 2021). Hal. 165-173

[606] Rahim, Husni. *Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia: Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2023). Hal. 34-42

[607] Djamil, Abdul. *Perjuangan Ideologi Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Tentang Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari*. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 5(1). (2020). Hal. 50-61

struktur organisasi yang mapan, sistem administrasi yang efisien, maupun sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangan pendidikan Islam di seluruh Indonesia.[608]

2) Dualisme Pengelolaan Pendidikan

Pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan telah menciptakan dualisme dalam tata kelola sistem pendidikan nasional, yang pada gilirannya menjadi tantangan dalam mewujudkan keselarasan kebijakan pendidikan Siregar menganalisis bahwa perpecahan ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan perhatian khusus pada pendidikan Islam, pada praktiknya menciptakan masalah koordinasi, standardisasi, dan integrasi antara kedua sistem pendidikan.

c) Tantangan Finansial Dan Sumber Daya

1) Keterbatasan Anggaran Pendidikan

Keterbatasan anggaran pendidikan merupakan hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan. Sebagai negara yang baru merdeka dan tengah berjuang mempertahankan kekayaannya, Indonesia menghadapi krisis finansial yang akut. Maksum mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk kepentingan pemeliharaan dan stabilitas politik, sehingga sektor pendidikan, termasuk pendidikan Islam, mendapatkan porsi yang sangat terbatas.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan sistem pendidikan Islam modern. Menurut Hasan menjelaskan bahwa pada masa awal kemerdekaan, sebagian besar tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam masih menggunakan metode tradisional dan belum memiliki kualifikasi formal yang diperlukan untuk mengintegrasikan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah.[609]

---

[608] Ibid., Hal. 62

[609] Hasan, Noorhaidi. *Pendidikan Islam di Indonesia : Kontesiasi, Dinamika, dan Masa Depan*. (Yogyakarta: Muhammadiyah, 2022). Hal. 58

d) Tantangan Infrastruktur dan Fasilitas

1) Kerusakan Akibat Perang

Periode revolusi kemerdekaan menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan yang signifikan di berbagai daerah. Menurut Lukens-Bull mengungkapkan bahwa banyak gedung sekolah dan madrasah yang rusak atau digunakan sebagai barak militer selama perang kemerdekaan. Situasi ini memaksa banyak lembaga pendidikan Islam beroperasi di bawah kondisi fisik yang sangat terbatas.

2) Kesenjangan Infrastruktur antara Daerah

Kesenjangan ini dalam pendidikan yang signifikan antara Jawa dan luar Jawa, serta antara daerah perkotaan dan perdesaan. Lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil dan pendesaan umumnya menghadapi kondisi infrastruktur yang jauh lebih buruk dibandingkan yang berada di perkotaan. Kesenjangan ini menyulitkan penerapan standar pendidikan yang seragam dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan telah berhasil meletakan fondasi penting bagi perkembangan pendidikan Islam dalam konteks Indonesia merdeka. Pengakuan formal terhadap eksistensi pendidikan Islam dan integrasinya ke dalam sistem pendidikan nasional menjadi modal berharga bagi perkembangan pendidikan Islam pada masa-masa selanjutnya. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman sejarah ini penting unuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan Islam yang lebih efektif, inklusif dan berkuaitas di Indonesia.[610]

`

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam modern di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada awal kemerdekaan, banyak tenaga pengajar di lembaga pendidikan Islam yang masih mengandalkan metode tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui pendekatan pengajaran agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

[610] Baharuddin, H., dan Hasan, MN (2022). *Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia: Fondasi Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer*. Jurnal Tatsqif, 20(2). (2022). Hal. 189-206

Keterbatasan kualifikasi formal di kalangan pengajar juga menjadi masalah utama. Tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, sulit bagi mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan siswa untuk bersaing di dunia yang semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan bagi tenaga pengajar menjadi langkah krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif.

Selain itu, tantangan ini juga mencerminkan perlunya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan program pelatihan yang sesuai. Dengan adanya dukungan yang tepat, diharapkan para pembelajar dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan relevan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan Islam, tetapi juga memperkuat lembaga pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, untuk mencapai sistem pendidikan Islam yang modern dan berkualitas, perlu ada upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi tenaga pengajar. Dengan memperhatikan aspek kualifikasi dan metode pengajaran, diharapkan pendidikan Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat.

BAB XXIII
KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ORDE LAMA

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional, terutama dalam membentuk moral, etika, serta wawasan keagamaan masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana mentransfer ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan kepribadian bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai jauh sebelum bangsa ini merdeka. Lembaga-lembaga seperti pesantren dan surau menjadi pusat pendidikan, sosial, dan kebudayaan masyarakat Muslim Nusantara. Namun, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tantangan baru pun muncul, termasuk bagaimana pendidikan Islam diposisikan dalam kerangka negara kesatuan yang sedang membangun sistem pemerintahan dan pendidikannya sendiri. Masa Orde Lama yang berlangsung dari 1945 hingga 1966, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya negara mengatur dan mengembangkan sistem pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam.[611]

Pada masa Orde Lama, Indonesia tengah berada dalam situasi politik yang belum stabil. Pemerintah menghadapi tantangan besar, mulai dari konsolidasi politik, pergolakan ideologi, hingga pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam situasi seperti itu, pendidikan menjadi alat penting untuk menanamkan semangat nasionalisme dan pembentukan identitas kebangsaan. Namun, dalam praktiknya, terjadi tarik-menarik antara berbagai kepentingan ideologis: nasionalisme sekuler, agama, dan komunisme. Ketiganya kemudian diakomodasi dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang menjadi dasar politik pemerintahan Soekarno.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari tantangan. Masih banyak lembaga pendidikan Islam yang dianggap inferior dibanding sekolah umum. Infrastruktur,

[611]Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 45.

kurikulum, dan kualitas pengajar menjadi isu yang belum terselesaikan. Selain itu, dualisme sistem pendidikan antara jalur pendidikan umum dan pendidikan agama menimbulkan kesenjangan yang cukup mencolok. Belum lagi tekanan politik dan keterbatasan anggaran yang membuat pendidikan Islam harus berjuang lebih keras untuk dapat berdiri sejajar dengan pendidikan umum.[612]

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Publik Dalam Pendidikan

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan publik mencakup segala bentuk peraturan, undang-undang, dan kebijakan negara yang berhubungan langsung dengan sistem pendidikan, termasuk kurikulum, pendanaan, pengangkatan guru, pengelolaan lembaga pendidikan, hingga pengakuan terhadap institusi keagamaan seperti madrasah dan pesantren.[613]

2. Teori Historis Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki akar yang panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari masa kerajaan Islam, masa kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Pendekatan historis memandang pendidikan Islam bukan sekadar aktivitas keagamaan, melainkan sebagai bagian dari proses peradaban dan perjuangan umat Islam dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya di tengah perubahan zaman.

Pendekatan ini juga membantu memahami mengapa umat Islam begitu gigih memperjuangkan mata pelajaran agama di sekolah umum, pengakuan madrasah, dan pendirian institusi pendidikan tinggi Islam. Semua ini adalah hasil dari perjalanan panjang pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan struktural dan ideologis yang datang dari negara dan sistem kekuasaan.[614]

---

[612]Dedy Irfan dan Ilyas Supena, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), Hlm 88.

[613]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 122.

[614]Hasan Asari, *Pendidikan Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), Hlm 97.

3. Teori Pendekatan Studi Islam Secara Multidisipliner

Dalam kajian Pendekatan Studi Islam dalam Perspektif Islam, pendidikan Islam dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan: teologis-normatif, historis, filosofis, sosiologis, hingga antropologis. Pendekatan ini penting karena pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan dogma agama, tetapi juga membentuk identitas sosial, budaya, bahkan politik umat Islam di Indonesia.

Pendekatan teologis-normatif menekankan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang taat kepada Allah, berakhlak mulia, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu menciptakan masyarakat beragama yang bermoral dan berpengetahuan.

Sementara itu, pendekatan sosiologis melihat pendidikan Islam sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur masyarakat, kekuasaan, dan budaya. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam harus bernegosiasi dengan kekuatan negara yang cenderung hegemonik. Negara tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga regulator yang menentukan mana pendidikan yang layak diakui dan mana yang tidak. Oleh karena itu, pendidikan Islam kerap berada dalam posisi subordinat dan harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan legal.[615]

C. PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial-Politik Indonesia pada Masa Orde Lama

a. Ketidakstabilan Politik dan Sistem Pemerintahan Pusat

Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan parlementer yang diwarnai oleh instabilitas politik. Antara tahun 1945 hingga 1959, Indonesia mengalami pergantian kabinet yang sangat sering, dengan lebih dari tujuh belas kabinet yang terbentuk dalam rentang waktu tersebut.[1] Kondisi ini menyebabkan kebijakan nasional, termasuk kebijakan pendidikan, berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Dalam sistem parlementer, partai-partai politik memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan, termasuk pendidikan. Namun,

[615]Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Depdiknas, 2004), Hlm 60.

dominasi partai politik justru menghambat pembentukan sistem pendidikan yang stabil dan berkelanjutan.

Situasi berubah setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya sistem parlementer dan kembalinya UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Melalui sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan melemahkan posisi partai politik.[2] Dalam kerangka Demokrasi Terpimpin ini, negara menjadi aktor utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, yang diarahkan untuk mendukung ideologi negara. Sayangnya, pendidikan Islam tidak menjadi bagian prioritas dalam agenda nasional tersebut.[616]

b. Dominasi Ideologi Nasakom dan Marginalisasi Islam

Presiden Soekarno memperkenalkan konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai bentuk kompromi politik antara kekuatan nasionalis, Islamis, dan komunis. Namun, dalam praktiknya, konsep ini lebih banyak mengakomodasi kekuatan nasionalis dan komunis, sementara kekuatan Islam cenderung dipinggirkan.[3] Ideologi negara yang condong pada sosialisme menyebabkan berbagai kebijakan pembangunan lebih diarahkan untuk menciptakan masyarakat revolusioner dalam kerangka sosialistik. Nilai-nilai agama dianggap sebagai urusan pribadi, dan tidak perlu terlalu dominan dalam ranah publik seperti pendidikan nasional.

Dalam bidang pendidikan, pengaruh sosialisme terlihat dalam kurikulum yang menekankan pembentukan "manusia revolusioner" ketimbang "manusia religius." Pendidikan agama tidak dihapus, namun tidak diberi tempat yang sentral. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren tidak mendapatkan dukungan yang seimbang dari negara, baik dalam bentuk dana maupun kebijakan kelembagaan.[4] Bahkan, dalam beberapa kasus, madrasah harus berjuang sendiri untuk mendapat pengakuan formal dari pemerintah.[617]

c. Respons Umat Islam dan Upaya Perlawanan Kultural

Meskipun menghadapi tekanan politik dan marginalisasi, umat Islam Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS) terus berjuang untuk

[616]Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm 75.

[617]Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), Hlm 109.

mempertahankan eksistensi pendidikan Islam di tengah gempuran ideologi negara. NU, misalnya, tetap mengembangkan jaringan pesantren tradisional, sementara Muhammadiyah berfokus pada pendidikan modern berbasis Islam melalui sekolah-sekolah formal.[618]

Upaya umat Islam ini menunjukkan bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi negara dalam dunia pendidikan. Namun, perjuangan ini tidak selalu mulus. Adanya tuduhan bahwa organisasi Islam konservatif cenderung anti-revolusi membuat beberapa lembaga pendidikan Islam dicurigai sebagai tempat persemaian ideologi "reaksioner.".[619] Akibatnya, posisi pendidikan Islam semakin terdesak secara politis dan kelembagaan. Walau demikian, ketahanan umat Islam dalam mempertahankan pendidikan keagamaan menjadi bukti vitalitas dan kemandirian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Berdasarkan dengan demikian, kondisi sosial-politik pada masa Orde Lama sangat mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk terhadap pendidikan Islam. Ketidakstabilan politik, sentralisasi kekuasaan, dominasi ideologi nasionalisme dan sosialisme, serta marginalisasi umat Islam menjadi tantangan besar dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

a. Kebijakan dalam Kurikulum

Pada masa Orde Lama, kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, banyak dipengaruhi oleh visi nasionalisme dan semangat integrasi bangsa. Salah satu bidang strategis yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengaturan kurikulum pendidikan. Pemerintah berupaya agar sistem pendidikan Islam tidak bertentangan dengan cita-cita pendidikan nasional, sehingga muncul kebijakan penyeragaman kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan agama dengan memasukkan materi-materi umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah. Hal ini bertujuan untuk menjadikan lulusan madrasah memiliki kompetensi serupa dengan sekolah umum.

---

[618]Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 34.

[619]Prof. Dr. H. Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Menangkap Nilai-nilai Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm 78.

Pemerintah juga mulai mengarahkan agar kurikulum madrasah disesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional. Langkah ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang terpadu. Kurikulum madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga mencakup mata pelajaran umum. Melalui kebijakan ini, pendidikan Islam diupayakan untuk tidak menjadi eksklusif, tetapi bisa mencetak lulusan yang mampu berkontribusi di berbagai sektor kehidupan masyarakat.[620]

Meskipun kebijakan ini terlihat positif, penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Banyak lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti pesantren, mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum nasional karena keterbatasan sumber daya dan ketiadaan pelatihan guru dalam mata pelajaran umum. Hal ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penerapan kebijakan kurikulum yang bersifat top-down dari pemerintah pusat.[621]

b. Kebijakan Pengakuan dan Legalisasi Madrasah

Pemerintah pada masa Orde Lama mulai memperhatikan posisi hukum lembaga-lembaga pendidikan Islam. Melalui Departemen Agama, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Salah satu kebijakan penting adalah adanya pemberian status "diakui" atau "disamakan" kepada madrasah yang telah memenuhi syarat kurikulum dan tenaga pengajar. Kebijakan ini memungkinkan lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di lembaga keislaman maupun di universitas umum.

Pengakuan legal ini penting karena menempatkan madrasah dalam posisi yang lebih setara dengan sekolah umum, walaupun dalam praktiknya tetap terdapat diskriminasi administratif dan anggaran. Banyak madrasah yang tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah karena belum memenuhi kriteria tertentu. Namun, secara politis, ini merupakan langkah penting untuk menyatukan kembali sistem pendidikan Islam yang sebelumnya tercerai-berai pasca kemerdekaan.[622]

---

[620]H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm 130.

[621]Mohammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 2008), Hlm 54.

[622]M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Hlm 91.

c. Kebijakan Pengawasan dan Standardisasi Lembaga Pendidikan Islam

Selain kurikulum dan pengakuan legal, pemerintah juga memberlakukan kebijakan pengawasan dan standardisasi terhadap lembaga pendidikan Islam. Melalui Kementerian Agama, pemerintah mengatur sistem akreditasi dan pengawasan terhadap materi ajar, metode pengajaran, serta kelayakan tenaga pengajar. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar pendidikan Islam tidak menyimpang dari tujuan negara serta menekan munculnya paham-paham radikal atau anti-negara.[623]

Namun, kebijakan pengawasan ini juga mengundang kritik, terutama dari kalangan pesantren dan madrasah tradisional, yang menilai bahwa negara terlalu ikut campur dalam urusan pendidikan Islam. Mereka khawatir adanya upaya sekularisasi pendidikan Islam secara sistematis melalui proses standarisasi. Ketegangan ini merupakan salah satu dinamika penting dalam perjalanan kebijakan pendidikan Islam selama Orde Lama.

d. Kebijakan Dukungan Infrastruktur dan Pembiayaan

Kebijakan lain yang dijalankan pemerintah adalah memberikan bantuan infrastruktur kepada lembaga pendidikan Islam, meskipun masih sangat terbatas. Bantuan ini meliputi pembangunan ruang kelas, penyediaan buku, dan dalam kasus tertentu, gaji guru. Namun karena keterbatasan APBN dan prioritas pembangunan yang lebih fokus pada sektor industri dan militer, bantuan kepada lembaga Islam seringkali tidak merata dan tidak mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari.

Hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antara madrasah yang memperoleh bantuan dengan yang tidak. Di sisi lain, banyak lembaga Islam tetap bertahan secara mandiri, bergantung pada dana masyarakat atau swadaya umat. Realitas ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah Orde Lama dalam mendukung pendidikan Islam secara substantif dan menyeluruh.[624]

---

[623]Soegarda Poerbakawatja dan Harsojo, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: CV. Remadja Karya, 1981), Hlm 43.

[624]Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Hlm 100.

3. Tantangan dan Dampak Kebijakan Lembaga Pendidikan islam di Indonesia pada Masa Orde Lama

a. Tantangan Struktural dan Administratif

Pada masa Orde Lama, sistem pendidikan nasional masih dalam proses konsolidasi pasca-kemerdekaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam adalah masalah struktur dan administrasi kelembagaan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan sekolah agama nonformal seringkali tidak memiliki kejelasan status hukum. Mereka kurang mendapat perhatian dalam hal legalitas formal, terutama karena belum semuanya terdaftar atau diakui secara administratif oleh negara. Situasi ini mengakibatkan banyak madrasah tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan terisolasi dari kebijakan pendidikan nasional yang tengah berkembang saat itu.

Kesulitan administrasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pendataan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ketika pemerintah mulai menyusun sistem pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan Islam tertinggal dari sekolah-sekolah negeri karena sistem administrasi mereka dinilai tidak memenuhi standar birokrasi pemerintah. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian dokumen, kurangnya tenaga administrasi profesional, serta sistem manajemen yang masih tradisional menjadi hambatan utama dalam proses legalisasi dan pembinaan lembaga pendidikan Islam.[625]

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendidikan

Masalah berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Lama yang mengalami kesulitan mendapatkan guru-guru berkualitas, terutama untuk mata pelajaran umum. Para pengajar lebih banyak berasal dari kalangan kiai atau ustadz lokal yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal tinggi. Sementara itu, kurikulum nasional mulai mensyaratkan penguasaan ilmu umum yang mengharuskan adanya guru-guru lulusan lembaga pendidikan tinggi .

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses santri dan guru terhadap pendidikan tinggi. Banyak pesantren dan madrasah belum mampu mengirimkan kadernya untuk melanjutkan studi ke tingkat sarjana, sehingga terjadi stagnasi dalam hal inovasi pendidikan. Selain itu, sarana fisik seperti ruang kelas,

[625]Rahmat Hidayat, "Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama", *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 2017, Hlm 155–170.

perpustakaan, dan laboratorium belum tersedia secara memadai. Akibatnya, proses pembelajaran berlangsung dalam keterbatasan fasilitas yang kurang mendukung mutu pendidikan .[626]

c. Tantangan Ideologis dan Ketegangan dengan Negara

Hubungan antara negara dan lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Lama tidak selalu harmonis. Pemerintah, terutama di bawah pengaruh ideologi nasionalisme sekuler, cenderung mencurigai lembaga-lembaga Islam sebagai basis oposisi politik. Beberapa tokoh pendidikan Islam yang aktif dalam partai politik Islam seperti Masyumi menjadi sasaran politik represif. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam berada dalam tekanan ideologis dan diawasi ketat oleh pemerintah.

Upaya negara untuk menyeragamkan sistem pendidikan melalui kurikulum nasional juga sering dipandang sebagai bentuk intervensi yang mengancam independensi pendidikan Islam. Banyak tokoh pesantren menolak campur tangan negara yang dianggap ingin melemahkan identitas keislaman lembaga mereka. Ketegangan ini menimbulkan resistensi terhadap program-program pemerintah, termasuk dalam hal pelatihan guru, penyeragaman mata pelajaran, dan sistem evaluasi nasional.[627]

d. Ketidakseimbangan antara Tradisi dan Modernisasi

Pendidikan Islam selama Orde Lama dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi. Di satu sisi, pesantren dan madrasah ingin mempertahankan kurikulum berbasis kitab kuning dan sistem halaqah yang menjadi ciri khasnya. Di sisi lain, perkembangan zaman menuntut lembaga pendidikan untuk mulai mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan teknologi dalam kurikulumnya.

Namun, banyak pesantren yang tidak siap untuk melakukan modernisasi karena keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pendidik yang memahami ilmu umum, dan ketakutan akan hilangnya otentisitas nilai-nilai Islam. Modernisasi juga dipandang sebagai jalan yang dapat membuka peluang sekularisasi pendidikan Islam. Padahal, jika dikelola dengan baik, proses modernisasi justru bisa

[626]Lestari, Rina. "Pendidikan Islam dan Tantangannya di Era Demokrasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(1), 2020, Hlm 23–35.

[627]Nurhasan, A. "Dinamika Politik Pendidikan pada Masa Orde Lama", *Jurnal Sejarah Pendidikan*, 5(2), 2019, Hlm 45–60.

memperkuat daya saing pendidikan Islam tanpa harus mengorbankan substansi keislaman.

e. Dampak Positif: Integrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

Meski menghadapi banyak tantangan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama turut membuka jalan bagi integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah secara bertahap mengakui eksistensi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal. Pada tahun 1951, melalui SK Menteri Agama, madrasah mulai diberikan status formal meskipun belum setara secara anggaran dan fasilitas dengan sekolah umum.

Integrasi ini memberi dampak positif berupa terbukanya peluang bagi lulusan madrasah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Pengakuan terhadap ijazah madrasah juga memungkinkan siswa untuk mengikuti ujian negara dan masuk ke dunia kerja formal. Proses ini menandai awal penting dalam perjalanan pendidikan Islam menuju profesionalisme dan legitimasi dalam sistem nasional.[628]

D. KESIMPULAN

Dapat penulis analisis bahwa kondisi sosial-politik Indonesia pada masa Orde Lama memberikan tantangan besar bagi pendidikan Islam. Dalam suasana politik yang didominasi oleh ideologi Nasakom, pendidikan Islam berusaha mempertahankan eksistensinya di tengah tekanan ideologi nasionalisme sekuler dan komunisme yang kuat. Pendidikan Islam tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan formal di tengah dinamika politik yang seringkali tidak menguntungkan.

Dapat penulis analisis bahwa kebijakan pemerintah orede lama akhirnya mengambil langkah-langkah penting dengan mengeluarkan kebijakan pengakuan madrasah, pemberlakuan pelajaran agama di sekolah umum, pengangkatan guru agama menjadi PNS, serta pendirian PTAIN. Kebijakan-kebijakan ini menandai awal integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, walaupun implementasinya masih menemui berbagai hambatan.

[628]Fitriyah, Siti. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 7(1), 2018, Hlm 67–80.

Dapat penulis analisis bahwa tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam meliputi dualisme sistem pendidikan, keterbatasan fasilitas, serta tekanan ideologis. Meski demikian, pendidikan Islam mampu bertahan dan berkembang, menjadi dasar penting bagi pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, (2018) Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Jepang. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Abbas, Siti Aisyah, and Nur Rahma Asnawi, 'Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sumatera (Suatu Kajian Terhadap Tokoh Dan Lembaganya)', ASH-SHAHABAH: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 6.1 (2020), pp. 1–15

Abbudin Nata, (2016), Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana,

Abdul Bustami, (2017), Strategi Pendidikan Islam dalam Menghadapi Penjajahan. (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Abdul Karim Bangura. (2021). Colonial Education and the Changing Role of Islam in the Colonized World. New York: Routledge.

Abdullah, Irwan. "Transformasi Pendidikan Islam dan Pengaruhnya terhadap Peradaban Kawasan Melayu." Jurnal Sosial Budaya, Vol. 13, No. 1 (2021):

Abdullah, M. A. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang: Pengaruhnya terhadap Masyarakat Jawa. Jurnal Sejarah Pendidikan.

Abdullah, Nurdin dan Rahmawati Basri. (2021) Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Memengaruhi Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore Abad XVII-XVIII. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 9, no. 1: 124-142.

Abdurrahman, D., & Hasyim, M. (2016). Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdurrahman, S. (2020). Islamisasi di Kutai Kartanegara dan Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Identitas Sosial. Jurnal Budaya dan Pendidikan Islam, 4(2), 112–127.

Abidin, Muhammad Zainal dan Nurfadilah Rahman. (2022), Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore terhadap Struktur Sosial Masyarakat: Analisis Historis-Sosiologis. Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam 8, no. 2: 135-152.

Abidin, Muzakkir. (2022), Strategi Kebijakan Sultan Tidore dalam Mempertahankan Tradisi Pendidikan Islam di Tengah Kolonialisme. Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam 7, no. 1:95-112.

Abuddin N. (2003). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Abuddin Nata, (2020), Pendidikan Islam Di era milineal, Jakarta, Kencana

Achmad Syafirizal. (2015) “Sejarah Islam Nusantara.” Islamuna: Jurnal Studi Islam 2, no. 2

Achmad, Fatoni, ‘Filosofi Pendidikan Islam: Membentuk Jiwa Anak Usia Dini Sebagai Cerminan Fitrah Dan Akhlak Mulia’, Jurnal Ilmiah Cahaya Paud, 6.2 (2024), pp. 188–206

Adam. (2023) "Islam Melayu dan Islam Jawa: Studi Komparatif Akulturasi Islam dan Kebudayaan dalam Perspektif Sejarah." Muslim Heritage 8.1

Affandi, Faisal, and Melda Diana Nasution, ‘ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM’, Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif, 1.1 (2023)

Afidah, Nur. (2021), "Perkembangan Islam pada Masa Kerajaan Demak." Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA) 1.1

Agus Sunyoto.(2014) Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo Sebagai Fakta Sejarah. Yogyakarta: Pustaka Alvabet.

Agus Sutiyono. (2014) “Sketsa Pendidikan Humanis Religius.” Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan 14, no. April.

Agusutang Bahaking Rama, (2023) Pendidikan Islam Masa Penjajahan, Kemerdekaan, dan Dinamika Kebijaksanaan. PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Vol.1, No. (3)

Ah. Zaki Fuad.(2015) “Rekonstruksi Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Takstonomi Transenden.” ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 3, no. 2.

Ahmad Daliman, (2012) Metode Penelitian Sejarah

Ahmad Mansur Suryanegara. (2009) Api Sejarah Jilid 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Salamadani

Ahmad Rofi Usman, (2015). Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Citra dan Fakta. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Sodikin. (2023). Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda: Studi Komparatif Pendidikan Islam dan Pendidikan Kolonial di Jawa Awal Abad XX. Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era, 3(1)

Ahmad Sulaiman. (2021). Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Perspektif Sejarah. Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol. 10, No. 3.

Ahya Clara Shantika, (2024), Kebijakan Penjajah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, KHIDMAT: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 2.

Aini, Q., Noviani, D., & Aina, Q. (2024). Teori ilmiah dalam konsep pendidikan Islam. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(1).

Akhiruddin, K M, 'Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara', TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 1.1 (2015), pp. 195–219

Aksan, Rofik, 'Kekuasaan Dan Politik Lembaga Pendidikan Islam', Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, 10.1 (2022), pp. 17–27

Al Munawwarah, Rofiqah, 'Sejarah Pendidikan Islam Di Maluku Pada Masa Awal Serta Perkembangannya', Vifada Journal of Education, 1.2 (2023), pp. 29–36

Al-Ghazali, A. R. "Prasasti Islam Awal di Sumatra." Jurnal Arkeologi 5, no. 2 2015.

Alhadza, Abdullah, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Sulawesi Tenggara.(Makala, 2009)

Ali, M. (2008). Strategi penelitian pendidikan. Bandung: Angkasa.

Amal, M. A. (2021). Dinamika Pendidikan Islam di Maluku Utara: Studi Historis Kesultanan Tidore dan Pengaruhnya terhadap Sistem Pendidikan. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 5(1), 78-92.

Amaliyah, A. (2013). EKSISTENSI PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR MASA DAULAH FATIMIYAH Lahirnya Al-Azhar, Tokoh-tokoh Pendidikan pada Masa Daulah Fatimiyah dan Pengaruhnya terhadap Dunia Islam. Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 16(1).

Amando, Fytrio. (2023) Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Mohammad Natsir. BS thesis.

Ambary, Hasan Muarif. Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia. Jakarta: Logos, 2021.

Amin. (2024) Hukum Islam Dalam Politik Indonesia: Dari Masa Ke Masa Jilid 1. Vol. 1. Penerbit Adab,

Amir, M. (2019). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang. Jurnal Pilar Kajian Islam Kontemporer, 10.

Amirullah, A. (2015). Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 13(2).

Anam, S. (2021). Karakteristik dan Siste Pendidikan Islam: Mengenal Sejarah Pesantren, Surau dan Meunasah di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2).

Anas, (2020), Dinamika Pendidikan Muhammadiyah pada Masa Penjajahan Jepang di Yogyakarta Tahun 1942–1945. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, Vol.6, No. (1)

Anderson, James E, Public Policymaking: An Introduction, 8th edn (Wadsworth, 2015).

Anderson, Thomas R. Public Policymaking. Boston: Houghton Mifflin, 2010.

Andriyanto, A. (2022). Konsep Kedudukan Raja pada Awal Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Keraton: Journal of History Education and Culture, 4(1), 30–37.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Anggito, Albi, and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Angriani, Riska Angriani Riska, ‘Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia’, 2020

An-Nur Lampung. (2023). Masuknya Islam di Tidore: Sejarah dan Peranannya dalam Kehidupan Sosial Budaya.

Annur Ngrukem. (2024). Kerajaan Islam Mataram dan Dampaknya dalam Sejarah Nusantara.

Anshari Muhammad, (2020), Krisis Konstantinopel dan Dampaknya terhadap Perdagangan Rempah-rempah Eropa. Jurnal Dunia Islam dan Barat, Vol.3, No. (1)

Anshari, Zainal, and Ahmad Hanif Fahruddin, ‘Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah Dan Kiprahnya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam’, Akademika, 14.01 (2020)

Anwar, S. (2019). Peran Ulama dalam Kebijakan Pendidikan pada Kerajaan Pajang. Sejarah Kebudayaan.

Arifin, (2020), Kebijakan Pendidikan Islam: Telaah Historis dan Kontekstual. (Malang: UIN Maliki Press)

Arifudin, Opan, and others, Psikologi Pendidikan: Tinjauan Teori Dan Praktis (Penerbit Widina, 2020)

Ariza, Hidra, 'Lembaga Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah Di Indonesia (Kajian Historis Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam)', SURAU: Journal of Islamic Education, 1.1 (2023), pp. 1–14

Arzam. (2014) "Hukum Islam Sebagai Revolusioner dan Egaliter." Jurnal Islamika 14, no. 1.

Asari, H. (2005). Pendidikan Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Asari, H. (2021). Sejarah Pendidikan Islam Nusantara. Yogyakarta: Kaukaba.

Asep Saepudin. (2019). Pendidikan Islam di Masa Kolonial. Bandung: Pustaka Setia.

Asin, U. (2021). Pola Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/363718148

Aslan, (2023), Dinamika Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda, SYAMIL: Journal of Islamic Education, Vol.6, No. (1)

Asnidar, Masna dan Mukhtar Yusuf. (2022), Pengaruh Geografis dan Sosio-Kultural dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jurnal Studi Islam dan Budaya 14, no. 2: 210-228.

Asroha, H. (2020). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Kontestasi Ideologis dan Moderasi. Jakarta: Grup Prenadamedia.

Asror, Moh, (2023) "Modernisme Pendidikan Islam dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis dan Relevansinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0." Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 8.1

Asrori. (2024) "invasi jepang di semenanjung korea dan hindia belanda: resistensi bangsa korea dan indonesia kepada jepang." humanis: jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora 16.2

As-tsauri Muhammad Sufyan, (2020), Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Guepedia)

Astuti, Sri, ‘Agama, Budaya Dan Perubahan Sosial Perspektif Pendidikan Islam Di Aceh’, Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 7.1 (2017), pp. 23–46

Asysyegav, M. H., & Maulana, M. A. (2025). Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ad Dustur, 2(1).

Atika, S. N., Mawla, I., Nurlatifah, S., Marwatussoffah, A., Oktaviani, V., & Alfahmi, F. F. (2025). PERAN KESULTANAN BANTEN DALAM MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI ISLAM DI NUSANTARA. An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam, 4(3).

Atika. (2025) "Peran Kesultanan Banten Dalam Mempertahankan Dan Mengembangkan Nilai-Nilai Islam Di Nusantara." An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam 4.3

Ayatullah, A., Muzayanah, F., Alanuari, A. A., & Urokhmat, S. (2024). Tradisi Magis di Kesultanan Cirebon. ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture, 5(1).

Azhar, Abdul. (2020). Pesantren dan Peranannya dalam Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu..

Aziz, Suci Karlina, (2018), "Pengaruh Kebijakan Politik Etis Pemerintah Terhadap Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara." Jurnal Budi Pekerti Agama Islam 2.5

Azizah, Fithria Rifatul, ‘Mengembangkan Paradigma Integratif-Interkonektif Dalam Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi (Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Islam’, Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam, 4.2 (2019)

Azra, A, Umam, S. (2021). Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas di Indonesia. Mizan.

Azra, A. & Thaha, I. (2022). "Revitalisasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional: Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Materiil". Jurnal Pendidikan Islam, 23(1).

Azra, A. (2018). Konsep Pendidikan Islam: Landasan Filosofis dan Aplikasinya dalam Dunia Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam.

Azra, A. (2021). Jejak-Jejak Jaringan Pendidikan Islam Di Nusantara: Dari Masa Kolonial Hingga Indonesia Modern. Jakarta: Kencana.

Azra, A. 2004. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III (Logos, 1999).

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2020.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2007.

Azwanda, Yuri El Hanif, Syahril Yusuf, and Ellya Roza, 'Proses Masuk Dan Penyebarluasan Islam Pada Masa Kerajaan Samudera Pasai Di Aceh', Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam, 5.2 (2024), pp. 1–6

Azyumardi Azra. (2004) Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Bandung: Mizan.

Azyumardi Azra. (2004). Islam di Dunia Indonesia: Sebuah Pembentukan Institusional. Bandung: Mizan.

Azzahra, F., Mutawali, M., & Syukri, S. (2025). Aktualisasi Nilai Historis & Teoritis dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Tasyri': Journal of Islamic Law, 4(1).

Bachtiar, Harsya W, Orde Lama Dan Orde Baru: Politik Dan Birokrasi Di Indonesia (LP3ES, 1981).

Badruddin. "Kesultanan Islam Awal di Nusantara: Perlak dan Samudera Pasai." Jurnal Tamaddun, Vol. 10, No. 2 (2023)

Badrun, Ahmad. (2023) Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Pengembangan Program Pendidikan Pesantren Modern (Studi Kasus Pada Pesantren Modern Darussalam Ciamis Jawa Barat). MS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah jakarta,

Baharuddin, H., & Hasan, MN (2022). "Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia: Fondasi Pengembangan Pendidikan Islam Kontemporer". Jurnal Tatsqif, 20(2).

Bahri, Samsul. (2021) Sejarah Sosial Pendidikan Islam. Penerbit Adab,

Baihaqi, Ahmad. (2023) "Analisis Kemajuan Kerajaan Demak " TARIKHUNA: JURNAL SEJARAH PERADABAN ISLAM 3.02

Bangsa, A. (2025). PENYEBARAN AGAMA ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN PADA MASA KESULTANAN PANGERAN SAMUDERA. TARBIYAH DARUSSALAM: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN, 9(01).

Basri, A. Y. (2018). Islamisasi dan perkembangan Kesultanan Bima. Pustaka Pelajar.

Basri, H. (2022). Pendekatan Historis dalam Kajian Pendidikan Islam Tradisional. Al-Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, 7(1), 15–27.

Basyir, H. (2020). Kerajaan Pajang dan Sistem Pendidikan Islam di Jawa. Pendidikan Sejarah.

Ben Said, Mohamed. (2024). Pendidikan dan Asimilasi: Pengaruh Penjajahan Prancis di Afrika Utara. Tunis: Tunisian..

Bensalem Mouhouche. (2022). Pendidikan Islam di Aljazair dan Tunisia pada Masa Penjajahan Prancis: Kebijakan dan Dampaknya. Jurnal Sejarah dan Pendidikan, 7(2).

Blumberger, J, 'Sarekat Islam."', Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie. Leiden: EJ Brill, 1924

Burhanuddin, J., & Bahtiar, M. (2020). Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, pemikiran, dan tantangan. Kencana.

Bustan, N., & Jumadi, J. (2022). Peran Raja dalam Islamisasi di Kedatuan Luwu Sulawesi Selatan. SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 2(1), 45–60.

Cahyanti, (2021), Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.2, No. (2).

Cahyanti, E. T. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(2).

Cahyanti, Eva Tri. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi. Dalam EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 2, no. 2 (2021)

Camila, Chinanti Safa, (2022). "Sejarah Kesultanan Pajang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah.

Chairudin, M. (2023). PENGEMBANGAN MADRASAH MODEL DI INDONESIA. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 21(1).

Choirul Anam. (2015) Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Nusantara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Choirunniswah, Choirunniswah, 'Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 18.01 (2013), pp. 56–84

Cholily. (2024) Metode Penelitian diBerbagai Masalah Pendidikan. UMMPress

Dalimunthe, Nurajidah, 'Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab. Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

Damar Shashangka. (2015). Babad Tanah Jawi: Kisah Para Wali dan Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Narasi.

Dandi, I., & Tendi, T. (2022). Merekonstruksi Sosok Pangeran Kuningan dalam Sejarah Cirebon. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 10(1).

Dangu, A. S., Sumarjiana, I. K. L., & Anto, R. (2022). Sejarah Pendidikan Indonesia Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1950. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(2).

Danugroho, Agus. (2022) Pendidikan dalam kacamata ketahanan nasional. Jejak Pustaka

Darmawan, M. (2010). Pendidikan dan Pembangunan dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan, R. 2017. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Timur, Jurnal Pendidikan Islam, 5(2): 112–127

Darmono, Setyono Djuandi, Building a Ship While Sailing (Kepustakaan Populer Gramedia, 2018)

Dasopang. (2025) "kebijakan harun ar-rasyid dan al-ma'mun dalam pengembangan pendidikan islam." Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan 2.1

Daulay, H. (2021). Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Daulay. (2019) Pendidikan Islam di Indonesia: historis dan eksistensinya. Prenada Media,

Dedi Susanto, Su'aidi, Minnah El Widdah, Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan Islam, 1(1),2023

Deliar Noer. (1980). Administrasi Islam di Indonesia. Rajawali Press.

Deliar Noer. (1996). Partai Islam di pentas nasional 1945–1965. (Jakarta: Grafiti Pers).

Departemen Agama RI, Pendekatan Studi Islam Dalam Perspektif Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005).

Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Kurikulum pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas.

Deri Wanto. (2023). Sejarah Pendidikan Islam dari Masa ke Masa. Jakarta: Rajawali Pers.

Detik.com. (2023, Mei 19). Kerajaan Mataram Islam: Sejarah, Pendiri, Kejayaan-Keruntuhan.

Dewi Lestari.(2022) "Peran Sunan Giri dalam Pengembangan Seni Tradisional sebagai Media Dakwah." Jurnal Seni dan Budaya Islam 8, no. 1.

Dewi, B. F. (2025). Basic Concepts of Modern Thought Islamic Religious Education. al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 8(1).

Dewi, Ernita, 'Transformasi Sosial Dan Nilai Agama', Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 14.1 (2012), pp. 112–21

Dhofier, Z. (2023). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia. Prisma, 2.

DIMAN, DIMAN, 'SEJARAH DESA TENGON SUKU DAYAK KUMBA PADA TAHUN 1984-2020' (IKIP PGRI PONTIANAK, 2023)

Dini, Permanasari. (2023 "Peran Ulama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia: Studi Kasus Di Kota Depok."

Djalil, B., & Hasim, R. (2024). Naskah-naskah Kuno dan Perannya dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group.

Djam'anuri Waluyo, Mufrod Teguh Mulyo, dan Djam'anuri Waluyo. (2016) Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djamil, A. (2020). Perjuangan Ideologi Pendidikan Islam di Indonesia: Studi Tentang Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 5(1).

Djamil, Muhammad Iqbal. (2022), Peran Sultan dalam Pengelolaan Institusi Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Al-Ulum: Jurnal Studi Islam 22, no. 1: 67-89.

Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa, (Bandung: Guepedia Publisher, 2020)

Dute, Hasruddin. (2021) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pluralistik. Publica Indonesia Utama,

Dzakiyy, Aulia Dinan Muhammad, and Muhammad Farhan Febrian, 'Sejarah Kerajaan Samudera Pasai Di Indonesia', ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3.7 (2024), pp. 161–67

Eka Wismulyani, (2019), Pendidikan Masa Kolonial. (Jakarta: Cempaka Putih PT)

El Hakim, M. D., & Fahyuni, E. F. (2020). Pemikiran Pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 2(1), 55–57. https://riset-iaid.net

Eldarifai, Z., Siregar, Z., Muqim, Z., & Zalnur, M. (2023). Landasan Ideal dan Landasan Struktural Pendidikan Agama Islam. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(12).

Emine Gunay. (2017). Ottoman Education During the First World War. Istanbul: Turkish Historical Society.

Endrayadi, (2018) Pendidikan Kolonial Di Kota Bandung Laksbang Pressindo:

Enhas. (2023) "Sejarah, Transformasi, dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman 13.3

Erni Mujiningsih, Erlis N. Yetti. (2015) "Sunan Kalijaga Dalam Novel Babad Walisongo Dan Kisah Dakwah Walisongo." Bahasa dan Seni 43, no. 2

Erwantoro, H. (2012). Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon. Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research, 4(1).

F Amelia, (2020) Pendudukan Jepang Di Indonesia Alprin:

Fadilah Mukhtar dan Maryam Jamilah, (2021), Transformasi Budaya Masyarakat Tidore sebagai Dampak dari Kebijakan Pendidikan Islam Era Kesultanan, Jurnal Sejarah dan Budaya Islam 8, no. 2: 119-137.

Fadli, M. (2021). Pendidikan Islam dan transformasi sosial budaya lokal: Studi Sejarah Kesultanan Islam di Indonesia Timur. Jurnal Sejarah dan Budaya Islam, 6(1).

Fahira, Jihan, 'Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh', Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1.1 (2024), pp. 1–11

Fahri Baharuddin.(2001) Dakwah Islam Wali Songo di Jawa. Bandung: Pustaka Setia.

Faisal, Ahmad dan Siti Hajar. (2023), Kompleksitas Kebijakan Pendidikan Islam di Wilayah Kesultanan: Studi Kasus Tidore dan Ternate. Jakarta: Rajawali Press.

Fajar, Ahmad Malik, 'Penerapan Metode User Centered Design (Ucd) Pada Web AIS UIN Jakarta Dengan Standar ISO 9241-210' (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Fajar, H. (2021). Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang: Antara Teori dan Praktik. Sejarah Islam Nusantara.

Fajrin, Suhaimi, and Taufikurrahman Taufikurrahman, 'Reorientasi Pendidikan Islam Tradisional Di Indonesia', AL-ALLAM, 2.2 (2021), pp. 41–52

Farid Setiawan, Kebijakan pendidikan muhammadiyah 1911-1942, Yogyakarta, UAD Press, (2021).hal 251.

Fathuddin Yusuf. (2018). Kebijakan Politik Islam Hindia-Belanda: Ordonansi Pendidikan Islam di Indonesia 1908–1936. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fathurahman, Oman. Filologi dan Islam Nusantara. Depok: Komunitas Bambu, 2019.

Fauzan, A. (2021). "Penguatan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis Implementasi Pasal 31 UUD 1945". Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 13(2).

Fauzi, Ahmad. "Peran Politik Kesultanan Islam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Nusantara." Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 1 (2022)

Fekrat, Izzi, Duski Samad, and Elda Rifai, 'Islamisasi Dan Pertumbuhan Institusi-Institusi Pendidikan Islam Di Nusantara', IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2.2 (2024), pp. 197–209

Fikri, Muhammad. "Modernisasi Pendidikan Islam: Pendekatan Historis." Jurnal Pemikiran Islam 15, no. 1 (2023): 45–60.

Fithri, W. (2014). Dinamika pendidikan Islam di Minangkabau (86 tahun perjalanan madrasah diniyyah pasia). Jurnal Al-Aqidah, 6.

Fitriani, (2024), Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No. (2)

Fitriani, Andini, Isrina Siregar, and Supian Ramli, 'Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326m', JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 2.1 (2022), pp. 11–22

Fitriani. "Dampak Pendidikan Islam terhadap Struktur Sosial Masyarakat Tradisional." Jurnal Sosial Budaya, Vol. 6, No. 2 (2022):

Fitriyah, S. (2018). Analisis kebijakan pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Jurnal Studi Islam Indonesia, 7(1), 67–80.

Franata, (2022), Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol.2, No. (5)

Gunawan, H. Ary, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 2012),

Gunawan, Mhd Alfat, and Asnil Aidah Ritonga, 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tari Mesekat Suku Alas Di Aceh Tenggara', Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4.3 (2023), pp. 645–58

Gusmawati. (2015). Islamisasi di Kerajaan Kutai pada Awal Abad ke-17 (Suatu Tinjauan Historis). Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gusmawati. (2017). Islamisasi di Kerajaan Kutai pada Awal Abad ke-17. Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, 3(1), 1–14.

H Soemantrie and S Hidayati, (2017) Perkembangan Kurikulum SMA Di Indonesia (Suatu Perspektif Historis Dari Masa Ke Masa) Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

H. Fida' Abdilah dan Yusak Burhanudin. (2010) Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Kencana.

Habibi, A., Faishal, A., & Syahid, F. N. (2023). Sejarah Pola Politik Islam Di Kalimantan Selatan. Islamic Education, 1(3).

Hadi, Saiful. Sosiologi Pendidikan Islam: Kajian Teoretis dan Praktis. Yogyakarta:Deepublish, 2021.

Hafid, A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam.

Hafiz, Muhammad. (2024) "Pandangan Ulama Terhadap Prospek Alumni Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir Di Kabupaten Labuhan Batu Utara." Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 9(1).

Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam, 9(1).

Hakim, (2024), Dinamika lembaga pendidikan Islam di Indonesia, tinjauan historis. UNISAN Jurnal, Vol.3, No. (10)

Hakim, A. R. (2021). Model Pendidikan Islam Tradisional dalam Masyarakat Adat.Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 33–45.

Hakim, A. R. (2022). Dinamika pendidikan Islam Nusantara. Prenada Media.

Hakim, Lukman. (2020) Pendidikan Islam Integratif: Best Practice Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. Gestalt Media,

Halim, Abdul, and Muhammad Alfani Alpi, 'Peninggalan Kesultanan Islam Di Tanah Melayu Sebuah Pembaruan Pendidikan Islam Dan Tamadun Melayu', Arriyadhah, 20.2 (2023), pp. 49–55

Haluty, Djaelani, 'Warisan Pendidikan Islam Nusantara: Suatu Perubahan Dan Keberlangsungan', Al-Ulum, 16.1 (2016), pp. 208–28

Hamdie, M Ilham Masykuri, and others, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan', Titik Karya: Jurnal Sosial Dan Humaniora Kontemporer, 1.01 (2023), pp. 9–17

Hamdie, M Ilham Masykuri, Moh Iqbal Assyauqi, Norazimah Hidayati, and Noor Liana Waty, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan', Titik Karya: Jurnal Sosial Dan Humaniora Kontemporer, 1.01 (2023), pp. 9–17

Hamid, Idrus dan Sitti Maryam. (2021), Transformasi Sosial Masyarakat Tidore: Pengaruh Sistem Pendidikan Islam dari Masa Kesultanan hingga Era Modern. Makassar: Penerbit Ininnawa.

Hamzah, Moh. Kebijakan Diskriminatif Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam: Studi Kasus Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. Dalam Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 4, no. 2 (2023).

Handoko, W., & Mansyur, S. (2018). Kesultanan Tidore: Bukti Arkeologi sebagai Pusat Kekuasaan Islam dan Pengaruhnya di Wilayah Periferi. Berkala Arkeologi, 38(1), 17–38.

Harahap, (2023), Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.1, No. (1).

Hardianti, Titin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, 'PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DI KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA (STUDI SEJARAH DAN IMPLEMENTASI)', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3.1 (2025), pp. 26–36

Harmonedi, H., & Zalnur, M. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2).

Harsya W. Bachtiar. (1981). Orde Lama dan Orde Baru: Politik dan Birokrasi di Indonesia. (Jakarta: LP3ES).

Harun, Ihsan, 'Sejarah Pendidikan Islam Di Aceh Tengah Era Tahun 1910-1986' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

Haryanti, Rina. "Dampak Kebijakan Pendidikan Kesultanan Terhadap Masyarakat Maritim di Sumatra Timur." Jurnal Sejarah dan Budaya Islam, Vol. 10, No. 2 (2023): 95–110.

Hasan Asari. (2007). Wali Songo dan Dakwah Islam di Nusantara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan Mustaqim, (2023), Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang, Al-Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 01 No. 03.

Hasan, Mustaqim, dkk. Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda dan Jepang. Dalam Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, vol. 1, no. 3 (2023)

Hasan, N. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia : Kontesiasi, Dinamika, dan Masa Depan. Yogyakarta: Muhammadiyah.

Hasan, N. 2016. Sejarah Pendidikan Islam: Suatu Pengantar, Jurnal Pendidikan Islam Nusantara, 2(1): 45–58

Hasanuddin, L. (2019). Kesultanan Islam dan perkembangan pendidikan di Nusantara. CV Jejak.

Hasbullah, Moeflich, Islam & Transformasi Masyarakat Nusantara (Prenada Media, 2017)

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia (RajaGrafindo Persada, 2001).

Hasim, Abdul Rahman. (2020), Kebijakan Sultan Tidore dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Sejarah Abad XVII-XIX. Jurnal Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya 8, no. 2: 145-163.

Hasjmy, Ali. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasyim, Abdul Rahman dan Nur Khasanah. (2020), Dinamika Politik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jurnal Al-Tarbiyah: Media Pendidikan dan Sosial Keagamaan 12, no. 1: 75-93.

Hasyim, Rustam, 'Masyarakat Dan Kebudayaan Ternate Dalam Perspektif Sejarah', Jurnal Geocivic, 2.2 (2019)

Hayati, Nur Rohmah, 'Kiprah Ormas Islam Di Bidang Pendidikan', Al Ghazali, 1.1 (2018), pp. 133–44

Herlambang, D. (2021). Relasi Kesultanan Pajang dan Islamisasi Pedesaan di Jawa Tengah. Jurnal Tamaddun.

Hermawati, Vivin Vivin, Halim Soebahar, Noor Harisuddin, and Moch Chotib, 'Tokoh Pendidikan Islam Nusantara Abdurrauf As-Singkili: Kontribusi Terhadap Pendidikan Islam', An Namatul Ausath, 2.2 (2024), pp. 91–102

Hidayat, A. (2019). Pendidikan Islam dalam Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 8(1), 45–60.

Hidayat, Muslih, 'Islamisasi Dan Prototipe Institusi-Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia', Edification Journal: Pendidikan Agama Islam, 1.1 (2019), pp. 23–39

Hidayat, R & I, M. (2023). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Kontemporer. Rajawali Press.

Hidayat, R. (2017). Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 155–170.

Hikayat Perlak. Jilid I. Aceh: Pustaka Sejarah Nusantara, 1998.

Hikmawati. (2024) "Pendidikan Islam berwawasan multikultural sebagai resolusi konflik pemahaman agama."

Hoddin, Muhammad Sholeh, 'Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.', Jurnal Ilmiah Iqra', 14.1 (2020), pp. 15–30

Huda, M. N., Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Pendidikan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijakannya. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 6(2).

Huda. (2023) "Pendidikan Islam Di Indonesia Masa Penjajahan Kemerdekaan Dan Dinamika Kebijakannya." Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi 6.2

Humah, Darsis, Zainuddin Arifin, and Abd Rauf Wajo, 'Sistem Pemerintahan Di Kesultanan Ternate', Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10.24.2 (2024), pp. 896–909

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. Edisi revisi. New Haven: Yale University Press, 2020.

Husni, M. (2020). "Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal dalam Perspektif Sejarah Sosial di Bima." Makalah seminar, Universitas Mataram.

Hwan Mukarrom. (2014). Sejarah Islam Indonesia I: Dari Awal Islamisasi Sampai Periode Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara. Surabaya: IAIN Press.

Ibrahim Muhammad, (2017), Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas. (Pustaka Pelajar)

Ibrahim, F. I., & Haryanto, B. (2020). Islamic Education Concept of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Academia Open. https://www.researchgate.net

Ibrahim, Hasan. "Islamisasi dan Peranan Kesultanan Perlak." Jurnal Sejarah dan Budaya Islam 10, no. 2 (2021)

Ibrahim, Rustam dan Nurdin Abdullah. (2024), Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam dari Masa Kesultanan Tidore hingga Era Modern. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Idham. (2014). Makam Noto Igomo: Arkeologi Makam Tokoh Agama di Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Analisa: Journal of Social Science and Religion, 1(2), 125–130.

Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 8(2).

Idris, Syarifuddin, 'Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia', KREATIF: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 13.2 (2015), pp. 148–65

Ika Purnamasari, Diraningsih Zai, Indah Chofifah SM, Santa Hoky Sembiring, & Harifin. (2023). "Transformasi Sosial dan Budaya Melalui Islamisasi di Sumatera Utara." Jurnal Medan Resource Center 3, no. 2: 10.

Inglehart, Ronald, dan Christian Welzel. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. Edisi terbaru. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Irawan, Aguk. (2022) "Relasi Pesantren dan Keraton: Perspektif Antropologi-Sejarah era Kerajaan Demak Bintoro dan Mataram Islam." ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture 3.2

Irfan, D., & Supena, I. (2021). Sejarah pendidikan Islam Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Irmansyah. (2024) Manajemen Dakwah dalam Kondisi Bencana. Publica Indonesia Utama,

Irwan, (2024), Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda. Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan, Vol. 15, No. 2.

Iskandar, Khusnan, and Ahmad Syahrul Ansori, 'Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan', Journal of Education and Religious Studies, 2.02 (2022), pp. 45–52

Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2(1), 47–49. https://ejournal.stitpn.ac.id

Ismail, A. (2020). Tradisi keilmuan Islam di Kesultanan Bima. Jurnal Warisan Islam Nusantara, 2(2).

Ismail, Arifuddin dan Nur Ainun. (2023), Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Kesultanan Tidore terhadap Tradisi Literasi Masyarakat Lokal. Jurnal Adabiyah: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 19, no. 1: 67-85.

Ismail, I. (2016). POLITIK PENDIDIKAN ISLAM ORDE LAMA 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). KABILAH: Journal of Social Community, 1(1).

Ismail, M. Hilir & Alan Malingi. (2018). Jejak Para Sultan Bima. CV. Adnan Printing.

Iswandi, Iswandi, 'Pilar-Pilar Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh', Edudeena: Journal of Islamic Religious Education, 3.2 (2019), pp. 109–21

Ith'am, M. I. (2018). Penerapan Politik Pendidikan (Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram). EDU-RELIGIA: Jurnal Keagamaan dan Pembelajarannya, 1(1).

Iwan Agus Supriono. (2015). "Islam di Nusantara dan Transformasi Kebudayaan Melayu Indonesia." Jurnal Madania 5, no. 2: 177–178.

Jabnabillah, Faradiba, Aswin Aswin, and Mahfudz Reza Fahlevi, 'Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika', Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6.1 (2023), pp. 59–70

Jalaluddin, & Said, U. (1996). Filsafat pendidikan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

James D. Le Sueur. (2011). The Colonial Education System in Algeria: A Case Study. London: Oxford University Press.

Jamil, M. (2021). Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Dampaknya pada Perkembangan Islam di Jawa. Pendidikan Agama Islam.

Jamil. (2023) "Perspektif sejarah sosial dan nilai edukatif pesantren dalam pendidikan Islam." Risalatuna Journal of Pesantren Studies 3.2

Jannah, Miftahul, 'PEMERINTAHAN ISLAM DI KERAJAAN ACEH PADA MASA SULTAN ISKANDAR MUDATAHUN 1951—2009'

JE. Hosio, Kebijakan Publik dan Desentralisasi, (Yogyakarta: LBM, 2006)

Jumati, Rosmina, ‘Kajian Historis Peran Ulama Tidore Dalam Perkembangan Islam Dan Relevansinya Pada Pembelajaran SKI Di MAN 2 Kota Tidore’, JUANGA: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 2024, pp. 131–42

Kadi, Kadi, ‘IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM: Kajian Atas Problem Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam’ (IAI Tribakti Press, 2022)

Kadir, Abdul Rahman dan Safinah Rauf. (2020), Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Bahasa dan Sastra di Kesultanan Tidore. Jurnal Manuskripta 13, no. 2: 183-205.

Kahar, Syadidul, ‘Modernisasi Pendidikan Islam Di Yayasan Pendidikan Islam Al Aziziyah Samalanga’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

Kamila, (2024), Menjelajah Lorong Waktu: Pendidikan Islam di Bawah Cengkeraman Kolonialisme Belanda, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No. (3)

Karel, A. (2020). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: PPIM IAIN Jakarta.

Kartini Kartono, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa (Bandung: Mandar Maju, 2009)

Kebudayaan Kota Yogyakarta. (2023). Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Khasanah, Nur, Achmad Irwan Hamzani, and Havis Aravik. (2022) Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah. Penerbit NEM,

Khosin, Khamam, ‘Reformasi Pendidikan Muhammadiyah Di Indonesia’, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17.2 (2023), pp. 1177–87

Khotimah, U. H., Juanda, A., & Rosidin, D. N. (2023). Implementasi Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 2 Cirebon. Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL), 2(2).

Khumaimah, R. (2021). Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia (Kontestasi Ideologi dan Gagasan). Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 11(2).

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kompas.com. (2023, April 7). Peranan Kerajaan Mataram Islam dalam Penyebaran Islam.

Kurniati, K. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2).

Kurniawan, S., & Mahrus, E. (2020). Pendidikan Islam dalam Perspektif Syed Naquib Al-Attas dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia.

Kusdani, Kusdani, 'Pendidikan Islam Dan Teori Konstruktivisme Dalam Penguatan Keagamaan', Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 11.1 (2022), pp. 36–46

Kusnadi, Kusnadi, Bahaking Rama, and Muhammad Rusydi Rasyid, 'Proses Perkembangan Islam Di Nusantara, Teori Masuknya Dan Pusat Pendidikan Islam Masa Awal Di Asia Tenggara', Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal, 2.2 (2022), pp. 75–91

Kusnadi, M. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Historis. Bandung: Alfabeta.

Kusuma, D. (2019). Keruntuhan Kesultanan Pajang dan Bangkitnya Kesultanan Mataram Islam. Jurnal Pendidikan Sejarah Islam.

Kuswono, K. (2020) "Politik Islam Pada Masa Pendudukan Jepang". HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah,

La Ode Muhammad Syahartijan, La Ode Jumaidin, BUDAYA PENDIDIKAN ISLAM DI KESULTANAN BUTON PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (ABAD KE -19),Jurnal ETNOREFLIKA, Vol 4, 2015

Laila, Imailda Nur, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Peradaban Islam Di Indonesia', Wahana Karya Ilmiah Pendidikan, 7.02 (2023), pp. 70–79

Laila, Imailda Nur, 'Peran Pendidikan Islam Dalam Membangun Peradaban Islam Di Indonesia', Wahana Karya Ilmiah Pendidikan, 7.02 (2023), pp. 70–79

Lalira, James Edward. (2025) Sejarah, Bahasa dan Budaya Desa Gemeh Dari Cikal Bakal Hingga Pemekaran Wilayah. Gema Edukasi Mandiri,

Langgong. (2021). Transformasi Politik, Agama dan Budaya Masyarakat Kutai Islam. Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(2), 91–105.

Latief, Hamdan dan Asriani Kadir. (2023), Faktor Ekonomi dan Perdagangan dalam Pembentukan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Islam 7, no. 2: 156-174.

Latif, Yudi. (2018) "Membumikan Islam dan Kebangsaan: Trajektori Pendidikan Islam dalam Pembangunan Karakter Bangsa." Jurnal Studi Keislaman vol 8, no. 1

Latifah, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang dan Dampaknya terhadap Pendidikan Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Sosial.

Leirissa, R. Z., & Pattikayhatu, J. A. (2022). Molucanologi: Kajian Interdisipliner tentang Maluku, Kesultanan Tidore, dan Warisan Pendidikannya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lestari, Dwi, 'Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933)', JSI: Jurnal Sejarah Islam, 1.01 (2022), pp. 7–40

Lestari, R. (2020). Pendidikan Islam dan tantangannya di era demokrasi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 9(1), 23–35.

Lilis Suryani. (2015). Seri Jejak Para Wali: Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lubis, M. (2019). Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Maulid di Bugis-Makassar, Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Historis di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, N. (2014). Pendidikan Islam: Sejarah dan Kontemporer. Medan: UMSU Press.

M R Fadli and D Kumalasari, (2019) 'Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang', Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya, 13.2.

M. Abdul Gani. (2016). "Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah Kesultanan Bima." Jurnal Al-Tamaddun, 11(2).

M. Agus Wibowo. (2019). Wali Songo: Jejak Dakwah dan Pendidikan Islam di Nusantara. Jakarta: Rajawali Pers.

M. Dhiya'uddin. (2009). Pendidikan Islam di Nusantara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

M. Ibrahim. (2022). Colonialism and Educational Transformations in Muslim Societies during World War I. International Review of History and Education, 9(1).

M. Muhlis dan Nur Iftitahul Husniyah. (2023). "Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu, Raden Qosim Sunan Drajat dalam Penyebaran Islam Masyarakat Pesisir Utara Lamongan." Jurnal Urwatul Wutsqo 12, no. 2.

M. Quraish Shihab. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Jakarta: Mizan.

M. Saleh. (2003). “Islamisasi di Bima dan Peran Kesultanan dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” Jurnal Sejarah dan Budaya, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar.

MA, M R, ‘Institusi Pendidikan Islam Di Nusantara Pada Masa Awal (Kajian Terhadap Meunasah, Dayah Dan Rangkang)’, Lentera: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi, 12.3 (2012), p. 148437

Ma’arif, Ahmad Syafi’i. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Bandung: Mizan, 2017.

Ma’rufin, Akhmad Fajar, ‘Kebijakan Ordonansi Guru Dan Pendidikan Islam Di Jawa Timur 1905-1942’ (Universitas Negeri Malang, 2011)

Madjid, Abd, Analisis Kebijakan Pendidikan (Samudra Biru, 2018)

Madjid, Abd, Analisis Kebijakan Pendidikan (Samudra Biru, 2018)

Maftuhin, M. (2007). Pendidikan Islam dalam Konteks Modernisasi. Surabaya: Al-Ma’arif.

Maghfirah, Moona Maghfirah, ‘Relasi Kuasa Dan Islamisasi: Dinamika Hukum Islam Di Kesultanan Samudera Pasai’, PERADA, 7.1 (2024)

Mahbub, Moh, and Junaidi Khab. (2022) NU Tulang Punggung Negara. Strategi NU Pasca-Khittah dalam Membangun Relasi Sosial, Politik, dan Keagamaan. Vol. 174. No. 1. Sulur Pustaka,

Mahfud, C. (2021). Islam dan pendidikan: Perspektif historis dan kontemporer. Pustaka Pelajar.

Mahmud Yunus. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 2019.

Maryam, Siti. “Peranan Kesultanan Perlak dalam Menyebarkan Islam di Nusantara.” Jurnal Tarikh dan Peradaban Islam, Vol. 8, No. 1 (2021)

Masruraini, Masruraini, Bahaking Rama, and Muhammad Rusydi Rasyid, ‘Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Hingga Lahirnya Kerajaan Islam Di Aceh: Lembaga Dan Tokohnya’, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal, 2.4 (2022), pp. 210–23

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional (Safiria Insania Press, 2004).

Masykur Arif. (2014). Sunan Drajat: Sejarah Hidup dan Perjuangan Wali Tanah Jawa. Yogyakarta: Diva Press.

Maulana, Dede. (2015). "Peran Jaka Tingkir dalam merintis Kerajaan Pajang.

Maulana, Ilham, and others, 'PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607–1636', Sharia: Jurnal Kajian Islam, 1.2 (2024), pp. 139–56

Maulana, Ilham, M kautsar Thariq, Samsudin Samsudin, and Yan Nurcahya, 'PERAN SULTAN ISKANDAR MUDA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN ACEH DARUSSALAM TAHUN 1607–1636', Sharia: Jurnal Kajian Islam, 1.2 (2024), pp. 139–56

Maulida, (2020), Dinamika dan Peran Pondok Pesantren dalam Pendidikan Islam Sejak Era Kolonialisme hingga Masa Kini. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.5, No. (9)

Mawardi Pewangi, Eka Mahendra Putra, & Muzakkir Ahlisan. (2025). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. Bandung: CV Pena Publisher.

Meliani, F., Suhartini, A., & Basri, H. (2022). Dinamika dan tipologi pondok pesantren di Cirebon. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 7(2).

Miftahur Rohman, (2018) Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,)

Miftahur Rohman, (2018) Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang,

Mihara, S. (2018). Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam di Nusantara. Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 6(1).

Mihara, Susmihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara', Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, 6.1 (2018), pp. 13–32

Mihara, Susmihara, 'Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara', Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, 6.1 (2018), pp. 13–32

Mihara, Susmihara, ‘Pendidikan Islam Masa Kerajaan Islam Di Nusantara’, Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan, 6.1 (2018), pp. 13–32

Miranti, A. D., & Ayundasari, L. (2021). Kesultanan Banjar: Peranan dalam persebaran Islam di Kalimantan (abad XVI M-XIX M). Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 1(2).

Mohammad Emnis Anwar, Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, Jurnal Edukasi Islami Pendidikan Islam Vol. 03,2014

Mohd Roslan Mohd Nor. (2017). “Sumbangan Syarif Hidayatullah Dalam Penyebaran Pendidikan Agama Islam di Jawa Barat.” At-Ta’dib 12, no. 1.

Mokodongan, Fahlia, and Rahmat Kasim, ‘Menjadi Muslim Di Minahasa Utara: Dinamika Kehidupan Komunitas Islam Di Daerah Minoritas’, Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 10.02 (2025), pp. 142–64

Muarif Ambary, Hasan. Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia. Jakarta: Logos, 2021.

Mubarak, F. (2009). Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia. Jurnal: Ta’lim Muta’allim, 4(8).

Mubarok, M Khusni, and Al Darmono, ‘Konstruksi Filosofi Pendidikan Islam Multikultural Nasional’, Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 14.1 (2020), pp. 56–64

Mubin, (2021). Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Vol.3, No. (1)

Muchlas, S. (2024). Sejarah Pendidikan Islam di Nusantara. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3), 45217–45223.

Muchtar, (2019), Kolonialisme dan Pendidikan: Dampak terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 5, No. (2).

Mudhiah, Mudhiah, and Rusdiah Rusdiah, ‘Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Analisis Historis Terhadap Dinamika Kurikulum, Lembaga, Dan Strategi Pembelajaran’, Mandarasa, 1.2 (2024)

Mudhiah, Mudhiah, and Rusdiah Rusdiah, 'Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan: Analisis Historis Terhadap Dinamika Kurikulum, Lembaga, Dan Strategi Pembelajaran', Mandarasa, 1.2 (2024)

Mufarokhah, Refleksi filosofi sunan kalijaga pada tata kelola pemerintahan di kabupaten demak. Diss. Universitas islam sultan agung, (2023) hlm 46

Muhaimin, M. A. (2020). Paradigma Pendidikan Islam. PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2008). Paradigma pendidikan Islam: Upaya menangkap nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Jakarta: Kencana.

Muhamad Ikmal. 2023. Peran Jaka Tingkir Dalam Peralihan Kerajaan Demak ke Pajan. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon S1.

Muhammad, A. (2022). Pendidikan Islam di Kalimantan Timur: Sejarah dan Perkembangannya. Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 6(3), 75–87.

Muhammad, Rusydi Ali. Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Aceh: Kajian Historis dan Perkembangannya. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.

Muin, Djono, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hak-Hak Adat Dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate Di Kota Ternate', IQRA: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora, 1.1 (2022), pp. 1–13

Mujib, A. (2024). Model Pendidikan Islam di Turki. Journal of Islamic Education Studies, 2(2).

Mukhlis, M. (2020). Pendidikan Islam di Indonesia: Perkembangan dan tantangannya. Raja Grafindo Persada.

Mukhlis. "Dinamika Meunasah sebagai Lembaga Pendidikan dan Sosial Masyarakat Aceh." Jurnal Al-Bidayah, Vol. 13, No. 1 (2022): 55–68.

Mukromin, Muhammad. (2024) Peran Pondok Pesantren dalam meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill Bagi Santri untuk menyongsong Era Indonesia Emas 2045 (Studi Kasus Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo). Diss. Universitas Islam Indonesia,

Mukti, Abdul, and others, 'PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN SAMUDERA PASAI', Jurnal Ilmiah Hospitality, 11.2 (2022), pp. 327–34

Mukti, Abdul, Yusnaili Budianti, Rahmat Syukur, Latifah Diba, and Dewi Maya Sari, ‘MEMAHAMI PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN ACEH’, Jurnal Ilmiah Hospitality, 11.2 (2022), pp. 345–50

Mulkhan, Abdul Munir dan Sulaiman Mappiasse. (2024), Pergulatan Tradisi dan Modernitas: Determinan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Yogyakarta: Penerbit Gading.

Mulyadi, R. (2021). Pendidikan Islam pada Kerajaan Pajang: Sebuah Tinjauan Historis. Sejarah Peradaban Islam.

Mumtaz, N. M. (2022). Kebijakan pendidikan Islam dari masa ke masa. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2).

Munir, Fadhli, ‘Pendidikan Rangkang Sebagai Media Pendidikan Syari’at Islam Di Aceh: Tinjauan Sosiologi Masyarakat Aceh’, Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science, 2.1 (2016), pp. 1–25

Munir, M. (2022). Madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Prenadamedia Group.

Muntoha, Tohir. (2023) "Islam Nusantara Sebuah Hasil Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal." Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam 4.1

Musliati, (2023), Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan, Tips: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1, No. 2.

Musliati, Musliati, Cyndy Aulia, and Erwinsyah Erwinsyah, ‘Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan’, Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1.2 (2023), pp. 104–16

Mustafa, Ibrahim dan Nurhayati Ali. (2024), Jejak Pendidikan Islam dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial-Keagamaan Masyarakat Tidore. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muthoharoh, Miftakhul, ‘Historis Pendidikan Islam Serta Upaya Penguatannya Dalam Sistem Pendidikan Nasional’, Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiyah, 28.1 (2021), pp. 1–14

Muthrofin, K., & Muchtar, N. E. P. (2023). Kontribusi siti walidah dalam pengembangan pendidikan islam di indonesia melalui muhammadiyah. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 19(2).

Muttaqin, Z. (2020). Historisitas, Setting Sosial, Politik, Dan Kakakter Hukum Islam Di Kalimantan Selatan. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(2).

Naily Fadhilah, (2020), "Jejak Peradaban Dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak," Al-Mawarid 2, no. 1

Nandika, Didan Galih. (2018) Sejarah Pendidikan Islam Masa Pemerintahan Raden Fatah Kerajaan Islam Demak Periodisasi 1478-1518 M. BS thesis. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nasir Tamara, M. Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Kompas, 2020.

Nasir, M., Rama, B., & Yahdi, M. (2023). Pendidikan Islam Pada Masa Awal Di Indonesia. Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 6(2).

Nasir, Muh, Bahaking Rama, and Muhammad Yahdi, 'Pendidikan Islam Pada Masa Awal Di Indonesia', Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 6.2 (2023), pp. 1282–96

Nasrowi Bagas Mukti, (2023), Politik Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Publik Belanda pada masa Penjajahan di Indonesia, INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2.

Nasution, A. (2022). Strategi Pendidikan Islam pada Kerajaan Pajang dan Pengaruhnya terhadap Islam di Jawa Tengah. Islam dan Pendidikan.

Nasution, Abdul Gani Jamora, 'Pendidikan Islam Dalam Catatan Sejarah', 2017

Nasution. (2023) Sejarah Islam Asia Tenggara. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers,

Nata, A. (2012). Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Nata, Abuddin, Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia (Kencana, 2012).

Natsir, Muhammad. "Metode Talaqqi dalam Pendidikan Islam Tradisional: Studi Kasus Dayah di Aceh." Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2 (2021

Neha Latifatunnikmah. (2023). “Corak Dakwah Sunan Kudus dalam Mewujudkan Toleransi di Kota Kretek.” Jurnal Studi Islam dan Budaya 12, no. 2: 145.

Nengsih, S. W. (2020). Kearifan Lokal Dalam Legenda Keagamaan Masyarakat Banjar. JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA (JBSP), 10(1).

Nikki R. Keddie. (2003). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. New Haven: Yale University Press.

Noer, Deliar, Partai Islam Di Pentas Nasional 1945–1965 (Grafiti Pers, 1996).

Novrandianti, Novi, Endis Firdaus, and Saepul Anwar, ‘Pendidikan Islam Di Indonesia: Dari Awal Penyebaran Islam Hingga Era Reformasi Pendidikan’, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 14.2 (2024), pp. 279–94

Nur Sahed, (2018), Pendekatan Rasional-Religius dalam Pendidikan Islam (Kajian Terhadap Falsafah Dasar Iqra’), Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan : Volume 02

Nur, Hani, ‘DEPATI SETIO JUNJUNG PESEKO AZRA’I AL-BASYARI KETUA LEMBAGA ADAT KOTA JAMBI 2012-2022’ (Universitas jambi, 2022)

Nur, Hasan Basri M, ‘Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan Di Kerajaan Aceh Darussalam’, WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1.1 (2024), pp. 26–41

Nur, Mohamad Abduh dan Siti Fatimah. (2022), Kebijakan Pendidikan Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Nilai dan Norma Masyarakat Tidore. Jurnal Pendidikan Islam dan Studi Keislaman 15, no. 2: 210-231.

Nurainiah, Nurainiah, Nia Wardhani, and Nurul Jeumpa, ‘Eksistensi Ulama Dan Lembaga Pendidikan Islam Pada Masa Kesultanan Aceh’, Al-Hashif: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Islam, 1.1 (2023), pp. 1–15

Nurbaity, (2018), Pendidikan Indonesia Masa Kolonial Belanda dan Pemerintahan Pendudukan Jepang. Jurnal Tsaqofah, Vol.16, NO. (1)

Nurhadi, A. (2019). Jejak pendidikan Islam di Indonesia: Dari masa klasik hingga kontemporer. Prenadamedia Group.

Nurhasan, A. (2019). Dinamika politik pendidikan pada masa Orde Lama. Jurnal Sejarah Pendidikan, 5(2), 45–60.

Nursalim, E., Zahra, F. A., Naila, S., Ridhotullah, N. A., & Pratama, A. R. (2024). PENDIDIKAN REMAJA DI MASJID AGUNG AL-FAROQ SANGATTA. Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 3(2).

Nuruzzaman, Muhammad Adib, and Iksan Iksan, 'Islam Dalam Pusaran Modernitas: Menelusuri Pola Pendidikan Islam Berbasis Komunitas Pada Perkotaan Di Indonesia', El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies, 2024, pp. 383–92

Nuryanto, (2020) Peta Jalan Pendidikan Indonesia (UNY Press,

Pandjaitan, M. B., Lestari, A., & Solehudin, U. (2025). STRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG DITERAPKAN OLEH SUNAN GUNUNG JATI DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM CIREBON. JURNAL ILMIAH KAJIAN KEANGKATANLAUTAN, 7(1).

Pane, I. (2023). Peradaban Islam di Indonesia. Journal of Education and Culture, 3(1).

Persis, L. P. I. (n.d.). PERAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.

Poerbakawatja, S., & Harsojo. (1981). Ilmu pendidikan. Bandung: CV. Remadja Karya.

Prabowo, G., & Zulkarnain, M. (2012). Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 bagi Pendidikan di Indonesia 1945–1954.

Prasetyo, G. I. A., Farizy, B. S., Billah, M. M., & Yustirandi, A. F. (2024). Pengelolaan Tanah Adat Keraton Kasepuhan Cirebon dalam Bingkai Kebijakan Agraria Nasional terhadap UUPA. Jurnal Pertanahan, 14(1).

Prasetyo, W. (2020). Kerajaan Pajang dan Pendidikan Islam: Sebuah Perspektif Historis. Pendidikan Sejarah Islam.

Pratama, M. A. Q. (2024). Pengaruh Politik Etis Pada Pengembangan Pendidikan di Bali 1900-1928. Indonesian Journal of History and Islamic Civilization (IJHIC), 1(1).

Pulungan Syamsul, (2019), Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Prenada Media Group)

Purnama, Agung, Nina Herlina Lubis, and Widyonugrahanto Widyonugrahanto, 'Pergulatan Pemikiran Kiai Nahdlatul Ulama Dengan Kaum Modernis Islam Di Jawa Barat (1930-1937)', Patanjala, 9.2, p. 291743

Purwadi. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Perspektif Historis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Puteri, A. A., & Nawangsih, Q. H. Y. (2024). PERAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN NILAI DAN NORMA SOSIAL DI MASYARAKAT BANJARMASIN. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(6).

Putri, Nur Indah dan Syamsul Bahri. (2021), Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Tidore: Studi Naskah dan Dampaknya terhadap Masyarakat. Makassar: Penerbit De La Macca.

Putri, R. (2024). "SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF SEJARAH KRITIS," Edu-Riligia.

Putri, Yulita, and Abid Nurhuda. (2023) Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman. PT. Sonpedia Publishing Indonesia,

Putuhena, S., & Abdullah, I. (2020). Islamisasi dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Kajian Historis Abad XVI-XIX. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Qomar, Mujamil, Pendidikan Islam: Pola Baru (Erlangga, 2005).

Qurroti A'yun. (2019). "Falsafah Kepemimpinan Wali Songo." Qolamuna: Jurnal Studi Islam Interdisipliner 3, no. 2.

Rachmawati, S. (2019). Pendidikan Islam dan Sistem Sosial pada Kerajaan Pajang. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan,

Raha. (2023). Pesantren Era Mataram Islam. Alif.id.

Rahim, H. (2023). Arah baru Pendidikan Islam di Indonesia: Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Rahmadhani, (2023), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Masa Kolonialisme Belanda, Jurnal Social Science, Vol.1, No. (1)

Rahmah, S. & Sahide, A. (2022). Islamisasi dan Transformasi Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia. Al-Urwatul Wutsqa: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(2), 111–126.

Rahman, A. (2022). Pola Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore. Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, 5(2), 196–210.https://www.researchgate.net/publication/363718148_POLA_PEMBELAJARAN_AGAMA_ISLAM_PADA_MASYARAKAT_ADAT_KESULTANAN_TIDORE

Rahman, Aswar dan Siti Jamilah. (2023), Kebijakan Pelestarian Khazanah Intelektual Islam pada Masa Kesultanan Tidore. Jurnal Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam 19, no. 2: 210-231.

Rahman, F. (2024). “Landasan Filosofis Pendidikan Islam”. Tarim: Jurnal Dasar Pendidikan Islam, 2(1)

Rahmat Hidayat & Candra Wijaya. (2016). Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Di Indonesia. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.

Ramadhani, Desy, and Septian Teguh Wijiyanto, ‘Sulthanah Taj’al Alam Safiatuddin Syah: Nilai Inspirasi Dan Kontribusi Dalam Memimpin Kesultanan Aceh 1641-1675’, Rinontje: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah, 3.2 (2022)

Ramadlan, Mohammad Fajar Shodiq. (2023) Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi. Universitas Brawijaya Press,

Rambe. (2024) "Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Dari Pengajian hingga Era Kontemporer." Rayah Al-Islam 8.4

Rasyid, A. (2012). Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter Bangsa Pasca-Kolonialisme. Jakarta: Rajawali Pers.

Rasyid, Sibhgatullah Ar, and Nurul Jeumpa, ‘Peran Tgk. Muhammad Daud Beureueh Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Aceh’, JKA, 1.2 (2024)

Ridha, M. F. (2013). Potret Lain Perjalanan Hukum Di Kerajaan Banjar. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1).

Ridhotullah, N. A., & Ifendi, M. (2024). PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA. PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum, 2(4).

Risalah: Jurnal Pendidikan, 12(1)

Riska, (2021), Sistem Pendidikan di Indonesia Pada Masa Portugis dan Belanda. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.3, No. (3).

Rizani, R., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Hukum Pidana dalam Adat Banjar: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Pidana Nasional. Interdisciplinary Explorations in Research Journal, 2(2).

Rizkianto, Anggit, Jalan Dakwah Sarekat Islam (Zhena Ardh Grumma, 2020)

Rodiana. (2018) "Sejarah Karawang: Analisis Arsip Kolonial dan Narasi Lokal." Jurnal Estoria 14.2:

Rohani, (2022), Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda (Kasus Muhammadiyah Dan NU), Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies Vol.18, No.2,

Rohmah, N. (2018) "Pesantren dan Politik Pendidikan Islam di Indonesia". Jurnal Tarbiyatuna, 9(2),

Rohmah, N., Pd, M., & Salabi, A. S. (2025). Sejarah Pendidikan Islam. Jakad Media Publishing.

Rohmah, Sejarah Pendidikan Islam. Jakad Media Publishing

Rohman, F. (2021). "Perjuangan Tokoh Muslim dalam Merumuskan Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan". Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, 5(2).

Rohman, Miftahur, 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang' 2018, 2018

Rohman, T. (2021). Jejak Kebudayaan dan Pendidikan Islam di Masa Kesultanan Pajang. Jurnal Warisan Islam Nusantara.

ROMADHON, SATRIO FAJAR, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Di Era Modern (Studi Kasus: Dusun Bengan Kidul Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah)', 2022

Roseta, Charolin Indah. (2020) "Dakwah Antarbudaya: Perubahan Sosial Budaya Pada Proses Islamisasi Jawa Abad XV." INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah 1.2

Rostow, Walt W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Edisi ketiga. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Rozi, B., & Misbah, A. (2022). Sejarah Kesultanan Cirebon Dan Problematikanya Tahun 1677-1752. Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam, 1(1).

Rusdi, Muhammad, 'Pendidikan Islam Di Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan', Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 10.2 (2007), pp. 228–37

Rusdiyanto, Rusdiyanto, 'Kesultanan Ternate Dan Tidore', Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 3.1 (2018)

Ruslan. (2023) "Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan." Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi 6.2

Rusli, H. (2020). Pengaruh kebijakan kesultanan terhadap sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia Timur. Jurnal Pendidikan Islam Historis, 5.

Rut. (2024) Pendudukan Jepang di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6),

S Ariantoni, (2017) Perkembangan Kurikulum SD Di Indonesia Dari Mengajar Tradisional Ke Belajar Aktif Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

S H Hasan, (2022) Perkembangan Kurikulum SMP Dari Masa Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, Ke Zaman Kemerdekaan (Pusat Kurikulum dan Perbukuan:

Sabarudin, Muhammad, 'Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan', TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 1.1 (2015), pp. 139–74

Sabarudin, Muhammad, 'Pola Dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal Dan Sebelum Kemerdekaan', TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 1.1 (2015), pp. 139–74

Sabarudin, Muhammad. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 1(1).

Sadik, Nur dan Raihani Abdullah. (2022), Relasi Ulama-Umara dan Dampaknya terhadap Formulasi Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2: 219-241.

Safei, S. (2015). Peranan Kerajaan Islam dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia. AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 2(2), 301–308.

Safei, Safei, 'Peranan Kerajaan Islam Dalam Perkembangan Pendidikan Di Indonesia', AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 2.2 (2015), pp. 301–08

Safei, Safei, 'Peranan Kerajaan Islam Dalam Perkembangan Pendidikan Di Indonesia', AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 2.2 (2015), pp. 301–8

Safitri, E. (2021). Kebijakan Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Peranannya dalam Penyebaran Islam di Jawa. Pendidikan Islam Nusantara.

Sagala, S. (2013). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sahab Syed. (2015). Islamic Education and Colonialism: A History of the Muslim World. Jakarta: Mizan..

Sahar Amin. (2020). Islam and Education in Colonial India. London: Palgrave Macmillan.

Saifullah Isra, Kebijakan Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Semessta Aksara,2021)

Sajadi, Dahrun, 'Sistem Pendidikan Islam', Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam, 4.1 (2021), pp. 47–66

SALAM, N U R ALFIYYAH, 'LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN'

Salim, Agus dan Rosmiati Karim. (2023), Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pendidikan Islam di Era Kesultanan Tidore. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 11, no. 1: 94-112.

Salim, Agus, 'Organisasi Islam Dan Perannya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia', Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 3.1 (2024), pp. 7–14

Salsabila, Unik Hanifah, 'Teori Ekologi Bronfenbrenner Sebagai Sebuah Pendekatan Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam', Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam, 7.1 (2018), pp. 139–58

Salsabilah, K. (2024). Awal Mulanya Islam Berkembang Di Indonesia. Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 2(1).

Samad, Sri Astuti A, 'Peran Perempuan Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Aceh (Kajian Terhadap Kontribusi Wanita Dalam Tinjauan Sejarah)', 2016

Sambas, Nandang. Sosiologi Pendidikan: Perspektif Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2022.

Samsir, I. (2018). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Kutai Kartanegara pada Masa Kerajaan Kutai. Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Budaya, 5(2), 157–170.

Samsudin, Rahmatullah, dan Nasira Al-Jufri, (2022), Dampak Sistem Pendidikan Islam Terhadap Stratifikasi Sosial Masyarakat Tidore dari Era Kesultanan hingga Kini, Jurnal Sosiologi Agama dan Budaya 10, no. 1: 57-76.

Samsul Nizar, (2016), Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana,

Saputra. (2022) Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini,

Sari, Intan Devi Orlita, ‘Perekonomian Islam Pada Masa Kerajaan Aceh Darussalam’, Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan, 8.2 (2022), pp. 146–54

Sari, L. (2018). Pengaruh Kebijakan Pendidikan Islam Kerajaan Pajang terhadap Struktur Sosial di Jawa. Jurnal Studi Islam dan Budaya.

Sari, Sinta Novita, and Qolbi Khoiri, ‘Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5.1 (2023), pp. 4806–14

Sari, Sinta Novita, and Qolbi Khoiri, ‘Diversitas Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia’, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5.1 (2023), pp. 4806–14

Sarip, M. (2024). Menelusuri Jejak Islam Masuk ke Tanah Kutai. Republika.

Setiawan, Ahmad Hapsak, and Roby Sagara. (2024) "Sejarah Masuknya Islam di Indonesia." MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis 4.3

Setyaningsih, Ari, and others, ‘The Historicity of Islamic Education: Tracing the Traces of Al-Irsyad and Jami’at Khair’, Dirasah International Journal of Islamic Studies, 2.2 (2024), pp. 136–44

Setyawati, Dewi, Heryati Heryati, and Yuliarni Yuliarni, ‘PENGARUH INVESTASI ASING TERHADAP EKONOMI PEERDAGANGAN DAN PENDIDIKAN ISLAM MASA KESULTANAN PALEMBANG TAHUN 1724-1825’, Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 8.3 (2023), pp. 911–26

Shihab, M. Quraish. Membedah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana, 2008.

Shihabuddin, Ahmad, and Ellya Roza, ‘Sejarah Uang Dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi Terhadap Peradaban Islam Di Indonesia’, Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman, 9.2 (2023), pp. 171–86

Sholihatun, Sholihatun, ‘Sejarah Jamiatul Khair Dalam Pembentukan Masyarakat Betawi (Studi Kasus Sejarah Islam Betawi Abad XX)’ (UNUSIA, 2018)

Silvia, Atik, and Khoirul Holis, ‘Pemikiran Pendidikan Islam Periode Kemerdekaan’, El-Fata: Jurnal Ilmu Tarbiyah, 4.01 (2024), pp. 54–72

Sinulingga, A. Y., & Ananda, F. (2024). Sejarah dan Urgensi Hukum Keluarga Islam Dalam Transformasi Sistem Hukum Nasional. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 7(4).

Sipuan, Sipuan, and others, 'Pendekatan Pendidikan Multikultural', Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8.2 (2022), pp. 815–30

Sismawati, S., Taraki, M., US, K. A., & Sya'roni, S. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam, 2(5).

Siti Sudarsono. (2017). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Siti Zubaidah. (2019). Pendidikan Islam dan Globalisasi: Studi Kasus di Bima. Jurnal Pendidikan Global, Vol. 13, No. 1.

Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020

Sofyan, (2023) Sistem Pendidikan Kolonial Belanda Di Indonesia Tahun 1900--1942,

Solemede, Ivana, Trivena Tamaneha, Robby Selfanay, Merlin Solemede, and Kharista Walunaman, 'Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya Di Provinsi Maluku', Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, 1.1 (2020), pp. 69–86

Solichin, A. (2015). Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi. Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan, Vol. 1(5),

Solichin, Mujianto, (2023), Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme, Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol.6, No. (1)

Songgirin. (2022) Sistem Pendidikan Kader dan pengembangan lembaga pendidikan islam. Penerbit NEM,

Sritama, I. W. (2019). Konsep Dasar Dan Teori Pendidikan Agama Islam. INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan, 5(1).

Subandi, (2020), Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.1, No. (1)

Subhan, A. (2012). Lembaga pendidikan Islam Indonesia: abad ke-20. Kencana.

Sugianto, H., Buamona, N., et al. 2022. Pola Pembelajaran Agama Islam pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore, Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, 5(2): 195–214

Sugianto, H., Buamona, N., Limatahu, K., Abdullah, I. Z., & Permata, I. (2022). Pola Pembelajaran Agama Islam Pada Masyarakat Adat Kesultanan Tidore. Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies, 5(2), 195–214.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.(Bandung :Refika Aditama, 2005.)

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.(Bandung : Refika Aditama, 2005).

Sukirman, J. (2018). Peran Sultan Pajang dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Jawa Tengah. Pendidikan Sejarah Islam.

Sukmadinata, N. S. (2009). Landasan psikologi proses pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sulaiman, I. (2023). Warisan pendidikan Islam dari kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. LKiS.

Sulaiman, T. (2019). Pendidikan Islam di Kerajaan Pajang dan Dampaknya terhadap Masyarakat Jawa. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Islam.

Sulasman, S. (2019) "Kebijakan Pemerintah Militer Jepang Terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 1942-1945". HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah

Sumanti Siti Tuti, (2020), Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA), Vol.4, No. (1)

Sumanti Solihah Titin, (2018), Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA), Vol. 1, No. 1.

Sumanti, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA), 1(1).

Sunarto, A. (2019). Runtuhnya Kesultanan Pajang: Analisis Politik dan Perebutan Kekuasaan Abad ke-16. Jurnal Sejarah Islam Nusantara.

Supardi, Agus. (2015). "Peran Ki Juru Martani dalam Runtuhnya Kerajaan Pajang." Jurnal Budaya dan Sejarah,

Suparlan, Suparlan, and Sutama Sutama, ‘Arah Politik Pendidikan Islam Di Masa Disrupsi’, Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan, 11.3 (2020), pp. 257–72

Supendi, U., Pribadi, S., & Murni, F. E. D. (2024). Dampak Islamisasi Kerajaan Padjajaran: Sistim Pendidikan dan Nilai-Nilai Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Sunda. Attractive: Innovative Education Journal, 6(1).

Supendi, U., Putra, M. Z. O., & Nurcahya, Y. (2025). Islam Pada Zaman Kerajaan Sumedanglarang (Abad 14-15). Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1).

Supendi, Usman, Syofiah Pribadi, and Fitria Eka Dewi Murni, ‘Dampak Islamisasi Kerajaan Padjajaran: Sistim Pendidikan Dan Nilai-Nilai Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Sunda’, Attractive: Innovative Education Journal, 6.1 (2024), pp. 15–26

Supendi. (2025) "Islam Pada Zaman Kerajaan Sumedanglarang (Abad 14-15)." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 1.1

Suprijono, A. & Wibowo, SAYA (2021). "Praktik Pembelajaran Aktif: Membaca Sekolah Kerja dalam Konteks Pendidikan Indonesia". Jurnal Inovasi Pendidikan, 15(2).

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Salamadani, 2020.

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 1: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Salamadani, 2020.

Suwito. "Pendidikan Islam dalam Struktur Sosial Masyarakat Tradisional." Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 2023.

Swastika, K., Marjono, M., & Aini, Q. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1949.

Syafira Masnuah, Nyayu Khodijah, & Ermis Suryana. (2022). ‘Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)’. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 9(1) Syarif Hidayat & Candra Wijaya. (2016). Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Di Indonesia. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia.

Syafrizal, A. (2015). Sejarah islam nusantara. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2).

Syah, A. R., & Rahman, A. (2021). Jejak Lembaga Pendidikan Islam Tradisional di Kesultanan Tidore dan Transformasinya. Makassar: Penerbit Alauddin University Press.

Syahril. (2018). Pendidikan Islam Masa Awal Kemerdekaan. Jurnal Mimbar Akademika, 14(1).

Syahrir, Abdul Kadir dan Marlina Gazali. (2021), Integrasi Kebijakan Pendidikan Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat di Tidore: Perspektif Antropologis. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 24, no. 1: 156-174.

Syahrizal, Hasan, and M Syahran Jailani, 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif', QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1.1 (2023), pp. 13–23

Syaikhu, Ach, 'SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM'

Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). Islam sebagai agama dan Islam sebagai budaya dalam masyarakat Banjar. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 2(3).

Syamsul, M. (2023). Pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara: Perspektif Sosial dan Budaya. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 9(1), 90–105.

Syarif Muhammad, (2019). Politik Pendidikan Jepang dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol.8, No. (2)

Syarifuddin, (2024) Jejak Awal Islam di Nusantara: Sejarah Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam. Bening Media Publishing,

Syarifuddin, Nahdiyah. (2021), Naskah-naskah Kebijakan Sultan Tidore tentang Pendidikan Islam: Tinjauan Filologis dan Historis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Syarifuddin. (2024) Jejak Awal Islam di Nusantara: Sejarah Masuknya Agama dan Kebudayaan Islam. Bening Media Publishing,

Tafsir, A. (2014). Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tajuddin, Zulqarnain, Bahaking Rama, and Abdul Kadir, 'AWAL MASUKNYA ISLAM DI SUMATRA (Perkembangan Pendidikan Islam Masa Awal Di Sumatera Barat, Lembaga & Tokohnya)', Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal, 3.4 (2023), pp. 242–55

Tarigan, M., Ahmad, A. K., Fadilla, A. S., & Hartina, D. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP).

Tarunasena M. (2012). Sejarah 2 untuk SMA Kelas XI IPS. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tati Haryati, A. Gafar Hidayat, dan Subhan. (2021). "Telaah Historis: Kedudukan Kesultanan Goa-Tallo dalam Penyebarluasan Agama Islam di Bima pada Abad XVII." Jurnal Pendidikan IPS 11.

Tawalinuddin Haris. (2006). "Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa." Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia, 8(1).

Thalib, Muh Dahlan, 'Peranan Lembaga Keagamaan Al-Irsyad Dalam Pendidikan Di Indonesia', 2018

The Columnist. (2023). Konsep Pendidikan Islam Perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas. https://thecolumnist.id

Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, HAR (2020). "Transformasi Sistem Pendidikan Nasional: Membangun Pendidikan yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila". Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. (2005). Sejarah Bima: Suatu Kajian Sosial dan Budaya. Depdikbud.

Tirolian, (2018), Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, Vol.2, No. (2)

Tirolian, Tirolian. Kolonialisme dan Dikotomi Pendidikan Islam di Indonesia. Dalam Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, vol. 6, no. 1 (2021

Topatimasang, Roem, Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku (INSISTPress, 2016)

Transiska, Rizki. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dan Respon Umat Islam di Jambi (Tahun 1915–1942 M). Dalam Thaqafiyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam, vol. 20, no. 1 (2021)

Tsabit Azinar Ahmad, (2018), "Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)," Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9

Turner, Jonathan H. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2022.

Tylor, Edward B. Primitive Culture. Vol. I. London: John Murray, 1871.

Ubaidillah. (2023) Ekonomi Islam Nusantara. Nawa Litera Publishing,

Ulum, M. (2020). Spiritualitas dalam Pendidikan Islam dalam Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Jurnal Al-Misbah, 4(1), 1–21. https://journal2.uad.ac.id

Umar Yasin. (2023). Madrasah dan Pesantren: Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bima. Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat, Vol. 14, No. 2.

Umar, Nasaruddin dan Fatimah Azzahra. (2021), Faktor Kolonialisme dan Resistensi dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore. Jurnal Sejarah Peradaban Islam 6, no. 1: 88-107.

Umar, Umar, 'Eksistensi Pendidikan Islam Di Indonesia (Perspekstif Sejarah Pendidikan Nasional)', Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 19.1 (2016), pp. 16–29

Usman, I. M. (2013). Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam. Jurnal Al Hikmah, 14(1).

Usman, Ismail, 'Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam', Potret Pemikiran, 21.1 (2017)

Usman, M. H., & Aslan, A. (2020). Pola Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Kontinuitas dan Perubahan. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(2), 114-129.

Wahid, A., & Hidayat, K. (2020). "Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Islam Indonesia". Jurnal Studi Islam dan Masyarakat, 16(2).

Wahid, Abdul, 'Eksistensi Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Kolonial Belanda', Jurnal Kewarganegaraan. Researchgate. Net, 2022

Wahyudi, M. (2022). Peran Ulama dalam Pendidikan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Jurnal Pendidikan Islam, 13(1), 45–58.

Wardah, Eva Syarifah, ‘Kiprah Ulama Dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)’, Al-Fath, 4.1 (2010), pp. 82–96

Wekke, I. S., & Alhamid, I. (2023). Transmisi Keilmuan dan Tradisi Pendidikan Islam di Kesultanan Tidore: Perspektif Sejarah Sosial. Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 15(1), 45-61.

Wekke, Ismail Suardi. “Peran Dayah dan Meunasah dalam Pendidikan Islam Tradisional di Aceh.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 23, No. 3 (2023): 210–225.

Widodo, H. (2022). Kajian Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Pajang: Aspek Kebijakan dan Implementasinya. Pendidikan Islam dan Sejarah.

Wijaya, Candra, Usiono Usiono, and Ahmad Syukri Sitorus, ‘Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan Di Abad Ke-21’ 2015, 2015

Wiratama, E. P. (2014). Kesultanan Kutai Kartanegara: Perkembangan Islam di Indonesia. Makalah dan Kertas Kerja, Universitas Indonesia.

Yenni, T. (2019). Peranan Sultan Agung dalam Pengembangan Islam di Pulau Jawa. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Yogyanto, (2017), “Peran Raden Fatah Dalam Mengembangkan Agama Islam Di Demak.” Yogyakarta:PGRI

Yuniendel Ratna Kasni, (2024), Jejak Kolonialisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tantangan hingga Transisi. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 9, No. 4

Yuniendel, R. K. (2024). Jejak Kolonialisme dalam Pendidikan Islam di Indonesia: Dari Tantangan hingga Transisi. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(4)

Yunus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 2019.

Yusuf Muhammad, (2023), Politik Kolonial Portugis di Maluku: Studi atas Intervensi dalam Dinamika Kesultanan Ternate dan Tidore. Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.15, No. (1)

Yusuf, A. (2023). The Role of Islamic Education in the Rise of Muslim Nationalism during the Great War. Journal of Muslim Societies, 6(1)

ZA, H M Syadli, ‘Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh’, Alqalam, 20.96 (2003), pp. 125–42

Zahara, T. A. (2023). Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2).

Zainal Arifin. (2020). “Sunan Giri: Konstruk Elite Islam Terhadap Perubahan Sosial pada Masa Peralihan Majapahit ke Demak.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zakiah D. (2022). Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat. Semarang: Adisam.

Zamakhsyari Dhofier. (2019). “Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai.” Jakarta: LP3ES.

Zamakhsyari Dhofier. (2019). Peran Kyai dalam Mempertahankan Lembaga Pendidikan Pesantren. Jurnal Pesantren Nusantara.

Zamzami, F. (2022). Sultan Hadiwijaya dan Masa Akhir Kesultanan Pajang: Kajian Historiografis. Jurnal Sejarah Islam dan Budaya Jawa.

Zamzami, Rizal. (2018). Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Panembahan Senapati (1584–1601). JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 2(2).

Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam (Bumi Aksara, 1993).

Zulifan, Muhammad, ‘Politik Islam Di Indonesia: Ideologi, Transformasi Dan Prospek Dalam Proses Politik Terkini’, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1.2 (2016), pp. 171–95

Zuriatin dan Nurhasanah. (2018). “Kebudayaan Islam yang Berkembang di Kesultanan Bima pada Abad Ke XVII M.” Jurnal Pendidikan IPS, 8(2).

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Dari Awal Kerajaan Islam Sampai Masa Orde Lama

Pendidikan dimulai dengan pesantren sebagai pusat belajar, lalu berkembang selama masa kesultanan dengan pendirian madrasah dan karya sastra Islam. Meskipun terhambat oleh kolonialisasi, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama muncul untuk memperkuat pendidikan. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam diakui secara resmi dan madrasah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Secara keseluruhan, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan budaya masyarakat Indonesia.